

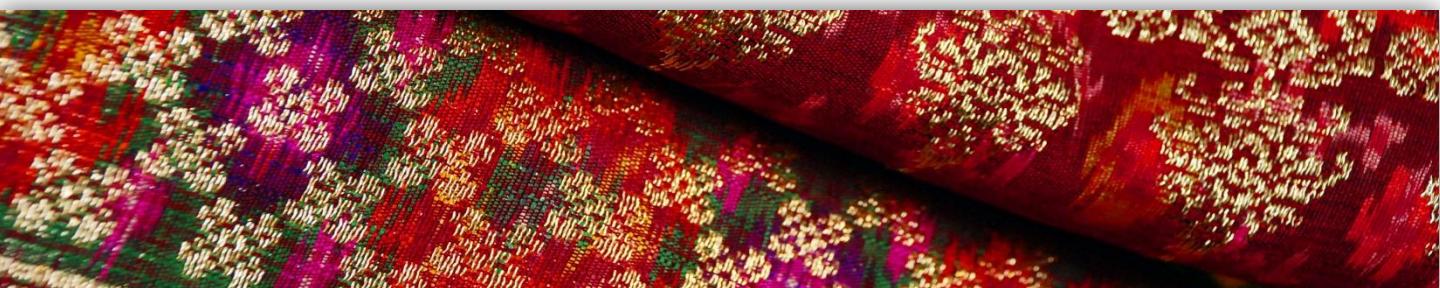


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2018



*Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan
Berdaya Saing Internasional*

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2014



Contact.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Kapten A. Rivai No. 23 Palembang 30129

+62-711-356108, 356118 .Telp

+62-711-356118 .Fax

bappeda.sumselprov.go.id .Web

KATA PENGANTAR

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, RPJMD menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 memuat penjabaran visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih untuk masa bakti 2013-2018 yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan dan penetapan indikator kinerja. Proses penyusunan RPJMD juga memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dan berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 akan dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk secara bersama-sama, bersungguh-sungguh, ikhlas, dan penuh semangat memajukan Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Agustus 2014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-3
1.3. Landasan Hukum.....	I-4
1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-7
1.5. Sistematika Penulisan	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3 Topografi.....	II-3
2.1.1.4 Geologi.....	II-4
2.1.1.5 Hidrologi.....	II-5
2.1.1.6 Klimatologi.....	II-7
2.1.1.7 Penggunaan Lahan.....	II-8
2.1.2. Potensi dan Pengembangan Wilayah.....	II-9
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-16
2.1.4. Demografi	II-21
2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat	II-25
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-25
2.2.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-25

2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II-34
2.2.2.1	Pendidikan	II-34
2.2.2.2	Kesehatan.....	II-41
2.2.2.3	Pertanahan	II-46
2.2.2.4	Ketenagakerjaan	II-46
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-47
2.2.4	Standar Pelayanan Minimal.....	II-47
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-56
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-56
2.3.1.1	Pendidikan	II-56
2.3.1.2	Kesehatan.....	II-61
2.3.1.3	Pekerjaan Umum	II-66
2.3.1.4	Perumahan	II-71
2.3.1.5	Penataan Ruang.....	II-76
2.3.1.6	Perencanaan Pembangunan	II-76
2.3.1.7	Perhubungan	II-77
2.3.1.8	Lingkungan Hidup	II-85
2.3.1.9	Pertanahan	II-92
2.3.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	II-93
2.3.1.11	Pemberdayaan Perempuan dan PA	II-93
2.3.1.12	KB dan Keluarga Sejahtera	II-96
2.3.1.13	Sosial.....	II-97
2.3.1.14	Ketenagakerjaan	II-97
2.3.1.15	Koperasi dan UKM	II-100
2.3.1.16	Penanaman Modal	II-102
2.3.1.17	Kebudayaan	II-103
2.3.1.18	Ketahanan Pangan	II-103
2.3.1.19	Statistik	II-107
2.3.1.20	Komunikasi dan Informatika	II-107
2.3.1.21	Perpustakaan	II-108
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-109
2.3.2.1	Pertanian	II-109
2.3.2.2	Kehutanan	II-111
2.3.2.3	ESDM	II-114
2.3.2.4	Pariwisata	II-115
2.3.2.5	Kelautan dan Perikanan	II-115

2.3.2.6	Perdagangan.....	II-116
2.3.2.7	Perindustrian.....	II-116
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-118
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-118
2.4.1.1	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm Keuangan Daerah..	II-118
2.4.1.2	Pertanian	II-119
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-120
2.4.2.1	Perhubungan	II-120
2.4.2.2	Penataan Ruang.....	II-125
2.4.2.3	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm Keuangan Daerah..	II-126
2.4.2.4	Lingkungan Hidup	II-127
2.4.2.5	Komunikasi dan Informatika.....	II-128
2.4.3.	Fokus Iklim Investasi	II-132
2.4.3.1	Otonomi Daerah, Pem. Umum, Adm Keuangan Daerah..	II-132
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-134
2.4.4.1	Ketenagakerjaan	II-134

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN..... III-1

3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-1
3.1.2.	Neraca Daerah	III-6
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-13
3.2.1.	Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-13
3.2.2.	Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-14
3.3.	Kerangka Pendanaan	III-15
3.3.1.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-15
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-15
3.3.3.	Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-17
3.3.3.1	Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-17
3.3.3.2	Kebijakan Belanja Daerah	III-20
3.3.3.3	Pembiayaan Daerah.....	III-23

BAB IV	ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1.	Permasalahan Daerah	IV-1
4.1.1.	Kemiskinan.....	IV-1
4.1.2.	Pengangguran	IV-3
4.1.3.	Pendidikan	IV-4
4.1.4.	Kesehatan	IV-5
4.1.5.	Keadilan Gender dan Perlindungan Anak	IV-7
4.2.	Analisis Lingkungan Strategis	IV-7
4.2.1.	Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal.....	IV-8
4.2.1.1.	Identifikasi dan Analisa Kekuatan Daerah	IV-8
4.2.1.2.	Identifikasi dan Analisa Kelemahan Daerah.....	IV-8
4.2.2.	Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal.....	IV-9
4.2.2.1.	Identifikasi dan Analisa Peluang Daerah	IV-9
4.2.2.2.	Identifikasi dan Analisa Ancaman Daerah	IV-10
4.3.	Isu Strategis Daerah	IV-12
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	V-1
5.1.	Arahan RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan Arahan Gubernur Sumatera Selatan	V-1
5.2.	Visi dan Misi	V-6
5.2.1.	Visi	V-6
5.2.2.	Misi.....	V-7
5.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	V-8
5.3.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu....	V-9
5.3.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua	V-15
5.3.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketiga	V-19
5.3.4.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Keempat..	V-29
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	VI-1
6.1.	Prioritas Pembangunan Daerah 2013-2018.....	VI-1
6.1.1.	Prioritas 1: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	VI-1
6.1.2.	Proritas 2: Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya.....	VI-2

6.1.3.	Prioritas 3: Penanggulangan Kemiskinan dengan memperkuat sistem perlindungan sosial berdasarkan siklus hidup manusia....	VI-2
6.1.4.	Prioritas 4: Pembangunan Pertanian	VI-3
6.1.5.	Prioritas 5: Infrastruktur dan Energi.....	VI-3
6.1.6.	Prioritas 6: Investasi dan Pengembangan Usaha.....	VI-4
6.1.7.	Prioritas 7: Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana.....	VI-5
6.1.8.	Prioritas 8: Pengembangan Wilayah	VI-5
6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Pembangunan	VI-6
6.2.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu	VI-6
6.2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua.....	VI-12
6.2.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga.....	VI-15
6.2.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat	VI-21
6.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah	VI-25
6.3.1.	Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	VI-32
6.3.2.	Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	VI-33
6.3.3.	Kabupaten Muara Enim	VI-33
6.3.4.	Kabupaten Lahat	VI-34
6.3.5.	Kabupaten Musi Rawas	VI-34
6.3.6.	Kabupaten Musi Banyuasin.....	VI-35
6.3.7.	Kabupaten Banyuasin.....	VI-35
6.3.8.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	VI-36
6.3.9.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	VI-36
6.3.10.	Kabupaten Ogan Ilir.....	VI-37
6.3.11.	Kabupaten Empat Lawang.....	VI-37
6.3.12.	Kota Palembang	VI-38
6.3.13.	Kota Pagaralam	VI-38
6.3.14.	Kota Lubuk Linggau	VI-39
6.3.15.	Kota Prabumulih	VI-39
6.3.16.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	VI-40
6.3.17.	Kabupaten Musi Rawas Utara	VI-40

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN.....VII-1

7.1.	Kebijakan Umum	VII-1
7.1.1.	Reorientasi	VII-1
7.1.2.	Reposisi	VII-2

7.1.3.	Revitalisasi	VII-2
7.2.	Program Pembangunan.....	VII-3
7.2.1.	Urusan Wajib.....	VII-3
7.2.2.	Urusan Pilihan	VII-10

**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
KEBUTUHAN PENDANAAN** VIII-1

8.1.	Rencana Program Prioritas	VIII-1
8.1.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Kesatu	VIII-1
8.1.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Kedua	VIII-9
8.1.3.	Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Ketiga	VIII-12
8.1.4.	Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Keempat	VIII-18
8.2.	Kerangka Pendanaan Tahun 2013-2018.....	VIII-21
8.2.1.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembangunan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2013-2018	VIII-22
8.3.	Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan untuk Mewujudkan Misi Pembangunan	VIII-25

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA IX-1

9.1.	Tahapan Pembangunan	IX-1
9.1.1.	Tahap Konsolidasi: Penegasan Komitmen (2014).....	IX-1
9.1.2.	Tahap Penguatan: Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Hasil Pertanian, dan Pariwisata (Hilirisasi) (2015)	IX-2
9.1.3.	Tahap Penguatan dan Percepatan: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis (2016).....	IX-3
9.1.4.	Tahap Pemantapan: Percepatan dan Perluasan Hilirisasi Industri, dan Pengembangan Pariwisata Berstandar Internasional (2017)	IX-3
9.1.5.	Tahap Perwujudan: Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional (2018).....	IX-4
9.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	IX-5
9.2.1.	Indikator Makro Daerah	IX-5
9.2.2.	Indikator Pembangunan Kabupaten/Kota	IX-6
9.2.3.	Indikator Kinerja Pembangunan Misi Kesatu	IX-8

9.2.4.	Indikator Kinerja Pembangunan Misi Kedua	IX-13
9.2.5.	Indikator Kinerja Pembangunan Misi Ketiga	IX-17
9.2.6.	Indikator Kinerja Pembangunan Misi Keempat	IX-22
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
10.1.	Pedoman Transisi	X-1
10.2.	Kaidah Pelaksanaan	X-2
BAB XI	PENUTUP	XI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya	I-12
Gambar 2.1	Peta konflik lahan di Sumatera Selatan	II-20
Gambar 2.2	Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Selatan	II-22
Gambar 2.3	Distribusi penduduk menurut kab/kota.....	II-23
Gambar 2.4	Laju pertumbuhan ekonomi 2004-2012.....	II-25
Gambar 2.5	Laju inflasi Sumatera Selatan dan Nasional 2006-2012.....	II-29
Gambar 2.6	Perbandingan PDRB per kapita dengan capaian nasional	II-29
Gambar 2.7	Perbandingan Indeks Gini dengan capaian nasional	II-30
Gambar 2.8	Angka partisipasi kasar tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA.....	II-36
Gambar 2.9	Angka partisipasi murni 2008-2012	II-38
Gambar 2.10	Perbandingan angka kurang gizi dengan target RPJMD	II-43
Gambar 2.11	IPM dan komponen 2008-2011	II-44
Gambar 2.12	Angka partisipasi sekolah menurut usia 2008-2012	II-59
Gambar 2.12	Cakupan pelayanan persampahan perkotaan.....	II-71
Gambar 2.13	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih.....	II-73
Gambar 2.14	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak.....	II-75
Gambar 2.15	Jalur KA dan stasiun di Sumbagsel.....	II-80
Gambar 2.16	Tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin	II-98
Gambar 2.17	Tingkat pengangguran terbuka menurut daerah tempat tinggal Agustus 2006-Agustus 2012.....	II-99
Gambar 2.18	Pendapatan per kapita ADHB dengan migas dan tanpa migas 2009-2012	II-118
Gambar 2.19	Data rumah tangga yang teraliri listrik	II-130
Gambar 2.20	Perkembangan jumlah ijin usaha yang dikeluarkan	II-134

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah kabupaten/kota dan kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013	II-1
Tabel 2.2	Luas kabupaten/kota berdasarkan kemiringan lereng.....	II-3
Tabel 2.3	Luas penutupan lahan di Provinsi Sumatera Selaatan	II-7
Tabel 2.4	Sebaran dan luas kawasan gambut menurut kedalaman	II-9
Tabel 2.5	Luas kawasan hutan menurut fungsi/status.....	II-10
Tabel 2.6	Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan	II-12
Tabel 2.7	Potensi panas bumi di Provinsi Sumatera Selatan	II-13
Tabel 2.8	Sebaran PLTMH dan daya terpasangnya menurut kab/kota	II-14
Tabel 2.9	Sebaran potensi sumberdaya air (mini/mikrohidro)	II-14
Tabel 2.10	Arahan pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik dan unggulan wilayah kab/kota	II-15
Tabel 2.11	Rekapitulasi kejadian bencana berdasarkan sebaran kab/kota	II-18
Tabel 2.12	Rekapitulasi bencana berdasarkan jenis bencana.....	II-19
Tabel 2.13	Batas wilayah yang masih harus diselesaikan	II-21
Tabel 2.14	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menurut kab/kota	II-22
Tabel 2.15	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk usia kerja dan angkatan kerja.....	II-24
Tabel 2.16	Laju pertumbuhan ekonomi sektoral ADHB 2008-2011	II-26
Tabel 2.17	Laju pertumbuhan ekonomi menurut penggunaan	II-27
Tabel 2.18	Jumlah penduduk miskin di Sumatera selatan.....	II-32
Tabel 2.19	Jumlah dan persentase kemiskinan menurut kab/kota 2008-2011..	II-32
Tabel 2.20	Banyaknya peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan dan diselesaikan menurut jenisnya 2007-2011	II-33
Tabel 2.21	Angka buta huruf menurut kab/kota 2005-2011	II-34
Tabel 2.22	Rata-rata lama sekolah 2008-2012	II-35
Tabel 2.23	Angka partisipasi kasar kab/kota tingkat SD, SMP dan SMA.....	II-37
Tabel 2.24	Jumlah murid yang tamat pendidikan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK TA. 2007-2012	II-38
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI 2008-2012.....	II-39
Tabel 2.26	APM tingkat SLTP/MTS 2008-2012	II-40
Tabel 2.27	APM tingkat SLTA/SMK/MA 2008-2012	II-41

Tabel 2.28	Angka Harapan Hidup kab/kota 2008-2012	II-42
Tabel 2.29	Angka kurang gizi pada balita 2008-2012.....	II-43
Tabel 2.30	IPM menurut kab/kota 2008-2012	II-45
Tabel 2.31	Persentase luas tanah bersertifikat 2009-2013.....	II-46
Tabel 2.32	Jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin 2008-2012	II-47
Tabel 2.33	Pencapaian SPM	II-48
Tabel 2.34	Angka partisipasi sekolah menurut umur 2010-2011	II-57
Tabel 2.35	Jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, rasio siswa-sekolah dan rasio siswa-guru menurut jenjang pendidikan	II-58
Tabel 2.36	Rasio guru/murid tingkat pendidikan SD, SLTP, SLTA.....	II-59
Tabel 2.37	Angka partisipasi sekolah menurut tingkat usia 2008-2012.....	II-60
Tabel 2.38	Angka melek huruf menurut tingkat usia 2008-2012	II-60
Tabel 2.39	Angka putus sekolah 2008-2012	II-61
Tabel 2.40	Angka kelulusan untuk setiap jenjang pendidikan	II-61
Tabel 2.41	Rasio puskesmas per 30.000 penduduk 2008-2012.....	II-62
Tabel 2.42	Rasio dokter per 100.000 penduduk 2008-2012.....	II-62
Tabel 2.43	Cakupan kompiklasi kebidanan yang ditangani 2008-2012	II-63
Tabel 2.44	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 2008-2012	II-63
Tabel 2.45	Persentase desa yang mencapai <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> 2008-2012	II-64
Tabel 2.46	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.....	II-64
Tabel 2.47	Cakupan penemuan TBC BTA 2008-2012	II-65
Tabel 2.48	Angka kesakitan DBD/100.000 penduduk 2008-2012	II-65
Tabel 2.49	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 2008-2012	II-66
Tabel 2.50	Cakupan kunjungan bayi 2008-2012	II-66
Tabel 2.51	Panjang jalan dengan kondisi mantap berdasarkan kewenangan 2009-2012.....	II-67
Tabel 2.52	Luas jaringan irigasi 2009-2012	II-69
Tabel 2.53	Luas daerah rawa pasang surut 2012.....	II-69
Tabel 2.54	Pelayanan persampahan 2012	II-70
Tabel 2.55	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih 2008-2012.....	II-72
Tabel 2.56	Persentase rumah tangga memiliki sumber listrik 2008-2012.....	II-73
Tabel 2.57	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak 2008-2012.	II-74

Tabel 2.58	Data pembangunan perumahan dan permukiman oleh Pemda bekerjasama dengan kementerian	II-76
Tabel 2.59	Persentase RTH di Ibukota Provinsi	II-76
Tabel 2.60	Ketersediaan dokumen perencanaan.....	II-77
Tabel 2.61	Data terminal di Provinsi Sumatera Selatan	II-78
Tabel 2.62	Rute dan panjang rel PT. KA Divre III wilayah Sumbagsel	II-79
Tabel 2.63	Jumlah wilayah di sekitar sungai.....	II-80
Tabel 2.64	Daftar dermaga sungai dan danau di Sumsel.....	II-81
Tabel 2.65	Kondisi bandar udara di Provinsi Sumatera Selatan	II-84
Tabel 2.66	Kualitas air mutu DAS Musi Sumatera Selatan 2012	II-86
Tabel 2.67	Kualitas udara ambient pada 15 Kab/Kota	II-91
Tabel 2.68	Emisi GRK dari enam sektor di Sumsel	II-91
Tabel 2.69	Indeks kualitas lingkungan hidup.....	II-92
Tabel 2.70	Persentase luas tanah bersertifikat 2008-2013.....	II-93
Tabel 2.71	Rasio kesenjangan gender 2008-2012.....	II-93
Tabel 2.72	Perkembangan komponen pembentuk IPG 2008-2012	II-95
Tabel 2.73	Perkembangan komponen IDG 2008-2012	II-96
Tabel 2.74	Persentase pasangan usia subur peserta KB	II-96
Tabel 2.75	Keluarga Pra Sejahtera dan KS I.....	II-96
Tabel 2.76	Jumlah panti asuhan 2008-2012	II-97
Tabel 2.77	Tingkat partisipasi angkatan kerja 2008-2012.....	II-97
Tabel 2.78	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	II-98
Tabel 2.79	Tingkat pengangguran terbuka menurut kab/kota	II-99
Tabel 2.80	Perkembangan koperasi Sumatera Selatan 2008-2012	II-101
Tabel 2.81	Jumlah investor PMDN dan PMA 2008-2013	II-102
Tabel 2.82	Jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA 2008-2013.....	II-102
Tabel 2.83	Jumlah tenaga kerja yang diserap PMDN dan PMA 2008-2013.....	II-103
Tabel 2.84	Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan Pemprov Sumsel 2008-2013	II-103
Tabel 2.85	Jumlah sarana untuk menyelenggarakan festival seni dan budaya .	II-103
Tabel 2.86	Regulasi ketahanan pangan	II-104
Tabel 2.87	Ketersediaan pangan utama	II-105
Tabel 2.88	Ketersediaan Buku Kab/Kota Dalam Angka dan PDRB Kab/Kota.....	II-107
Tabel 2.89	Persetase RT menurut beberapa indikator akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi 2008-2012.....	II-107
Tabel 2.90	Jumlah perpustakaan 2008-2013	II-108

Tabel 2.91	Jumlah buku koleksi umum dan referensi di Badan Perpustakaan Prov. Sumsel 2008-2013.....	II-109
Tabel 2.92	Produktivitas bahan pangan utama lokal	II-109
Tabel 2.93	Kontribusi sektor pada PDRB Sumatera Selatan 2008-2012	II-110
Tabel 2.94	Distribusi lahan kritis pada DAS Musi	II-112
Tabel 2.95	Hotspot dan kebakaran di Sumatera Selatan 2009-2012.....	II-113
Tabel 2.96	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB.....	II-114
Tabel 2.97	Data kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan	II-115
Tabel 2.98	Produksi ikan 2008-2012.....	II-115
Tabel 2.99	Konsumsi ikan 2008-2012	II-115
Tabel 2.100	Nilai ekspor dan impor 2003-2012	II-116
Tabel 2.101	Kontribusi sektoral industri terhadap PDRB ADHB	II-117
Tabel 2.102	Pengeluaran persentase masyarakat 2008-2012	II-119
Tabel 2.103	Nilai Tukar Petani 2009-2012.....	II-120
Tabel 2.104	Rasio panjang jalan/jumlah kendaraan.....	II-121
Tabel 2.105	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum.....	II-122
Tabel 2.106	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	II-122
Tabel 2.107	Bongkar orang dan barang melalui pelabuhan	II-123
Tabel 2.108	Lalin angkutan udara internasional Bandar Udara SMB II	II-124
Tabel 2.109	Lalin angkutan udara domestik Bandar Udara SMB II	II-124
Tabel 2.110	Ketaatan terhadap RTRW	II-125
Tabel 2.111	Banyaknya rumah makan/restoran, meja dan kursi menurut kab/kota	II-126
Tabel 2.112	Jumlah Hotel Berbintang dan kamar menurut hotel.....	II-127
Tabel 2.113	Persentase akses air bersih 2008-2012	II-128
Tabel 2.114	Capaian kinerja pembangunan prioritas energi 2009-2012	II-129
Tabel 2.115	Persentase RT yang memiliki sumber listrik	II-131
Tabel 2.116	Pengeluaran RT menurut beberapa indikator akses terhadap teknologi informasi/komunikasi 2008-2012.....	II-132
Tabel 2.117	Jumlah tindak kejahatan pada Kejaksaan Tinggi dan jenis kejahatan	II-132
Tabel 2.118	Rata-rata lama waktu pelayanan perijinan usaha	II-133
Tabel 2.119	Angka beban tanggungan Sumatera Selatan	II-134

Tabel 3.1	Perkembangan realisasi pendapatan daerah 2008-2012	III-2
Tabel 3.2	Struktur Pendapatan Asli Daerah 2009-2012	III-3
Tabel 3.3	Realisasi pendapatan transfer 2009-2012	III-4
Tabel 3.4	Realisasi belanja daerah menurut urusan 2008-2013	III-5
Tabel 3.5	Realisasi pembiayaan daerah 2009-2012.....	III-6
Tabel 3.6	Pertumbuhan Neraca Daerah 2009-2012.....	III-7
Tabel 3.7	Rasio likuiditas neraca Pemprov Sumsel	III-12
Tabel 3.8	Rasio Solvabilitas Pemprov Sumsel	III-13
Tabel 3.9	Perkiraan kebutuhan investasi	III-16
Tabel 3.10	Proyeksi pendapatan Prov. Sumsel 2013-2018.....	III-20
Tabel 3.11	Perkiraan belanja daerah 2013-2018.....	III-22
Tabel 5.1	Arahan RPJPD 2005-2025, Rancangan RTRW 2013-2033, dan arahan Gubernur 2013-2018.....	V-2
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi Kesatu RPJMD Prov. Sumsel 2013-2018	V-13
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kedua RPJMD Prov. Sumsel 2013-2018	V-17
Tabel 5.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ketiga RPJMD Prov. Sumsel 2013-2018	V-24
Tabel 5.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ketiga RPJMD Prov. Sumsel 2013-2018	V-31
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Kesatu.....	VI-6
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Kedua	VI-12
Tabel 6.3	Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Ketiga	VI-16
Tabel 6.4	Strategi dan Arah Kebijakan mewujudkan Misi Keempat.....	VI-21
Tabel 6.5	Jenis pusat kegiatan, lokasi dan prioritas penataan sistem perkotaan	VI-25
Tabel 6.6	Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan.....	VI-26
Tabel 6.7	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. OKU.....	VI-42
Tabel 6.8	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. OKI.....	VI-43
Tabel 6.9	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. Muara Enim	VI-45
Tabel 6.10	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. Lahat ...	VI-48
Tabel 6.11	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. Mura....	VI-51
Tabel 6.12	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. Muba ...	VI-55

Tabel 6.13	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. Banyuasin.....	VI-57
Tabel 6.14	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab.OKUT....	VI-64
Tabel 6.15	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. OKUS...	VI-65
Tabel 6.16	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. Ogan Ilir.....	VI-67
Tabel 6.17	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kab. Empat Lawang	VI-70
Tabel 6.18	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Palembang	VI-74
Tabel 6.19	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Pagar Alam.....	VI-78
Tabel 6.20	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau	VI-80
Tabel 6.21	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Prabumulih	VI-82
Tabel 6.22	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	VI-84
Tabel 6.23	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara	VI-86
Tabel 8.1	Rencana Program Prioritas Misi Kesatu.....	VIII-2
Tabel 8.2	Rencana Program Prioritas Misi Kedua	VIII-9
Tabel 8.3	Rencana Program Prioritas Misi Ketiga	VIII-12
Tabel 8.4	Rencana Program Prioritas Misi Keempat	VIII-19
Tabel 8.5	Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat 2013-2018 .	VIII-22
Tabel 8.6	Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah 2013-2018	VIII-23
Tabel 8.7	Proyeksi penggunaan kapasitas riil keuangan daerah 2013-2018 ...	VIII-24
Tabel 8.8	Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Kesatu berdasarkan urusan dan SKPD 2013-2018	VIII-26
Tabel 8.9	Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Kedua berdasarkan urusan dan SKPD 2013-2018	VIII-38
Tabel 8.10	Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Ketiga berdasarkan urusan dan SKPD 2013-2018	VIII-44
Tabel 8.11	Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Keempat berdasarkan urusan dan SKPD 2013-2018	VIII-51

Tabel 9.1	Indikator Makro Daerah RPJMD Prov. Sumsel 2013-2018	IX-5
Tabel 9.2	Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota 2013-2018	IX-6
Tabel 9.3	Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kemiskinan Kab/Kota 2013-2018	IX-7
Tabel 9.4	Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Pengangguran Tebuka Kab/Kota 2013-2018	IX-7
Tabel 9.5	Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan IPM Kab/Kota 2013-2018	IX-8
Tabel 9.6	Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Kesatu	IX-9
Tabel 9.7	Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Kedua	IX-13
Tabel 9.8	Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Ketiga	IX-17
Tabel 9.9	Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Keempat	IX-22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lima tahun terakhir (2008-2013), pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan telah membawa perbaikan dan peningkatan kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara bertahap terus meningkat, kondisi sosial semakin membaik dan kegiatan ekonomi daerah terus berkembang. Peningkatan kinerja pembangunan menandai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, dan menunjukkan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, penyelenggaraan SEA Games XXVI tahun 2011, *Islamic Solidarity Games* (ISG) tahun 2013 dan pelaksanaan berbagai pesta seni dan budaya baik tingkat nasional maupun internasional yang berlangsung lancar dan sukses merupakan salah satu wujud keberhasilan Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja pembangunan. Keberhasilan tersebut menegaskan pentingnya Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, pusat seni dan budaya, serta pusat kegiatan olah raga yang terkemuka di Indonesia dan ASEAN. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah terdepan dalam menyambut terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Kemajuan Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari tuntutan persaingan global, pelaksanaan demokrasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah. Persaingan global memberikan tekanan tentang pentingnya Provinsi Sumatera Selatan berkembang menjadi daerah yang nyaman, aman dan kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas; serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat bagi pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di ASEAN. Pelaksanaan demokrasi menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih partisipatif, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada seluruh rakyat; dan tetap mengutamakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang lebih maju dan modern dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Dalam dinamika pembangunan Provinsi Sumatera Selatan semakin maju dan berkembang, tantangan pembangunan dalam lima tahun mendatang (2013-2018) adalah melakukan transformasi dan akselerasi pembangunan agar dapat mengatasi berbagai masalah terutama belum optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik; belum terpadunya pengelolaan prasarana dan sarana transportasi, sanitasi dan energi; belum optimalnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; belum tuntasnya penanganan kemiskinan dan pengangguran; serta belum meratanya pembangunan antardaerah kabupaten/kota. Berbagai tantangan tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan di setiap wilayah kabupaten/kota.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 menegaskan bahwa tahapan pembangunan 2013-2018 diarahkan untuk mendukung pembangunan menyeluruh di semua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, iptek, dan suasana wilayah yang kondusif. RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan proses berkesinambungan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan otonomi daerah.

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2013 menjadi salah satu instrumen demokrasi utama yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa bakti 2013-2018, yang pelantikannya dilaksanakan tanggal 27 Nopember 2014, mempunyai kewajiban melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih untuk masa bakti tahun 2013-2018 telah merumuskan visi pembangunan, yaitu: "*Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih maju dan Berdaya Saing Internasional*". Visi pembangunan tersebut menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan tahapan lima (5) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan visi dari RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033 (telah mendapat persetujuan substansi Menteri PU), memperhatikan berbagai prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dilakukan secara partisipatif, komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengutamakan keterlibatan masyarakat secara aktif melalui berbagai konsultasi publik, forum diskusi terfokus, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan memperhatikan arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Anggaran-SKPD, serta sekaligus menjadi acuan penentuan program dan kegiatan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berjenjang, dan selanjutnya digunakan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hubungan antarlembaga pemerintah, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan berfungsi sebagai tolok ukur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dalam menilai pertanggungjawaban Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada setiap akhir tahun anggaran dan setiap akhir masa jabatan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- (1) mendukung terwujudnya visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dalam mempercepat pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan;

- (2) menjabarkan visi, misi, dan program oleh Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan kedalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- (3) menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBN dan sumber dana lainnya;
- (4) mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antarSKPD, antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah;
- (5) menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- (6) menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, adil, responsif, amanah, profesional dan modern dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (7) mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat.

1.3 Landasan Hukum

Landasan ideal penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah Pancasila yang menjadi sumber nilai-nilai keutamaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan konstitusional penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber segala hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah.

Landasan operasional penyusunan RPJMD ini meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
- (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (20) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- (23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- (24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
- (25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).
- (26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1.4.1 RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan masa bakti tahun 2013-2018, juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dengan Visi "*Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025*". Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 adalah (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dengan prioritas pembangunan menyeluruh disemua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, iptek, dan suasana wilayah yang kondusif. Pada tahap ketiga RPJPD 2005-2025 arah kebijakan adalah (1) menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan

ekonomi dengan prioritas pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih dari 6,5 persen pertahun, penguatan struktur ekonomi yang didukung peningkatan nilai tambah industri dan jasa, pengembangan sektor-sektor baru potensial, peningkatan surplus perdagangan dan investasi, penurunan pengangguran terbuka menjadi kurang dari 10 persen, penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui pemberdayaan UMKM, dan penguatan kualitas SDM; (2) menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, penguasaan iptek, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perbaikan kualitas permukiman dan perumahan, dan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pekerja anak, dan kelompok marginal lainnya, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama, seni dan budaya lokal; (3) mengelola dan memanfatkan sumber daya yang berkelanjutan dengan prioritas pemanfaatan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan, penataan ruang yang adil dan seimbang, penguatan sistem transportasi wilayah dan revitalisasi pertanian dan agribisnis; (4) membangun pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggungjawab dengan prioritas penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan umum, penguatan kapasitas keuangan daerah, penguatan peran serta masyarakat, keterbukaan informasi, pembangunan politik lokal, peningkatan penegakan hukum, peningkatan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, serta peningkatan keamanan dan ketertiban

1.4.2 RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. RTRW Provinsi Sumatera Selatan memuat strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan beberapa hal berikut: (1) pengembangan sistem perkotaan provinsi yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu keluar-masuk (*multi-gate*) dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya; (2) pengembangan sistem infrastruktur wilayah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional; (3) pengembangan tata ruang yang akomodatif namun tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam membutuhkan

pertimbangan aspek lingkungan, khususnya perwilayahannya DAS dan sub DAS. Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya air bagi pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah sungai strategis nasional seperti WS Musi, Sugihan, dan Banyuasin; (4) kedudukan dan peranan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai “salah satu titik sentuh” dan “pintu gerbang” Kawasan Barat Indonesia ke wilayah Internasional (Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan lain-lain), serta ke wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang dapat memberi peluang pasar ekspor bagi Provinsi Sumatera Selatan; serta (5) pembentukan sistem kota-kota secara hirarkis dengan memperhatikan keseimbangan antar sub wilayah.

Sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan: (1) mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat; (2) memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (3) meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (4) meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi; (5) mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (6) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta (7) menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian kegiatan antarsektor dan antarSKPD.

Dalam menyusun RPJMD, selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4.3 RPJMD dan RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah. Prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan juga memperhatikan tujuan pembangunan millenium (MDG's).

Selain itu, penyusunan RPJMD Sumatera Selatan juga memperhatikan arah kebijakan pengembangan wilayah Sumatera yang tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014, yaitu: (1) pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikulutra, sawit, dan karet; (2) pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut; (3) pengembangan gugus (cluster) industri unggulan dilakukan dengan strategi mengembangkan PKN Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi; (4) pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional dilakukan dengan strategi: (a) mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara, dan (b) mengembangkan sumber energi alternatif; (5) pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dengan strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu; (6) pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi: (a) meningkatkan kapasitas pembangkit listrik; (b) mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik; (c) diversifikasi sumber energi pembangkit listrik; (7) penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur; (b) meningkatkan kapasitas pelabuhan laut; (c). meningkatkan kapasitas pelabuhan udara; (d) mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai; (8) pengembangan Sumatera sebagai pool angkutan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (b) memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah tangga miskin; (c) meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja; (9) peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga miskin; (10) reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan kualitas legislasi, (b) meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, (c) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel; (11) pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan, dan (b) mengembangkan ekonomi lokal kawasan perbatasan; serta (12)

pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan mitigasi bencana alam; (b) pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup.

1.4.4 RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan. Renstra SKPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan SKPD disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.4.5 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,kabupaten dan provinsi. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum wilayah Provinsi Sumatera Selatan menguraikan tentang karakteristik wilayah dan kondisi aktual berupa geografis daerah, penduduk dan tenaga kerja, sumberdaya alam dan lingkungan, perekonomian daerah, pariwisata daerah, sosial budaya daerah, infrastruktur, dan pemerintahan daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang mempunyai luas wilayah 91.806,36 km². Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, Provinsi Lampung di sebelah selatan, Provinsi Bangka Belitung di sebelah timur dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Provinsi Sumatera Selatan secara administratif dibagi menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota, serta 228 kecamatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Musi Rawas Utara, maka Provinsi Sumatera Selatan secara administrasi menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota dengan jumlah desa sebanyak 2.823 desa, 363 kelurahan dan 231 kecamatan.

Tabel 2. 1

Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan,
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Banyuasin	19	11,832.99
2	Empat Lawang	10	2,256.44
3	Lahat	22	5,311.74
4	Lubuk Linggau	8	401.50
5	Muara Enim	20	7,383.90

No	Kabupaten	Kecamatan	Luas (Km2)
6	Musi Banyuasin	14	14,266.26
7	Musi Rawas	14	6,350.00
8	Ogan Ilir	16	2,666.07
9	Ogan Komering Ilir	18	18,359.04
10	Ogan Komering Ulu	12	4,797.06
11	OKU Selatan	19	5,493.94
12	OKU Timur	20	3,370.00
13	Pagar Alam	5	633.66
14	Palembang	16	400.61
15	Prabumulih	6	434.50

Sumber : Permendagri No. 6 Tahun 2008

2 (dua) kabupaten pemekaran baru :

1	Penukal Abab Lematang Ilir*	5	1,840.00
2	Musi Rawas Utara**	7	6,008.65
TOTAL		231	91,806.36

sumber :

* Pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, berdasarkan UU No. 7 Thn 2013

** Pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2013

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara $1^{\circ} 37' 27''$ sampai $4^{\circ} 55' 17''$ Lintang Selatan dan antara $102^{\circ} 3' 54''$ dan $106^{\circ} 13' 26''$ Bujur Timur. Provinsi Sumatera Selatan dan dialiri banyak sungai besar dan kecil dengan kekayaan sumber daya yang melimpah antara lain minyak bumi, batu bara dan gas alam. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang sekitar 750 km menjadi tempat yang subur bagi budi daya pertanian dan perikanan, dan penghubung bagi perdagangan antardaerah sejak jaman kerajaan Sriwijaya. Dengan letak geografis yang strategis, Sumatera Selatan menjadi salah satu pusat pertemuan dan interaksi para pedagang-pedagang asing terutama dari Arab, India dan Cina. Letak geografis ini memberikan peluang bagi Sumatera Selatan untuk cepat maju dan berkembang.

2.1.1.3 Topografi

Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Wilayah Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah dari Barat ke Timur dengan ketinggian antara 400-1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah

dengan ketinggian rata-rata antara 900-1200 mdpl berada pada bagian Barat yang merupakan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan ini memiliki puncak-puncak dengan ketinggian tertinggi berada di Gunung Dempo dengan ketinggian 3.159 mdpl, kemudian Gunung Bungkuk dengan ketinggian 2.125 mdpl, Gunung Seminung dengan ketinggian 1.964 mdpl, dan Gunung Patah dengan ketinggian 1.107 mdpl.

Bagian Timur merupakan daerah pantai dengan tanah terdiri dari rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya merupakan tumbuhan Palmase dan bakau. Sedangkan di bagian tengah merupakan wilayah dengan dataran rendah yang luas.

Tabel 2. 2
Luas Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)				
		0-8%	8 - 15 %	16-25%	26-40%	>40%
1	Banyuasin	1.181.610	1.689	-	-	-
2	Empat Lawang	18.212	62.253	38.531	2.141	104.506
3	Lahat	126.787	142.785	148.751	5.133	107.718
4	Lubuk Linggau	2.863	24.546	5.492	1.569	5.680
5	Muara Enim	710.763	122.335	26.611	25.262	37.418
6	Musi Banyuasin	1.284.134	113.236	20.934	-	8.323
7	Musi Rawas	542.957	267.264	160.457	20.200	244.988
8	OKI	1.832.553	2.293	1.058	-	-
9	OKU	236.011	124.065	58.855	41.939	18.836
10	OKU Selatan	124.040	129.222	137.501	95.939	62.693
11	OKU Timur	297.717	39.109	174	-	-
12	Pagar Alam	86	26.931	20.005	11.703	4.641
13	Palembang	40.061	-	-	-	-
14	Prabumulih	24.760	15.220	3.470	-	-
15	Ogan Ilir	266.607	-	-	-	-
Total		6.422.553	1.070.948	621.840	1.714.422	5.922.802

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2005-2019.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Panjang wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 450 km dari Sungai Benu (batas Provinsi Jambi) sampai Sungai Mesuji (batas Provinsi Lampung). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan pesisir pantai timur terdapat kawasan strategis provinsi yaitu di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Wilayah pegunungan terdapat di bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan dengan puncak tertinggi Gunung Seminung (1.964 m) dan Gunung Dempo (3.159). Daerah ini tersusun dari bentukan lembah, dataran tinggi *plateau* dan kerucut vulkanik. Bagian penting wilayah ini adalah lembahan yang merupakan lahan budidaya pertanian. Punggungan Sumatera, deretan bukit barisan merupakan bagian sistem pegunungan dari *Sunda Shield*, terbentuk pada zaman tersier, dimana batas *Sunda Shield* yaitu Lempeng

India yang secara berangsur-angsur menekan dan menunjam di bawah Paparan Sunda, menghasilkan deretan Pegunungan Bukit Barisan.

Kawasan yang termasuk daerah bahaya Gunung Dempo terdiri dari Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagar Alam dengan luas total seluas 36.850 Ha atau sekitar 0,40 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten tersebut merupakan daerah rawan bencana gempa bumi dengan total persentase terhadap luas wilayah 3,28 persen terdiri dari Kabupaten Empat Lawang persentase terhadap luas wilayah 1,92, Kabupaten Lahat persentase terhadap luas wilayah 1,16 Kota Pagar Alam persentase terhadap luas wilayah 0,19.

2.1.1.4 Geologi

Berdasarkan tatanan tektoniknya, wilayah Provinsi Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Kedua mendala tektonik ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong antara Lempeng Samudera Hindia di barat daya dan Lempeng Benua Eurasia di timur laut pada tersier. Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak di sepanjang Parit Sunda yang berada di lepas Pantai Barat Sumatera, dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman miring -30⁰ di bawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda.

Jenis struktur yang umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Struktur lipatan memperlihatkan orientasi barat laut-tenggara, melibatkan sikuen batuan berumur *Oligosen-Plistosen*. Sedangkan sesar yang ada merupakan sesar normal dan sesar naik. Sesar normal dengan pola kelurusan barat laut-tenggara tampak berkembang pada runtutan batuan berumur *Oligosen-Moisen*, sedangkan struktur dengan arah umum timur laut-barat daya, utara-selatan, dan barat-timur terdapat pada sikuen batuan berumur *Plio-Plistosen*. Sesar naik biasanya berarah barat laut-tenggara, timur laut-barat daya dan barat-timur, dijumpai pada batuan berumur *Plio-Plistosen* dan kemungkinan merupakan hasil peremajaan struktur tua yang berupa sesar tarikan.

Struktur rekahan yang berkembang memperlihatkan arah umum timur laut-barat daya, relatif tegak lurus dengan struktur regional atau sejajar dengan arah pergerakan tektonik di Sumatera. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk *antiklinorium* telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon. Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini.

Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara; (2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6) formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

2.1.1.5 Hidrologi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air dengan sumber air utama dari Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Sebagian besar sungai-sungai bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi beserta anak sungainya, seperti Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelangi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas.

Air sungai di Sumatera Selatan pada umumnya berwarna keruh dan membawa endapan lempung (*suspended materials*). Hal ini disebabkan salah satunya oleh kegiatan penebangan pohon-pohon (hutan) yang tidak terkendali sehingga terjadi erosi di daerah hulu dan sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Kondisi ini selanjutnya berakibat pada pendangkalan aliran sungai dan pergeseran pola aliran sungai.

Air permukaan merupakan sumber daya air yang paling strategis karena dapat dimanfaatkan langsung untuk berbagai keperluan makhluk hidup. Air permukaan dapat langsung digunakan sebagai sumber bahan baku keperluan manusia, hewan, industri, dan kebutuhan lainnya. Keberadaan air permukaan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu.

Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktiasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang mencapai

puncaknya genangan lebak sampai 500.000 Ha, sedang pada musim kemarau yang panjang genangan lebak tinggal 5.000 Ha.

Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Malahan masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih. Mereka mengambil air dari sungai kemudian diendapkan atau ditambahkan kaporit, kemudian langsung digunakan sebagai air untuk dimasak atau pada saat musim hujan mereka menampung air hujan untuk dijadikan air minum. Kebiasaan ini sudah terjadi secara turun menurun sejak dahulu. Hanya saja dulu air sungai masih belum terlalu tercemar. Saat ini penggunaan air sungai tanpa pengolahan khusus akan sangat berbahaya bagi kesehatan, karena pencemaran sungai sudah sangat tinggi.

DAS (Daerah Aliran Sungai)

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII mencakup 4 (empat) Wilayah Sungai (WS): Musi, Sugihan, Banyuasin, dan Lemau (MSBL). DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan bagian dari WS MSBL terdiri dari DAS Musi, DAS Banyuasin, DAS Benawang, DAS Bulurariding dan DAS Mesuji (BPDAS Musi).

Wilayah Sungai Musi dengan nama DAS Musi, Lakitan, Rawas, Semangus, Batang Hari Leko, Wilayah Sungai Sugihan dengan nama DAS Burung, Gaja Mati, Pelimbangan, Beberi, Olok, Daras, Medang, Padang, Banyuasin, Senda, Limau, Ibul, Puntian, Pangkalan Balai, Buluain, Kepayang, Mangsang, Kedawang, Titikan, Mendes, Tungkal, Keluang, Lalan, Supat, Lilin.

Rawa

Luas rawa di provinsi Sumatera Selatan sekitar 1.483.662 Ha atau 17,11% dari luas wilayah daratan yang terbagi menjadi RPS (rawa pasang surut), RL (rawa lebak). Rawa tersebut terdapat di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah RPS 19 dan RL 1, di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah RPS 7 dan RL 1, di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah RPS 3 dan RL 63, di Kabupaten Ogan Komering Ilir RPS 4 dan RL 14, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Timur Hanya terdapat RL yaitu Kabupaten

Ogan Ilir dengan jumlah 53 dan OKU Timur dengan jumlah 5. Sementara, Kota Palembang hanya terdapat 1 RPS.

2.1.1.6 Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17-634,4/22 mm sepanjang tahun. Setiap bulan hujan cenderung turun dan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 26,4°C hingga 27,8°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 26,8°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Agustus, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Sumatera Selatan merupakan bagian dari usaha mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk menunjang kehidupan manusia; menjaga keragaman habitat bilogi; menyediaan sumber bahan mentah, energi dan mineral; mengatur perubahan iklim; mendorong pengendalian sampah dan polusi; menyediakan ruang kehidupan; menjadi penghubung spasial bagi mobilitas orang dan barang; dan menyimpan dan melindungi berbagai wairisan sejarah. Penggunaan lahan di Sumatera Selatan sangat menentukan dan saling mempengaruhi dengan pola kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Berdasarkan data luas penutupan lahan tahun 2010, penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar digunakan untuk mendukung pertanian lahan kering campur sekitar 32,91 persen, belukar rawa sekitar 10,33 persen, semak belukar sekitar 10,23 persen, perkebunan 8,34 persen dan pertanian lahan kering sekitar 6,48 persen. Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan lahan, Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi. Selain itu, Sumatera Selatan juga menjadi salah satu koridor ekonomi Sumatera dan menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK) di Tanjung Api-api.

Tabel 2. 3
Luas Penutupan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan
2006-2010 (Ha)

Penutupan Lahan	kode	2006	2008	2010	Distri busi (%)
Hutan Lahan Kering Primer	2001	297.930	295.713	295.713	3,40
Hutan Lahan Kering Sekunder	2002	300.903	277.057	275.952	3,17
Hutan Mangrove Primer	2004	142.880	104.371	104.363	1,20

Penutupan Lahan	kode	2006	2008	2010	Distri busi (%)
Hutan Rawa Primer	2005	30.115	20.831	11.678	0,13
Hutan Tanaman	2006	215.779	217.530	289.104	3,32
Semak Belukar	2007	532.207	518.857	890.077	10,23
Perkebunan	2010	663.023	724.864	725.719	8,34
Permukiman	2012	167.484	167.484	167.484	1,92
Tanah Terbuka	2014	285.931	278.051	305.449	3,51
Awan	2500	3.135	3.135	3.135	0,04
Rumput	3000	267.389	263.907	263.602	3,03
Air	5001	96.846	96.846	96.846	1,11
Hutan Mangrove Sekunder	20041	30.993	67.959	67.959	0,78
Hutan Rawa Sekunder	20051	223.145	204.052	197.083	2,26
Belukar Rawa	20071	1.336.129	1.340.806	898.630	10,33
Pertanian Lahan Kering	20091	561.932	562.096	564.058	6,48
Pertanian Lahan Kering Campur	20092	2.852.498	2.864.974	2.863.616	32,91
Sawah	20093	404.206	404.216	404.216	4,65
Tambak	20094	59.807	60.114	60.114	0,69
Bandara/Pelabuhan	20121	231	231	231	0,00
Transmigrasi	20122	55.137	55.137	55.137	0,63
Pertambangan	20141	28.195	28.195	28.195	0,32
Rawa	50011	145.849	145.317	133.383	1,53
Total		8.701.742	8.701.742	8.701.742	100,00

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan terkait dengan ketersediaan potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tada hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering. Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa, penggunaan bahan baku, peningkatan keterampilan petani dan kemampuan petani mengakses modal perbankan, dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian.

Penetapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi akan mendorong optimalisasi pengelolaan lahan untuk memanfaatkan potensi sumber daya energi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi untuk penyediaan energi bahan bakar, rumah tangga dan industri. Selain itu, pembangunan koridor ekonomi dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api juga memerlukan lahan yang luas sehingga mengubah penggunaan lahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lumbung pangan, lumbung energi, koridor ekonomi dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-

api antara lain adalah meningkatnya lahan kritis, meningkatnya lahan alih fungsi lahan, maraknya penimbunan rawa, rusaknya daerah hutan mangrove dan pesisir, banyaknya tambang galian C liar dan pembalakan hutan, meningkatnya konflik kepemilikan lahan, serta meningkatnya spekulasi lahan yang menyebabkan harga lahan tinggi.

Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong pengelolaan dan peruntukan lahan secara baik, transparan, akuntabel dan berbasis hukum sehingga penggunaan lahan akan menjamin pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan bergambut seluas 1,42 juta ha atau 15,46 persen dari luas wilayah. Dengan luasan seperti ini menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi terluas kedua di Pulau Sumatera (setelah Provinsi Riau) yang memiliki kawasan gambut. Dilihat dari ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketebalan yang bervariasi antara 50-400 cm atau termasuk kategori dangkal hingga dalam. Sekitar 96,8 persen termasuk gambut dangkal hingga sedang, sisanya 3,2 persen atau 45.009 ha merupakan gambut dalam yang sebarannya terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, bahwa gambut yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 m.

Tabel 2. 4

Sebaran dan Luas Kawasan Gambut Menurut Kedalaman

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Dangkal (50-100 cm)	Sedang (100-200 cm)	Dalam (200-400 cm)
1	Banyuasin	252.706,52	dangkal	sedang	dalam
2	Muara Enim	24.104,00	-	sedang	dalam
3	Musi Banyuasin	340.604,48	Dangkal	Sedang	dalam
4	Musi Rawas	34.126,00	-	sedang	-
5	Ogan Komering Ilir	768.501,00	-	Sedang	dalam
Jumlah		1.420.042	-	-	-

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya hutan yaitu seluas 3.670.957 ha atau sekitar 41,96 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, baik yang

disebabkan oleh manusia/masyarakat maupun perubahan musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam Provinsi Sumatera Selatan saja, tapi juga masyarakat yang berada di provinsi yang berdekatan, bahkan hingga menimbulkan dampak internasional hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Tabel 2. 5
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lindung	591.832	6,76
2	Hutan Produksi Tetap	1.688.445	19,30
3	Hutan Produksi Konversi	360.881	4,13
4	Hutan Produksi Terbatas	236.893	2,71
5	Suaka Margasatwa	267.772	3,06
6	Taman Nasional	466.060	0,53
7	Taman Hutan Rakyat	607	0,01
8	Taman Wisata Alam	223	0,003
Total		3.670.957	41,96

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2012

Sumberdaya air di Provinsi Sumatera Selatan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air, karena dialiri oleh banyak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar adalah Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Sehingga masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih. Mereka mengambil air dari sungai kemudian diendapkan atau ditambahkan kaporit, kemudian langsung digunakan sebagai air untuk dimasak atau pada saat musim hujan mereka menampung air hujan untuk dijadikan air minum. Kebiasaan ini sudah terjadi secara turun menurun sejak dahulu. Hanya saja dulu air sungai masih belum terlalu tercemar. Saat ini penggunaan air sungai

tanpa pengolahan khusus akan sangat berbahaya bagi kesehatan, karena pencemaran sungai sudah sangat tinggi.

Komponen utama pembentuk air tanah adalah air hujan yang sebagian meresap ke dalam tanah di daerah imbuhan (*recharge area*) dan sebagian tersimpan di dalam akuifer serta sebagian lagi keluar secara alamiah di daerah luah (*discharge area*). Berdasarkan tempatnya air tanah tidak terlepas dari litologi dan morfologinya. Melihat persebaran keberadaan air tanah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dibedakan menjadi : wilayah air tanah dataran, wilayah air tanah perbukitan dan wilayah air tanah kaki gunung api (Robert, H. 1996). Namun, secara umum data potensi air tanah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan belum banyak dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan, diketahui bahwa cekungan air tanah yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 9 (sembilan) lokasi, yaitu: (1) Dua cekungan di dalam provinsi: (a) CAT Karangagung (Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Ogan Komering Ilir); (b) CAT Palembang-Kayuagung (Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang dan Prabumulih); dan (2) tujuh cekungan lintas batas provinsi: (a) CAT Jambi-Dumai (Prov. Sumsel, Prov. Jambi, dan Prov. Riau); (b) CAT Bangko-Sarolangun (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi); (c) CAT Sugiwaras (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi); (d) CAT Lubuk Linggau-Muara Enim (Prov. Sumsel, Prov. Bengkulu, dan Prov. Lampung); (e) CAT Muaraduo-Curup (Prov. Sumsel dan Prov. Bengkulu), (f) CAT Baturaja (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung), dan (g) CAT Ranau (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung).

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi sumberdaya energi yang sangat melimpah, baik sumberdaya energi fosil maupun non fosil. Jenis sumberdaya energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas bumi merupakan cadangan yang patut diperhitungkan secara nasional karena potensinya yang cukup besar. Demikian juga dengan potensi sumberdaya non fosil yang bersifat terbarukan seperti panas bumi, biomassa, dan mini/mikro-hidro, terdapat dalam jumlah yang signifikan. Potensi sumberdaya energi terbarukan ini apabila dikembangkan secara optimal akan memberikan alternatif untuk menggantikan penggunaan energi fosil.

Potensi cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini tersebar di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih. Cadangan minyak di 8 (delapan) daerah tersebut diperkirakan sebesar 757,6 MMSTB atau sekitar 8,78 % dari total cadangan minyak bumi nasional. Berdasarkan statusnya cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan dengan status terbukti sebesar 448,2 MMSTB atau 10,7 % dari total cadangan terbukti minyak bumi nasional.

Berdasarkan besarnya *lifting* yang terdapat di setiap daerah penghasil, maka terdapat beberapa sentra akumulasi besar dari minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari yang terbesar sampai terkecil berturut-turut adalah Kabupaten Musi Banyuasin (48,50%), Kabupaten Muara Enim (24,04%), Kabupaten Musi Rawas (10,85%) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (5,69%). Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi di 4 (empat) kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek ekonomi tinggi.

Cadangan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 24.179.980 BSCF. Bila dibandingkan dengan cadangan gas bumi nasional yaitu 185.797.870 BSCF, maka rasio potensi gas bumi Provinsi Sumatera Selatan terhadap cadangan gas bumi nasional adalah 13,01%. Ada 2 (dua) sentra akumulasi besar dari gas alam di Provinsi Sumatera Selatan apabila dilihat berdasarkan *lifting* gas buminya, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin (48,41%) dan Kabupaten Musi Rawas (39,21%). Wilayah kerja pertambangan gas bumi di kedua kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek ekonomi tinggi.

Potensi batubara di Provinsi Sumatera Selatan cukup besar, yaitu 22.240,4 juta ton atau sekitar 38,5 % dari total cadangan sumberdaya batubara nasional yaitu 57.847,7 juta ton. Sedangkan potensi cadangan yang siap tambang di Provinsi Sumatera Selatan adalah sekitar 2.653,9 juta ton atau sekitar 38 % dari cadangan siap tambang nasional yaitu 6.981,6 juta ton. Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 6 (enam) kabupaten. Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan dengan status terukur sebesar 19.843,68 juta ton, cadangan batubara dengan status terunjuk sebesar 2.071,79 juta ton dan cadangan batubara dengan status tereka sebesar 325 juta ton.

Pengusahaan batubara di Provinsi Sumatera Selatan terlihat sangat prospektif pada masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari penjualan batubara yang cenderung naik dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Kenaikan penjualan batubara terlihat signifikan seiring dengan peningkatan kebutuhan batubara, terutama untuk PLTU. Selain dipergunakan untuk PLTU, batubara dimanfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan pabrik semen dan industri lain.

Tabel 2. 6

Cadangan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Cadangan (Juta Ton)			Jumlah (Juta Ton)
		Terukur	Terunjuk	Tereka	
1	Muara Enim	13.563,21	-	-	13.563,21
2	Lahat	2.714,97	-	-	2.714,97
3	Musi Rawas	-	1.235,00	-	1.235,00

No	Kabupaten	Cadangan (Juta Ton)			Jumlah (Juta Ton)
		Terukur	Terunjuk	Tereka	
4	Musi Banyuasin	3.565,50	-	-	3.565,50
5	Ogan Komering Ulu	-	836,79	-	836,79
6	Ogan Komering Ilir	-	-	325,00	325,00
Total		19.843,68	2.071,79	325,00	22.240,47

Sumber : Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 2008.

Laporan Masterplan Sumatera Selatan Lumbung Energi Nasional.

Gas metana adalah gas yang terdapat di dalam lapisan batubara. Pada umumnya gas metana berasosiasi dengan gas CO₂, N₂ dan air. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki daerah prospektif seluas 20.000 km² atau 27,03 persen dari luas daerah prospektif di Indonesia. Sedangkan potensi sumberdaya gas metana di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 120 TCF.

Gas metana dapat digunakan untuk keperluan gas domestik, pembangkit listrik dan bahan baku untuk industri kimia. Peralatan dan infrastruktur yang diperlukan dalam pemanfaatan gas metana adalah sama dengan yang dipergunakan untuk gas bumi, sehingga di masa mendatang apabila gas CBM telah diproduksi, maka dapat langsung disalurkan pada jaringan pemipaan gas bumi yang telah tersedia.

Panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Energi tersebut berasal dari magma yang mendidihkan air yang ada di dalam tanah, kemudian uap air yang ada dapat diubah menjadi tenaga listrik. Energi ini tidak menimbulkan limbah seperti minyak bumi dan batubara. Potensi panas bumi di Provinsi Sumatera Selatan berada di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagar Alam. Potensi panas bumi terbesar dan telah dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Bukit Lumut Balai Kabupaten Muara Enim (835 MWe).

Tabel 2. 7

Potensi Panas Bumi di Provinsi Sumatera Selatan

No	Lokasi	Kabupaten/ Kota	Potensi (MWe)	Keterangan
1	Ulu Danau (Pulau Beringin)	OKU Selatan	231	Spekulatif
2	Marga Bayur (Lawang Agung)	OKU Selatan	339	Hipotesis
3	Way Selabung	OKU Selatan	231	Spekulatif
4	Rantau Dadap (Segamit)	Muara Enim	225	Hipotesis
5	Bukit Lumut Balai	Muara Enim	835	Spekulatif
6	Tanjung Sakti	Lahat	50	Indikasi
7	Way Panas, Kota Batu	OKU Selatan	-	Indikasi
8	Ulu Musi	Empat Lawang	-	Indikasi
Total			1.911	

Sumber: Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 2009.

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat potensi sumberdaya air untuk Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Muara Enim dan Kota Pagar Alam. Total daya yang dapat dihasilkan dari sumberdaya air yang terdapat di 5 (lima) kabupaten/kota tersebut sekitar 8.506,08 KW. Namun hingga saat ini potensi sumberdaya air yang ada tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat dari daya terpasang pada Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) yang baru mencapai 310 KW atau 3,64 persen dari potensi total daya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selain potensi sumberdaya air untuk PLTMH, di Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terdapat di Sungai Lematang (83,2 MW), Sungai Enim (47 MW) dan Danau Ranau (34 MW).

Tabel 2. 8

Sebaran PLTMH dan Daya Terpasangnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009

No	Kabupaten	Lokasi	Daya Terpasang (KW)	Kondisi
1	OKU	Pulau Bringin	30	Operasional
		Muara Dua Kisam	22	Operasional
2	Muara Enim	Aremantai	40	Operasional
		Semendo Darat	40	Operasional
3	Lahat	Kota Agug	30	Operasional
		Pulau Pinang	40	Operasional
4	OKU Selatan	Sugihan	61	Operasional
		Penyandingan	15	Operasional
		Pagar Agung	32	Operasional
		Tanjung Durian	80	Operasional
Total			390	

Sumber: Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, 2009.

Tabel 2. 9

Sebaran Potensi Sumberdaya Air (Mini/Mikrohidro) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Total Daya (Kw)
1	Lahat	Perigi, Sungai Salak, Sungai Ayun, Sungai Endikat, Lawang Agung, Tanjungan, Sungai Betung, Sungai Cawang, Sungai Kikim Kanan, Air Betung.	1.613,28
2	Pagar Alam	Prahu, Pematang Bango, Mingkik, Sukajadi, Talang Sejemput, Tebat Benawa.	1.285,27
3	Musi Rawas	Lekok, Layang, Temam II, Sungai Kerali, Bukit Bukok, Sungai Kejatan.	2.028,11
4	OKU Selatan dan OKU	Pematang Danau, Ulu Danau, Arom Ante, Cukuhnau, Sungai Kepayang Kecil, Way Telema, Air Kenik.	1.619,21
5	Muara Enim	Bedegung, Air Dingin, Penindaian, Tanjung Agung, Sungai Basung, Air Bodor, Segamit	1.960,21
Total			8.506,08

Sumber: Masterplan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Lumpung Energi Nasional

Pengembangan wilayah Sumatera Selatan sebagaimana yang telah direncanakan menjadi beberapa kawasan budidaya yaitu diantaranya pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain. Secara rinci arah pengembangan wilayah dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2. 10
Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Karakteristik dan Unggulan
Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Wilayah	Karakteristik Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
Kabupaten				
1	Banyuasin	Dataran rendah, bergelombang	Pertanian, perkebunan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian • Kawasan perkebunan • Kawasan perikanan • Kawasan industri
2	Empat Lawang	Perbukitan, Pegunungan	Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan
3	Lahat	Perbukitan, Pegunungan	Perkebunan, tambang mineral, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertambangan • Kawasan pertanian
4	Muara Enim	Dataran rendah, perbukitan, pegunungan	Tambang, perkebunan, hutan tamanan, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertambangan • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan industri
5	Musi Banyuasin	Dataran rendah, perbukitan	Tambang, perkebunan, pertanian, hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan produksi • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan pertambangan
6	Musi Rawas	Perbukitan, pegunungan	Perkebunan, pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian
7	Musi Rawas Utara	Perbukitan, pegunungan	Perkebunan, tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertambangan
8	Ogan Ilir	Dataran rendah, perbukitan	Pertanian, perikanan, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian • Kawasan perkebunan • Kawasan perikanan
9	Ogan Komering Ilir	Dataran rendah	Hutan tanaman, perkebunan, pertanian, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan produksi • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan perikanan
10	Ogan Komering Ulu	Perbukitan	Perkebunan, pertanian, tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan pertambangan
11	OKU Selatan	Perbukitan, Pegunungan	Perkebunan, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian
12	OKU Timur	Perbukitan	Pertanian, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian • Kawasan perkebunan
13	Penukal Abab Lematang Ilir	Dataran rendah, perbukitan	Perkebunan, tambang, hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan produksi • Kawasan perkebunan • Kawasan pertambangan
Kota				
14	Lubuklinggau	Pegunungan	Jasa, pariwisata, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan permukiman • Kawasan pariwisata
15	Pagar Alam	Pegunungan	Pariwisata, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian • Kawasan permukiman • Kawasan pariwisata
16	Palembang	Dataran rendah	Jasa, industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan permukiman
17	Prabumulih	Perbukitan	Perkebunan, pertanian, jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan permukiman

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah gangguan serius terhadap keberfungsiannya suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan. Peristiwa tersebut melampaui kemampuan manusia atau masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki sendiri. Suatu peristiwa tergolong bencana jika menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dikelompokkan dalam kejadian bencana alam dan bencana non alam.

Bencana alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, gunung meletus dan tsunami.

Kondisi geografis, topografi dan klimatalogi menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan termasuk rawan bencana baik banjir, longsor, abrasi maupun perubahan iklim. Hasil Kajian Risiko Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) menyebutkan bahwa perubahan iklim akan membawa dampak bagi wilayah Provinsi Sumatera Selatan baik pesisir, sumber daya air, pertanian, dan kesehatan.

Perubahan iklim akan mempengaruhi perubahan genangan tingkat permukaan laut yang selanjutnya menyebabkan bahaya banjir di pesisir Selatan wilayah Sumatera. Dampak primer yang dialami oleh Kabupaten/Kota yang diperkirakan terkena rendaman adalah terjadinya peningkatan frekuensi banjir di wilayah pesisir terutama wilayah yang masih berada pada sistem Sungai Musi; (2) turunnya permukaan air tanah yang disebabkan oleh pemanfaatan air tanah yang tidak memperhitungkan keseimbangan sehingga menyebabkan terjadinya intrusi air laut ke darat dan perubahan vegetasi, pertanian dan kesuburan tanah pesisir; (3) munculnya kenaikan muka laut juga mengakibatkan volume air laut yang mendesak ke dalam sungai semakin besar yang akan mengubah salinitas perairan pesisir; (4) terjadinya kemunduran ke arah darat batas antara perairan tawar dan payau, perubahan lokasi fisik, yaitu batas perairan darat, berkurangnya luas kawasan pantai dan semakin mengecilnya garis pantai sehingga berpengaruh pada luas administratif kota-kabupaten di kawasan pesisir. Kabupaten/Kota yang terkena rendaman di antaranya adalah OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Pola ruang yang terkena bahaya rendaman adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, pertanian lahan basah, hutan suaka alam, perkebunan, permukiman, dan kawasan pelabuhan Tanjung Api-api. Berdasarkan kajian kerentanan, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang terkena risiko genangan pada tingkat risiko sangat tinggi yaitu Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

Dampak perubahan iklim pada sektor sumber daya air pada dasarnya dipengaruhi oleh curah hujan. Dampak perubahan iklim berupa banjir, longsor, dan penurunan ketersediaan air akan memberi dampak khusus pada penyediaan air Sumatera Selatan. Persentase cakupan wilayah risiko banjir Kota Prabumulih memiliki risiko potensi banjir tertinggi. Luas total potensi risiko tertinggi di Prabumulih adalah 33,82 persen. Namun, daerah resiko banjir terbesar adalah di Kabupaten Muara Enim. Dalam peristiwa ekstrim yang dipengaruhi oleh kenaikan tingkat pasang surut dan laut, Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin memiliki potensi risiko daerah genangan tertinggi. Hal ini disebabkan oleh banjir dan naiknya permukaan laut sehingga menenggelamkan 59,36 persen dari luas Kota Palembang dan 57,33 persen dari wilayah Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, berdasarkan hasil proyeksi, daerah dengan risiko banjir tertinggi terletak di Ogan Ilir di mana 43,39 persen dari luas Kabupaten terendam. Sementara itu, dalam kondisi peristiwa ekstrim, daerah potensi risiko tertinggi akan berlokasi di Kota Palembang karena 60,57 persen dari luas Kota Palembang akan tergenang.

Perubahan iklim juga akan berperngaruh terhadap meningkatnya risiko penurunan ketersediaan air dalam kondisi *baseline* di Sumatera Selatan cukup rendah. Risiko tinggi ditemukan di wilayah Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, risiko dengan tingkat "sedang" terdapat di 22 wilayah di 7 (tujuh) kabupaten / kota yaitu: Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU Timur. Risiko kekurangan air meningkat disebabkan oleh penurunan pasokan air akibat turunnya tren curah hujan dan meningkatnya kebutuhan evapotranspirasi dan air.

Perubahan iklim juga akan berperngaruh terhadap meningkatnya risiko penurunan produktivitas tanaman pangan. Kabupaten Banyuasin dan OKI memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan luas sawah padi tada hujan, Muara Enim memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan lahan kering, Musi Banyuasin dan Banyuasin memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan luas pertanian jagung, dan OKU Timur dan Lahat memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan luas pertanian kedelai. Selain itu, Musi Banyuasin, OKI, Muara Enim, Banyuasin, Lahat, dan OKU Timur memiliki risiko serius dari penurunan luas panen padi, jagung, dan kedelai.

Risiko perubahan iklim terhadap penurunan produktivitas padi sawah bervariasi dari rendah ke tingkat tinggi, kecuali untuk OKU Timur. Daerah ini memiliki potensi risiko yang tinggi penurunan produktivitas padi sawah, sedangkan Lubuk Linggau dan Pagar Alam memiliki tingkat risiko yang sangat rendah. Adapun untuk produktivitas jagung, Sumatera Selatan sangat rendah dengan tingkat resiko yang tinggi, kecuali untuk OKI yang memiliki potensi tingkat risiko sangat tinggi. Untuk produktivitas kedelai, Sumatera Selatan akan mengalami tingkat moderat dan resiko yang tinggi, kecuali

untuk OKU Selatan, Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan Palembang, tanpa risiko tingkat yang sangat tinggi.

Risiko dari perubahan iklim terhadap penurunan luas panen irigasi menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi risiko penurunan luas panen padi irigasi pada tingkat rendah dan sangat rendah. Hanya beberapa kabupaten yang mengalami risiko penurunan luas sawah pada tingkat sedang dan tinggi, seperti OKU Timur (tingkat sedang), OKI (tingkat sedang), dan Banyuasin (tingkat tinggi).

Perubahan iklim berupa temperatur dan curah hujan dinilai berpengaruh pada penyebaran penyakit DBD, malaria, dan diare di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat curah hujan berpengaruh pada penyebaran populasi nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berbeda berdasarkan tingkat kejadian, curah hujan bulanan dan temperatur, dan populasi. Puncak kejadian DBD biasa terjadi pada masa transisi tahunan sekitar November-Januari tahun berikutnya. Terdapat 6 wilayah berisiko tinggi terjangkit DBD yang disebabkan oleh berbagai faktor: tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yang mempercepat epidemik, kurangnya fasilitas kesehatan, dan tidak tertutupnya saluran air. Selain itu, perubahan iklim juga berpengaruh terhadap jangkitan diare. Kota Palembang memiliki prevalensi tertinggi diare diikuti oleh Muara Enim dan Ogan Komering Ulu. Kabupaten tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu tingkat pertumbuhan tinggi dan kepadatan penduduk. Secara umum, jumlah penduduk yang tinggi menjadi penyebab utama yang mengakibatkan resiko yang sangat tinggi diare.

Tabel 2. 11

Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Sebaran Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2013

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	Total
1	Banyuasin	7	3	16	15	41
2	Empat Lawang	13	13	22	12	60
3	Lahat	8	13	15	15	51
4	Muara Enim	3	4	24	15	46
5	Musi Banyuasin	3	3	2	12	20
6	Musi Rawas	4	3	5	8	20
7	Musi Rawas Utara*)	0	0	0	5	5
8	Ogan Ilir	4	6	11	11	32
9	Ogan Komering Ilir	5	11	5	12	33
10	Ogan Komering Ulu	2	0	5	10	17
11	Ogan Komering Ulu Selatan	2	2	1	16	21

12	Ogan Komering Ulu Timur	5	5	16	11	37
13	Penukal Abab Lematang Ilir*)	0	0	0	4	4
14	Lubuklinggau	0	1	1	1	3
15	Pagar Alam	11	13	37	26	87
16	Palembang	14	20	25	26	85
17	Prabumulih	1	1	10	7	19
Jumlah		82	98	195	206	581

Sumber : BPBD Prov. Sumsel, 2013

Keterangan : * data masih tergabung dengan kabupaten induk

Tabel 2. 12
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2010 - 2013

No	Jenis Bencana	Tahun				Total
		2010	2011	2012	2013	
1	Banjir	34	7	32	47	120
2	Kebakaran	27	69	107	106	309
3	Puting Beliung	15	17	37	30	99
4	Tanah Longsor	6	5	19	23	53
Jumlah		82	98	195	206	581

Sumber : BPBD Prov. Sumsel, 2013

Selain dari bencana yang berasal dari alami, terdapat juga bencana yang disebabkan oleh faktor non alam dan faktor manusia. Bencana non alam antara lain kebakaran pemukiman, bentrok masa, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, epidemi, dan wabah penyakit.

Konflik secara sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau sekelompok orang, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurnya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Sumber-sumber konflik berasal dari : Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; Perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat

beragama, antar suku, dan antar etnis; Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, dan; Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Jumlah kejadian bencana alam dan non alam di Sumatera Selatan pada kurun tahun 2019 sampai tahun 2012 berjumlah 365 kejadian. Kejadian bencana yang terbesar yakni bencana alam sebanyak 198 kejadian dan bencana alam non alam sebanyak 167 kejadian. Kejadian yang terbesar pada bencana alam yakni banjir dan banjir bandang sebanyak 70 kasus, di peringkat kedua yakni angin puting beliung (APB) sebanyak 69 kasus, dan pada posisi ketiga yakni tanah longsor sebanyak 26 kejadian.

Bencana yang non alami yang menjadi permasalahan yakni kebakaran pemukiman. Kejadian bencana alam yang terbesar dari 15 kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Selatan secara berurutan pada kurun tersebut yakni Kabupaten Empat Lawang (27 kali di 37 desa), Kota Pagaralam (26 kali di 14 desa), Kabupaten Banyuasin (22 kali di 14 desa), Kabupaten Lahat (21 kali di 23 desa), dan Musi Banyusin (20 kali di 29 desa). Akan tetapi ada tiga kabupaten yang kejadian bencana alamnya di bawah lima kabupaten tersebut, tetapi desa yang dilandanya lebih banyak, yakni Kabupaten Muaraenim terjadi di 66 desa dengan kejadian sebanyak 13 kali, kabupaten Musi Rawas dengan 8 musibah melanda 29 desa, dan di Kabupaten Ogan Ilir bencana alam melanda 29 desa dengan 6 kejadian.

Konflik sosial dalam periode 2009 sampai 2012 di Sumatera Selatan terdapat 46 kasus. Peta konflik lahan dalam kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2. 1 Peta Konflik Lahan di Sumatera Selatan



Tabel 2. 13
Batas Wilayah Yang Masih Harus Diselesaikan

No	Segmen	Panjang	Sudah	Belum
		Batas (Km)	Selesai (Km)	Selesai (Km)
1	Ogan Ilir dengan Muara Enim	128	38	90
2	Ogan Ilir dengan Banyuasin	27	7	20
3	OKI dengan Banyuasin	214	202	12
4	Muara Enim dengan Lahat	183	138	45
5	Muara Enim dengan Prabumulih	117	20	97
6	Muara Enim dengan Ogan Komering Ulu	143	113	30
7	Muara Enim dengan Musi Rawas	35	0	35
8	Musi Banyuasin dengan Banyuasin	299	198	101
9	Musi Rawas dng Empat Lawang	30	25	5
10	Lahat dengan Musi Rawas	54	10	44
11	Lahat dengan Pagar Alam	90	30	60
12	Lubuklinggau dengan Musi Rawas	52	45	7
13	Ogan Ilir dengan Ogan Komering Ulu	27	23	4
14	Ogan Ilir dengan Ogan Komering Ilir	92	10	82
15	Ogan Ilir dengan Prabumulih	7	0	7
16	Ogan Komering Ulu dengan OKU Selatan	93	38	55
17	Banyuasin dengan Muara Enim	70	10	60
18	OKU Timur dengan OKU Selatan	28	26	2
19	Ogan Ilir dengan OKU Timur	45	22	23

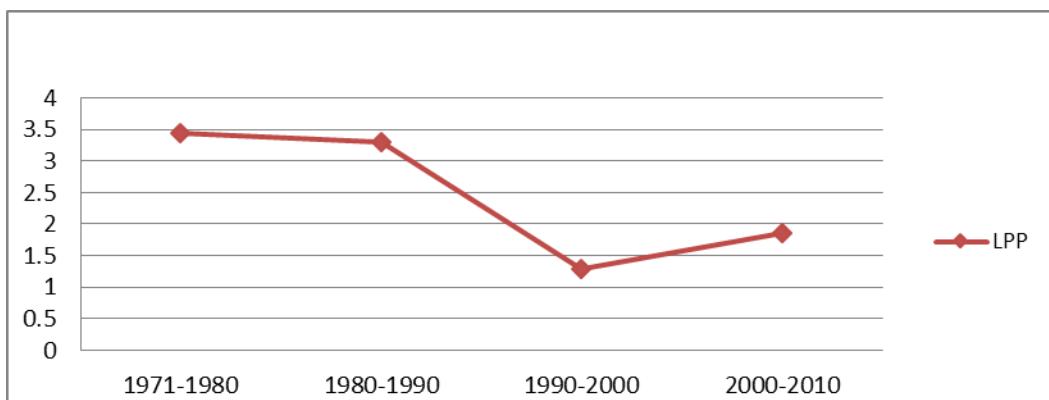
2.1.4 Demografi

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan mencapai 7.222.635 jiwa sehingga tercatat sebagai peringkat kesembilan dari seluruh provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2010 adalah 7.450.394 jiwa atau meningkat 3,15 persen dari tahun 2009. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat 2,93 juta jiwa pada tahun 1971 menjadi 3,97 juta jiwa pada tahun 1980, 5,49 juta jiwa pada tahun 1990, 6,27 juta jiwa pada tahun 2000, serta 7,22 juta jiwa pada tahun 2009.

Selama periode 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan mencapai 3,45 persen per tahun turun menjadi 3,29 per tahun pada periode 1980-1990, pada tahun 1990-2000 pertumbuhan penduduk menjadi 1,28 persen per tahun. Namun, laju pertumbuhan penduduk selama 2000-2010 terlihat mengalami kenaikan menjadi 1,85 persen per tahun.

Gambar 2. 2

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 1971-2010



Sumber: BPS; Supas 2005 dan Proyeksi

Persebaran penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kota Palembang dengan penduduk sebanyak 1.455 juta jiwa. Kabupaten/Kota yang lain umumnya jauh lebih kecil berkisar antara 126,2 ribu jiwa yang terkecil di Kota Pagaralam sampai dengan yang terbesar di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 750,1 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk antara kabupaten/kota dalam setahun terakhir juga cukup bervariasi. Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kota Prabumulih mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi yaitu berturut-turut 5,02 dan 4,40 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Kabupaten Banyuasin, OKU Selatan dan Ogan Ilir, masing-masing sebesar -0,62, -0,26 dan 0,75 persen.

Tabel 2. 14

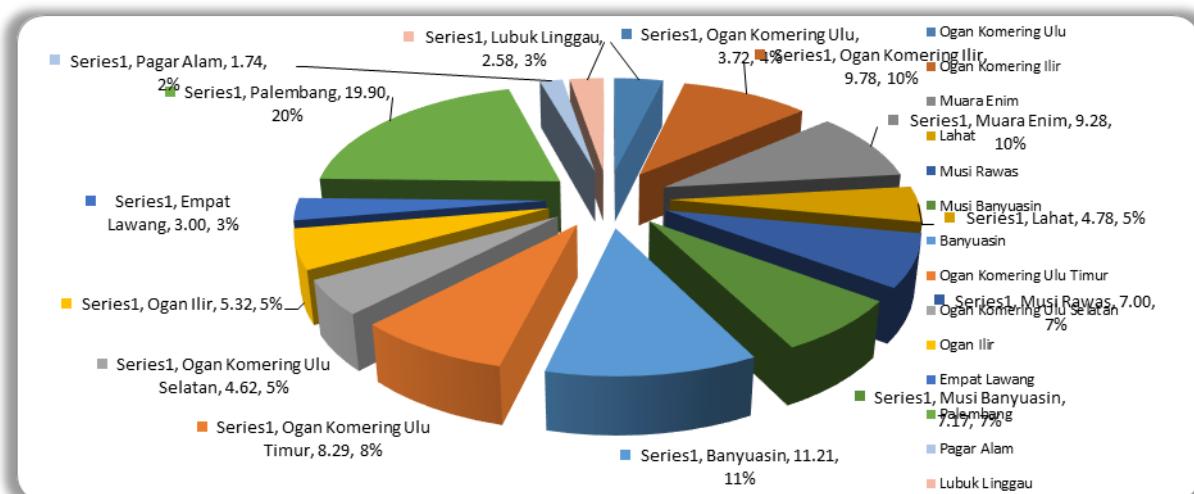
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk					LPP 2008-2012
	2008	2009	2010	2011	2012	
Ogan Komering Ulu	264.743	267.022	324.045	334.295	338.369	5,02
Ogan Komering Ilir	696.505	707.627	727.376	742.374	752.906	1,57
Muara Enim	660.906	668.341	716.676	731.410	741.795	2,34
Latoh	340.556	341.055	369.974	374.505	380.398	2,24
Musi Rawas	499.238	505.940	525.508	535.614	543.349	1,70

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk					LPP 2008-2012
	2008	2009	2010	2011	2012	
Musi Banyuasin	510.387	523.025	561.458	580.489	587.325	2,85
Banyuasin	798.360	818.280	750.110	762.482	773.878	-0,62
OKU Selatan	329.071	331.879	318.428	320.290	324.836	-0,26
OKU Timur	576.699	581.665	609.982	619.460	628.827	1,74
Ogan Ilir	378.570	384.663	380.904	387.205	392.989	0,75
Empat Lawang	213.559	213.872	221.176	222.735	225.737	1,12
Palembang	1.417.047	1.438.938	1.455.284	1.481.814	1.503.485	1,19
Prabumulih	136.253	137.786	161.984	166.960	169.022	4,40
Pagar Alam	116.316	116.486	126.181	127.706	129.719	2,20
Lubuk Linggau	183.580	186.056	201.308	206.086	208.893	2,62
Sumatera Selatan	7.121.790	7.222.635	7.450.394	7.593.425	7.701.528	1,58

Sumber: BPS; Supas 2005 dan Proyeksi

Gambar 2. 3
Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010



Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Provinsi Sumatera Selatan menghadapi masalah kependudukan yang sangat serius terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah pengendalian pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara berkesinambungan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pengendalian pertumbuhan penduduk dimaksud mengindikasikan meningkatnya kembali angka kelahiran, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah diantaranya dengan kembali menggalakkan Program KB untuk pengaturan kelahiran.

Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan selama setahun terakhir menunjukkan kondisi yang terjadi secara umum, dimana peningkatan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

Pada Tabel 2.8 terlihat bahwa jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2012 dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 meningkat sebanyak 85.775 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,62 persen. Jumlah angkatan kerja selama setahun terakhir mengalami penurunan sebanyak 24.300 orang dengan laju penurunan sebesar 0,64 persen.

Tabel 2. 15

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan, 2011-2012

Jenis Kelamin	2008	2009	2010	2011	2012	Laju Pertumbuhan
Penduduk Usia Kerja						
- Laki-laki	2.500.401	2.544.865	2.644.220	2.686.171	2.730.223	1,77
- Perempuan	2.474.818	2.520.877	2.574.380	2.613.786	2.655.509	1,42
- Total	4.975.219	5.065.742	5.218.600	5.299.957	5.385.732	1,59
Angkatan Kerja						
- Laki-laki	2.134.134	2.152.515	2.238.638	2.313.769	2.350.312	1,95
- Perempuan	1.337.878	1.307.850	1.426.406	1.456.904	1.396.061	0,85
- Total	3.472.012	3.460.365	3.665.044	3.770.673	3.746.373	1,53

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2012

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk usia kerja laki-laki (1,77 persen) sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan angkatan kerja laki-laki (1,95 persen). Sedangkan peningkatan laju pertumbuhan usia kerja perempuan (1,42 persen) dihadapkan pada penurunan pertumbuhan angkatan kerja perempuan sebanyak 6,08 persen.

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan pada Agustus 2012 mencapai 3.746.373 orang, berkurang sekitar 24.300 orang dibandingkan Agustus 2011 sebesar 3.770.673 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Agustus 2012 mencapai 3.532.932 orang, berkurang sekitar 20.172 orang dibandingkan keadaan pada Agustus 2011 yang sebesar 3.553.104 orang.

Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2012, jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2012 mengalami kenaikan hanya pada satu sektor, yaitu Sektor Industri sebesar 21.896 orang, sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 70.435 orang, kemudian sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 56.652 orang, diikuti sektor-sektor lainnya.

Dalam satu tahun terakhir (Agustus 2011-Agustus 2012) terdapat penambahan pekerja dengan status buruh/karyawan sebesar 104.515 orang, dan pekerja bebas di non pertanian sebesar 7.860 orang, sementara itu jumlah pekerja di status pekerjaan lainnya terjadi penurunan. Penurunan

pekerja terbesar terjadi pada status pekerja yang berusaha sendiri sebesar 37.552 orang, kemudian pekerja bebas di pertanian sebesar 29.260 orang dan pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 27.494 orang.

Persentase terbesar dari penduduk laki-laki yang bekerja pada bulan Agustus 2012 adalah pekerja berstatus buruh/karyawan (36,13 persen), sedangkan persentase terbesar dari penduduk perempuan yang bekerja adalah sebagai pekerja tak dibayar (43,95 persen).

2.2 Aspek Kesejahteraan Rakyat

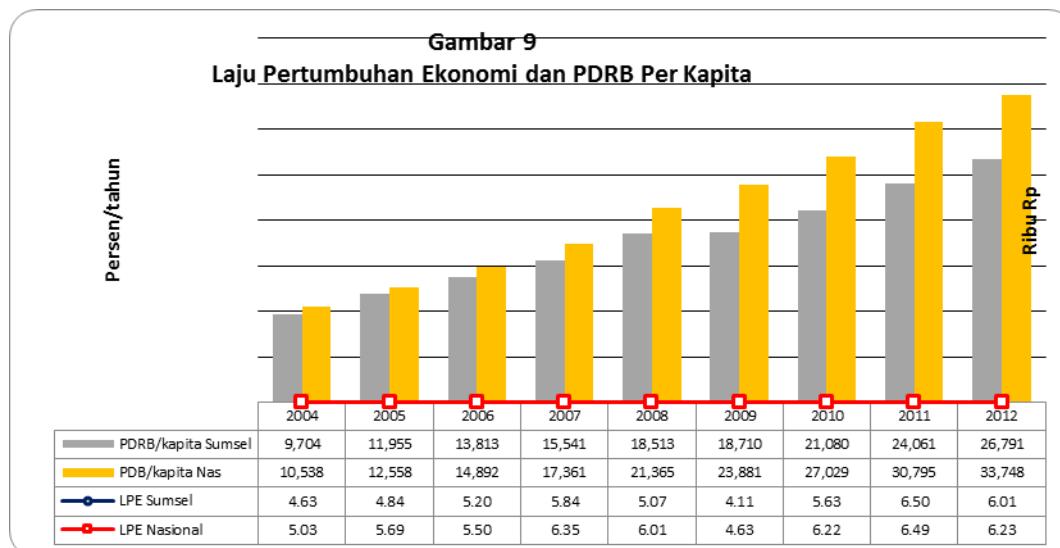
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.2.1.1.1 Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian di Sumatera Selatan tidak terlepas dari perkembangan ekonomi nasional dan dunia. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2008-2012 pertumbuhan ekonomi tanpa migas rata-rata sebesar 6,57 persen per tahun. Sementara pertumbuhan ekonomi rata-rata dengan migas hanya sebesar 5,27 persen. Pola pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa sektor non migas menjadi penggerak utama bagi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2. 4
Laju Pertumbuhan Ekonomi 2004-2012



Seluruh sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif, akan tetapi ada tiga sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang menurun dari tahun

sebelumnya, sektor – sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan antara lain sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami

penurunan pertumbuhan dari 12,3 persen pada tahun 2011 menjadi 11,2 persen di tahun 2012, di sektor bangunan juga mengalami penurunan pertumbuhan, dimana pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 12,8 persen menjadi 8,9 persen di tahun 2012. Begitu juga dengan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan menjadi 0,4 persen pada tahun 2012 dari 2,9 persen di tahun 2011.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi sektoral tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,16 persen, sektor jasa-jasa 8,87 persen, sektor bangunan 8,75 persen, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 7,76 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,22 persen per tahun.

Tabel 2. 16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2011 (%)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1 Pertanian	4,09	3,11	4,42	5,2	5,3	4,42
2 Pertambangan & Penggalian	1,53	1,62	1,21	2,9	0,4	1,53
3 Industri Pengolahan	3,42	2,14	5,76	5,7	6,0	4,60
4 Listrik, Gas, & Air Bersih	5,24	5,09	6,31	7,6	8,5	6,55
5 Bangunan	6,14	7,34	8,75	12,8	8,9	8,79
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	6,87	3,13	6,91	8,0	9,5	6,88
7 Pengangkutan & Komunikasi	13,92	13,76	12,68	12,3	11,2	12,77
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,63	6,85	7,39	8,2	9,0	8,01
9 Jasa-jasa	11,35	9,36	7,38	7,4	7,6	8,62
PDRB DENGAN MIGAS	5,07	4,11	5,43	6,5	6,0	5,42
PDRB TANPA MIGAS	6,31	5,06	6,94	8,0	7,9	6,84
RATA-RATA	6,79	5,82	6,75	7,78	7,38	6,91

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2011, data diolah

Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,0 persen, melambat jika dibanding tahun 2011 yang tumbuh sebesar 6,5 persen. Pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan mengalami perlambatan selama tahun 2012. Perlambatan pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang hanya tumbuh 0,4 persen, hal ini dikarenakan terkontraksinya sub sektor pertambangan migas yang terkontraksi sebesar 0,09 persen. Selanjutnya sektor yang mengalami perlambatan adalah sektor

bangunan dan sektor angkutan dan komunikasi. Perlambatan pertumbuhan sektor bangunan tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya momen SEA GAMES, dimana pada tahun 2011 sektor ini dapat tumbuh tinggi terutama karena adanya momen tersebut. Sedangkan sektor lain pertumbuhannya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Secara berturut-turut tiga sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan dari 2,59 persen tahun 2011 menjadi 0,4 persen di tahun 2012. Sektor bangunan tumbuh dari 12,9 persen pada tahun 2011 menjadi 8,9 persen di tahun 2012. Sektor yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2012 yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu tumbuh sebesar 11,2 persen atau lebih rendah daripada tahun 2011 yang sebesar 12,3 persen.

Tabel 2. 17
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Tahun 2008-2012

Komponen Penggunaan		Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)					Pertumbuhan (persen)
		2008	2009	2010	2011	2012	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	ADHB	80,52	90,36	101,55	115,48	128,36	9,78
	ADHK	34,71	36,85	39,13	41,70	44,41	5,05
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	ADHB	1,45	2,19	1,94	2,13	2,34	10,04
	ADHK	0,67	0,97	0,81	0,82	0,85	4,87
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	ADHB	10,03	13,62	15,76	19,5	22,06	17,07
	ADHK	4,57	5,11	5,58	6,14	6,58	7,56
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	ADHB	29,37	31,45	37,05	44,98	53,69	12,82
	ADHK	13,12	13,83	15,04	16,86	18,87	7,54
Ekspor Barang dan Jasa	ADHB	53,03	46,54	59,77	75,06	81,65	9,02
	ADHK	25,5	22,62	26,71	30,61	31,39	4,24
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	ADHB	40,27	46,21	57,55	74,39	85,74	16,32
	ADHK	17,13	18,64	22,22	27,44	31,66	13,07
PDRB	ADHB	133,66	137,33	157,74	182,39	206,33	9,07
	ADHK	58,07	60,45	63,86	68,01	72,09	4,42

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Sektor pertanian tumbuh 5,3 persen pada tahun 2012, meningkat relatif kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tumbuh 5,2 persen. Sektor industri pengolahan tumbuh dari 5,8 persen pada tahun 2011 menjadi 6,0 persen di tahun 2012. Sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh 8,5 persen pada tahun 2012, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,1 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh dari 8,0 persen di tahun 2011 menjadi 9,5 persen pada tahun 2012 ini. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 9,0 persen pada tahun 2012, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar yang tumbuh sebesar

8,3 persen. Sektor industri pengolahan tumbuh 6,0 persen ditahun 2012, lebih tinggi dibanding tahun 2011 yang tumbuh 5,7 persen. Sektor jasa-jasa tumbuh dari 7,5 persen di tahun 2011 menjadi 7,6 persen di tahun 2012.

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 senilai 206,33 triliun meningkat jika dibandingkan tahun 2011 yang senilai Rp. 182,39. Besaran PDRB tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 128,34 triliun. Komponen penggunaan lainnya meliputi konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 2,34 triliun, pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar 22,06 triliun, pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar Rp. 53,69 triliun, transaksi ekspor barang dan jasa sebesar 81,65 triliun dan impor barang dan jasa sebesar Rp. 85,74 triliun.

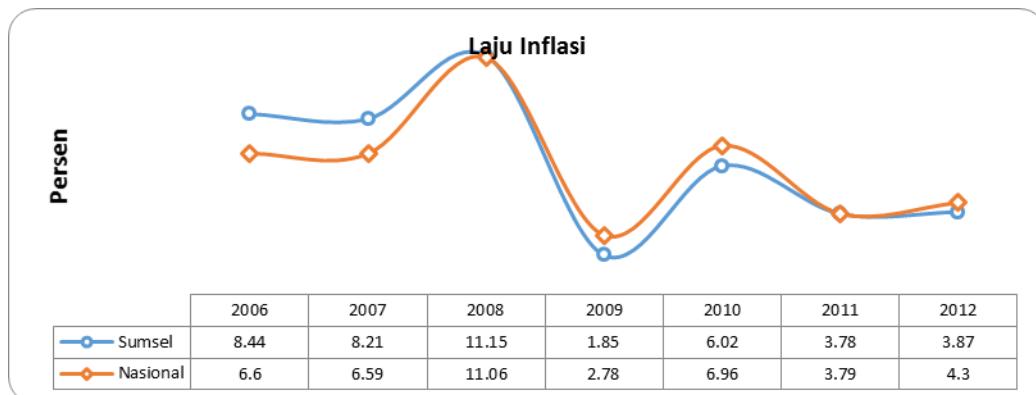
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012 sebesar Rp.72,09 triliun dengan komposisi konsumsi rumah tangga senilai 44,41 triliun, konsumsi lembaga swasta nirlaba senilai Rp. 0,85 triliun, konsumsi pemerintah senilai Rp. 6,58 triliun dan pembentukan modal tetap domestik bruto senilai Rp. 18,87 triliun. Sementara ekspor dan impor masing-masing sebesar Rp. 31,39 triliun dan Rp. 31,66 triliun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan output yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, membaiknya perekonomian Sumatera Selatan dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan yang meningkat tajam di tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2012 tercatat sebesar 6,0 persen, melambat dibandingkan tahun 2011 yang tercatat 6,5 persen. Perlambatan pertumbuhan ini terjadi di semua komponen kecuali konsumsi lembaga nirlaba yang sedikit mengalami ekspansi. Konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah masing-masing melambat dari 6,6 persen dan 10,04 persen di tahun 2011 menjadi 6,5 persen dan 7,2 persen di tahun 2012. Penurunan tingkat pendapatan masyarakat akibat penurunan harga komoditas unggulan Sumatera Selatan serta kebijakan moratorium pegawai menjadi penyebab perlambatan kedua komponen ini. Sementara itu pembentukan modal tetap domestik bruto yang merupakan cerminan investasi juga melambat dari 12,1 persen di tahun 2011 menjadi 11,9 persen pada tahun 2012. Setelah usainya momen SEA GAMES menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto. Dari sisi eksternal komponen ekspor melambat cukup tajam dari 14,6 persen pada tahun 2011 menjadi 2,55 persen pada tahun 2012. Anjloknya nilai ekspor luar negeri Sumatera Selatan berimbas pada melambatnya pencapaian ekspor. Sedangkan nilai impor pada tahun 2011 tumbuh sebesar 23,5 persen dan pada tahun 2012 melambat menjadi 15,4 persen. Lesunya perekonomian dunia pada tahun 2012 berdampak pada perlambatan perdagangan internasional.

2.2.1.1.2 Laju Inflasi

Membaiknya perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya permintaan atas faktor produksi dan membaiknya harga komoditas mampu membuat tingkat inflasi terkendali di angka 3,78 persen di tahun 2011. Akan tetapi terjadi kenaikan yang tidak begitu signifikan pada tahun 2012 menjadi 3,87 persen. Hal ini merupakan salah satu pengaruh dari melemahnya perekonomian Eropa pada pertengahan tahun 2012.

Gambar 2. 5
Laju Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional
Tahun 2006-2012

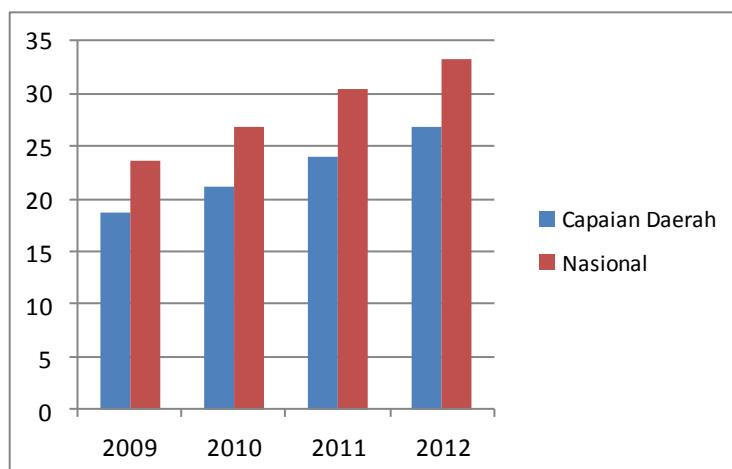


Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan 2012

Selama tahun 2006-2008, inflasi di Sumatera Selatan cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Tetapi pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2009-2012 kondisi tersebut berbalik dimana inflasi Sumatera Selatan menjadi lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Seimbangnya kondisi penawaran dan permintaan barang dan jasa turut mempengaruhi fluktuasi harga bahan pokok di Sumatera Selatan.

2.2.1.1.3 PDRB per Kapita

Gambar 2. 6
Perbandingan PDRB Per Kapita dengan Capaian Nasional

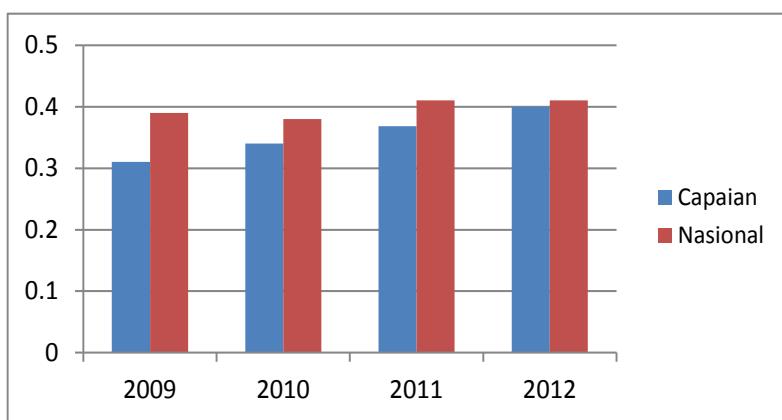


Sumber : EKPD Sumsel, 2013

Berdasarkan indikator outcome di atas, perkembangan PDRB terjadi peningkatan, tahun 2009: Rp.18,71 juta, tahun 2010: Rp.21,08 juta, tahun 2011: Rp.24,061 juta dan tahun 2012: Rp.26,791 juta. Data tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh faktor membaiknya perekonomian, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Sumsel yang terjadi peningkatan setiap tahunnya.

2.2.1.4 Indeks Gini

Gambar 2. 7
Perbandingan Indeks Gini dengan Capaian Nasional



Sumber : EKPD Sumsel, 2013

Capaian indikator indeks gini masih lebih rendah target yang ada dalam dokumen RPJMD. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan pengeluaran ini adalah pengaruh krisis global, fluktuatifnya harga komoditi perkebunan, seperti komoditi karet dan kelapa sawit. Oleh karena sebagian besar

penduduk Sumatera Selatan menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Fluktuatifnya harga komoditi pertanian dan perkebunan akan mempengaruhi pengeluaran penduduk. Peningkatan distribusi pengeluaran penduduk secara umum lebih diakibatkan oleh distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan yang semakin meningkat dibandingkan dengan di perdesaan. Meskipun distribusi pengeluaran penduduk miskin juga mengalami kenaikan. Peningkatan angka Gini Rasio, mengindikasikan adanya ketimpangan pengeluaran penduduk, meskipun relatif tidak terlalu besar dari tahun 2010 ke tahun 2011, yaitu sebesar 0,028.

2.2.1.1.5 Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan telah dilakukan dengan beberapa pendekatan program/kegiatan. Sejak tahun 2011 program penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan dengan program MDGs yang difokuskan pada goal 1 (Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan). Pada tahun 2013 kemiskinan di Sumatera Selatan dilengkapi pula lewat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang diintegrasikan dengan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebagai langkah awal, pada tahun 2013 dilakukan rekonsilidasi dengan menetapkan lokasi Quickwins di beberapa Kab/kota untuk Tahun 2014. Pemerintah Pusat menetapkan 2 Kab/Kota itu sebagai lokasi quickwins, yaitu Kabupaten OKI (Kecamatan Sirah Pulau Padang) dan Kota Palembang (Kecamatan Kertapati). Provinsi Sumatera Selatan menambahkan 2 lagi lokasi quickwins Kab/Kota berdasarkan prioritas dan perangkingan, melengkapi yang telah ditetapkan pusat, yaitu Kabupaten Ogan Ilir (Kecamatan Pemulutan, dan Kabupaten Muara Enim (Kecamatan Tanjung Agung).

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2004-2011 menunjukkan kecenderungan menurun. Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan pada tahun 2004 tercatat sebesar 1.379,30 jiwa (20,92 persen) dan berkurang menjadi 1.057,03 ribu jiwa (13,78 persen) pada tahun 2012. Kondisi ini menempatkan Provinsi Sumatera Selatan termasuk kelompok provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional (12,49 persen). Jika dianalisis persebarannya menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, hingga tahun 2012 63 persen lebih penduduk miskin Sumatera Selatan tinggal tersebar di perdesaan. Namun laju penurunan penduduk miskin di perdesaan cenderung lebih cepat daripada di perkotaan dalam lima tahun terakhir (2005-2010).

Tabel 2. 18

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Penduduk Miskin					
	Kota		Desa		Total	
	Jumlah (Ribu)	Persen	Jumlah (Ribu)	Persen	Jumlah (Ribu)	Persen
2004	455,10	20,13	924,20	21,33	1.379,30	20,92
2005	557,80	21,19	871,20	20,90	1.429,00	21,01
2006	559,50	22,32	847,40	20,14	1.446,90	20,99
2007	545,90	20,30	785,90	18,43	1.331,80	19,15
2008	514,70	18,87	734,90	17,01	1.249,60	17,73
2009	470,03	16,93	697,85	15,87	1.167,87	16,28
2010	471,20	16,73	654,50	14,67	1.125,70	15,47
2011	407,42	14,94	654,45	13,39	1.061,87	13,95
2012	388,65	14,16	668,38	13,57	1.057,03	13,78
2013	375,96	13,28	732,25	14,50	1.108,21	14,06

Sumber: BPS Provinsi Sumsel 2012, BPS Pusat

Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin adalah tertinggi, yaitu sebesar 25,45 persen pada tahun 2008 dan menjadi 18,99 persen pada tahun 2011. Selanjutnya Kabupaten Musi Rawas adalah kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi kedua yaitu sebesar 24,27 persen pada tahun 2008 dan turun menjadi 18,25 persen pada tahun 2011. Persentase kemiskinan tertinggi ketiga ada di Kabupaten Lahat yaitu sebesar 23,21 persen pada tahun 2008, dan turun menjadi 17,92 persen pada tahun 2011. Sementara, tingkat kemiskinan yang terendah tahun 2011 adalah Kabupaten OKU Timur, Kota Pagaralam dan OKU Selatan.

Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah upaya pengurangan kemiskinan harus memperhatikan karakteristik wilayah dan mengutamakan sinergitas kebijakan Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2. 19

Jumlah dan Persentase Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2008-2011

Kab/Kota	Juli 2008		Juli 2009		Juli 2010		Sept 2011		Sept 2012	
	Jumlah (Ribu)	persen								
OKU	38,60	14,64	35,10	13,17	39,90	12,28	38,30	11,58		11,19
OKI	122,70	17,67	114,20	16,17	116,50	15,98	111,90	15,06		14,53
Muara Enim	118,40	17,98	106,40	15,96	104,40	14,51	100,40	13,71		13,21

Kab/Kota	Juli 2008		Juli 2009		Juli 2010		Sept 2011		Sept 2012	
	Jumlah (Ribu)	persen	Jumlah (Ribu)	persen	Jumlah (Ribu)	persen	Jumlah (Ribu)	persen	Jumlah (Ribu)	persen
Lahat	78,70	23,21	71,30	20,98	70,50	19,03	67,70	17,92		17,45
Musi Rawas	120,70	24,27	108,00	21,40	102,00	19,38	98,00	18,25		17,67
MUBA	129,50	25,45	118,90	22,76	113,40	20,06	108,90	18,99		18,29
Banyuasin	122,40	15,38	112,10	13,72	93,00	12,39	89,30	11,66		11,27
OKU Selatan	47,70	14,56	42,10	12,73	36,70	11,53	35,30	10,84		10,49
OKU Timur	69,60	12,12	57,70	9,95	59,90	9,81	57,50	9,23		8,98
Ogan Ilir	67,10	17,78	60,10	15,65	53,30	13,98	51,30	13,18		12,79
Empat Lawang	39,10	18,37	33,70	15,80	32,50	14,74	31,30	13,82		13,36
Palembang	235,30	16,66	211,80	14,75	218,50	15,00	210,00	14,13		13,59
Prabumulih	20,90	15,39	19,10	13,93	21,00	12,94	20,20	12,19		11,71
Pagaralam	11,80	10,23	11,20	9,66	12,40	9,81	11,90	9,24		9,00
Lubuklinggau	31,80	17,36	28,10	15,12	30,90	15,30	29,70	14,43		13,88
SUMATERA SELATAN	1.254,30	17,67	1.130,00	16,28	1.105	14,80	1.074,81	13,95		13,48

Sumber: Hasil Olah Susenas 2012

2.2.1.1.6 Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Penanganan kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaporkan hampir keseluruhan telah ditangani baik untuk kasus Perdata maupun kasus Perdana termasuk pelanggaran terhadap KUHP. Tabel yang terlampir merupakan jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang telah diselesaikan oleh kejaksaaan pada tahun 2012.

Tabel 2. 20
Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan dan
Diselesaikan Menurut Jenisnya di Provinsi Sumatera Selatan (Unit)
Tahun 2007-2011

Jenis Kejahatan dan Pelanggaran	2008		2009		2010		2011		2012	
	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Dilaporkan
KEJAHATAN										
1 Terhadap Keteribitan Umum	99	99	0	0	276	274	247	247		
2 Pembakaran	17	17	0	0	8	6	15	4		
3 Kebakaran	36	38	61	30	41	26	21	9		
4 Mata Uang	16	12	27	24	11	7	8	4		
5 Perkosaan	160	112	201	130	207	100	166	65		
6 Perjudian	247	264	213	200	192	267	302	203		
7 Penculikan	17	17	0	0	24	0	15	0		
8 Pembunuhan	144	91	147	104	121	80	133	45		
9 Penganiayaan Berat	1437	815	1521	922	1727	90	1639	688		
10 Penganiayaan Ringan	293	162	563	306	457	200	498	198		
11 Pencurian Dengan Pemberatan	3707	1690	4208	1647	4354	1581	5194	1270		
12 Pencurian Ringan	294	376	817	455	781	426	403	255		
13 Pencurian Dengan Kekerasan	1204	538	1341	528	1289	365	1308	253		
14 Pemerasan	156	124	156	156	316	210	264	146		
15 Penggelapan	535	319	1057	419	1037	435	1352	446		
16 Penipuan	705	266	1030	419	1019	437	1147	327		
17 Merusak	1	1	19	19	148	26	285	51		
18 Penadahan	3	3	8	8	10	6	22	14		
19 Lain-lain	1422	-	1500	858	1446	892	1597	699		
PELANGGARAN										
1 kuhp	0	-	0	-			-	-	-	-
JUMLAH/TOTA	10513	4944	12869	6225	13464	5428	14616	4925		

Sumber : BPS Sumsel 2012

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1 Pendidikan

2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas memperlihatkan angka yang stabil, yaitu 97,04 persen pada tahun 2008, 97,21 persen pada tahun 2009, 97,36 persen pada tahun 2010, dan 96,65 persen pada tahun 2011. Dilihat dari jenis kelamin perempuan memiliki angka buta huruf lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tahun 2008 angka buta huruf perempuan sebesar 4,26 persen, laki-laki 2,96 persen, tahun 2009 angka buta huruf perempuan sebesar 3,96 persen, laki-laki sebesar 2,79 persen, tahun 2010 angka buta huruf perempuan sebesar 3,49 persen, laki-laki sebesar 2,64 persen, dan pada tahun 2011 angka buta huruf perempuan sebesar 4,82 persen, laki-laki sebesar 3,35 persen. Hal ini menunjukkan perempuan masih sedikit tertinggal dibanding laki-laki dalam membaca dan menulis. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 21

Angka Buta Huruf Menurut Kabupaten/Kota 2005-2011

No	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Ogan Komering Ulu	4,90	2,79	2,32	1,93	1,57	1,57	4,07
2	Ogan Komering Ilir	5,30	5,35	5,35	5,25	4,76	3,44	4,55
3	Muara Enim	1,20	1,20	1,20	1,2	1,19	1,18	3,31
4	Lahat	4,00	3,09	2,80	2,45	2,41	2,22	2,76
5	Musi Rawas	4,50	4,49	3,50	3,5	3,49	3,48	4,12
6	Musi Banyuasin	4,50	4,10	3,50	3,71	3,46	2,99	2,30
7	Banyuasin	6,50	4,07	4,07	3,92	3,76	3,54	3,50
8	OKU Selatan	6,30	2,51	2,51	2,51	2,2	2,10	2,90
9	OKU Timur	8,80	5,53	5,37	5,37	5,33	5,27	5,15
10	Ogan Ilir	5,80	2,71	2,76	2,68	2,53	2,38	2,76
11	Empat Lawang	-	4,20	3,25	2,98	2,72	2,22	2,66
12	Kota Palembang	2,30	1,37	1,37	1,37	1,31	1,29	2,66
13	Kota Prabumulih	2,30	2,30	2,10	1,71	1,34	1,34	3,24
14	Kota Pagar Alam	2,80	2,62	2,18	1,79	1,76	1,50	2,40
15	Kota Lubuk Linggau	5,00	1,97	1,97	1,97	1,67	1,60	2,07
Sumatera Selatan		4,10	3,41	3,34	2,95	2,79	2,64	3,35
Nasional		9,09	8,55	8,13	7,81	7,42	7,09	7,19

2.2.2.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 baru mencapai 7,82 tahun, berarti rata-rata baru sampai taraf pendidikan SMP pada kelas dua.

Untuk tingkat kabupaten/kota rata-rata lama sekolah tertinggi tercatat di Kota Palembang yang mencapai 9,96 tahun, dengan penduduk laki-laki rata-rata 10,24 tahun dan perempuan rata-rata 9,68 tahun. Ini berarti penduduk laki-laki rata-rata sudah mengenyam pendidikan sampai SLTA kelas dua, sedangkan penduduk perempuan secara rata-rata baru menamatkan tingkat SLTA kelas satu.

Tabel 2. 22
Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2012 (dalam tahun)

No.	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1	Ogan Komering Ulu	7,57	7,71	8,38	8,40	8,51
2	Ogan Komering Ilir	6,70	6,73	6,74	6,75	6,76
3	Muara Enim	7,30	7,35	7,49	7,52	7,53
4	Lahat	7,59	7,72	8,28	8,31	8,37
5	Musi Rawas	7,00	7,05	7,09	7,11	7,14
6	Musi Banyuasin	7,00	7,05	7,51	7,61	7,63
7	Banyuasin	7,00	7,01	7,02	7,06	7,08
8	OKU Selatan	7,10	7,15	7,45	7,47	7,48
9	OKU Timur	6,80	6,87	6,91	7,29	7,30
10	Ogan Ilir	7,46	7,52	7,53	7,56	7,57
11	Empat Lawang	6,88	6,94	7,23	7,40	7,69
12	Kota Palembang	9,90	9,95	9,96	9,98	10,30
13	Kota Prabumulih	8,88	9,00	9,16	9,25	9,29
14	Kota Pagar Alam	8,42	8,54	8,95	8,97	9,01
15	Kota Lubuk Linggau	8,98	9,11	9,24	9,36	9,37
Sumatera Selatan		7,60	7,66	7,82	7,84	8,00

Rata-rata lama sekolah terpendek terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu baru 6,76 tahun atau setara tamat Sekolah Dasar, dimana rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki 6,92 tahun dan perempuan 6,55 tahun. Demikian juga di Kabupaten Banyuasin dan Musi Rawas, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki setara kelas 1 SLTP dan perempuan hanya setara kelas 6 SD. Oleh sebab itu, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk di daerah perdesaan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas.

2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar

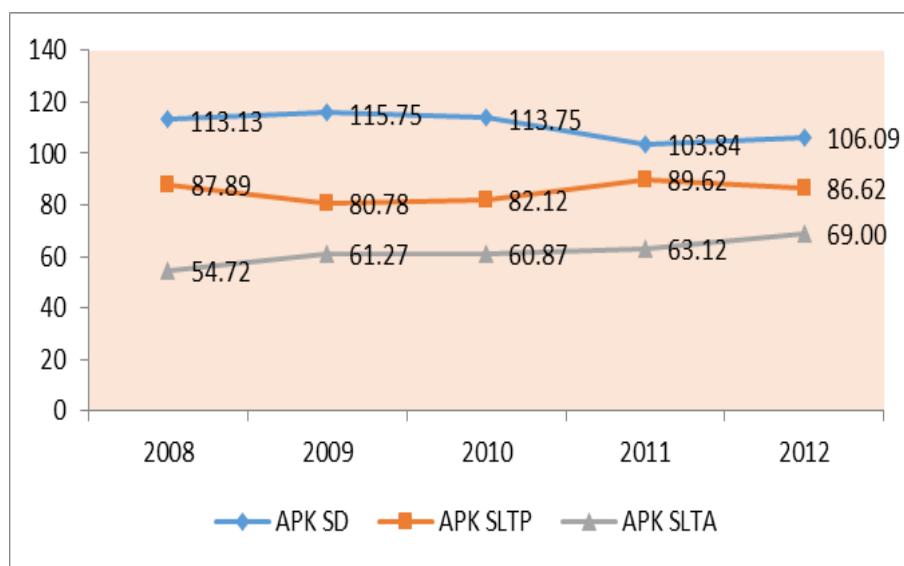
APK bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Dilihat dari gambaran grafik

dibawah, Angka Partisipasi Kasar (APK) di semua jenjang pendidikan di Sumatera Selatan bergerak fluktuatif, namun telah menuju ke arah yang lebih baik. APK SD/MI di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 menunjukkan persentase 113,13%, meningkat menjadi 115,75% pada tahun 2009 dan menurun menjadi 113,75% pada tahun 2010 dan menurun kembali pada tahun 2011 menjadi 103,84% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 106,09% pada tahun 2012.

Artinya penduduk di Sumatera Selatan yang bersekolah di SD dari tahun 2008-2012 pada umumnya masih terdapat siswa yang sekolah di SD yang usianya di atas usia sekolah SD (di atas 7-12). Untuk APK tingkat SMP selama periode 2009-2012 pada umumnya menunjukkan *trend* meningkat, hanya pada tahun 2009 dan 2012 yang mengalami penurunan. Artinya pada tingkat SMP masih banyak anak usia sekolah SMP tapi tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke SMP. Sementara untuk tingkat SMA menunjukkan trend meningkat selama periode 2008-2013, kecuali pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa anak usia SMA banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke SMA.

Gambar 2. 8

Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD, SLTP dan SLTA



Tabel 2. 23
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tingkat SD, SLTP dan SLTA
Tahun 2008-2012

No	Wilayah	2008			2009			2010			2011			2012		
		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
	Kab/Kota															
1	Ogan Komering Ulu				117,45	75,95	77,39	111,83	78,37	69,17	106,46	81,43	79,82	108,56	79,53	73,15
2	Ogan Komering Ilir				108,24	62,86	53,95	117,97	75,33	33,78	101,76	75,24	36,71	107,53	70,60	48,26
3	Muara Enim				120,88	70,94	65,04	114,73	80,75	55,76	102,87	94,77	54,73	110,43	77,79	66,70
4	Lahat				122,20	90,71	72,96	113,97	88,44	73,68	106,71	93,04	88,53	112,18	80,32	90,06
5	Musi Rawas				106,05	94,42	35,73	112,72	72,36	38,07	107,15	88,10	32,42	107,80	87,14	73,22
6	Musi Banyuasin				112,49	103,60	49,76	115,30	81,04	39,35	110,67	80,34	50,03	105,66	81,58	63,72
7	Banyuasin				110,33	86,48	41,84	108,67	87,34	51,68	100,87	83,56	53,39	104,14	82,41	59,34
8	OKU Selatan				117,97	82,53	37,74	111,96	78,00	54,25	102,15	96,58	68,00	106,33	87,26	70,56
9	OKU Timur				115,32	99,57	44,73	108,83	78,38	68,68	100,36	101,43	67,61	102,42	92,42	70,82
10	Ogan Ilir				121,66	76,42	60,42	116,11	78,10	51,41	101,18	84,26	60,27	108,67	71,63	59,53
11	Empat Lawang				119,33	94,72	55,01	124,00	95,39	61,42	108,22	92,66	65,49	109,22	97,10	84,96
12	Kota Palembang				120,61	71,42	82,84	114,14	89,69	87,87	102,13	97,19	82,28	102,21	105,86	73,30
13	Kota Prabumulih				119,26	78,80	85,97	116,59	80,30	64,18	109,80	86,73	87,45	111,77	77,25	100,62
14	Kota Pagar Alam				122,24	77,03	103,11	116,65	85,46	80,41	102,29	105,29	77,37	103,29	105,90	81,67
15	Kota Lubuk Linggau				116,99	70,50	83,26	111,42	81,46	71,70	107,44	86,72	88,61	98,10	99,91	77,64
	Sumatera Selatan	113,13	87,89	54,72	115,75	80,78	61,27	113,75	82,12	60,87	103,84	89,62	63,12	106,09	86,62	69,00

Sumber : BPS-Susenas 2012 (data diolah)

2.2.2.1.4 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, SLTA maupun SMK secara garis besar mengalami peningkatan pada tahun 2012 untuk tamatan tingkat pendidikan SD pada tahun ajaran 2007/2008 ialah 128.792 murid dan mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 138.525 murid. Untuk tingkat pendidikan SLTP pada tahun ajaran 2007/2008 berjumlah 83.472 murid dan mengalami peningkatan menjadi 97.983 murid pada tahun ajaran 2011/2012. Begitu pula dengan tingkat pendidikan SLTA dan SMK dimana untuk tahun ajaran 2007/2008 SLTA jumlah tamatan sebanyak 47.874 dan SMK berjumlah 13.649 mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2011/2012 untuk SLTA tamatan berjumlah 55.857 murid dan SMK berjumlah 20.916 murid.

Tabel 2. 24

Jumlah Murid Yang Tamat Pendidikan Tingkat SD, SLTP, SMA dan SMK
Tahun Ajaran 2007-2012

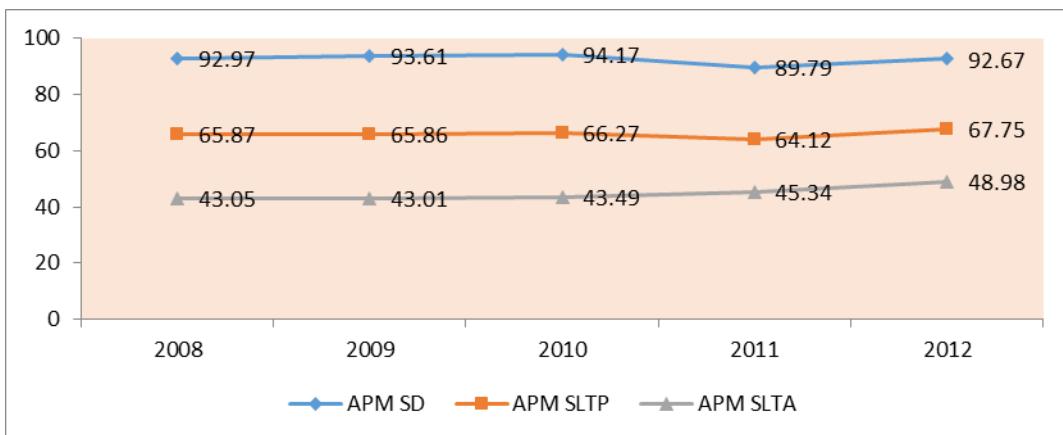
Tingkat Pendidikan	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
SD	128.792	156.781	136.462	125.054	138.525
SLTP	83.742	94.367	74.493	100.012	97.983
SLTA	47.874	57.507	46.492	52.772	55.857
SMK	13.649	17.909	15.596	18.548	20.916

Sumber : BPS Sumsel 2012 (data diolah)

2.2.2.1.5 Angka Partisipasi Murni

Gambar 2. 9

Angka Partisipasi Murni Tahun 2008-2012



APM bermanfaat untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Dari trend grafik diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan di Sumatera Selatan cederung fluktuatif. APM SD/MI dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan, dari 92,97 pada tahun 2008 menjadi 92,67 pada tahun 2012. APM SMP/MTs mengalami penurunan dari 65,07 pada tahun 2008 menjadi 67,75 pada tahun 2012. Sementara untuk tingkat SMA selama periode tersebut menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa dari semua tingkat pendidikan di Sumatera Selatan masih banyak anak sekolah yang tidak tepat waktunya.

2.2.2.1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan SD di setiap Kabupaten/Kota sebagian besar sudah diatas rata-rata APM Provinsi Sumatera Selatan, anak sekolah yang tidak tepat waktunya atau dibawah rata-rata Provinsi tersebar di Kota dan diatas rata-rata provinsi tersebar di beberapa Kabupaten kecuali Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 2. 25

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tingkat SD/MI 2008-2012

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
1	Ogan Komering Ulu	96,35	95,68	91,58	94,15	
2	Ogan Komering Ilir	94,91	95,02	90,49	94,29	
3	Muara Enim	95,78	95,58	90,24	94,20	
4	Lahat	95,78	95,65	87,62	93,02	
5	Musi Rawas	90,45	95,62	93,15	94,42	
6	Musi Banyuasin	89,87	96,42	94,04	96,75	
7	Banyuasin	89,25	92,92	88,70	93,29	
8	OKU Selatan	96,28	94,97	91,29	94,42	
9	OKU Timur	95,25	94,70	89,38	93,81	
10	Ogan Ilir	92,64	91,78	89,10	91,97	
11	Empat Lawang	94,68	96,92	93,85	94,30	
12	Kota Palembang	94,24	90,73	86,45	87,62	
13	Kota Prabumulih	96,13	96,63	88,30	91,46	
14	Kota Pagar Alam	96,08	96,41	85,96	89,43	
15	Kota Lubuk Linggau	95,64	92,31	89,51	87,75	
	Sumatera Selatan	92,97	93,61	94,17	89,79	92,67

Sumber : BPS-Susenas 2012 (data diolah)

2.2.2.1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs

Berbeda dengan Angka Partisipasi Murni tingkat pendidikan SLTP dimana untuk seluruh kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah diatas rata-rata provinsi dan beberapa Kabupaten. APM yang paling rendah terdapat di Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 2. 26

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tingkat SLTP.MTs 2008-2012

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
	Kab/Kota					
1	Ogan Komering Ulu		61,90	67,97	62,63	62,55
2	Ogan Komering Ilir		54,03	60,67	55,26	61,90
3	Muara Enim		60,70	68,13	70,77	65,25
4	Lahat		80,03	75,89	65,39	67,60
5	Musi Rawas		77,15	59,90	63,35	72,91
6	Musi Banyuasin		75,59	69,11	60,44	71,95
7	Banyuasin		71,37	66,98	59,35	65,40
8	OKU Selatan		68,28	67,36	71,41	70,38
9	OKU Timur		79,50	66,67	70,84	77,09
10	Ogan Ilir		56,26	61,03	62,12	52,48
11	Empat Lawang		75,43	77,85	73,48	78,91
12	Kota Palembang		57,65	64,81	64,75	67,84
13	Kota Prabumulih		66,69	70,33	62,44	62,11
14	Kota Pagar Alam		69,27	74,27	66,46	76,43
15	Kota Lubuk Linggau		61,59	64,58	59,79	70,68
Sumatera Selatan		65,87	65,86	66,27	64,12	67,75

Sumber : BPS-Susenas 2012 (data diolah)

2.2.2.1.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/AMK/MA

Peningkatan Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Selatan untuk tingkat pendidikan SLTA mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun jika dilihat dari nilai per Kabupaten/Kota terdapat 4 Kabupaten yang nilainya dibawah rata-rata Provinsi seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 2. 27

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tingkat SLTA/SMK/MA 2008-2012

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
	Kab/Kota					
1	Ogan Komering Ulu		51,08	47,21	58,62	55,51
2	Ogan Komering Ilir		34,57	25,30	25,73	33,46
3	Muara Enim		36,85	38,16	39,83	43,07
4	Lahat		5,74	61,47	62,78	60,49
5	Musi Rawas		27,87	26,05	25,41	51,49
6	Musi Banyuasin		41,32	33,17	40,1	48,45
7	Banyuasin		32,29	38,93	34,36	45,34
8	OKU Selatan		33,21	41,46	48,01	50,47
9	OKU Timur		42,62	54,77	48,99	53,51
10	Ogan Ilir		35,48	30,98	42,89	41,50
11	Empat Lawang		44,16	51,43	53,95	62,36
12	Kota Palembang		55,67	55,65	57,8	50,98
13	Kota Prabumulih		58,35	42,94	63,74	66,22
14	Kota Pagar Alam		53,17	55,89	54,61	57,83
15	Kota Lubuk Linggau		45,86	52,34	60,5	54,88
	Sumatera Selatan	43,05	43,01	43,49	45,34	48,98

Sumber : BPS-Susenas 2012 (data diolah)

2.2.2.2 Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan akselerasi peningkatan program pembangunan kesehatan dan program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan lain sebagainya. Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki angka usia harapan hidup dibawah rata-rata Provinsi yakni 70,10. Angka usia harapan hidup diatas rata-rata Provinsi diantaranya Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan kota Pagaralam.

Tabel 2. 28
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2008-2012

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
	Kab/Kota					
1	Ogan Komering Ulu	69,20	69,30	69,40	69,50	69,61
2	Ogan Komering Ilir	67,56	67,79	68,02	68,25	68,48
3	Muara Enim	67,28	67,47	67,66	67,85	68,03
4	Lahat	67,56	67,90	68,23	68,57	68,90
5	Musi Rawas	64,29	64,44	64,80	64,95	65,10
6	Musi Banyuasin	69,33	69,59	69,86	70,12	70,39
7	Banyuasin	67,05	67,23	67,41	67,59	67,77
8	OKU Selatan	69,24	69,30	69,37	69,44	69,51
9	OKU Timur	68,23	68,29	68,36	68,42	68,48
10	Ogan Ilir	65,68	65,98	66,27	66,57	66,86
11	Empat Lawang	65,28	65,42	65,50	65,64	65,78
12	Kota Palembang	70,66	70,90	71,13	71,37	71,60
13	Kota Prabumulih	71,10	71,51	71,91	72,32	72,73
14	Kota Pagar Alam	69,74	69,95	70,17	70,39	70,61
15	Kota Lubuk Linggau	65,39	65,54	65,69	65,84	65,99
Sumatera Selatan		69,20	69,40	69,60	69,80	70,10

Sumber: BPS-Susenas 2012 (data diolah)

2.2.2.2 Angka Kematian Bayi

Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengatasi kemiskinan, dan membangun pondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan cenderung membaik yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kesehatan. Angka kematian bayi dari 34,80 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menurun menjadi 31,50 pada tahun 2008, kemudian menurun lagi menjadi 24,40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2002/2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDPTKI 2003), menurun menjadi 150 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009.

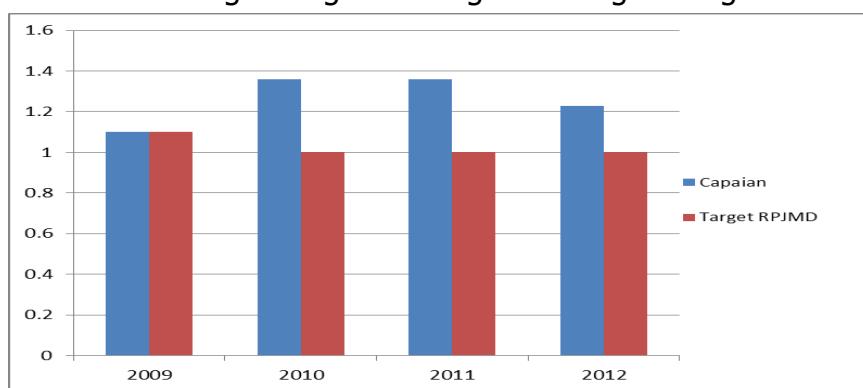
Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk terjadi penurunan dari 34,4 persen pada tahun 1999 menjadi 28 persen pada tahun 2005, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas) tahun 2007, secara umum prevalensi gizi buruk di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah 6,5 persen dan gizi kurang 11,7 persen, balita dengan gizi buruk menurun dari 1,3 persen pada tahun 2003 menjadi 0,04 persen pada tahun 2008, dan persentase kecamatan yang bebas rawan gizi meningkat dari 69,29 persen

pada tahun 2004 menjadi 70,3 persen pada tahun 2008. Berbagai kemajuan tersebut mendorong peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dari 67,9 pada tahun 2003 menjadi 69,40 tahun pada tahun 2009, pada tahun 2010 menjadi 69,60 tahun. Hal ini menunjukkan perbaikan mutu sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Selatan.

2.2.2.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk

Gambar 2. 10

Perbandingan Angka Kurang Gizi Dengan Target RPJMD



Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan antara capaian indikator angka kurang gizi dengan target yang ada dalam dokumen RPJMD, maka capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan target. Hal ini disebabkan Pola penyakit dominan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat adalah penyakit khas daerah tropis yaitu penyakit infeksi. Meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan warga masyarakat dalam hidup sehat. Salah satu penyebab anak kurang gizi adalah penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi.

Tabel 2. 29

Angka Kurang Gizi pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2012

Indikator Outcome	Satuan	2009	2010	2011	2012
Angka kurang gizi (gizi kurang dan Buruk) pada Balita	%	1,1	1,36	1,36	1,23

Sumber: EKPD 2013

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

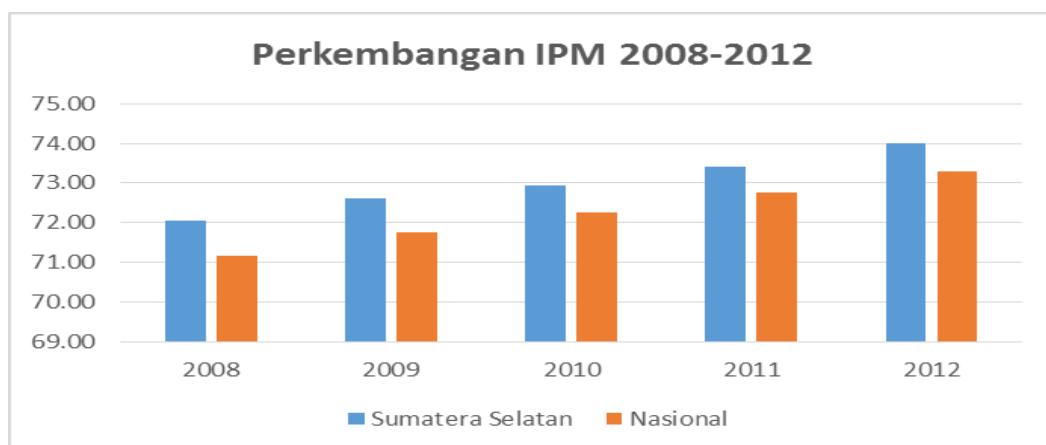
Aspek Kesejahteraan Masyarakat, secara umum dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), serta suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

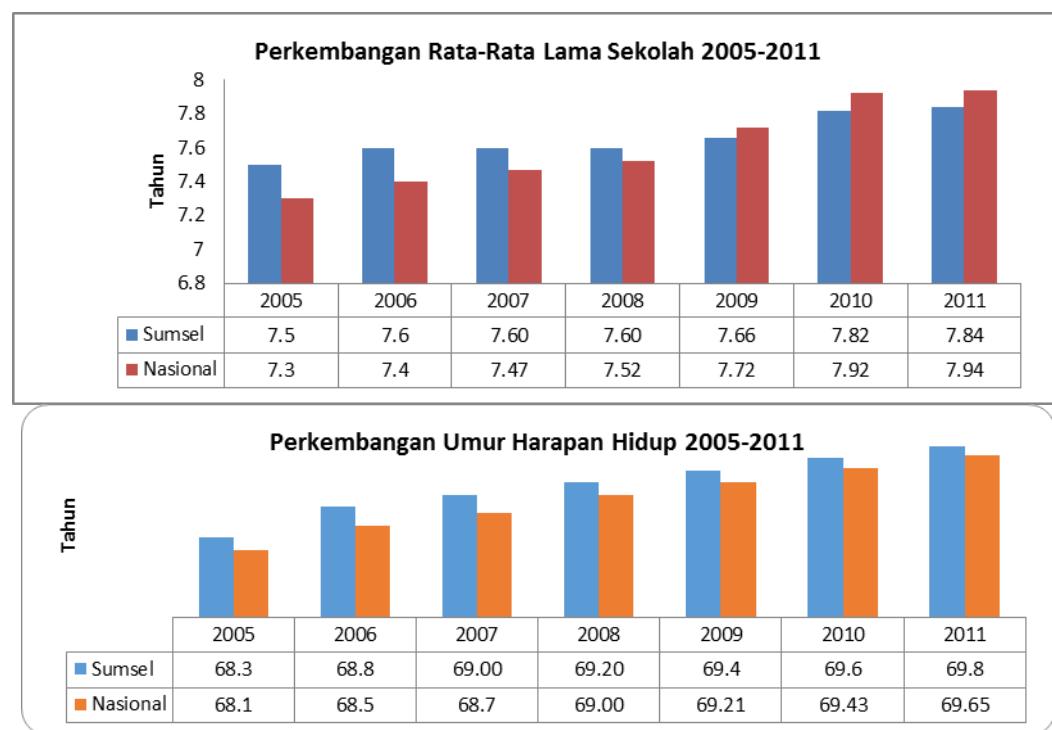
IPM Provinsi Sumatera Selatan meningkat selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan selalu lebih tinggi di atas nilai IPM nasional. Pada tahun 2012 mencapai 73,99 lebih tinggi dari nilai IPM nasional 73,29. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sumatera Selatan secara rata-rata nasional lebih baik. Dengan membandingkan nilai IPM provinsi lainnya nilai IPM Sumatera Selatan berada pada posisi menengah. Nilai IPM lebih tinggi dari rata-rata nasional, tetapi belum termasuk peringkat tinggi.

Peningkatan nilai IPM ditentukan oleh perbaikan nilai komponen pemebntuk IPM. Angka Harapan Hidup meningkat dari 67,7 tahun pada tahun 2004 menjadi 69,80 tahun pada tahun 2011 menunjukkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah juga meningkat sebagai gambaran perbaikan derajat pendidikan masyarakat. Daya beli masyarakat Sumatera Selatan juga meningkat sebagai wujud perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat.

Gambar 2. 11

IPM dan Komponen, Provinsi Sumatera Selatan 2008 – 2011





Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2010

IPM tertinggi adalah Kota Palembang dengan nilai IPM sebesar 77,38, disusul oleh Kota Prabumulih dengan nilai IPM sebesar 75,45. Sedangkan IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas dengan nilai IPM sebesar 69,01, disusul oleh Kabupaten Empat Lawang dengan nilai IPM sebesar 69,69 (Tabel 2.30).

Tabel 2.30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2008-2012

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
1	OKU	71,92	72,36	73,14	73,59	74,01
2	OKI	69,64	70,06	70,61	71,07	71,45
3	Muara Enim	69,91	70,38	70,81	71,26	71,65
4	Lahat	69,99	70,53	71,30	71,83	72,29
5	Musi Rawas	66,77	67,33	67,89	68,38	69,01
6	Musi Banyuasin	70,54	71,13	71,81	72,44	73,15
7	Banyuasin	69,08	69,45	69,78	70,28	70,70
8	OKU Selatan	70,66	71,02	71,42	71,82	72,29
9	OKU Timur	68,88	69,39	69,68	70,34	70,72
10	Ogan Ilir	68,67	69,17	69,51	70,09	70,52
11	Empat Lawang	67,68	68,15	68,61	69,08	69,69
12	Kota Palembang	75,49	75,83	76,23	76,69	77,38

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
13	Kota Prabumulih	73,20	73,69	74,27	74,94	75,45
14	Kota Pagar Alam	72,16	72,48	73,19	73,70	74,15
15	Kota Lubuk Linggau	69,69	70,18	70,56	71,10	71,46
Sumatera Selatan		72,05	72,61	72,95	73,42	73,99
Peringkat Sumsel		12	10	10	10	10
Nasional		71,17	71,76	72,27	72,77	73,29
Peringkat Nasional			111	108	124	125

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2012

2.2.2.3 Pertanahan

2.2.2.3.1 Luas Tanah Yang Bersertifikat

Tabel 2. 31

Persentase Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2013

No	Tahun	Tanah Terdaftar		Tanah Belum Terdaftar		% Terdaftar Thdp Lahan
		Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	
1	S/D 2008	992,862	1,913,147	3,883,167	3,457,203	
2	2009	39,250	99,975	3,843,917	3,357,228	
3	2010	11,305	20,298	3,832,612	3,336,930	
4	2011	62,032	146,961	3,770,580	3,189,970	
5	2012	20,472	148,097	3,750,108	3,041,872	
6	2013	71,057	1,111,385	3,679,051	1,930,487	
Jumlah		1,196,978	3,439,864			64.05

Sumber: Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan

Ket : Lahan yang disertifikasi merupakan bukan kawasan hutan

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2008-2012 secara garis besar mengalami peningkatan baik dari angkatan kerja laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2. 32

Jumlah Angkatan Kerja Menurut jenis Kelamin
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012

Jenis Kelamin	2008	2009	2010	2011	2012
Laki-Laki	2.134.134	2.152.515	2.238.638	2.313.769	2.350.312
Perempuan	1.337.878	1.307.850	1.426.406	1.456.904	1.396.061
Total	3.472.012	3.460.365	3.665.044	3.770.673	3.746.373

Sumber: BPS Sumsel 2012 (data diolah)

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Berbagai kegiatan seni budaya dan kejuaraan olah raga baik skala nasional maupun internasional seperti PON, SEA Games maupun Islamic Solidarity Games (ISG) telah dilaksanakan di Sumatera Selatan. Keberhasilan berbagai kegiatan seni dan budaya, serta kejuaraan olah raga mendorong berkembangnya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Berbagai prasarana dan sarana seni dan budaya, dan olah raga belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu kawasan Jakabaring sebagai pusat kegiatan olahraga berstandar internasional belum dikembangkan sebagai wisata olah raga dan belum dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan keolahragaan bagi siswa. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah perlu adanya terobosan pendayagunaan kawasan Jakabaring.

Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mengembangkan pusat-pusat seni dan budaya, menggalakkan festival seni dan budaya berskala nasional dan internasional, serta mengembangkan manajemen olahraga yang menggabungkan kegiatan promosi, ekonomi dan prestasi olahraga.

2.2.4. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/676/SJ tanggal 7 Maret 2011 perihal Percepatan Penerapan SPM di Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tindaklanjut dengan mengeluarkan 9 (sembilan) Peraturan Gubernur pada tahun 2012, yaitu :

1. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.
2. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

3. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Adapun hasil dari pelaksanaan SPM tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 33

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
Provinsi Sumatera Selatan

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	BIDANG URUSAN SOSIAL					
	A. Pelaksanaan Program/Kegiatan Sosial :					
	1 Persentase (%) PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	n.a	n.a	15,13	24,19	47,32
	2 Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan Standar Operasional Pelayanan Kesejahteraan Sosial	n.a	n.a	100	100	100
	B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial :					
	1 Persentase (%) Panti Sosial Provinsi yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	n.a	n.a	100	100	100
	2 Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Luar Panti	n.a	n.a	3,52	3,24	3,20
	C. Penanggulangan Korban Bencana :					
	1 Presentase (%) kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	n.a	n.a	100	100	100
	2 Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	n.a	n.a	100	100	100
	D. Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Lanjut Usia tidak Potensial :					
	3 Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	n.a	n.a	13,33	13,33	13,33
2	LINGKUNGAN HIDUP					
	A. Jenis Pelayanan Informasi Status Mutu Air :					
	1 Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	n.a	n.a	100	100	89
	B. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien :					
	1 Prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya	n.a	n.a	100	100	100
	C. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup :					

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian				
		2008	2009	2010	2011	2012
	1 Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	n.a	n.a	100	100	100
3	PERUMAHAN RAKYAT					
	A. Rumah Layak Huni dan Terjangkau:					
	1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	94
	2 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	48,7
	B. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum :					
	3 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. (%)	n.a	n.a	n.a	0,52	0,29
4	PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN					
	A. Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak :					
	1 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu. (%)	n.a	n.a	100	100	100
	2 Cakupan Ketersediaan Petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki Kemampuan untuk Menindaklanjuti Pengaduan/Laporan Masyarakat. (%)	n.a	n.a	100	100	100
	B. Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan :					
	1 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS. (%)	n.a	n.a	100	100	100
	2 Cakupan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A). (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	10
	3 Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang Melaksanakan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	25
	4 Cakupan Tenaga Kesehatan Terlatih tentang Tatalaksana Kasus Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) di Puskesmas. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	5 Cakupan Tenaga Kesehatan Terlatih tentang Tatalaksana Kasus Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	80
	C. Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan :					
	1 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi	n.a	n.a	n.a	n.a	95,1

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu. (%)					
2	Cakupan Petugas Rehabilitasi Sosial yang Terlatih. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	53,3
3	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100
4	Cakupan Petugas Bimbingan Rohani Terlatih dalam Melakukan Bimbingan Rohani. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100
D. Penegakan dan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan :						
1	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. (%)	n.a	n.a	100	100	100
2	Cakupan Penyelesaian Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Tingkat Kepolisian. (%)	n.a	n.a	80	88,5	n.a
3	Cakupan Ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta. (%)	n.a	n.a	100	100	100
4	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana di UPPA. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100
5	Cakupan Ketersediaan Polisi yang Terlatih dalam Memberikan Layanan yang Sensitif Gender. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100
6	Cakupan Ketersediaan Jaksa yang Terlatih dalam Penuntutan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100
7	Cakupan Ketersediaan Hakim yang Terlatih dalam Menangani Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	19,2
8	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100
9	Cakupan Ketersediaan Petugas Pendamping Hukum atau Advokat yang mempunyai Kemampuan Pendampingan pada Saksi dan/atau Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100
E. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan :						
1	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100
2	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	100
3	Cakupan Ketersediaan Petugas Terlatih untuk Melakukan Reintegrasi Sosial. (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	53,3
5 KETENAGAKERJAAN						
A. Pelayanan Pelatihan Kerja :						
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. (%)	n.a	n.a	80	38,1	94,88

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian				
		2008	2009	2010	2011	2012
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. (%)	n.a	n.a	80	80	90
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. (%)	n.a	n.a	73,85	96	87,5
<i>B. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja:</i>						
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. (%)	n.a	n.a	24,9	37,53	65,57
<i>C. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :</i>						
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama. (%)	n.a	n.a	56,25	83,87	40
<i>D. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek :</i>						
1	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. (%)	n.a	n.a	100	62,13	23,21
<i>E. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan :</i>						
1	Besaran Pemeriksaan Perusahaan. (%)	n.a	n.a	-	100	100
2	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan. (%)	n.a	n.a	100	100	100
6 KETAHANAN PANGAN						
<i>A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan :</i>						
1	Penguatan Cadangan Pangan. (%)	n.a	n.a	63,42	63,75	73,03
<i>B. Distribusi dan Akses Pangan :</i>						
1	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah. (%)	n.a	n.a	100,46	100,08	95,30
<i>C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan :</i>						
1	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. (%)	n.a	n.a	50	72,92	88,89
<i>D. Penanganan Rawan Pangan :</i>						
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan. (%)	n.a	n.a	31,94	41,67	43,06
7 KESENIAN						
<i>A. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian</i>						
1	Cakupan Kajian Seni. (%)	n.a	n.a	93	120	107
2	Cakupan Fasilitasi Seni. (%)	n.a	n.a	286	286	286
3	Cakupan Gelar Seni. (%)	n.a	n.a	133	133	133
4	Misi Kesenian. (%)	n.a	n.a	100	100	100

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian				
		2008	2009	2010	2011	2012
5	Cakupan Sumber Daya Kesenian. (%)	n.a	n.a	300	300	300
6	Cakupan Tempat. (%)	n.a	n.a	100	100	100
7	Cakupan Organisasi. (%)	n.a	n.a	196	196	196
8	PERHUBUNGAN					
	A. Angkutan Jalan :					
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi. (%)	n.a	n.a	93,92	96,90	89,50
2	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek. (%)	n.a	n.a	53,33	53,33	53,33
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi. (%)	n.a	n.a	78,75	80,24	84,23
4	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). (%)	n.a	n.a	93,92	96,90	89,50
5	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan. (%)	n.a	n.a	65,00	75,00	85,00
	B. Angkutan Sungai dan Danau :					
1	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari. (%)	n.a	n.a	98,60	57,85	62,10
2	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari. (%)	n.a	n.a	45,50	45,50	45,50
3	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. (%)	n.a	n.a	97,95	95,07	96,62
4	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau. (%)	n.a	n.a	97,95	95,07	96,62
	C. Angkutan Penyeberangan :					
1	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	n.a	n.a	46,67	53,33	53,33

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian				
		2008	2009	2010	2011	2012
	yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan					
2	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	n.a	n.a	66,67	66,67	66,67
3	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	n.a	n.a	94,14	90,00	90,00
4	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.	n.a	n.a	93,86	90,00	90,00
Angkutan Laut :						
1	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	n.a	n.a	100	100	100
2	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	n.a	n.a	45,00	45,50	45,50
3	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	n.a	n.a	92,86	90,00	90,00
4	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	n.a	n.a	100	100	100
9 PENANAMAN MODAL						
A. Kebijakan Penanaman Modal :						
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan. (sektor/bidang usaha/tahun)	n.a	n.a	3	0	3
B. Kerjasama Penanaman Modal :						
1	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing. (sektor/bidang usaha/tahun)	n.a	n.a	0	0	0
2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat	n.a	n.a	1	1	1

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Provinsi/Nasional. (sektor/bidang usaha/tahun)					
	C. Promosi Penanaman Modal :					
1	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi. (sektor/bidang usaha/tahun)	n.a	n.a	4	3	4
2	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten. (sektor/bidang usaha/tahun)	n.a	n.a	6	5	6
	D. Layanan Penanaman Modal :					
1	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi. (sektor/bidang usaha/tahun)	n.a	n.a	80	80	80
2	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. (sektor/bidang usaha/tahun)	n.a	n.a	0	0	0
	E. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :					
	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha. (kali/th)	n.a	n.a	1	1	1
	F. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal :					
	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (%)	n.a	n.a	75	75	75
	G. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal :					
	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. (kali/th)	n.a	n.a	1	1	1

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

2.3.1.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Capaian bidang pendidikan di Sumatera Selatan telah menunjukkan hasil yang cukup berarti. Sebagai hasil dari Program Sekolah Gratis di Sumatera Selatan, maka buta huruf masyarakat terus menurun; anak putus sekolah SD, SMP dan SMA terus menurun; serta partisipasi anak usia sekolah SD, SMP dan SMA terus meningkat.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren meningkat 2 tahun terakhir, tetapi menurun sedikit untuk SD pada Tahun 2011. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD tahun 2011 sebesar 89,79 persen, SMP sebesar 64,12 persen, SMA sebesar 45,34 persen, angka ini hampir menyamai nasional dimana APM Nasional SD 91,03 persen, SMP 68,12 persen dan SMA 47,97 persen.

Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2011, usia 7-12 tahun sebesar 97,91 persen, usia 13-15 tahun 85,32 persen, usia 16-18 tahun sebesar 55,93 persen, usia 19-24 tahun sebesar 12,25 persen, sedangkan nasional usia 7-12 tahun sebesar 97,98 persen, usia 13-15 tahun 87,78 persen, usia 16-18 tahun sebesar 57,85 persen, usia 19-24 tahun sebesar 14,26 persen.

Persentase Angka Partikasi Kasar (APK) tahun 2011, SD sebesar 103,84 persen, SMP sebesar 89,62 persen dan SMA sebesar 63,12 persen. Angka ini tidak berbeda jauh dengan angka nasional yaitu SD sebesar 102,58 persen, SMP sebesar 89,57 persen dan SMA sebesar 64,66 persen.

Berbagai capai pembangunan pendidikan memperlihatkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah persentase APM, APS, dan APK. Hal ini disebabkan masih adanya angka putus sekolah di SD/MI sebesar 0,31 persen, SMP/MTs sebesar 0,63 persen dan SMA/SMK/MA sebesar 0,99 persen.

Perkembangan menunjukkan bahwa semakin tinggi umur, angka partisipasi sekolah semakin kecil, mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Sekolah anak-anak usia 7-12 tahun (usia SD) pada tahun 2011 telah mencapai 97,91 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun (usia SLTP), angka partisipasi sekolah lebih kecil (85,32 persen) dan pada kelompok umur 16-18 tahun, angka partisipasi sekolah hanya sebesar 55,93 persen. Ini berarti bahwa masih ada 12,49 persen penduduk usia 13-15 yang

tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP dan 29,32 persen penduduk usia 16-18 yang tidak melanjutkan pendidikan ke SLTA.

Tabel 2. 34

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Umur 2010-2011

Wilayah	2008				2009				2010				2011				2012			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
Kab/Kota																				
Ogan Komering Ulu					99.39	88.75	63.33	14.32	99.28	88.59	56.19	13.42	97.72	89.98	69.1	14.62	98.48	91.70	62.40	
Ogan Komering Ilir					97.00	73.57	42.05	4.37	98.04	80.00	37.22	3.68	96.30	71.23	33.1	2.57	96.40	81.32	38.08	
Muara Enim					98.19	83.16	45.50	7.87	98.23	83.80	49.98	7.81	98.21	85.65	47.99	1.88	96.47	88.00	50.47	
Lahat					99.40	89.68	63.41	12.40	99.35	91.81	66.30	9.85	96.97	91.99	67.86	9.16	98.28	92.57	64.36	
Musi Rawas					96.81	86.41	34.29	2.37	98.20	76.72	36.88	2.96	98.81	82.03	39.6	4.67	98.37	91.11	58.79	
Musi Banyuasin					98.69	87.97	51.29	6.21	98.38	81.35	42.20	4.92	97.68	83.10	48.5	7.48	98.01	82.31	55.60	
Banyuasin					95.04	82.31	42.50	8.92	95.96	81.35	51.16	8.43	96.57	83.14	45.21	9.19	97.13	88.97	56.05	
OKU Selatan					97.81	77.04	50.10	6.87	97.26	87.53	49.11	5.22	97.07	93.12	59.47	2.43	98.24	85.64	59.28	
OKU Timur					97.76	85.48	59.81	7.93	96.83	83.80	61.58	7.94	98.63	88.85	61.47	11.99	98.97	88.91	59.23	
Ogan Ilir					96.25	80.96	52.72	14.20	95.57	81.03	51.02	17.25	96.91	82.20	52.48	13.24	98.70	83.49	46.19	
Empat Lawang					95.65	83.34	65.01	6.05	98.15	88.30	74.57	5.66	98.93	86.14	64.37	8.29	97.83	92.92	76.44	
Kota Palembang					99.70	89.29	65.77	22.94	99.36	93.82	68.27	25.38	98.76	89.02	72.1	26.86	99.10	92.04	68.63	
Kota Prabumulih					99.43	95.93	68.24	12.33	99.50	90.42	53.03	12.96	98.68	90.01	70.31	9.53	97.99	91.13	71.82	
Kota Pagar Alam					99.75	96.98	59.35	10.71	99.23	95.88	62.68	16.68	100.00	93.01	61.55	24.29	100.00	96.92	64.58	
Linggau					98.63	90.32	61.86	16.09	98.02	88.34	64.88	22.98	100.00	89.42	71.91	24.14	99.55	89.22	62.12	
Sumatera Selatan	97.88	84.55	54.27	12.3	97.8	84.65	54.12	11.61	98	85.41	54.79	12.07	97.91	85.32	55.93	12.25	98.04	85.52	58.31	13.55
Nasional	97.88	84.89	55.5	13.29	97.95	85.47	55.16	12.72	98.02	86.24	56.01	13.77	97.58	87.78	57.85	14.26	97.95	89.66	61.06	15.84

Sumber: BPS; Susenas, 2008-2011

Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun yang terendah dijumpai di Kabupaten Ogan Komering Ilir (96,30 persen) dan Lahat (96,97 persen), sedangkan tertinggi di Kota Palembang (100, 00 persen) dan Kota Pagaralam (100,00 persen). Pada usia 13-15 tahun partisipasi sekolah yang paling rendah ditemui di Kabupaten OKI (71,23 persen), dan Kabupaten Musi Rawas (82,03 persen), sedangkan yang tertinggi berada di Kota Pagaralam (93,01 persen) dan Kota Prabumulih (90,01 persen). Untuk kelompok umur 16-18 tahun partisipasi sekolah terendah adalah di Kabupaten OKI (33,10 persen dan Kabupaten Musi Rawas (39,60 persen) sedangkan tertinggi adalah di Kota Palembang (72,10 persen).

2.3.1.1.1.2 Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Kondisi pendidikan ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan tenaga pengajar. Sejalan dengan peningkatan angka aprtisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa menjadi persyaratan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar. Perluasan daya tamping kelas dilakukan dengan

pembangunan gedung kelas baru, rehabilitasi gedung SD dan SLTP yang rusak berat dan penempatan guru kontrak di sekolah yang kekurangan guru.

Perkembangan fasilitas pendidikan di Sumatera Selatan dalam empat tahun terakhir terus meningkat untuk mengimbangi jumlah siswa yang juga cenderung meningkat baik jenjang SD, SLTP maupun SLTA.

Tabel 2. 35

Jumlah Sekolah, Jumlah Guru, Jumlah Siswa, Rasio Siswa-Sekolah dan
Rasio Siswa-Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2006/2007 – 2010/2011

Jenjang Pendidikan	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Jumlah Sekolah					
SD	4.660	4.770	4.882	5.032	5.009
SLTP	1.307	1.395	1.542	1.571	1.857
SLTA	682	762	863	901	955
Jumlah Guru					
SD	55.980	60.128	62.280	67.956	57.436*
SLTP	20.449	22.543	23.687	30.867	22.919*
SLTA	14.209	13.709	16.109	21.105	18.001*
Jumlah Siswa					
SD	994.583	1.006.583	991.079	1.038.510	948.946*
SLTP	323.756	344.756	358.202	382.439	310.542*
SLTA	223.348	235.348	254.348	277.421	248.772*
Rasio Siswa-Sekolah					
SD	213,43	211,02	203,01	206,38	209,48
SLTP	247,71	247,14	232,30	243,44	275,30
SLTA	327,49	308,86	294,73	307,90	350,88
Rasio Siswa-Guru					
SD	17,77	16,74	15,91	15,28	16,52
SLTP	15,83	15,29	15,12	12,39	13,55
SLTA	15,72	17,17	15,79	13,14	13,82

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011

2.3.1.1.3 Rasio Guru-Murid

Rasio Guru/Murid di SD

Rasio Guru/Murid tingkat SD di Sumatera Selatan Pada 2009 s.d 2012 mengalami fluktuasi dan berkisar di angka 1:21 dan 1:20. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang guru mengajar 21 murid hingga 20 murid, angka ini cukup memadai.

Rasio Guru/Murid di SMP

Rasio Guru/Murid di tingkat SMP memnunjukkan angka yang menurun yaitu sebesar 1: 14 pada 2009, 1:13 pada 2010 dan 2011, dan, 1:11 pada 2012. Angka ini menunjukan bahwa 1 guru mengajar 14 murid dan meningkat rasionalya menjadi 13 murid pada 2010 dan 2011 dan menjadi 12 murid pada 2012. Hal ini memperlihatkan bahwa rasio guru/murid tingakt SMP di Sumatera Selatan cukup memadai.

Rasio Guru/Murid di SMA

Rasio Guru/Murid di tingkat SMA menunjukkan angka yang menurun yaitu sebesar 1:12 pada 2009 dan 2010, menjadi 1:11 pada 2011 dan 2012. Angka ini cukup memadai, menunjukan bahwa 1 orang guru mengajar 12 murid pada 2009 dan 2010 dan meningkat rasionalya menjadi 11 murid pada 2011 dan 2012.

Tabel 2. 36

Rasio Guru/Murid Tingkat Pendidikan SD, SLTP dan SLTA
Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio guru/murid (SD)	NA	21	21	20	20
Rasio guru/murid (SMP)	NA	14	13	13	12
Rasio guru/murid (SMA)	NA	12	12	11	11

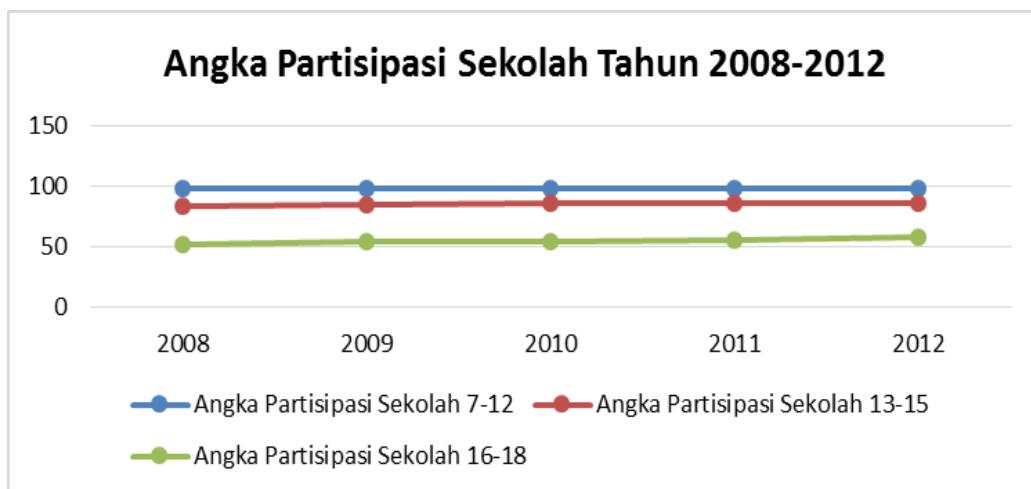
Sumber : BPS Sumsel 2013

2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah

2.3.1.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah

Gambar 2.12

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Tingkat Usia Tahun 2008-2012



Tabel 2. 37

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Tingkat Usia Tahun 2008-2012

Angka Partisipasi Sekolah	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Partisipasi Sekolah 7-12	97,79	97,8	98	97,91	98,04
Angka Partisipasi Sekolah 13-15	83,21	84,65	85,41	85,32	85,52
Angka Partisipasi Sekolah 16-18	52,12	54,12	54,79	55,93	58,31

Sumber : Inkesra Sumsel 2012

Dari tabel data APS setiap tingkatan umur di atas terlihat bahwa semakin tinggi umur, angka partisipasi sekolah semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk Sumatera Selatan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2012 angka Partisipasi Sekolah anak usia 7-12 tahun (usia SD) mencapai 98,04%, pada kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP) APS turun menjadi 88,52% dan pada kelompok usia 16-18 tahun (usia SMA) menjadi 58,21%. Hal ini menunjukkan ada 1,96 % anak usia 7-12 tahun tidak melanjutkan ke SMP. Sebanyak 11,48% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke SMA, dan ada 41,79% remaja usia 16-18 tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (kuliah).

2.3.1.1.2.2. Penduduk yang berusia >15 tahun Melek Huruf

Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun meningkat dari 99,66 pada 2008 menjadi 99,92 pada 2009. Pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 99,94. Pada 2011 angka tersebut menurun sedikit menjadi 99,12 lalu meningkat lagi menjadi 99,50 pada 2012. Begitu pula angka melek huruf penduduk usia 15-44 dan penduduk usia > 45 tahun. Secara umum terlihat bahwa angka melek huruf Sumatera Selatan cukup besar meski belum mencapai 100 %. Hal ini mengindikasikan masih adanya angka buta huruf dengan prosentase sangat rendah, terutama pada penduduk usia di atas 45 tahun.

Tabel 2. 38

Angka Melek Huruf Penduduk Menurut Tingkat Usia
Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
AMH penduduk > 15 thn	na	96,7	96,9	97,1	97,3
AMH penduduk 15-24 thn	99,66	99,92	99,94	99,12	99,5
AMH penduduk 15-44 thn	99,14	99,49	99,63	98,84	99,11
AMH penduduk >45 thn	91,97	91,73	91,9	90,98	91,22

Sumber : BPS Sumsel 2013

2.3.1.1.3. Angka Putus Sekolah

Jika dibandingkan antara capaian indikator rata-rata Angka Putus Sekolah pada semua tingkat pendidikan terlihat angka yang fluksuatif walaupun tidak terlalu tinggi berbeda jauh. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab angka putus sekolah. Antara lain, daerah perairan sehingga kesulitan transportasi, pemerataan prasarana sekolah, yaitu tidak semua daerah memiliki sarana pendidikan di tingkat menengah pertama maupun menengah atas. Usia Pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor lainnya.

Tabel 2. 39

Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Putus Sekolah	na	0,50%	0,51%	0,48%	0,52%

Sumber : EKPD Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2013

2.3.1.1.4. Angka Kelulusan

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Angka Kelulusan nasional tingkat pendidikan SD/sederajat, tingkat pendidikan SMP/sederajat maupun tingkat pendidikan SMA/sederajat terjadi peningkatan. Tahun 2012 kelulusan tingkat SD sederajat mencapai 96,83, sedangkan untuk tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat termasuk kelulusan Paket B dan C hampir mendekati 100 persen, yaitu 99,86 untuk tingkat SMP sederajat dan 99,96 untuk tingkat SMA sederajat.

Tabel 2. 40

Angka Kelulusan Untuk Setiap Jenjang Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012

Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
SD/MI	na	93,43	93,73	94,87	96,83
SMP/MTs	na	89,21	89,73	99,95	99,89
SMA/SMK/MA	na	98,56	97,90	99,89	99,96

Sumber : EKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1. Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk

Rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Sumatera Selatan pada tahun 2011 sebesar 1: 24.978, menjadi 1: 24.978 pada 2012. Angka ini menunjukkan jumlah puskesmas di Sumatera Selatan masih belum mencapai target provinsi sebesar 1:30.0000.

Tabel 2. 41
Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	NA	NA	NA	1:24.355	1:24.978

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.2.2. Rasio Dokter per 100.000 penduduk

Selama 4 tahun terakhir (2008-2011) tidak terjadi peningkatan Rasio dokter per 100.000 penduduk, baru pada tahun 2012 menjadi 11,38. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter per 100.000 penduduk di Sumatera Selatan masih kurang memadai , target resntra sebesar 40 dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2013. Jika dilihat dari hasil capaian selama 5 tahun maka rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 rasio dokter per 100.000 penduduk sebesar 9,48 naik menjadi 10 per 100.000 penduduk pada tahun 2010 sampai dengan 2012.

Tabel 2. 42

Rasio Doker Per 100.000 Penduduk Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio dokter per 100.000 penduduk	NA	9,48	10,00	10,00	10,00

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.2.3. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Terjadi peningkatan selama 5 tahun terakhir. Angka ini memperlihatkan kasus komplikasi kebidanan meningkat setiap tahun di Sumatera Selatan meskipun angka tersebut masih belum memadai, target pada 2013 sebesar 90. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2013 sebesar 66,43 persen. Jika dibandingkan dengan target rentsra tahun 2013 sebesar 90 persen maka persentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 73,81 persen, dengan kata lain indikator kinerja cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani belum mencapai target akhir renstra 2013. Jika dilihat dari hasil capaian selama 5 tahun maka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 9,13 persen naik secara drastis menjadi 57,21 persen pada tahun 2010 kemudian naik menjadi 56,31 persen pada tahun 2011 kemudian naik lagi menjadi 62,58 persen pada tahun 2012.

Tabel 2. 43
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	NA	9,13	57,12	58,31	62,58

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.2.4. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Terjadi peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Sumatera Selatan meningkat setiap tahun selama 5 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 80 % persalinan telah dicakup oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Secara umum pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah mencapai target sebesar 88,11%.

Tabel 2. 44
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	NA	76,4	82,12	89,94	88,89

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.2.5. Persentase Desa Yang Mencapai Universal Child Imunization (UCI)

Persentase Desa yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) Sumatera Selatan memperlihatkan angka yang cukup tinggi, lebih dari 80% meskipun mengalami stagnasi pada 2010 dan 2012. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% desa-desa di Sumatera Selatan telah melakukan imunisasi bagi anak-anak lewat program UCI. Angka tersebut sudah cukup tinggi dan sudah melebihi target renstra sebesar 80% tetapi masih di bawah angka nasional sebesar 95%.

Tabel 2. 45

Persentase Desa Yang Mencapai *Universal Child Immunization* (UCI)
Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase desa yg mencapai UCI	NA	80,52	84,80	88,40	91,70

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.2.6. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Sumatera Selatan telah mencapai 100% selama 5 tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada balita gizi buruk yang tidak mendapat perawatan. Semua balita yang mengalami gizi buruk telah mendapat perawatan dan ditangani dengan baik. Tercapainya target untuk indikator ini disebabkan karena semakin membaiknya surveilans gizi aktif yang dilaksanakan, adanya program Jamkesmas dan Jamsoskes Sumsel Semesta yang memberikan jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Sumatera Selatan, termasuk untuk balita yang mengalami gizi buruk. Kenyataan dilapangan, kasus gizi buruk sering ditemukan terlambat dan atau ditangani tidak tepat. Hal ini terjadi karena belum semua Puskesmas terlatih tentang tatalaksana gizi buruk. Selain itu karena masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menyiapkan formula khusus untuk balita gizi buruk serta kurang tindak lanjut pemantauan setelah balita pulang ke rumah.

Tabel 2. 46

Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	NA	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.2.7. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC yang didiagnosis positif dari pemeriksaan dahak (TB BTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami naik turun. Pada tahun 2009 sebesar 44,69 % naik menjadi 49,12 % di tahun 2010. Pada tahun 2011 turun menjadi 46,87%. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan lagi sebesar 50,50% dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 47,41%. Fluktuasi tersebut disebabkan naik turunnya jumlah penduduk yang menderita penyakit TBC BTA yang bisa ditangani. Angka tersbut masih jauh dari target provinsi

sebesar 70% pada tahun 2013. Jika dilihat dari hasil capaian selama 5 tahun maka Penemuan pasein baru TB BTA positif mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 pasein baru TB BTA positif sebesar 44,69 persen naik menjadi 49,12 persen pada tahun 2010 kemudian turun menjadi 40,87 persen pada tahun 2011 kemudian naik lagi menjadi 50,50 persen pada tahun 2012.

Tabel 2. 47

Cakupan Penemuan TBC BTA Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Cakupan penemuan TBC BTA	NA	44,69	49,12	46,87	50,50

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.2.8. Angka Kesakitan DBD/100.000 penduduk

Angka kesakitan Demam Berdarah (DBD) di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi dari tahun 2008 s.d 2012. Pada tahun 2009 ada 10 penderita DBD dari 100.000 penduduk. Jumlah tersebut menurun menjadi 16 pada 2010. Meningkat lagi menjadi 43 pada 2011 dan menurun menjadi 18 pada 2012. Terjadi penurunan yang drastis di tahun 2013 disebabkan gencarnya program penanganan Demam berdarah di Sumatera Selatan. Pada tahun 2009 angka kesakitan DBD sebesar 24 per 100.000 penduduk, turun menjadi 16 per 100.000 penduduk pada tahun 2010 kemudian naik menjadi 27 per 100.000 penduduk pada tahun 2011, naik lagi menjadi 43 per 100.000 penduduk pada tahun 2012 dan turun drastis menjadi 18 per 100.000 penduduk pada tahun 2013. Sedangkan untuk persentase capaian angka kesakitan DBD sudah sejak tahun 2009 diatas 100 persen.

Tabel 2. 48

Angka Kesakitan DBD/100.000 Penduduk Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Kesakitan DBD/100.000 Penduduk	NA	24,00	16,00	27,00	43,00

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.2.9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.

Pada tahun 2009 s.d 2012 cakupan pelayanan kesehatan mencapai 100%. Hal ini disebabkan Program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta yang membuat masyarakat miskin bisa dengan mudah memperoleh pelayanan bagi pasien. Pencapaian indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin pada tahun 2012 sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan pada tahun 2012 sebesar

100 persen, maka capaian pada saat ini adalah sebesar sebesar 100 persen. Dengan demikian target kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin telah mencapai target Renstra 2012-2013. Jika dilihat dari hasil capaian selama 5 tahun maka cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2010.

Tabel 2. 49

**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Tahun 2008-2012**

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	NA	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.2.10. Cakupan Kunjungan Bayi

Kunjungan Bayi adalah kunjungan bayi (umur 1-12 bulan) termasuk neonatus (umur 1-28 hari) untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali (bayi), 2 kali (neonatus) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu di tahun 2009 sebesar 29,00 % naik menjadi 72,67 % pada tahun 2010, pada tahun 2011 naik lagi menjadi 90,00 %. Pada tahun 2012 kunjungan bayi mengalami kenaikan sedikit yaitu sebesar 90,35 untuk tahun 2012 Angka tersebut telah melebihi target provinsi sebesar 90,00%.

Tabel 2. 50

Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Cakupan kunjungan bayi	NA	29,00	72,67	90,00	90,35

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tentu saja menyebabkan meningkatnya pergerakan orang maupun barang. Infrastruktur utamanya infrastruktur jalan dituntut agar mampu memfasilitasi semakin meningkatnya pergerakan orang dan barang tersebut. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah.

Jaringan jalan berstatus di Provinsi Sumatera Selatan sendiri hingga pada tahun 2013 mencapai 17.248,65 km, yang terdiri atas jalan dengan status jalan nasional sebesar 8,37% atau sepanjang 1.444,26 km, jalan provinsi sebesar 8,48% atau sepanjang 1.462,87 km dan jalan kabupaten/kota sebesar 83,15% atau sepanjang 14.341,52 km yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari total keseluruhan panjang jalan tersebut, tentu saja tidak semua dalam kondisi baik/mantap. Berdasarkan data tahun 2013, secara keseluruhan kondisi jalan mantap baru mencapai 64,84% dari total seluruh jaringan jalan. Apabila diuraikan berdasarkan status jalan, kondisi jalan mantap kewenangan nasional sebesar 96,20%, jalan mantap kewenangan provinsi sebesar 81,59% dan jalan mantap kewenangan kab/kota rata-rata sebesar 59,98%. Selain belum mantapnya beberapa kondisi jaringan jalan, beberapa ruas jalan utama di Sumsel juga masih sering terjadi kemacetan akibat kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung volume kendaraan yang lewat. Pada kurun waktu terakhir laju kerusakan ruas jalan melebihi dari upaya peningkatan/rehabilitasi jalan yang ada sebagai akibat dari tingginya lalu lintas kendaraan dengan tonase tinggi (MST 10 ton – 16 ton) sedangkan kemampuan daya dukung jalan di Sumatera Selatan rata-rata 10 ton

Tabel 2. 51

Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap di Sumatera Selatan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2009 – 2012

Kab/Kota	TAHUN 2009									TOTAL		
	Negara			Provinsi			Kab/Kota					
	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap
Ogan Komering Ulu	-	-	-	86.51	77.69	89.80%	487.17	367.67	75.47%	573.68	445.36	77.63%
Ogan Komering Ilir	112.50	92.53	82.25%	76.73	57.03	74.33%	1,743.50	1,260.60	72.30%	1,932.73	1,410.16	72.96%
Muara enim	191.22	191.22	100.00%	223.22	140.70	63.03%	1,254.05	1,100.88	87.79%	1,668.49	1,432.80	85.87%
Lahat	-	-	-	166.62	141.36	84.84%	1,685.05	842.53	50.00%	1,851.67	983.89	53.14%
Musi Rawas	353.48	349.38	98.84%	196.12	94.47	48.17%	1,485.81	1,365.07	91.87%	2,035.41	1,808.92	88.87%
Musi Banyuasin	304.05	291.01	95.71%	119.27	58.70	49.22%	1,400.71	547.03	39.05%	1,824.03	896.74	49.16%
Palembang	32.36	32.36	100.00%	74.85	62.70	83.77%	747.92	599.17	80.11%	855.13	694.23	81.18%
Prabumulih	27.20	27.20	100.00%	21.00	13.47	64.12%	447.12	147.12	32.90%	495.32	187.79	37.91%
Pagaralam	-	-	-	20.00	12.82	64.12%	504.33	260.51	51.65%	524.33	273.33	52.13%
OKU Selatan	-	-	-	229.76	161.67	70.36%	-	-	-	229.76	161.67	70.36%
OKU Timur	21.68	21.68	100.00%	254.62	151.04	59.32%	666.95	492.95	73.91%	943.25	665.67	70.57%
Ogan Ilir	61.38	60.97	99.33%	111.56	64.00	57.37%	773.12	221.72	28.68%	946.06	346.69	36.65%
Empat Lawang	32.00	31.35	97.97%	163.63	82.50	50.42%	231.70	100.02	43.17%	427.33	213.87	50.05%
Lubuk Linggau	48.11	48.11	100.00%	4.60	2.95	64.12%	375.65	195.42	52.02%	428.36	246.48	57.54%
Banyuasin	61.00	57.83	94.80%	-	-	-	1,314.00	615.27	46.82%	1,375.00	673.10	48.95%
Provinsi Sumsel	1,244.98	1,203.64	96.68%	1,748.49	1,121.10	64.12%	13,117.08	8,115.96	61.87%	16,110.55	10,440.70	64.81%

Kab/Kota	TAHUN 2010									TOTAL		
	Negara			Provinsi			Kab/Kota					
	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap
Ogan Komering Ulu	93.55	93.01	99.42%	138.52	91.68	66.19%	487.17	367.67	75.47%	719.24	552.36	76.80%
Ogan Komering Ilir	112.50	92.18	81.93%	79.10	37.47	47.37%	1,853.56	415.71	22.43%	2,045.16	545.36	26.67%
Muara enim	191.22	186.26	97.40%	215.00	132.63	61.69%	1,359.20	135.92	10.00%	1,765.42	454.81	25.76%
Lahat	94.44	78.62	83.25%	87.93	62.23	70.77%	1,164.10	545.63	46.87%	1,346.47	686.48	50.98%
Musi Rawas	253.49	249.75	98.53%	195.85	68.25	34.85%	1,039.29	859.53	82.70%	1,488.63	1,177.53	79.10%
Musi Banyuasin	304.05	254.09	90.48%	88.95	52.42	58.93%	1,073.77	238.59	22.22%	1,466.77	545.10	37.16%
Palembang	90.95	83.30	91.59%	86.91	77.03	88.64%	797.03	531.46	66.68%	974.89	691.79	70.96%
Prabumulih	27.20	24.91	91.57%	18.40	10.99	59.71%	402.10	379.37	94.35%	447.70	415.26	92.75%
Pagaralam	52.22	46.87	89.75%	5.00	2.99	59.71%	504.35	16.45	3.26%	561.57	66.30	11.81%
OKU Selatan	-	-	-	191.23	148.35	77.58%	470.85	343.55	72.96%	662.08	491.90	74.30%
OKU Timur	21.68	21.67	99.95%	205.75	101.21	49.19%	666.94	274.11	41.10%	894.37	396.99	44.39%
Ogan Ilir	61.38	60.77	99.01%	126.35	64.79	51.28%	803.42	738.84	91.96%	991.15	864.40	87.21%
Empat Lawang	32.47	31.71	97.65%	120.09	71.71	59.71%	355.61	101.40	28.51%	508.17	204.81	40.30%
Lubuk Linggau	48.11	48.09	99.95%	4.60	2.75	59.71%	478.30	190.54	39.84%	531.01	241.37	45.46%
Banyuasin	61.00	57.64	94.49%	56.50	43.00	76.11%	999.00	325.79	32.61%	1,116.50	426.43	38.19%
Provinsi Sumsel	1,444.26	1,328.86	92.01%	1,620.17	967.48	59.71%	12,454.69	5,464.56	43.88%	15,519.12	7,760.91	50.01%

Kab/Kota	TAHUN 2011											
	Negara			Provinsi			Kab/Kota			TOTAL		
	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap
Ogan Komering Ulu	42.64	40.44	94.84%	138.52	99.35	71.72%	607.17	426.86	70.30%	788.33	566.65	71.88%
Ogan Komering Ilir	109.60	86.23	78.68%	79.10	39.20	49.56%	1,537.26	683.50	44.46%	1,725.96	808.93	46.87%
Muara enim	154.60	142.01	91.85%	215.00	141.50	65.81%	1,370.74	356.39	26.00%	1,740.34	639.90	36.77%
Lahat	114.87	104.43	90.91%	87.93	92.10	104.74%	1,297.66	1,289.24	99.35%	1,500.46	1,485.77	99.02%
Musi Rawas	215.06	211.47	98.33%	195.85	60.24	30.76%	1,080.81	1,019.99	94.37%	1,491.72	1,291.70	86.59%
Musi Banyuasin	320.68	261.67	81.60%	88.95	12.00	13.49%	1,073.77	396.62	36.94%	1,483.40	670.29	45.19%
Palembang	79.65	68.58	86.10%	86.91	66.34	76.34%	797.03	726.57	91.16%	963.59	861.49	89.40%
Prabumulih	82.95	68.05	82.04%	18.40	11.45	62.21%	346.50	345.20	99.62%	447.85	424.70	94.83%
Pagaralam	82.85	63.11	76.17%	5.00	3.11	62.21%	504.35	313.77	62.21%	592.20	379.99	64.17%
OKU Selatan	-	-	-	191.23	174.53	91.27%	507.12	354.57	69.92%	698.35	529.10	75.76%
OKU Timur	7.26	5.96	82.13%	205.75	162.15	78.81%	671.34	572.64	85.30%	884.35	740.75	83.76%
Ogan Ilir	63.16	57.75	91.44%	126.35	36.40	28.81%	838.47	513.27	61.22%	1,027.98	607.42	59.09%
Empat Lawang	91.60	85.79	93.65%	120.09	74.71	62.21%	393.60	173.52	44.09%	605.29	334.02	55.18%
Lubuk Linggau	23.17	22.27	96.10%	4.60	2.86	62.21%	492.69	329.10	66.80%	520.46	354.23	68.06%
Banyuasin	56.17	45.97	81.85%	56.50	31.90	56.46%	1,004.98	399.90	39.79%	1,117.65	477.77	42.75%
Provinsi Sumsel	1,444.26	1,263.73	87.50%	1,620.17	1,007.84	62.21%	12,523	7,901	63.09%	15,587.92	10,172.71	65.26%

Kab/Kota	TAHUN 2012											
	Negara			Provinsi			Kab/Kota			TOTAL		
	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap	Panjang	Mantap (B+S)	% Mantap
Ogan Komering Ulu	42.64	42.42	99.47%	138.52	101.62	73.36%	607.17	426.86	70.30%	788.33	570.90	72.42%
Ogan Komering Ilir	109.60	89.85	81.98%	79.10	52.90	66.88%	1,538.87	856.33	55.65%	1,727.57	999.08	57.83%
Muara enim	154.60	150.67	97.46%	215.00	172.10	80.05%	1,447.05	432.70	29.90%	1,816.65	755.47	41.59%
Lahat	114.87	95.69	83.30%	87.93	88.59	100.75%	1,297.65	778.59	60.00%	1,500.45	962.87	64.17%
Musi Rawas	215.06	212.00	98.58%	89.65	72.48	80.85%	1,601.95	1,313.45	81.99%	1,906.66	1,597.93	83.81%
Musi Banyuasin	320.68	290.30	90.53%	40.85	29.85	73.07%	1,073.77	396.62	36.94%	1,435.30	716.77	49.94%
Palembang	79.65	73.00	91.64%	86.91	76.27	87.76%	797.03	726.57	91.16%	963.59	875.84	90.89%
Prabumulih	82.95	76.00	91.62%	18.40	14.10	-	346.50	345.20	99.62%	447.85	435.30	97.20%
Pagaralam	82.85	74.40	89.80%	5.00	3.83	-	504.35	307.29	60.93%	592.20	385.52	65.10%
OKU Selatan	-	-	-	191.23	161.23	84.31%	507.12	354.57	69.92%	698.35	515.80	73.86%
OKU Timur	7.26	7.26	100.00%	205.75	148.65	72.25%	932.57	751.90	80.63%	1,145.58	907.81	79.24%
Ogan Ilir	63.16	62.56	99.06%	126.35	82.80	65.53%	838.47	637.27	76.00%	1,027.98	782.63	76.13%
Empat Lawang	91.60	89.50	97.70%	120.09	92.00	76.61%	394.10	310.01	78.66%	605.79	491.51	81.14%
Lubuk Linggau	23.17	23.17	100.00%	4.60	3.52	-	504.36	329.10	65.25%	532.13	355.80	66.86%
Banyuasin	56.17	53.10	94.54%	56.50	23.00	40.71%	1,032.20	466.04	45.15%	1,144.87	542.14	47.35%
Provinsi Sumsel	1,444.26	1,339.92	92.78%	1,465.87	1,122.94	76.61%	13,423.16	8,432.50	62.82%	16,333.29	10,895.36	66.71%

Sumber : BPJN III, DPU BM Sumsel, DAK Kab/Kota

2.3.1.3.2. Jaringan Irigasi

Infrastruktur lainnya yang berkaitan erat dengan bidang perekonomian di Sumatera Selatan adalah infrastruktur Daerah Rawa dan Daerah Irigasi yang mendukung sektor pertanian terutama produksi beras. Berdasarkan data tahun 2012, Provinsi Sumatera Selatan memiliki luasan irigasi baku seluas 269.209 Ha dan luas potensial sebesar 211.596 Ha. Dari luasan potensial tersebut, baru 67,97% atau seluas 143.842 Ha yang telah menjadi daerah fungsional yang terdiri dari irigasi teknis seluas 90.965 Ha, irigasi semi teknis 48.817 Ha dan irigasi sederhana seluas 4.060 Ha. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki luasan daerah rawa yang tersebar di pantai timur Sumatera Selatan yang terdiri dari rawa pasang surut dan rawa non-pasang surut. Rawa pasang surut memiliki luasan baku sebesar 584.956 Ha dan luasan potensial sebesar 538.658 Ha. Dari luasan potensial tersebut, baru 40% atau seluas 215.866 ha rawa pasang surut yang berfungsi. Untuk rawa non-pasang surut memiliki luasan baku sebesar 114.274 Ha dan luasan potensial sebesar 100.474 Ha. Dari luasan potensial tersebut, baru 30% atau seluas 30.775 ha rawa non pasang surut yang berfungsi.

Tabel 2. 52
Luas Jaringan Irigasi di Sumatera Selatan
Tahun 2009 – 2012

No	Wilayah	2009			2010			2011			2012		
		Luas Area (Ha)			Luas Area (Ha)			Luas Area (Ha)			Luas Area (Ha)		
		Baku	Potensi	Fungsi									
1.	Kab. Musi Rawas	28,074	26,907	20,095	51,535	39,652	22,389	51,538	39,652	22,389	51,538	39,652	22,389
2.	Kota Lubuk Linggau	-	-	-	1,385	1,080	520	1,385	1,080	520	1,385	1,080	520
3.	Kab. Empat Lawang	-	-	-	24,688	10,928	6,726	24,088	9,988	6,726	24,088	9,988	6,726
4.	Kab. Lahat	24,130	24,130	6,856	33,107	15,377	10,355	33,243	-	10,355	33,243	-	10,355
5.	Kota Pagar Alam	19,336	19,336	2,895	28,060	19,066	2,645	28,060	19,066	2,645	28,060	19,066	2,645
6.	Kab. Muara Enim	3,615	3,615	642	9,437	5,428	4,174	9,437	5,428	4,174	9,437	5,428	4,174
7.	Kab. OKU	2,599	3,969	929	8,868	3,587	1,398	36,863	30,767	1,398	36,863	30,767	1,398
8.	Kab. OKU Timur	70,614	70,614	51,978	70,604	70,504	50,317	70,604	70,504	50,317	70,604	70,504	50,317
9.	Kab. OKU Selatan	5,424	5,375	4,423	12,621	6,817	6,536	12,621	6,817	6,536	12,621	6,817	6,536
10.	Kota Prabumulih	350	350	220	350	350	220	350	350	220	350	350	220
11.	Kab. OKI	1,020	1,020	1,001	1,020	1,020	1,001	1,020	1,020	1,001	1,020	1,020	1,001

Sumber : BBWSS VIII, DPU Pengairan Sumsel, DAK Kab/Kota

Tabel 2. 53
Luas Daerah Rawa Pasang Surut
di Sumatera Selatan Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Rawa Pasang Surut (Ha)		
		Baku	Potensial	Fungsi
1	Kab. Muara Enim	17,390	17,390	5,600
2	Kab. OKU Timur	10,800	9,800	2,443
3	Kab. OKI	83,088	81,643	32,789
4	Kab. Ogan Ilir	66,291	61,760	36,426
5	Kota Palembang	640	640	400
6	Kab. Banyuasin	337,883	298,561	112,033
7	Kab. Muba	68,864	68,864	26,175
Jumlah		584,956	538,658	215,866

Sumber : Data Dasar Bidang Infrastruktur Bappeda Prov. Sumsel, 2012

Dari gambaran data tersebut, tantangan ke depan yang dihadapi adalah masih banyaknya lahan potensial yang belum dikembangkan menjadi daerah irigasi teknis. Selain itu perlunya mempertahankan dan menjaga luasan daerah irigasi dan rawa tersebut agar tidak terjadi penyusutan dan alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan. Pemanfaatan lahan irigasi dan rawa di masa mendatang tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional, namun juga mampu mensejahterakan masyarakat

2.3.1.3.3. Rasio TPS Per satuan Penduduk

Cakupan pelayanan persampahan pada penduduk perkotaan di Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 38,81%. Cakupan tertinggi di Kota

Palembang sebesar 70% sedangkan cakupan terendah di Pagaralam yaitu sebesar 2,44% (lihat Gambar 2.12). Jika dilihat dari jumlah timbunan sampah yang terangkut di perkotaan Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 23,13%. Jumlah sampah terangkut tertinggi di Kota Pagaralam sebesar 94,12% berbanding terbalik dengan cakupan pelayanan persampahannya hal ini menunjukkan bahwa timbunan sampah yang terangkut sebagian besar berupa timbunan sampah di fasilitas umum seperti pasar-pasar tradisional.

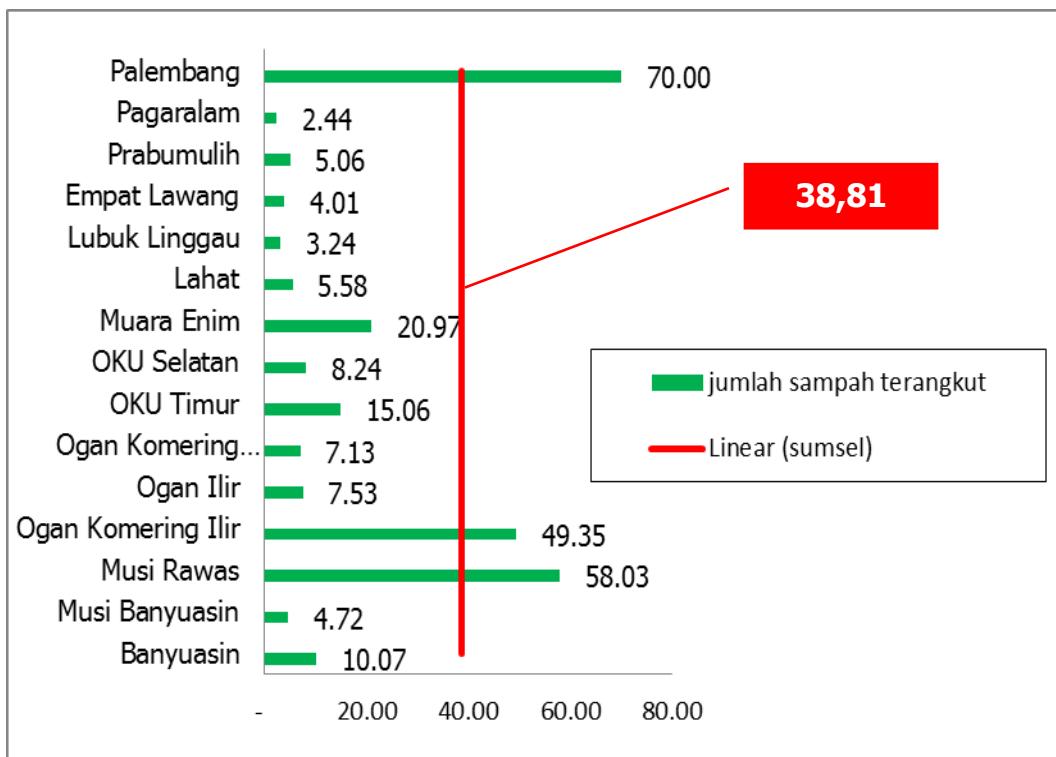
Tabel 2. 54

Pelayanan Persampahan Tahun 2012

No	Wilayah	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	Jumlah TPA	Jumlah TPS
1	Ogan Komering Ulu	7.13	2.00	1.00
2	Ogan Komering Ilir	49.35	1.00	1.00
3	Muara Enim	20.97	2.00	1.00
4	Lahat	5.58	2.00	1.00
5	Musi Rawas	58.03	2.00	1.00
6	Musi Banyuasin	4.72	2.00	1.00
7	Banyuasin	10.07	2.00	1.00
8	OKU Selatan	8.24	1.00	1.00
9	OKU Timur	15.06	1.00	1.00
10	Ogan Ilir	7.53	2.00	1.00
11	Empat Lawang	4.01	0.00	0.00
12	Kota Palembang	70.00	2.00	2.00
13	Kota Prabumulih	5.06	1.00	1.00
14	Kota Pagar Alam	2.44	1.00	1.00
15	Kota Lubuk Linggau	3.24	2.00	1.00
	Sumatera Selatan	53.33	23.00	15.00

Sumber : DPU CK 2012 & Buku PPSP 2013

Gambar 2. 12
Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan



Sumber : DPU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan 2012

2.3.1.4 Perumahan

Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat tinggal sehari-hari penghuninya yaitu sebagai tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Oleh karena itu rumah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Data keadaan perumahan menggambarkan salah satu dimensi kesejahteraan rumah tangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain adalah akses rumah tangga terhadap air bersih, sanitasi layak, akses terhadap sumber listrik dan beberapa indikator lainnya.

Berdasarkan data BPS tahun 2012, Persentase rumah tangga dengan akses air bersih pada tahun baru mencapai 58,13% berada dibawah rata-rata Nasional 64,60% dan target MDG's 2015 sebesar 70%. Rumah tangga dengan akses sanitasi layak juga baru mencapai 50,87% berada dibawah rata-rata nasional 59,71% dan target MDG's sebesar 62,41%. Selanjutnya untuk cakupan pelayanan persampahan pada penduduk perkotaan di Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 38,81%, jika dilihat dari jumlah timbunan sampah yang terangkut di perkotaan Sumatera Selatan saat ini

baru mencapai 23,13%. hal ini menunjukkan bahwa timbunan sampah yang terangkut sebagian besar berupa timbunan sampah di fasilitas umum seperti pasar-pasar tradisional. Persoalan air bersih, sanitasi dan persampahan ini kedepannya juga perlu menjadi perhatian dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang akan bermuara kepada meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan.

2.3.1.4.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Akses rumah tangga ke sumber air minum yang layak terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi penduduk atau rumahtangga yang mengakses sumber air minum yang terlindung di Sumatera Selatan meningkat dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Berdasarkan data Susenas, pada tahun 2007 proporsinya hanya mencapai 48,23%, dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 58,13%. Peningkatan proporsi ini menuju capaian target MDGs yaitu sebesar 68,87%.

Tabel 2. 55
Percentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih
Tahun 2008 – 2012

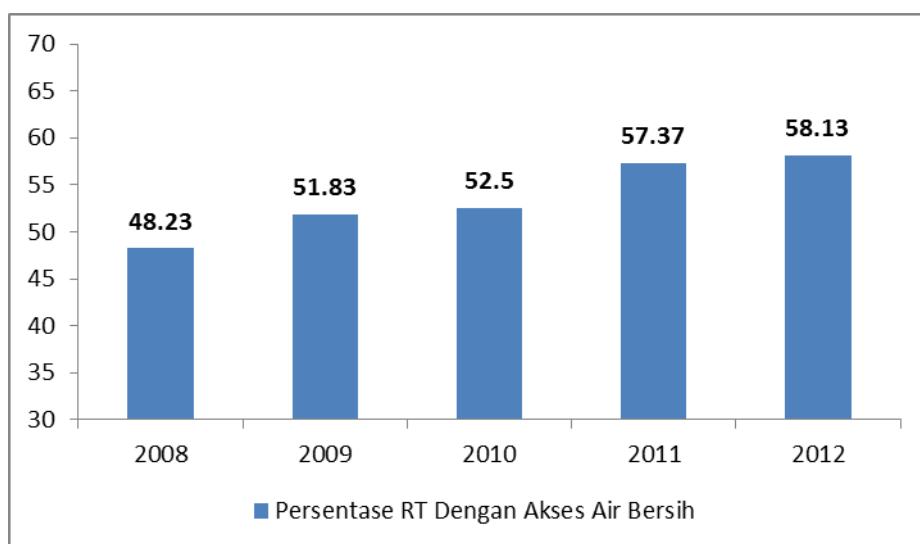
No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
1	Ogan Komering Ulu	58.02	62,78	53.45	67.16	62.52
2	Ogan Komering Ilir	36.60	39,84	46.06	49.02	46.81
3	Muara Enim	50.17	46,16	46.68	59.56	61.09
4	Lahat	35.19	38.31	37.42	39.56	42.19
5	Musi Rawas	38.98	40,62	43.05	41.86	60.48
6	Musi Banyuasin	41.52	43,17	42.84	46.75	47.66
7	Banyuasin	29.48	31,10	37.16	43.02	43.19
8	OKU Selatan	21.42	29,17	30.39	27.34	29.91
9	OKU Timur	46.80	58,46	57.06	63.21	62.2
10	Ogan Ilir	40.14	40,11	46.13	46.18	43.00
11	Empat Lawang	12.08	15.86	15.12	22.23	20.8
12	Kota Palembang	88.30	94,40	90.32	95.08	94.23
13	Kota Prabumulih	55.27	48,47	58.80	74.49	69.65
14	Kota Pagar Alam	45.77	42.88	38.25	37.34	44.29
15	Kota Lubuk Linggau	59.08	59,91	58.36	62.12	54.41
	Sumatera Selatan	48.23	51.83	52.5	57.37	58.13

Disamping kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar dalam hal akses terhadap air minum yang layak menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Data Susenas menunjukkan bahwa proporsi rumahtangga dengan akses tertinggi ke sumber air minum layak

adalah Kota Palembang mencapai kisaran 94,23 persen. Di urutan kedua yaitu Kota Prabumulih mencapai 69,65 persen. Berbeda halnya di Kabupaten Empat Lawang, proporsi rumah tangga terhadap sumber air minum layak hanya sebesar 20,80 persen. Masih relatif rendahnya akses air minum yang layak mencerminkan penyediaan infrastruktur air minum termasuk sarana dan prasarana belum terpelihara dan pengelolaannya belum berkelanjutan.

Gambar 2. 13

Percentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih
Tahun 2008 - 2012



Sumber : BPS 2008 - 2012

2.3.1.4.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tabel 2. 56
Percentase Rumah Tangga Memiliki Sumber Listrik
Tahun 2008 – 2012

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
1	Ogan Komering Ulu	91.84	93.06	91.22	94.06	93.85
2	Ogan Komering Ilir	76.35	84.94	79.14	90.74	92.95
3	Muara Enim	86.71	90.84	92.45	96.27	97.13
4	Lahat	84.66	89.30	91.83	94.87	95.31
5	Musi Rawas	81.29	82.03	82.57	90.29	93.68
6	Musi Banyuasin	77.78	87.29	85.02	88.33	93.25
7	Banyuasin	66.70	78.69	88.00	86.4	95.76
8	OKU Selatan	52.33	72.13	74.04	70.89	68.3

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
9	OKU Timur	84.01	86.04	89.76	95.55	97.61
10	Ogan Ilir	78.24	83.51	81.76	83.64	88.15
11	Empat Lawang	68.39	82.45	80.60	85	88.57
12	Kota Palembang	98.42	99.48	98.47	99.58	97.75
13	Kota Prabumulih	94.96	98.40	96.26	96.6	99.23
14	Kota Pagar Alam	95.06	97.57	94.96	98.22	98.24
15	Kota Lubuk Linggau	92.39	96.04	98.02	99.06	99.22
	Sumatera Selatan	82.1	88.05	88.69	92.01	94.02

Sumber : BPS Sumsel 2008 - 2012

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal lainnya adalah sumber listrik sebagai penerangan. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 94,02 persen rumah tinggal di Sumatera Selatan telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Angka penggunaan listrik ini konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya dan meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2006 yang besarnya 77,21 persen. Namun demikian saat ini masih ada sekitar 5,98 persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik sebagai penerangan utama.

2.3.1.4.3. Rumah Tangga Bersanitasi

Akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang layak juga terus meningkat. Data Susenas menunjukkan bahwa akses sanitasi yang layak meningkat dari 39,03 persen pada tahun 2008 menjadi 50,87 persen pada tahun 2012. Laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, guna mencapai target MDGs pada tahun 2015 sebesar 62,41 persen.

Tabel 2. 57

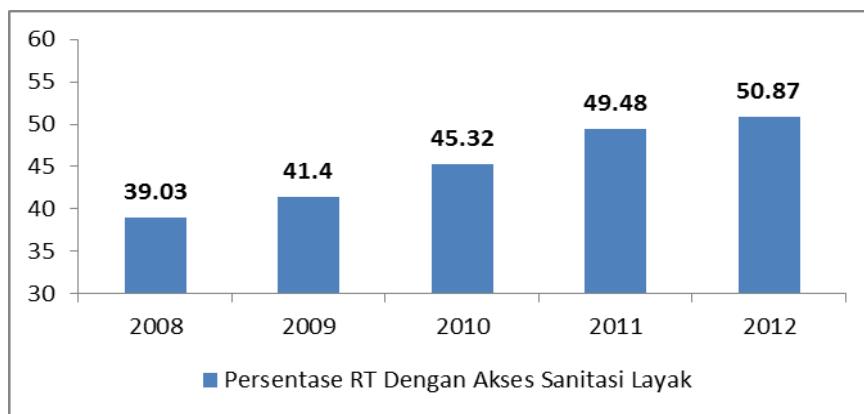
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2008 – 2012

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
1	Ogan Komering Ulu	55.95	52.06	47.89	59.57	56.37
2	Ogan Komering Ilir	19.14	20.09	21.11	28.1	30.65
3	Muara Enim	38.83	42.94	50.22	59.3	53.7
4	Lahat	32.56	34.90	33.29	28.59	40.63
5	Musi Rawas	21.38	26.87	28.07	31.1	33.95
6	Musi Banyuasin	27.55	27.09	44.33	43.24	56.93

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
7	Banyuasin	38.79	38.40	33.54	40.49	41.34
8	OKU Selatan	23.23	21.27	35.35	26.99	22.37
9	OKU Timur	21.56	26.18	38.52	44.25	53.17
10	Ogan Ilir	42.72	44.39	37.84	46.27	43.49
11	Empat Lawang	11.40	15.87	24.85	32.81	40.31
12	Kota Palembang	74.11	75.13	76.83	77.49	76.08
13	Kota Prabumulih	61.80	69.09	64.50	70.36	75.21
14	Kota Pagar Alam	13.91	10.05	43.88	48.7	55.21
15	Kota Lubuk Linggau	60.83	75.62	78.79	69.96	66.73
	Sumatera Selatan	39.03	41.4	45.32	49.48	50.87

Terdapat kesenjangan yang cukup lebar dalam hal akses berkelanjutan terhadap sanitasi yang layak antara kabupaten/kota. Akses sanitasi layak tertinggi sebesar 76,08 persen di Kota Palembang dan yang terendah di Kabupaten OKUS sebesar 22,37 persen. Masih relatif rendahnya akses sanitasi yang layak mencerminkan bahwa pemerintah harus lebih memberikan perhatian khusus untuk penyediaan infrastruktur sanitasi termasuk sarana dan prasarana. Selain itu juga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mengelola sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

Gambar 2. 14
Percentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2008 – 2012



Sumber : BPS 2008 - 2012

2.3.1.4.4. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Untuk pemukiman, sampai saat ini Pemerintah telah membuat 2.800 unit rumah murah dan membangun Rusunawa di 5 Kawasan dalam rangka untuk terus mengurangi kawasan kumuh di Sumatera Selatan.

Tabel 2. 58

Data Pembangunan Perumahan dan Permukiman Oleh Pemda
Bekerjasama dengan Kementerian

No.	Provinsi/Kab/ Kota	Rumah Murah/MBR (Unit)	Rusunawa	Keterangan
1	Sumatera Selatan	2.000	1 kawasan	Rencana pembangunan rusunawa di kawasan Jakabaring
2	Palembang	-	3 kawasan	Rusunawa yang telah dibangun pada Kawasan Kasnariyah, 5 Ulu dan IAIN Raden Fatah
3	Musi Banyuasin	800	-	-
4	Ogan Ilir	-	1 kawasan	Pembangunan rusunawa di kawasan Unsri Inderalaya
Jumlah		2.800 unit		5 kawasan

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2011

2.3.1.5. Penataan Ruang

2.3.1.5.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau

Tabel 2. 59

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibukota Provinsi

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase RTH	na	15%	20%	25%	30%

Sumber : EKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013

Ruang Terbuka Hijau atau RTH menjadi sangat penting fungsinya dalam ekosistem kota. RTH merupakan salah satu indikator sebagai indeks untuk menuju "Kota Hijau/Green City). Untuk itu, dalam kurun waktu 2009-2012 kota Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil meningkatkan persentase RTH dalam kota sesuai amanat perundangan bahwa setiap kota minimal harus menyediakan 30% RTH.

2.3.1.6. Perencanaan pembangunan

2.3.1.6.1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan pembangunan

Tabel 2. 60

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan

No	Dokumen	Status	Keterangan
1	RPJMD 2005-2025	ada	Perda Prov. Sumsel No 17 tahun 2007
2	RPJMD 2008-2013	ada	Perda Prov. Sumsel No.13 Tahun 2009
3	RKPD :		
	- Tahun 2008	ada	Pergub Sumsel No. 25 Tahun 2007
	- Tahun 2009	ada	Pergub Sumsel No. 08 Tahun 2008
	- Tahun 2010	ada	Pergub Sumsel No. 37 Tahun 2009
	- Tahun 2011	ada	Pergub Sumsel No. 28 Tahun 2010
	- Tahun 2012	ada	Pergub Sumsel No. 13 Tahun 2011

Sesuai dengan UU 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan. Ketiga amanat ini, sudah dipenuhi dan dijabarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan melalui penyusunan RPJP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025, RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kurun waktu 2008-2013.

2.3.1.6.2. Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD

Secara umum seluruh program yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013, telah dijabarkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau dengan kata lain Program RPJMD, 100% telah dijabarkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun berkenaan.

2.3.1.7. Perhubungan

2.3.1.7.1. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Terminal Bus

Untuk prasarana pendukung, saat ini di Sumatera Selatan memiliki 36 terminal angkutan umum yang terdiri atas terminal tipe B sebanyak 18

terminal (50%), tipe C sebanyak 11 terminal (30,56%) dan sisanya sebanyak 7 terminal (19,44%) termasuk terminal tipe A yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Semakin banyaknya angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi dan angkutan antar provinsi yang berplat hitam (travel) berdampak terhadap semakin berkurang angkutan umum (berplat kuning) pada jurusan yang sama yang pada akhirnya juga berdampak semakin berkurangnya angkutan umum yang masuk ke terminal.

Tabel 2. 61
Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
1	Palembang	1. Karya Jaya 2. Alang-Alang Lebar 3. Plaju 4. Jakabaring 5. Tangga Buntung 6. Lemabang 7. Sako	A A	B B	C C C
2	Prabumulih	1. Prabumulih 2. Kota Prabumulih		B	C
3	Pagaralam	1. Nendagung 2. Pagar Gading		B	C
4	Lubuk Linggau	1. Simpang Perintis 2. Muara 3. Kalimantan 4. Watas 5. Satelit		B	C C C C
5	Banyuasin	1. Betung	A		
6	Musi Banyuasin	1. Randik		B	
7	Empat Lawang	-	-	-	-
8	Ogan Ilir	1. Km 32 Indralaya		B	
9	Ogan Komering Ilir	1. Kayu Agung 2. Tanjung Raja 3. Tulung Selapan		B B B	
10	Ogan Komering Ulu	1. Baturaja	A		
11	OKU Timur	1. Kota Baru 2. Lubuk Harjo		B B	
12	OKU Selatan	1. Muara Dua			C
13	Muara Enim	1. Muara Enim 2. Simpang Kodim 3. Bantingan 4. Talang Ubi	A	B B B	
14	Musi Rawas	1. Simpang Periuk 2. Lakitan 3. Trawas	A	B B	

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
15	Lahat	1. Batay 2. Muara Siban 3. Lembayung	A	B	C
Jumlah			7	18	11

Sumber : Statistik Dishubkominfo Sumsel 2012

Perkeretaapian

Untuk pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh memang akan lebih efektif jika diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Akan tetapi angkutan kereta api di Sumatera Selatan masih terbatas pada kawasan tertentu (Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuk Linggau), belum ada jalur yang menuju outlet pengiriman barang di Sumsel dan masih menggunakan single track dan dengan kondisi rel yang sudah cukup tua sehingga kapasitasnya terbatas. dari 675 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagian Selatan sebagian besar (89%) merupakan single track dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur double track. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel 2. 62

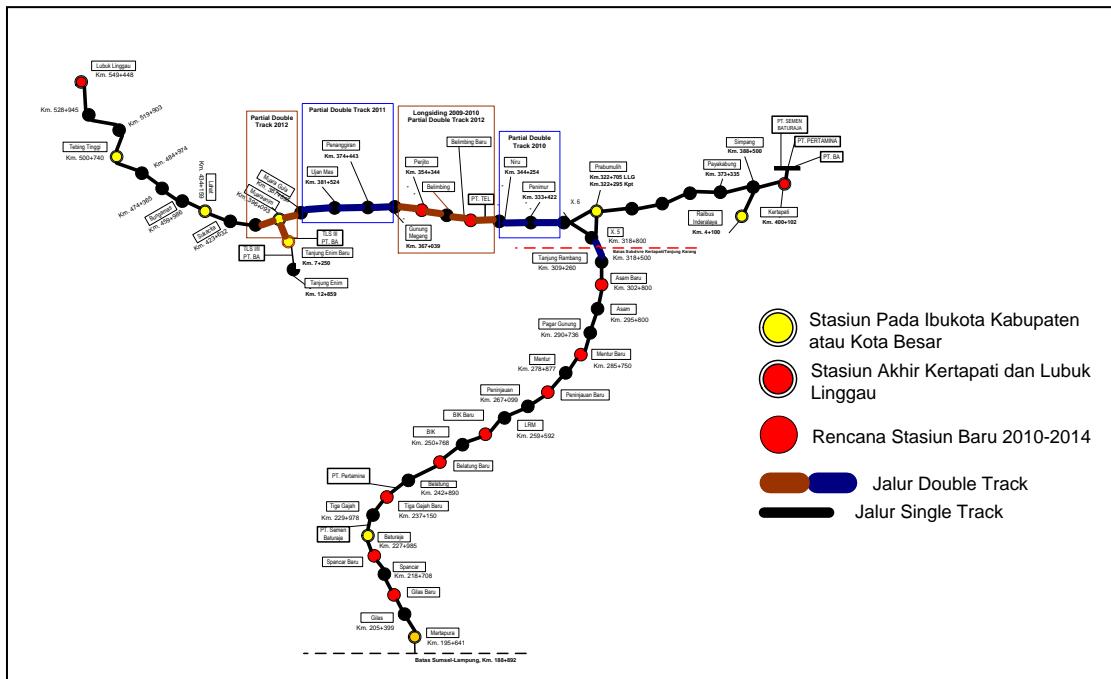
Rute dan Panjang Rel PT. KA Drive III di Wilayah Sumbagsel

No	Lintasan	Panjang (km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Muara Enim	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuk Linggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
	Total	675,95	

Sumber : Dishubkominfo Sumatera Selatan

Gambar 2. 15

Jalur Kereta Api dan Stasiun di Sumatera Bagian Selatan



Transportasi Sungai

Daerah yang memiliki akses baik ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 % dari 3.079 desa di Sumatera Selatan

Tabel 2. 63

Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Banyuasin	Banyuasin	Tanjung Lago	1	4
2	Batanghari	Musi Banyuasin	Batanghari Leko	1	10
3	Calik	Banyuasin	Pulau Rimau	1	10
4	Kelingi	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan	3	5
5	Komering	OKI	Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Lempuing Jaya	4	29
		OKU Timur	Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, Semendawai Barat	5	11
6	Lalan	Musi Banyuasin	Bayung Lencir, Lalan	2	16

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
7	Lematang	Muara Enim	Abab, Rambang Dangku, Sungai Rotan, Tanah Abang, Muara Belida	5	23
8	Lilin	Banyuasin Musi Banyuasin	Tungkal Ilir Sungai Lilin	1 1	2 1
9	Lumpur	OKI	Cengal, Pampangan, Tulung Selapan	3	23
10	Mesuji	OKI	Pedamaran Timur, Sungai Menang, Cengal	3	9
11	Musi	Banyuasin	Banyuasin I, Rantau Bayur	2	24
		Muara Enim	Penukal Utara	1	1
		Musi Banyuasin	Sanga Desa	1	3
		Palembang	Gandus, Ilir Timur II, Kertapati, Seberang Ulu I	4	10
12	Ogan	Ogan Ilir	Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja	12	65
13	Rawas	Musi Rawas	Karang Dapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulu Rawas	5	34
14	Saleh	Banyuasin	Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan	3	30
15	Sugihan	Banyuasin	Muara Sugihan	1	18
16	Telang	Banyuasin	Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang	3	27
Total				62	355

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2012

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik, 3% dalam kondisi rusak dan sisanya (10%) tidak diketahui kondisinya.

Tabel 2. 64
Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
1	Gandus	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006-2008
2	Tangga Buntung (35 Ilir)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1992/1993
3	Sekanak	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006
4	Benteng Kuto Besak (BKB)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2007
5	Bawah Ampera (7 ulu)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	-
6	16 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
7	16 Ilir (Bawah Ampera)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2004
8	Kertapati	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	-
9	Kertapati (Samping Stasiun KA)	S. Ogan, Palembang	Beton	Baik	2011
10	10 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	-
11	Rumah Buruk	-	-	Baik	-
12	Pasar Kuto	-	-	Baik	-
13	1 Ilir	-	-	Baik	-
14	Tangga Takat	-	-	Baik	-
15	13 Ulu	-	-	Baik	-
16	Padatuan	-	-	Baik	-
17	Padatuan 7 Ulu (a)	-	-	Baik	2009
18	Padatuan 7 Ulu (b)	-	-	Baik	2011
19	5 Ulu	-	-	Baik	-
20	4 Ulu	-	-	Baik	-
21	Sei Buaya	-	-	Baik	-
22	Pegayut	-	-	Baik	-
23	Ki Merogan	-	-	Baik	2008
24	Tangga Batu	S. Musi, Palembang	Ponton	Rusak	-
25	Pasar Induk Jakabaring	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2003/2005
26	Sei Lais	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	-
27	Bek Ang DAM (TNI)	S. Musi, Palembang	-	Baik	2010
28	Kampung Kapiten	S. Musi, Palembang	-	Baik	2008
29	Lawang Kidul	S. Musi, Palembang	-	Baik	2008
30	3/4 Ulu	S. Musi, Palembang	-	Baik	2010
31	Masjid Jamik	S. Musi, Palembang	-	Baik	2010
32	Solok Betutu	S. Musi, Palembang	-	Baik	2009
33	Pemulutan(Pos Peng)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1990
34	Tanjung Raja	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1994
35	Muara Kuang	S. Ogan, Ogan Ilir	-	-	-
36	Kuala Sugihan	S. Sugihan, OKI	Ponton	Baik	1990
37	Lebong Hitam	S. Lebong Hitam, OKI	Ponton	Baik	1990
38	Pelabuhan Laut Sungai Lumpur	S. Lumpur, OKI	Kayu	Baik	1990
39	Sungai Batang	S. Batang, OKI	Ponton	Baik	1990
40	Tulung Selapan	S. Tulung Selapan, OKI	Beton	Baik	2000
41	Sugihan Kanan	Jalur 27, OKI	Kayu	Baik	2003
42	Kuala XII	S. Kuala, OKI	Ponton	Baik	1990
43	Cengal	Cengal, OKI	Beton	Baik	2007
44	Pulau Padang	S. Lumpur, OKI	-	Baik	-
45	Pampangan	S. Lumpur, OKI	-	Baik	-
46	Sukodarmo (Jejawi)	S. Komering, OKI	Beton	Baik	2007
47	Muara Kumbang	S. Musi, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
48	Upang	S. Sugihan, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
49	Makarti Jaya	S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin	Ponton	Rusak	1983
50	Sungsang	S. Lilin, Banyuasin	Ponton	Baik	2004/2006
51	Sugihan (Ma. Padang)	Jalur 20, Banyuasin	Ponton	Baik	1998

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
52	Sugihan Kiri (cendana)	Jalur 14, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
53	Sugihan Kiri (Timbul Jaya)	Jalur 13, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
54	Gasing	Gasing	Beton, Ponton	Baik	2003/2004
55	Muara Telang	Jalur 8, Banyuasin	Ponton	Baik	2003
56	Telang Jaya	Jalur 8, Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	1992
57	Simpang PU	S. Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	1997
58	Muara Telang	Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	2005
59	Sembilang	S. Sembilang, Banyuasin	Ponton	Baik	2003/2004
60	Pengumbuk	S. Musi Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	2001
61	Teluk Betung	P. Rimau, Banyuasin	Ponton	Baik	-
62	Muara Padang	S. Sebalik, Banyuasin	Beton	Baik	-
63	Penuguan	S. Lilin, Banyuasin	-	-	-
64	Karang Agung	S. Lalan, Muba	Beton	Baik	1985
65	Sungai Lilin	S. Lilin, Muba	Ponton	Baik	2004
66	Sekayu	S. Musi, Muba	Beton	Baik	1993
67	Muara Lematang	S. Lematang, Muba	Ponton	Baik	1990
68	Bayung Lincir	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2009
69	Babat	S. Musi, Muba	-	-	-
70	Telang	S. Lalan, Muba	-	-	-
71	Pangkalan Bulian	S. Batang Hari Leko, Muba	-	-	-
72	Muara Rawas	S. Kelingi, Muba	-	-	-
73	Teluk Kijing	S. Batang Hari Leko, Muba	-	-	-
74	Muara Teladan	S. Batang Hari Leko, Muba	-	-	-
75	Simpang	S. Komering, OKU	-	-	-
76	Banding Agung	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja	Baik	1993
77	Kota Batu	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja, Lantai Kayu	Rusak	1994
78	Talang Pangeran (Pemulutan)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	2006
79	Muara Rupit	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	-
80	Muara Kelinci	S. Kelinci, Musi Rawas	-	Baik	-
81	Muara Lakitan	S. Kelinci, Musi Rawas	-	Baik	-
82	Beringin Teluk	S. Rawas, Musi Rawas	-	Baik	-
83	Pauh	S. Rawas, Musi Rawas	-	Baik	-
84	Padang Tepung	S. Kelinci, Lahat	-	Baik	-
85	Kota Agung	S. Lematang, Lahat	-	Baik	-
86	Muara Enim	S. Lematang, Muara Enim	-	Baik	-
87	Beringin	S. Ogan, Muara Enim	-	Baik	-
88	Gunung Megang	S. Lematang, Muara Enim	-	Baik	-
89	Muara Lematang	S. Musi, Muara Enim	-	Baik	-

Sumber : Statistik Dishubkominfo 2012

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari sedimentasi. Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai outlet utama untuk pengangkutan barang melalui kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain : sulit untuk dikembangkan karena berada ditengah pemukiman, kedalaman alur pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi ke ambang luar relatif jauh ± 108 km (60 mil) yang menyebabkan tingginya biaya operasional kapal yang akan berlabuh.

Transportasi Udara

Angkutan udara di Sumatera Selatan juga belum seimbang, dari 8 bandar udara yang ada, hanya 3 yang beoperasi (SMB II Palembang dan Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagaralam), sedangkan 5 bandara lainnya (bandara perintis) saat ini belum beroperasional sehingga pilihan perjalanan orang dan barang di Sumsel sebagian besar tertumpu pada fasilitas Jalan Raya.

Tabel 2. 65
Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Nama Bandara	Run Way	Jenis Pesawat	Keterangan
1	Palembang	SMB II	3000 x 45 m	Boeing 737/ Air Bus 330	Operasional Bandara Internasional
2	Muara Enim	Pendopo	1300 x 20 m	-	Vacuum
3	Muara Enim	Tanjung Enim	900 x 23 m	Cassa 212	Vacuum
4	Muara Enim	Serdang Gelumbang	1000 x 18 m	DHC-6	Vacuum
5	Lubuk Linggau	Silampari	2050 x 30 m	Fokker 50	Operasional dengan rute Lubuk Linggau-Palembang dan Lubuk Linggau Jakarta (PP)
6	Oku Selatan	Banding Agung	900 x 23 m	Cassa 212	Vacuum
7	Pagaralam	Atung Bungsu	1400 x 30 m	Fokker 50	Mualai Operasional Tahun 2014
8	Muba	Sekayu	900 x 23 m	Cassa 212	Vacuum

Sumber : Dishubkominfo, 2012

Dari gambaran kondisi infrastruktur tersebut ada beberapa fokus yang harus dihadapi ke depannya, antara lain Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor unggulan masih perlu ditingkatkan terutama untuk mengangkut barang (produk dalam skala besar yaitu Batubara, CPO, Karet, Kayu, Pulp, Semen, dll), pembangunan infrastruktur juga harus mampu menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah sekaligus untuk pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur kedepannya

juga harus mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, untuk itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergis dengan Pemerintah untuk segera mewujutkan beberapa pembangunan infrastruktur strategis (Jalan bebas hambatan, Jembatan Musi, KA Doble Track, Monorail)

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

2.3.1.8. 1 Pencemaran Air

Sumatera Selatan memiliki sumber daya air yang relatif besar dan tersebar namun laju pertambahan penduduk dan banyaknya aktifitas ekonomi menyebabkan kebutuhan air semakin meningkat dan penurunan kualitas air. Pencemaran dan kekurangan air secara fisik dapat disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri karena belum seluruh industri memiliki IPAL, limbah pestisida, kerusakan lahan yang menyebabkan lumpur, rumput liar, kegiatan transportasi sungai, dan pemakaian air tanah yang tidak terkontrol.

Tabel 2. 66

Kualitas Air Mutu DAS Musi Sumatera Selatan, 2012

No.	Lokasi	Nama Sungai	Kab/Kota	Skor Penilaian	Kelas	Status Mutu Air
1	Pedamaran	Babatan	OKI	-24	III	sedang
2	Teluk	Batang Hari Leko	Musi Banyuasin	-5	II	ringan
3	Muara Beliti	Beliti	Musi Rawas	-13	III	sedang
4	Muara Burnai	Burnai	OKI	-16	III	sedang
5	Banding Agung	Danau Ranau	OKU Selatan	-11	III	sedang
6	Indramayu	Enim	Muara Enim	-3	II	ringan
7	Darmo	Enim	Muara Enim	-11	III	sedang
8	PLTU/ Jembatan	Enim	Muara Enim	-6	II	ringan
9	Jembatan Enim II	Enim	Muara Enim	-14	III	sedang
10	Indralaya	Kelekar	Ogan Ilir	-20	III	sedang
11	Prabumulih Timur	Kelekar	Prabumulih	-15	III	sedang
12	Muara Kelingi	Kelingi	Musi Rawas	-10	II	ringan
13	Musi Rawas/ Perbatasan	Kelingi	Musi Rawas	-18	III	sedang
14	Muara Keramasan	Keramasan	Palembang	-17	III	sedang
15	Rambutan	Keramasan	Ogan Ilir	-22	III	sedang

No.	Lokasi	Nama Sungai	Kab/Kota	Skor Penilaian	Kelas	Status Mutu Air
16	Sukarami	Kikim	Lahat	-3	II	ringan
17	Bungamas	Kikim	Lahat	-3	II	Ringan
18	Plaju/S. Gerong	Komering	Palembang	-10	II	ringan
19	Sungai Dua	Komering	Banyuasin	-34	IV	berat
20	Kayu Agung	Komering	OKI	-16	III	sedang
21	Terusan Sigonang	Komering	OKI	-12	III	sedang
22	SP. Padang/Ulak Jeremun	Komering	OKI	-16	III	sedang
23	Muara Dua	Komering	OKU Selatan	-17	III	sedang
24	Martapura	Komering	OKU Timur	-11	III	sedang
25	Rasuan	Komering	OKU Timur	-12	III	sedang
26	Cempaka	Komering	OKU Timur	-15	III	sedang
27	Gunung Batu	Komering	OKU Timur	-16	III	sedang
28	Muara Lakitan	Lakitan	Musi Rawas	-8	II	ringan
29	Terawas	Lakitan Hulu	Musi Rawas	-8	II	ringan
30	Muara Lawai	Lawai	Lahat	-15	III	sedang
31	Tanjung Priok	Lematang	Muara Enim	-15	III	sedang
32	Teluk Lubuk	Lematang	Muara Enim	-19	III	sedang
33	Banuayu	Lematang	Muara Enim	-18	III	sedang

No.	Lokasi	Nama Sungai	Kab/Kota	Skor Penilaian	Kelas	Status Mutu Air
34	Sukamerindu	Lematang	Muara Enim	-15	III	sedang
35	Jembatan Kebur	Lematang	Lahat	-11	III	sedang
36	Pulau Pinang	Lematang	Lahat	-11	III	sedang
37	Sukajadi	Lematang/Air Terjun	Pagar Alam	-2	II	ringan
38	Gunung Megang	Lengi	Muara Enim	-16	III	sedang
39	Lengkayap	Lengkayap	OKU	-21	III	sedang
40	Tanjung Mulak	Lim	Lahat	-12	III	sedang
41	Tanjung Aur	Lingsing	Lahat	-9	II	ringan
42	Kota Lubuk Linggau	Maluh	Lb Linggau	-3	II	ringan
43	Pulo Kerto	Musi	Palembang	-10	II	ringan
44	Intake PDAM	Musi	Palembang	-14	III	sedang
45	Jembatan Ampera	Musi	Palembang	-10	II	ringan
46	Selat Borang	Musi	Banyuasin	-22	III	sedang
47	Pulau Burung	Musi	Banyuasin	-16	III	sedang
48	Desa Upang	Musi	Banyuasin	-20	III	sedang
49	Muara Tebing Air Telang	Musi	Banyuasin	-18	III	sedang
50	Tanjung Buyut	Musi	Banyuasin	-10	II	ringan
51	Talang Kelapa	Musi	Musi Banyuasin	-20	III	sedang

No.	Lokasi	Nama Sungai	Kab/Kota	Skor Penilaian	Kelas	Status Mutu Air
52	Jembatan Sekayu	Musi	Musi Banyuasin	-14	III	sedang
53	Tebing Tinggi	Musi	4 Lawang	-6	II	ringan
54	Tanjung Raya	Musi	4 Lawang	-15	III	sedang
55	Hulu Musi	Musi	4 Lawang	-14	III	sedang
56	Tebat Agung	Niru	Muara Enim	-9	II	ringan
57	Kertapati	Ogan	Palembang	-18	III	sedang
58	Tanjung Raja	Ogan	Ogan Ilir	-18	III	sedang
59	Pemulutan	Ogan	Ogan Ilir	-20	III	sedang
60	Desa Pusar	Ogan	OKU	-7	II	ringan
61	Peninjauan	Ogan	OKU	-8	II	ringan
62	Kerta Mulya	Ogan	OKU	-14	III	sedang
63	Tanjung Rambang	Rambang	Prabumulih	-11	III	sedang
64	Muara Rupit	Rawas	Musi Rawas	-14	III	sedang
65	Noman	Rupit	Musi Rawas	-7	II	ringan
66	Muara Rupit	Rupit	Musi Rawas	-11	III	sedang
67	Karang Jaya	Rupit	Musi Rawas	-5	II	ringan
68	Rantau Nipis	Selabung	OKU Selatan	-11	III	sedang
69	Semeteh	Semanggus	Musi Rawas	-5	II	ringan

No.	Lokasi	Nama Sungai	Kab/Kota	Skor Penilaian	Kelas	Status Mutu Air
70	Muara Kumbang T.CM	Terusan Cinta	Banyuasin	-18	III	sedang
71	Muara Tiku	Tiku	Musi Rawas	-2	II	ringan
72	Kota Batu	Warkuk	OKU Selatan	-14	III	sedang

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah (2012)

2.3.1.8.2. Mutu Udara terkait Perubahan Iklim

Hasil uji kualitas udara *ambient* pada 15 kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 67

Kualitas Udara *Ambient* pada 15 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan

No.	Lokasi Pemantauan	CO ₂ 30 µg/Nm ³	SO ₂ 900 µg/Nm ³	NO ₂ 400 µg/Nm ³	NH ₃ 24 ppm	Pb 2 µg/Nm ³	TSP 230 µg/Nm ³	Kebisingan 60 dB
1	Palembang	2,853	590,5	124,5585	0,0215	0,0305	92,65	72,2
2	Ogan Ilir	3,946	261,5	232,5	0,0115	0,075	82,65	76,45
3	OKI	1,989	226,5	223	0,0095	0,028	41	67,2
4	OKU Timur	2,452	252,75	239,4	0,013	0,0305	82,4	74,2
5	OKU Selatan	2,207	208,15	221,75	0,0135	0,0195	28,35	71,5
6	OKU	3,4075	309,5	260,5	0,0145	0,0765	90,05	69,8
7	Muara Enim	2,8535	289,5	225	0,017	0,362	69,8	70,55
8	Prabumulih	2,069	319	283	0,0145	0,019	16,45	78,7
9	Lahat	2,222	265	250,5	0,0265	0,041	24,1	70,7
10	Pagar Alam	2,6275	186	188,5	0,0135	0,026	19,45	52,1
11	Empat Lawang	2,1725	283	263	0,012	5,411	22,976	75,75
12	Musi Rawas	2,8225	319	274,5	0,0175	0,025	32,7	73,95
13	Lubuk Linggau	1,904	257	257	0,013	0,031	24,6	76,5
14	Musi Banyuasin	2,982	296	250	0,0165	0,0315	74,1	67,5
15	Banyuasin	2,1435	335,5	292,5	0,018	0,0285	50	75,2

Sumber BLH, 2011

2.3.1.8.3. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data yang ada pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai Pergub Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 68
Emisi GRK dari enam sektor di Sumatera Selatan

No.	Sumber Emisi	Ton CO ₂ eq
1	Sampah/limbah	973,349.00
2	Industri	2,434,686.09
3	Energi	2,333,240,809.75
4	Transportasi	2,036,551.78
5	Pertanian	1,069,250.79
6	Hutan dan gambut	78,814,596.44
	Jumlah	2,418,569,243.84

2.3.1.8.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2007 telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi. Selain itu pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Dannish International Development Agency (DANIDA) juga mulai mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada dasarnya merupakan modifikasi dari EPI.

Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal: Membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendisain program lingkungan, dan mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 69
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	n.a	69,30	75,70	77,50	n.a

Sumber : EKPD Provinsi Sumatera Selatan, 2013

2.3.1.9. Pertanahan

2.3.1.9. 1. Luas Tanah Bersertifikat

Tabel 2. 70
 Persentase Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan
 2008-2013

No	Tahun	Tanah Terdaftar		Tanah Belum Terdaftar		% Terdaftar Terhadap Lahan
		Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)	
1	s/d 2008	992,862	1,913,147	3,883,167	3,457,203	
2	2009	39,25	99,975	3,843,917	3,357,228	
3	2010	11,305	20,298	3,832,612	3,336,930	
4	2011	62,032	146,961	3,770,580	3,189,970	
5	2012	20,472	148,097	3,750,108	3,041,872	
6	2013	71,057	1,111,385	3,679,051	1,930,487	
JUMLAH		1,196,978	3,439,864			64.05

Ket : Lahan yang disertifikasi merupakan bukan kawasan hutan

Sumber : Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.1.10.1. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Seluruh Kabupaten Provinsi di Selatan sudah mengimplementasikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik (E-KTP).

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.1.11.1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender. Semakin tinggi rasio antara IPM dan IPG, semakin rendah kesenjangan gender, sebaliknya semakin rendah rasio semakin tinggi gap kesenjangan gender.

Tabel 2. 71

Rasio Kesenjangan Gender Provinsi Sumatera Selatan
 Tahun 2008-2012

TAHUN	IPM	IPG	RASIO (%)
2008	72.05	64.80	89.94
2009	72.61	64.97	89.48
2010	72.95	66.00	90.47
2011	73.42	66.48	90.55
2012	73.99	68.88	93.09

Sumber : BPS, data diolah

Perkembangan rasio IPM dan IPG di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2008 sampai 2012 berfluktuatif, pada tahun 2008 sebesar 89,94 % menurun menjadi 89,48% pada tahun 2009, meningkat menjadi 90,47% pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan kembali menjadi 90,55% pada

tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2012 menjadi 93,09% pada tiga tahun terakhir. Hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan kesetaraan gender di Sumatera Selatan, namun demikian masih terdapat gap kesetaraan gender sebesar 6,91%. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil-hasil pembangunan di Sumatera Selatan belum memberikan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Apabila dilihat dari komponen pembentuk IPG di Sumatera Selatan, pada komponen Angka Harapan Hidup dari tahun 2009 -2012 menunjukkan trend meningkat dan angka perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, hal ini mengindikasikan bahwa Angka Harapan Hidup Perempuan lebih tinggi dari laki-laki artinya agar terjadi kesetaraan, yang perlu diprioritaskan untuk diintervensi pada Angka Harapan Hidup adalah laki-laki. Sementara untuk komponen Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita, walaupun trendnya juga menunjukkan peningkatan, namun apabila dilihat dari angka capaiannya ternyata yang lebih tinggi dari ketiga komponen tersebut adalah laki-laki, terutama pada komponen pengeluaran perkapita. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender pada ketiga komponen IPG tersebut maka perempuanlah yang diprioritaskan untuk diintervensi karena ketiganya menunjukkan angka perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kesenjangan gender yang paling besar dari ketiga komponen tersebut adalah pada komponen Pengeluaran perkapita. Namun kalau dilihat dari capaian ketiga komponen tersebut ketiganya masih menunjukkan kesenjangan gender dimana laki-laki lebih tinggi dari perempuan, terutama pada komponen pengeluaran perkapita, angka capaian laki-laki jauh lebih tinggi dari perempuan. Artinya untuk ketiga komponen tersebut, untuk menciptakan kesetaraan maka yang diprioritaskan untuk diintervensi adalah pada perempuan, utamanya untuk komponen pendapatan perkapita.

Selatan rata-rata menunjukkan trend meningkat dari tahun 2009 -2011, namun pada tahun 2012 hanya komponen sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang mengalami peningkatan sedangkan untuk komponen Keterlibatan Perempuan di Parlemen dan Perempuan sebagai Tenaga Manager Profesional, Administrasi, Teknisi pada tahun 2012 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan menurunnya peran perempuan di bidang politik dan peran dalam proses pengambil keputusan, sementara kontribusi perempuan dalam bidang ekonomi mengalami peningkatan. Namun demikian apabila dilihat capaian secara keseluruhan, Pemberdayaan Perempuan di Sumatera Selatan Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Sumatera Selatan dari tahun 2009 -2012 menunjukkan trend meningkat dari 62,46% pada tahun 2009 menjadi 68,34% pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Sumatera Selatan selama periode tersebut mengalami peningkatan. Namun demikian apabila dilihat dari capaian komponen IDG Sumatera masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2. 72

**Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender
Tahun 2008-2012**

TAHUN	Komponen IPG								IPG	
	Angka harapan hidup		Angka melek huruf		Rata-rata lama sekolah		Pengeluaran per kapita			
	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan		
2008	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
2009	67.48	71.44	98.41	96.04	7.98	7.35	69.7	30.34	64.97	
2010	67.68	71.64	98.55	96.52	8.12	7.51	69.5	30.54	66.00	
2011	67.68	71.64	98.57	96.55	8.14	7.53	69.2	30.83	66.48	
2012	67.89	71.85	98.59	96.58	8.26	7.69	66.5	33.51	68.88	

Sumber : BPS, data diolah

Apabila dilihat dari komponen pembentuk IPG di Sumatera Selatan, pada komponen Angka Harapan Hidup dari tahun 2009 -2012 menunjukkan trend meningkat dan angka perempuan lebih tinggi daripada laki-lak. Hal ini mengindikasikan bahwa Angka Harapan Hidup Perempuan lebih tinggi dari laki-laki artinya agar terjadi kesetaraan, yang perlu diprioritaskan untuk diintervensi pada Angka Harapan Hidup adalah laki-laki. Sementara untuk komponen Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita, walaupun trendnya juga menunjukkan peningkatan, namun apabila dilihat dari angka capaiannya ternyata yang lebih tinggi dari ketiga komponen tersebut adalah laki-laki, terutama pada komponen pengeluaran perkapita. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender pada ketiga komponen IPG tersebut maka perempuanlah yang diprioritaskan untuk diintervensi karena ketiganya menunjukkan angka perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kesenjangan gender yang paling besar dari ketiga komponen tersebut adalah pada komponen Pengeluaran perkapita. Namun kalau dilihat dari capaian ketiga komponen tersebut ketiganya masih menunjukkan kesenjangan gender dimana laki-laki lebih tinggi dari perempuan, terutama pada komponen pengeluaran perkapita, angka capaian laki-laki jauh lebih tinggi dari perempuan. Artinya untuk ketiga komponen tersebut, untuk menciptakan kesetaraan maka yang diprioritaskan untuk diintervensi adalah pada perempuan, utamanya untuk komponen pendapatan perkapita.

Tabel 2. 73

Perkembangan Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012

Tahun	Komponen IDG			IDG
	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja	Perempuan sebagai Tenaga Manajer Profesional Administrasi Teknis	
2008	n.a	n.a	n.a	n.a
2009	10.7	30.34	43.61	62.46
2010	18.46	30.54	50.01	62.81
2011	18.46	30.83	51.79	67.32
2012	14.67	33.51	49.34	68.34

Sumber : BPS 2012

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.3.1.12.1 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB

Persentase Pasangan usia Subur yang menjadi peserta KB beberapa tahun terakhir (2009, 2010, 2011, 2012) berfluktuasi antara 71, 51 % s.d 73,49%. Meski masih berfluktuasi angka tersebut telah cukup tinggi yaitu lebih dari target Provinsi sebesar 70 %.

Tabel 2. 74

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB
Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase PUS Peserta KB	NA	NA	NA	73,49	71,51

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.12.2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I pada tahun 2010 s.d 2012 mengalami penurunan dari 40,59% pada tahun 2010, menjadi 37,46 pada tahun 2011 dan menurun lagi menjadi 35,56% pada 2012.

Tabel 2. 75

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	NA	NA	40,59	37,46	35,56

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.3.1.13. Sosial

2.3.1.13.1 Jumlah Panti Asuhan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, anak-anak terlantar menjadi tanggungjawab pemerintah untuk merawatnya. Jumlah panti asuhan di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang periode 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 76

Jumlah Panti Asuhan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Panti Asuhan	200	200	200	113	168

Sumber : BPS, 2013

2.3.1.14. Ketenagakerjaan

2.3.1.14.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkat Kerja mengalami penurunan dalam pertengahan tahun 2010- dan 2011 meskipun capaian pada tahun 2008 dimana angka 69,06 persen mengalami kenaikan pada tahun 2012 yakni 69,56. Terjadi penurunan angka partisipasi angkatan kerja dari tahun 2011 yakni 71,5 persen menjadi 69,56 persen ditahun 2012 agar ditingkatkan dalam program ketenagakerjaan maupun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan menurut struktur ketenagakerjaan.

Tabel 2. 77

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,06	68,31	70,23	71,5	69,56

Sumber : BPS Sumsel 2013

2.3.1.14.2 Besaran Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 37,53 persen dimana pada tahun 2010 hanya 24,9 persen namun harus menjadi program prioritas pada tahun kedepannya agar dapat menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia agar unggul dapat dapat diterima sesuai dengan bidangnya.

Tabel 2. 78

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Ditempatkan
Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Besaran pencari kerja yg terdaftar & ditempatkan	n.a	n.a	24,9	32,03	37,53

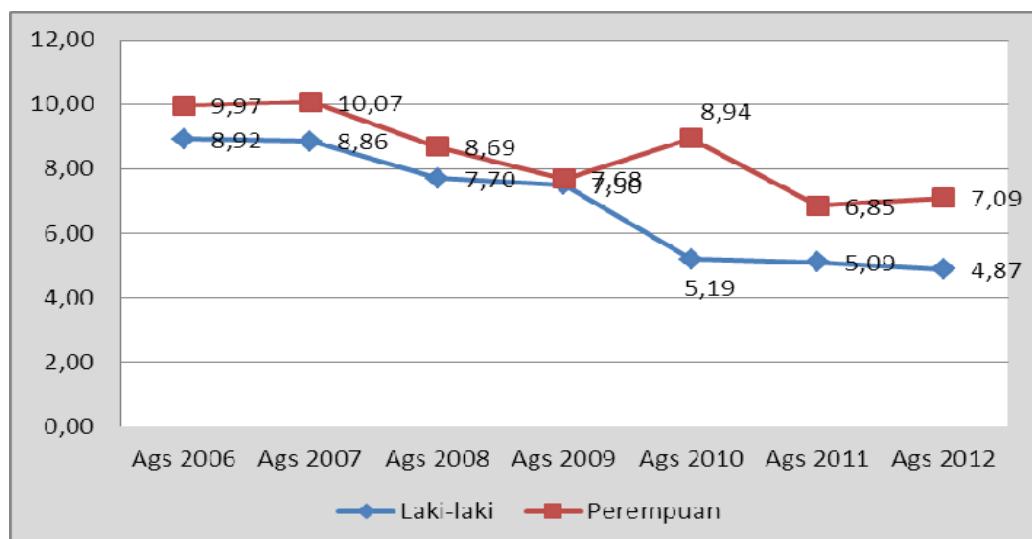
Sumber : BPS Sumsel 2013

2.3.1.14.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan pada Agustus 2012 mencapai 5,70 persen, mengalami penurunan 0,07 persen dibandingkan TPT pada Agustus 2011. Dari sisi gender, TPT laki-laki pada Agustus 2012 sebesar 4,87 persen, lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang mencapai 7,09 persen. TPT di daerah perkotaan pada Agustus 2012 sebesar 9,51 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT daerah pedesaan yang hanya sebesar 3,88 persen. Jika dibandingkan persen.

Gambar 2. 16

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen)
Agustus 2006 - Agustus 2012



Sumber: Sakernas Agustus 2006 - Agustus 2012

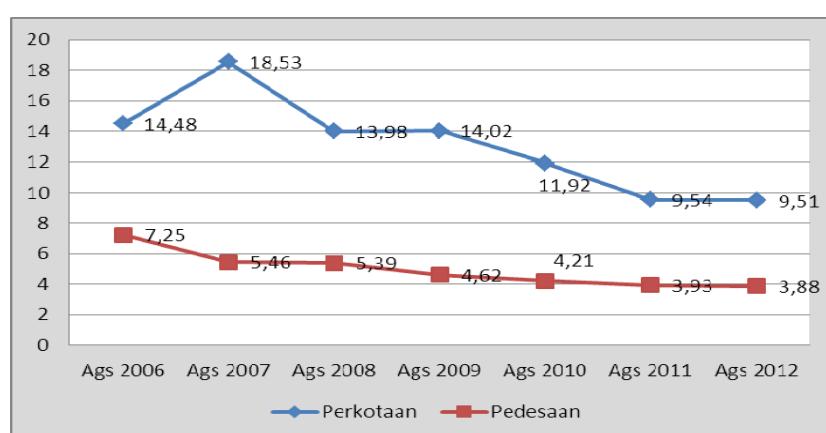
Tabel 2. 79

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Sumatera Selatan, 2008-2012

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
	Kab/Kota	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
1	Ogan Komering Ulu	8,76	7,29	5,46	4,96	5,40
2	Ogan Komering Ilir	7,31	7,04	7,46	4,68	10,95
3	Muara Enim	7,19	5,40	5,61	5,22	4,59
4	Lahat	4,48	4,44	2,50	4,67	4,46
5	Musi Rawas	2,58	2,64	2,40	3,87	1,78
6	Musi Banyuasin	5,29	6,79	5,99	4,46	3,47
7	Banyuasin	3,65	5,11	4,16	5,57	5,17
8	OKU Selatan	4,25	3,56	3,99	3,31	2,81
9	OKU Timur	8,22	5,51	3,68	4,05	2,62
10	Ogan Ilir	4,08	2,87	3,03	5,15	3,09
11	Empat Lawang	5,58	7,32	5,36	3,99	2,54
12	Kota Palembang	16,89	15,78	13,97	10,05	10,06
13	Kota Prabumulih	10,43	11,47	9,81	7,41	8,83
14	Kota Pagar Alam	8,55	11,37	9,76	6,02	3,91
15	Kota Lubuk Linggau	15,54	11,24	9,38	7,4	6,85
	Sumatera Selatan	8,08	7,61	6,65	5,77	5,70
	Nasional	8,39	7,87	7,14	6,56	6,14

Gambar 2. 17

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen)
Agustus 2006 - Agustus 2012



Sumber: Sakernas Agustus 2006 - Agustus 2012

Tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di kota selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, juga dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan juga banyaknya pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja, maka berakibat pada tingginya tingkat pengangguran. Berbeda dengan daerah pedesaan yang pada umumnya tingkat pendidikan penduduknya relatif masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan-pekerjaan di sektor tradisional.

2.3.1.15. Koperasi dan UKM

Tabel 2. 80
Perkembangan Koperasi di Sumatera Selatan Tahun 2008–2012

URAIAN	SATUAN	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Jumlah Koperasi	Unit	4.164	2,79	4.448	6,82	4.737	6,50	5.122	8,12	5.225	5,1
Jumlah Anggota	Orang	746.920	3,03	766.700	2,65	782.418	2,05	798.588	2,07	800.570	1,44
Pelaksanaan RAT	Unit	1.535	1,52	1.963	27,88	2.252	14,72	2.298	2,04	2.398	11,24
Modal Sendiri	Rp. Juta	947.971	0,04	948.616	0,07	966.655	1,90	986.055	2,01	987.375	0,83
Modal Luar	Rp. Juta	641.949	-53,86	702.454	9,43	716.433	1,99	728.433	1,67	728.533	2,7
Volume Usaha	Rp. Juta	2.418.527	2,20	2.483.341	2,68	2.535.985	2,12	2.586.985	2,01	2.638.338	1,82
SHU	Rp. Juta	111.985	0,93	112.283	0,27	114.753	2,20	117.053	2,00	117.713	1,0
Partisipasi Anggota	Rp. Juta	3.238	1,35	3.239	0,03	3.241	0,06	3.242	0,03	3.296	0,36
Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	36.255	0,94	36.741	1,34	37.163	1,15	37.463	0,81	37.669	0,78

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumsel. 2011

2.3.1.16. Penanaman Modal

2.3.1.16.1 Jumlah Investor PMDN dan PMA

Tabel 2. 81

Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Investor PMDN	14	16	38	42	34
Jumlah Investor PMA	35	45	53	73	73

Sumber : BPMPD Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1.16.2 Jumlah Realisasi PMDN dan PMA

Tabel 2. 82

Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai realisasi investasi PMDN (juta Rupiah)	7.155.278	7.155.310	10.290.899	11.149.994	6.898.790
Nilai realisasi investasi PMA (Juta Rupiah)	599.738	742.460	1.188.031	5.525.347	9.052.521

Sumber : BPMPD Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1.16.3 Jumlah Tenaga Kerja yang diserap PMDN dan PMA

Tabel 2. 83

Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap PMDN dan PMA
di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Tenaga Kerja PMDN	3.599	8.773	8.802	35.237	21.683
Tenaga Kerja PMA	10.071	13.339	16.975	26.391	33.290

Sumber : BPMPD Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1.17. Kebudayaan

2.3.1.17.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2. 84

Jumlah Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	n.a	n.a	7	9	13

2.3.1.17.2 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2. 85

Jumlah Sarana untuk Menyelenggarakan Festival Seni dan Budaya di
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4	4	3	3	3

2.3.1.18. Ketahanan Pangan

2.3.1.18.1. Regulasi Ketahanan Pangan

Tabel 2. 86

Regulasi Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan

No	JENIS	JUMLAH	NOMOR	Mengatur Tentang
1	UU	1	16 Tahun 2012	Pangan
2	PP	1	68 Tahun 2013	Ketahanan Pangan
3	Perpres	1	22 Tahun 2009	Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4	Permentan	2	65/Permentan/OT.140/12/2012	Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan,
			43/Permentan/OT.140/10/2009	Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
5	Perda	1	06 Tahun 2007	Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006-2025
6	Pergub	6	71 Tahun 2008	Pembentukan OKKP-D Provinsi Sumsel
			63 Tahun 2009	Percepatan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Sumsel
			03 Tahun 2012	Standar Biaya Perjalanan Dinas
			12 Tahun 2012	Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Provinsi Sumatera Selatan
			18 Tahun 2012	Perubahan Pergub Sumsel No 12 Tahun 2012
			38 Tahun 2012	Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan
7	Keputusan Gubernur	1	319/KTPS/DISPTPH/2013	Pembentukan Tim Pemantauan Dan Pembinaan Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
8	Keputusan Kepala Badan	1	912/SK/BAN.KETPANG.391/I/2013	Penunjukkan Dan Penetapan Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) BKP Sumatera Selatan

Sumber : Badan Ketahanan provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung pelaksanaan program-program yang terkait dengan ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan sudah didukung dengan regulasi yang terkait dengan ketahanan pangan. Selain peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda No. 06 Tahun

2006 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006-2025. Selain itu, Pemerintah Sumatera Selatan juga mengeluarkan enam Peraturan Gubernur.

2.3.1.19.2. Ketersedian Pangan Utama

Tabel 2. 87

Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.87

Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Sumatera Selatan

No	Komoditi	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
		Produksi (Ton)	Keter-sediaan Bahan Pangan	Kon-sumsi	Produksi (Ton)	Keterse-diaan Bahan Pangan	Kon-sumsi	Produksi (Ton)	Keterse-diaan Bahan Pangan	Konsumsi	Produksi (Ton)	Keterse-diaan Bahan Pangan	Konsumsi	Produk si (Ton)	Keterse-diaan Bahan Pangan	Kon-sumsi
1	Beras	1.718.660	1.598.653	765.436	1.810.924	1.303.726	739.596	2.038.394	1.810.924	719.708	2.123.541	2.066.843	733.022	3.070.181	1.873.847	809.376
2	Jagung	101.439	90.281	1.326	112.231	99.886	1.300	125.796	111.958	1.489	125.688	111.861	1.517	112.918	100.496	959
3	Ubi Kayu	197.150	91.635	86.250	170.139	144.618	1.001.457	159.292	143.206	137.832	159.346	13.113	69.052	143.565	137.636	27.635
4	Ubi Jalar	19.621	17.266	14.687	25.405	22.356	17.286	22.839	17.847	23.841	18.309	16.112	7.906	17.380	15.294	6.035
5	Kedelai	7.305	41.809	44.113	14.938	42.482	50.975	11.664	39.231	67.798	13.710	19.727	2.769	12.162	11.513	886.374
6	Gula Pasir	52.000	87.099	44.737	52.000	78.022	87.394	225.860	223.645	88.659	91.124	84.810	140.382	104.793	103.766	81.383
7	Minyak Goreng/Sawit	177.087	174.342	44.737	256.737	252.758	44.113	271.467	267.259	64.073	273.539	269.299	24.282	324.327	319.300	65.733
8	Sayuran dan Buah-buahan	776.059	393.233	731.851	2.789.936	617.751	739.233	679.986	420.880	394.498	435.673	405.800	405.711	597.668	573.046	
9	Daging	23.281	22.579	5.459	10.390	26.033	5.823	4.254	26.015	3.844	41.253	25.406	97.129	36.568	28.012	341.973
10	Telur	50.127	31.567	58.930	51.050	31.537	62.751	58.323	4.098	73.758	58.524	33.761	178.323	60.318	54.574	6.965
11	Susu	27.212	32	139.773	27.814	57.012	18.586	28.205	28.245	21.606	71	111	90.299	66	110	65.169
12	Ikan	312.510	228.918	90.565	321.887	235.742	148.447	3.822	8.091	175.084	341.053	330.228	65.259	820.441	795.369	24.618
13	Kacang Tanah	-	-	-	13.702	-	1.661	6.109	-	7.763	-	-	-	2.314	-	154.589
14	Kacang Hijau	4.172	-	4.107	4.158	-	4.757	3.280	-	2.719	-	-	-	2.479	-	1.607
																1.128

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumsel

2.3.1.19. Statistik

2.3.1.19.1 Ketersediaan Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan PDRB Kabupaten/Kota

Tabel 2. 88

Ketersediaan Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan PDRB Kabupaten/Kota

Jenis Buku	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kabupaten/kota Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada
PDRB Kabupaten/Kota	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Sumsel

Untuk mendukung perencanaan keberadaan data dan informasi sangatlah dibutuhkan. Untuk itulah keberadaan buku yang menginformasikan data-data terkait dengan pembangunan sangat dibutuhkan. Buku Kabupaten/kota dalam angka maupun buku PDRB di provinsi Sumatera sudah tersedia dengan sangat baik, baik berupa soft-file maupun dalam bentuk print-out. Buku-buku ini merupakan hasil kerjasama antara Bappeda dan Badan Pusat Statistik di masing-masing wilayah.

2.3.1.20. Komunikasi dan Informatika

2.3.1.20.1 Persentase RT menurut Beberapa Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi 2008-2012

Tabel 2. 89

Persentase RT menurut Beberapa Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi 2008-2012

Persentase RT	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Memiliki Telepon Rumah	8,25	8,36	8,64	7,05	5,11
Ada Anggota RT yang memiliki Ponsel	51,70	58,91	75,03	81,00	86,38
Memiliki Komputer	6,96	9,08	9,45	9,95	12,04
Akses Internet	n.a	n.a	9,20	9,25	10,87
Akses Internet di Rumah	3,57	1,76	2,49	2,42	2,86
Ada Anggota RT Akses Internet di Luar Rumah	5,42	9,18	8,56	8,67	10,21

Sumber : BPS, Inkesra 2013

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap informasi dan juga merupakan salah satu penanda terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dari data yang ada kepemilikan telefon rumah masih kecil dan terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan kebutuhan komunikasi rumah tangga mulai tergantikan dengan keberadaan telfon genggam (seluler). Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kepemilikan telepon seluler.

Di sisi lain, walaupun tren kepemilikan selalu meningkat, namun persentasenya masih belum terlalu tinggi, hal ini disebabkan harga komputer yang cukup tinggi. Hal yang cukup menarik adalah perbedaan antara akses internet di dalam dan luar rumah, dimana akses Rumah Tangga di dalam rumah lebih rendah dibandingkan di luar rumah. Hal ini disebabkan karena akses internet di luar rumah biasanya dilakukan melalui telfon seluler, warnet, kantor dan sekolah. Selain itu program *Sumsel free wifi*, yang mulai dilaksanakan tahun 2011, cukup membantu masyarakat untuk mengakses internet.

2.3.1.21. Perpustakan

2.3.1.21.1 Jumlah Perpustakaan

Tabel 2. 90

Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan 2008-2013

Jenis Perpustakaan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Desa	201	235	280	429	n.a
Umum	30	30	74	74	n.a
Instansi	15	52	128	208	n.a
Sekolah	n.a	678	631	1.644	n.a
Perguruan Tinggi	37	66	59	81	n.a
Rumah Ibadah	n.a	125	122	181	n.a

Sumber : BPS, DDA 2009-2012

2.3.1.21.2 Koleksi Buku Perpustakaan Daerah

Tabel 2. 91

Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2008-2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Judul Buku	n.a	93.014	610	92.819	n.a
Jumlah Eksemplar	n.a	299.899	6.100	335.420	n.a

Sumber : BPS, DDA 2009-2012

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pertanian

2.3.2.1.1 Produktivitas Bahan Pangan

Tabel 2. 92

Produktivitas bahan pangan utama lokal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Produktivitas Padi	Ton/Ha	4,13	4,18	4,25	4,31	4,25
Produktivitas Jagung	Ton/Ha	3,19	3,57	3,72	3,81	3,94
Produktivitas Kedele	Ton/Ha	1,36	1,49	1,54	1,57	1,56

Produktivitas padi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun untuk pada tahun 2012 pertumbuhan produktivitas padi menunjukkan kecenderungan menurun demikian juga dengan produksinya. Produktivitas jagung dari tahun 2008 - 2012 kecenderungan mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2012 jumlah produksinya mengalami penurunan bila dibanding tahun 2011. Produktivitas kedelai cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan produksinya cenderung fluktuatif, dengan lonjakan produksi yang tinggi dari tahun 2008 sebesar 7.305 ton menjadi 13.702 ton pada tahun 2009 namun tidak diikuti kenaikan drastis pada tingkat produktivitasnya.

Kondisi diatas umumnya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan benih tanaman pangan dengan produksi yang tinggi, kurangnya luas penerapan teknologi spesifik lokasi dan belum optimalnya sumber daya manusia pertanian yang melakukan pembinaan dan penerapan spesifik lokasi. Sisi perlindungan tanaman, kurangnya antisipasi Dampak Perubahan Iklim (banjir dan kekeringan) dan tingginya serangan OPT yang berdampak pada penurunan luas panen dan tingkat produktivitas.

Sisi luas tanam, rendahnya intensitas pertanaman dan berkurangnya ketersediaan lahan sebagai akibat meningkatnya alih fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya luas tanam tanaman pangan. Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah peningkatan sistem perbenihan, peningkatan luas teknologi spesifik lokasi, peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan teknologi spesifik lokasi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan.

Tabel 2. 93

**Kontribusi Sektor pada Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012**

No	PDRB	Kontribusi				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Sektor Primer	42,62	56,02	56,78	56,90	54,48
1.	Pertanian	17,18	17,35	17,54	17,21	16,58
a.	Tanaman Bahan Makanan	4,32	4,89	4,56	4,34	4,09
b.	Tanaman Perkebunan	7,15	6,70	7,16	7,10	6,82
c.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,44	1,47	1,43	1,41	1,43
d.	Kehutanan	1,69	1,99	1,84	1,69	1,60
e.	Perikanan	2,57	2,58	2,55	2,66	2,64
2.	Pertambangan & Penggalian	25,44	21,04	21,70	22,49	21,32
	Sektor Sekunder	29,75	30,67	29,43	28,71	28,66
3.	Industri Pengolahan	23,26	23,64	22,02	20,55	20,12
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0,48	0,51	0,49	0,48	0,48
5.	Bangunan	6,01	6,52	6,92	7,68	8,06
	Sektor Tersier	28,62	30,95	31,34	31,59	33,45
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	11,92	12,78	12,93	13,02	13,63
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,11	4,50	4,62	4,72	4,98
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,36	3,64	3,60	3,60	3,71
9.	Jasa-Jasa	9,23	10,03	10,19	10,25	11,13

Apabila dilihat dari struktur perekonomian Sumatera Selatan dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh sektor primer, dilanjutkan dengan sektor tersier yang menduduki urutan kedua dan sektor sekunder di urutan terakhir. Sektor primer (sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian), dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sektor primer memberikan kontribusi terhadap PDRB Sumatera Selatan sebesar 42,62 persen, dan tahun 2012 naik menjadi 54,48 persen. Peningkatan kontribusi terjadi di sektor pertambangan dan penggalian sedangkan sektor pertanian kontribusinya berfluktuatif. Sub sektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar untuk sektor pertanian, namun mulai dari tahun 2011 s.d 2012 terus mengalami penurunan karena fluktuasi harga. Sub sektor tanaman bahan makanan adalah penyumbang terbesar nomer dua pada sektor pertanian, seperti yang terjadi pada tanaman perkebunan sub sektor tanaman bahan makanan ini juga terus mengalami penurunan.

Sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan, sektor jasa-jasa), kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Selatan dalam lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 peranan sektor tersier 28,62 persen dan tahun 2012 menjadi sebesar 33,45 persen. Peningkatan kontribusi terjadi di hampir semua sektor tersier, kecuali sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang peranannya berfluktuatif.

Sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan) kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2008 kontribusi sektor sekunder sebesar 29,75 persen dan tahun 2012 kontribusinya turun kembali menjadi 28,66 persen. Penurunan kontribusi ini terjadi di sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih.

2.3.2.2 Kehutanan

2.3.2.2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kawasan hutan yang terdeforestasi dan terdegradasi bila tidak dimanfaatkan untuk kegiatan hutan tanaman atau dialihfungsikan menjadi usaha perkebunan atau pertanian lainnya akan berpotensi menjadi semak belukar dan belukar rawa atau dapat berpotensi menjadi lahan kritis. Luas semak belukar dan belukar rawa di Sumatera Selatan pada Tahun 2011 masing-masing seluas 890.077 hektar dan 898.630 hektar, yang jumlah keseluruhannya tanpa penutupan hutan alami dan hutan tanaman yakni seluas 1.788.707 hektar atau 1,88 kali luas penutupan hutan alami. Data luas kritis pada DAS Musi dapat dilihat pada Tabel 2.92. Lahan yang kritis terutama pada lahan gambut pada musim kemarau berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan kabut asap. Data *hotspot* atau titik api kurun waktu Tahun 2000 sampai 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2. 94. Distribusi lahan kritis pada DAS Musi

Distribusi Luas Kekritisana DAS Musi

PROVINSI	NAMA KAB	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	Grand Total
Bengkulu	Kab. Kepahyang	28.246,76	26.533,73	7.701,28	564,70	738,69	63.785,16
	Kab. Rejang Lebong	80.153,80	40.270,99	22.748,56	3.697,89	5.640,51	152.511,74
Bengkulu Total		108.400,57	66.804,71	30.449,83	4.262,59	6.379,20	216.296,90
Jambi	Kab. Batanghari	35.886,29	2.244,82	12.989,40	78,77	49.893,23	101.092,51
	Kab. Muaro Jambi	74.312,33	2.433,41	48.692,26	599,88	10.818,05	136.855,92
	Kab. Sarolangun	749,49	166,64	991,17	3,15	26.267,17	28.177,62
	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.649,40	302,52	4.148,11	210,01	9,11	7.319,14
	Jambi Total	113.597,50	5.147,39	66.820,94	891,81	86.987,55	273.445,19
Lampung	Kab. Lampung Barat	16.129,75	2.932,03	3.237,15	886,30	928,55	24.113,77
	Kab. Way Kanan	1.355,17	0,00	1.095,45			2.450,63
Lampung Total		17.484,92	2.932,03	4.332,60	886,30	928,55	26.564,39
Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	292.944,37	201.614,44	340.573,81	22.294,88	349.479,49	1.206.906,99
	Kab. Empat Lawang	139.745,45	15.156,48	51.331,60	968,23	20.502,89	227.704,64
	Kab. Lahat	227.825,55	17.695,58	66.071,19	9.107,55	59.821,29	380.521,16
	Kab. Muara Enim	417.183,62	69.385,44	123.523,09	36.197,93	209.312,65	855.602,72
	Kab. Musi Banyuasin	557.028,81	78.097,40	285.398,08	44.277,05	481.842,60	1.446.643,92
	Kab. Musi Rawas	465.368,57	36.682,15	333.073,18	10.847,92	371.403,44	1.217.375,26
	Kab. Ogan Ilir	59.442,06	87.587,09	74.463,60	4.126,82	11.255,85	236.875,43
	Kab. Ogan Komering Ilir	473.020,92	191.710,64	219.316,36	92.701,18	288.926,70	1.265.675,80
	Kab. OKU	145.052,98	54.489,81	103.373,33	9.570,25	56.333,56	368.819,93
	Kab. OKU Selatan	247.148,14	20.525,27	76.430,66	3.394,21	37.714,35	385.212,63
	Kab. OKU Timur	29.907,58	119.212,39	46.958,41	3.860,79	125.360,41	325.299,59
	Kota Pagar Alam	38.961,48	5.938,79	6.382,65	321,27	10.909,31	62.513,50
	Kota Palembang	3.022,87	8.224,97	726,49	1.357,09	24.387,52	37.718,94
	Kota Prabumulih	33.387,84	3.069,43	2.673,06	1.157,96	5.422,05	45.710,34
	Kota Lubuk Linggau	24.950,75	954,10	8.145,21	19,33	7.277,26	41.346,64
Sumsel Total		3.154.990,96	910.343,98	1.738.440,73	240.202,45	2.059.949,37	8.103.927,48
Grand Total		3.394.473,95	985.228,11	1.840.044,10	246.243,15	2.154.244,67	8.620.233,97

Sumber : BPDAS Musi 2012

2.3.2.2.2 Kerusakan Hutan

Tabel 2. 95. Hotspot dan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2012

No.	Kabupaten	2009		2010		2011		2012*	
		Hotspot	Luas Terbakar (ha)	Hotspot	Luas Terbakar (ha)	Hotspot	Luas Terbakar ha)	Hotspot	Luas Terbakar (ha)
1.	Banyuasin	373,00	2.405,85	36,00	232,20	639,00	4.121,55	688,00	4.437,60
2.	Empat Lawang	48,00	309,60	7,00	45,15	53,00	341,85	57,00	367,65
3.	Lahat	168,00	1.083,60	49,00	316,05	131,00	844,95	129,00	832,05
4.	Lubuk Linggau	22,00	141,90	10,00	64,50	4,00	25,80	17,00	109,65
5.	Muara Enim	536,00	3.457,20	157,00	1.012,65	944,00	6.088,80	834,00	5.379,30
6.	Musi Banyuasin	648,00	4.179,60	137,00	883,65	1.163,00	7.501,35	1.263,00	8.146,35
7.	Musi Rawas	803,00	5.179,35	136,00	877,20	581,00	3.747,45	1.040,00	6.708,00
8.	Ogan Ilir	223,00	1.438,35	54,00	348,30	288,00	1.857,60	245,00	1.580,25
9.	Ogan Komering Ilir	2.814,00	18.150,30	102,00	657,90	2.429,00	15.667,05	1.813,00	11.693,85
10.	OKU	226,00	1.457,70	34,00	219,30	253,00	1.631,85	244,00	1.573,80
11.	OKU Selatan	154,00	993,30	25,00	161,25	204,00	1.315,80	196,00	1.264,20
12.	OKU Timur	128,00	825,60	19,00	122,55	120,00	774,00	127,00	819,15
13.	Pagar Alam	4,00	25,80	3,00	19,35	6,00	38,70	5,00	32,25
14.	Palembang	8,00	51,60	4,00	25,80	6,00	38,70	4,00	25,80
15.	Prabumulih	46,00	296,70	25,00	161,25	21,00	135,45	27,00	174,15
	Total	6.201,00	39.996,45	798,00	5.147,10	6.842,00	44.130,90	6.689,00	43.144,05

* Data sampai dengan September 2012
Sumber Data :
Satelit Terra Aqua MODIS, diproses oleh : UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Kerusakan hutan mempunyai efek negatif terhadap lingkungan fisik, ekonomi dan sosial. Kerusakan atau berkurangnya penutupan hutan di hulu pada daerah tangkapan air dapat menyebabkan erosi, tanah longsor, banjir, endapan lumpur, dan pendangkalan sungai dan muara sungai. Demikian halnya bila deforestasi terjadi di kawasan hilir atau pada lahan basah dapat menghilangkan sumber daya gambut, tumbuhan sekat hijau atau *green belt* yang dapat menimbulkan abrasi, bahaya banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan gambut, angin puting beliung. Lahan yang mengalami kebakaran dan terdegradasi mengalami perubahan struktur dan kimiawi tanah menjadi marjinal yang membutuhkan teknologi dan biaya dalam pemanfaaat untuk kegiatan perkebunan dan pertanian yang dikelola oleh rakyat.

Efek lainnya dari deforestasi dan degradasi hutan yakni kelangkaan bahkan kepunahan keanekaragaman sumberdaya hayati dan hasil hutan bukan kayu. Deforestasi mempunyai implikasi terhadap perubahan iklim global yakni pemanasan global (global warming). Kelangkaan sumberdaya hutan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat pedesaan yang sumber nafkahnya. Hilangnya penutupan hutan pada kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi menyebabkan terganggunya fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan terutama sumberdaya air.

2.3.2.3 ESDM

Tabel 2. 96

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

TAHUN	2008	2009	2010	2011	2012
Pertambangan dan Penggalian	34.007.690	28.897.732	34.225.600	41.016.385	43.983.200
Pertambangan	32.257.917	26.811.966	31.886.955	38.340.750	40.894.878
a. Pertambangan Migas	29.351.296	23.454.257	27.363.755	32.395.894	33.313.020
b. Pertambangan Non Migas	2.906.621	3.357.709	4.523.200	5.944.856	7.581.858
c. Penggalian	1.749.773	2.085.766	2.338.645	2.675.635	3.088.322

Sumber : Perekonomian Sumsel Menurut PDRB Lapangan Usaha Triwulanan 2012

2.3.2.4 Pariwisata

Tabel 2. 97

Data Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun Kunjungan	Wisman (Wisatawan Mancanegara)	Wisnus (Wisatawan Nusantara)	Jumlah
1	2008	18.090	2.658.457	2.676.547
2	2009	29.900	2.301.760	2.331.660
3	2010	30.003	2.078.630	2.108.633
4	2011	42.953	3.162.169	3.205.122
5	2012	30.117	3.225.261	3.255.378

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sepanjang tahun 2008-2013, jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara mengalami peningkatan yang cukup baik. Lonjakan kenaikan sangat terasa sekali pada tahun 2011, dimana terjadi lonjakan wisatawan yang datang hingga mencapai 3,2 juta orang, yang berarti meningkat kurang lebih 1,1 juta orang. Hal ini, diperkirakan karena faktor penyelenggaraan Sea-Games ke-26 di Palembang. Secara kasat mata indikator berkembangannya kepariwisataan di Sumatera Selatan dapat dilihat dari tumbuhnya hotel-hotel berbintang di Palembang, sebagai prasarana pendukung tumbuhnya sektor ini.

2.3.2.5 Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 98

Produksi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012

Produksin Ikan (Ton)	2008	2009	2010	2011	2012
219.771	241.083	310.210,30	386.209,90	500.450,50	

Tabel 2. 99

Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012

Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	2008	2009	2010	2011	2012
24,78	25,2	32,66	34,72	36,12	

2.3.2.6 Perdagangan

Tabel 2. 100
Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2003-2012 (US\$ miliar)

Tahun	Nilai Ekspor	Pertumbuhan	Nilai Impor	Pertumbuhan	Surplus	Pertumbuhan
2003	1,055	-	0,108	-	0,946	-
2004	1,293	22,52%	0,100	-7,77%	1,193	26,01%
2005	1,457	12,75%	0,192	91,16%	1,266	6,14%
2006	2,091	43,45%	0,283	47,78%	1,807	42,80%
2007	2,714	29,78%	0,178	-37,17%	2,536	40,30%
2008	3,441	26,77%	0,226	26,56%	3,215	26,78%
2009	2,150	-37,51%	0,208	-7,71%	1,942	-39,60%
2010	2,818	31,07%	0,107	-48,70%	2,711	39,63%
2011	5,057	79,45%	0,553	416,8%	4,504	66,13%
2012	4,371	-13,55%	0,506	-8,38%	3,865	-14,19%
Rata-rata	2,645	22,18%	0,246	47,26%	2,399	19,40%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Selatan 2011

2.3.2.7 Perindustrian

Tabel 2. 101

Kontribusi Sektoral Industri Terhadap PDRB Sumatera Selatan tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha		2008	2009	2010	2011	2012
Industri Pengolahan		31.089.859	32.460.264	34.730.927	37.479.687	41.519.427
a.	Industri Migas	15.212.769	14.970.884	15.044.319	15.045.318	15.689.603
1.	Penggalian Minyak Bumi	5.212.769	14.970.884	15.044.319	15.045.318	15.689.603
2.	Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b.	Industri Tanpa Migas	15.877.090	17.489.380	19.686.608	22.434.369	25.829.824
1.	Makanan, Minuman & Tembakau	7.497.131	8.551.697	9.680.897	11.260.878	13.464.742
2.	Tekstil, Brg Kulit & Alas Kaki	114.425	135.020	147.335	161.004	177.504
3.	Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya	1.422.271	1.688.100	1.754.832	1.867.920	1.991.335
4.	Kertas dan Barang Cetakan	13.622	17.828	20.428	22.409	24.608
5.	Pupuk, Kimia & Brg dari Karet	6.192.505	6.372.849	7.274.417	8.211.843	9.135.568
6.	Semen & Brg. Galian bukan Logam	365.092	421.739	482.399	559.708	657.231
7.	Logam Dasar Besi & Baja	103.510	115.847	114.505	123.481	132.667
8.	Alat Angkut, Mesin & Peralatannya	168.534	186.300	211.795	227.126	246.169
9.	Barang Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : Perekonomian Sumatera Selatan Menurut PDRB Lapangan Usaha Triwulan Tahun 2012

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

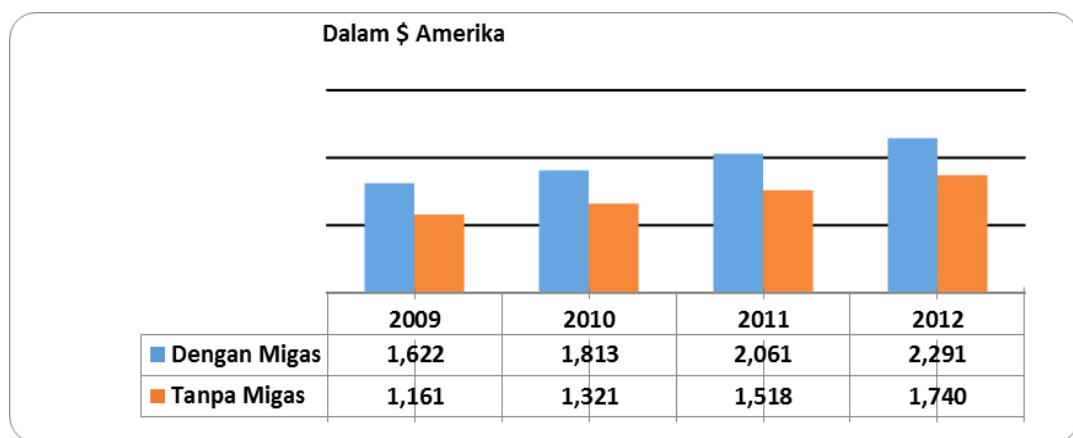
2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

2.4.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Dilihat dari sisi pendapatan perkapita, pendapatan perkapita Sumatera Selatan pada tahun 2012 atas harga berlaku dengan migas adalah sebesar Rp. 22,68 juta lebih tinggi dibanding tahun 2011 sebesar Rp. 20,40 juta Sedangkan pendapatan perkapita tanpa migas tahun 2012 sebesar Rp. 17,23 juta, juga lebih tinggi dibanding tahun 2011 sebesar Rp. 15,03 juta. Dengan memperhitungkan faktor nilai tukar rupiah terhadap US dollar (USD) (1 US\$ = Rp.9.900,-), pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 dengan migas setara dengan US\$ 2.291 lebih tinggi dari capaian pandapatan perkapita pada tahun 2011 yang sebesar US\$ 2.061. Pendapatan perkapita tanpa migas tahun 2012 sebesar US\$ 1.740, lebih tinggi dibanding tahun 2011 sebesar US\$ 1.518.

Gambar 2. 18

Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2009-2012



Asumsi 1 \$ US = Rp.9.900,-

Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan 2013

2.4.1.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah

mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau di tabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 2. 102
Pengeluaran Persentase Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Makanan	54,80	56,46	56,97	53,95	53,26
Non makanan	45,20	43,54	43,03	46,05	46,74
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bps-Susenas (data diolah)

2.4.1.2 Pertanian

2.4.1.2.1 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator pengukur kemampuan tukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya dan untuk keperluan dalam memproduksi produk pertanian secara detail tidak terdapat dalam target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan pada bidang pertanian diinginkan NTP Sumsel dapat berada di atas angka dasar NTP (100). Hal ini dikarenakan NTP sebesar 100 menunjukkan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk usahatannya cenderung sama besar dengan penerimaan yang didapatnya (impas).

Dari perkembangan NTP tahun 2009 – 2012 menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2009, NTP Sumsel tidak memenuhi target yang diinginkan dikarenakan berada di bawah angka 100 yaitu hanya sebesar 99,18. Setelah periode 2010 sampai dengan tahun 2012, NTP Sumsel terus membaik dan selalu berada di atas angka minimal (100), yaitu sebesar 104,89 di tahun 2010, meningkat menjadi 109,87 di tahun 2011, dan berada pada angka yang relatif sama di tahun 2012 yaitu sebesar 109,15. Artinya pada periode 2010-2012, NTP Sumsel sudah berada di atas angka minimal target NTP.

Tabel 2. 103
Nilai Tukar Petani Tahun 2009-2012

Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012
Nilai Tukar Petani	Indeks	99,18	104,89	109,87	109,15

Sumber : EKPD Sumsel 2013

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi pertumbuhan sektor industri & usaha kecil menengah, pertanian dan pertambangan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

2.4.2.1 Perhubungan

2.4.2.1.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 mencapai 17.248,65 Km yang meliputi jalan kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jalan Nasional di Sumsel dengan kondisi mantap sepanjang 1.389,44 Km (96,20%), jalan mantap kewenangan Provinsi sepanjang 1.193,59 Km (81,59%) dan jalan mantap kewenangan Kabupaten/Kota sepanjang 8.601,49 Km (59,98%). Hal ini menunjukkan bahwa untuk infrastruktur jalan masih ada sepanjang 6.064 Km jalan di Sumsel yang belum dalam kondisi baik, selain itu beberapa ruas jalan utama di Sumsel juga sering terjadi kemacetan akibat kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung volume kendaraan yang lewat. Pada kurun waktu satu tahun terakhir ini juga laju kerusakan ruas jalan melebihi dari upaya peningkatan/rehabilitasi jalan yang ada sebagai akibat dari tingginya lalu lintas kendaraan dengan tonase tinggi (MST 10 ton – 16 ton) sedangkan kemampuan daya dukung jalan di Sumatera Selatan rata-rata 10 ton.

Kemacetan jalan juga diperparah dengan tidak optimalnya pengaturan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dengan banyaknya bangunan yang berdiri melanggar batas, pasar tumpah, pedagang kaki lima, perguruan tinggi dan sekolah serta tingginya pertumbuhan kendaraan dalam lima tahun terakhir ini terutama kendaraan pribadi. Rata-rata terjadi peningkatan mencapai 10% setiap tahun. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan juga belum berimbang dan masih jauh dari kondisi idal. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu memprioritaskan peningkatan jalan dan jembatan dan pembangunan jalan dan jembatan baru menuju daerah-daerah yang strategis, serta terus berupaya meningkatkan kualitas jalan yang ada.

Tabel 2. 104
Rasio Panjang Jalan/Jumlah Kendaraan
Provinsi Sumatera Selatan

Kab/Kota	2009			2010			2011			2012		
	Panjang	Jumlah Kdr	Rasio									
Ogan Komering Ulu	573,680	44.853	0,013	719,240	49.837	0,014	788,332	55.375	0,014	788,332	61.527	0,013
Ogan Komering Ilir	1.932,730	39.433	0,049	2.045,160	43.815	0,047	1.725,956	48.683	0,035	1.727,566	54.092	0,032
Muara enim	1.668,490	63.061	0,026	1.765,420	70.068	0,025	1.740,343	77.853	0,022	1.816,653	86.504	0,021
Lahat	1.851,670	42.235	0,044	1.346,470	46.928	0,029	1.500,458	52.142	0,029	1.500,448	57.936	0,026
Musi Rawas	2.035,410	26.564	0,077	1.488,630	29.515	0,050	1.491,722	32.795	0,045	1.906,662	36.439	0,052
Musi Banyuasin	1.824,030	59.927	0,030	1.466,770	66.585	0,022	1.483,395	73.984	0,020	1.435,295	82.204	0,017
Palembang	855,130	823.428	0,001	974,885	914.920	0,001	963,588	1.016.577	0,001	963,588	1.129.530	0,001
Prabumulih	495,320	59.899	0,008	447,700	66.555	0,007	447,849	73.950	0,006	447,849	82.167	0,005
Pagaralam	524,330	6.739	0,078	561,570	7.488	0,075	592,200	8.319	0,071	592,200	9.244	0,064
OKU Selatan	229,760	7.889	0,029	662,079	8.765	0,076	698,349	9.739	0,072	698,349	10.821	0,065
OKU Timur	943,250	37.412	0,025	894,370	41.569	0,022	884,347	46.188	0,019	1.145,577	51.320	0,022
Ogan Ilir	946,060	14.561	0,065	991,150	16.179	0,061	1.027,977	17.977	0,057	1.027,977	19.974	0,051
Empat Lawang	427,330	8.447	0,051	508,170	9.386	0,054	605,293	10.428	0,058	605,793	11.587	0,052
Lubuk Linggau	428,360	24.042	0,018	531,010	26.713	0,020	520,464	29.681	0,018	532,134	32.979	0,016
Banyuasin	1.375,000	38.319	0,036	1.116,500	42.577	0,026	1.117,647	47.308	0,024	1.144,867	52.564	0,022
Provinsi Sumsel	16.110,550	1.296.809	0,012	15.519,124	1.440.899	0,011	15.587,920	1.600.999	0,010	16.333,290	1.778.888	0,009

Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Data Diolah dari Direktorat Lalu Lintas Polri)

Dari gambaran kondisi jalan dan jembatan di Sumsel saat ini terlihat bahwa jika tidak dilakukan antisipasi ke depannya akan berdampak kepada lamanya waktu tempuh kendaraan yang akan berakibat kepada "ekonomi biaya tinggi" yang pada akhirnya akan membuat tingginya biaya pengangkutan barang sehingga dapat melambungkan harga barang yang tentu saja akan mempengaruhi sektor perekonomian. Selain itu juga lamanya waktu tempuh akan berpengaruh kepada kualitas produk-produk hasil pertanian yang diangkut melalui transportasi darat.

2.4.2.1.1 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Tabel 2. 105
**Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
 Provinsi Sumatera Selatan**

Jumlah Produksi Angkutan penumpang (org)	2008	2009	2010	2011	2012
Angkutan Udara	n.a	1.810.766	2.106.905	2.484.519	2.408.923
Angkutan sungai, danau & penyeberangan	n.a	635.668	46.644	119.615	115.298
Angkutan Laut	n.a	462.436	65.907	552.205	510.857
Angkutan Darat	n.a	23.263.694	10.701.200	4.528.694	10.636.128
Angkutan Kereta Api	n.a	1.053.640	1.961.312	2.010.984	1.425.500

Sumber : Dishubkominfo

Angkutan umum memang masih menjadi pilihan masyarakat, selain biaya yang dikeluarkan masih terjangku, juga karena lebih aman dan banyak pilihan. Dari data yang angkutan darat masih menjadi pilihan utama, walaupun memang terjadi penurunan tahun 2009. Di sisi lain penggunaan angkutan udara terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Harga tiket yang sangat kompetitif diperkirakan menjadi pemicu utama masyarakat beralih ke jenis angkutan ini dibandingkan dengan menggunakan angkutan darat (bis), sementara walaupun masih perlu analisis lagi, namun banyaknya masyarakat yang menggunakan pesawat untuk berpergian bisa menjadi indikasi awal adanya perbaikan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, untuk angkutan barang, angkutan laut dan kereta api menjadi pilihan utama. Angkutan laut memang menjadi pintu masuk perdangan domestic dan luar negeri Provinsi Sumatera Selatan. Jika dihubungkan dengan aktivitas bongkar-muat dan ekspor-impor memang sebagian besar melalui jalur laut. Sementara angkutan kereta api dimungkinkan dengan aktivitas angkutan barang-barang hasil pertambangan dan pertanian.

Tabel 2. 106
**Jumlah barang yang terangkut angkutan umum
 Provinsi Sumatera Selatan**

Jumlah Produksi Angkutan Barang (Ton)	2008	2009	2010	2011	2012
Angkutan Udara	n.a	n.a	9.797,24	12.460	n.a.
Angkutan sungai, danau & penyeberangan	n.a	1.182,00	127	176.650	n.a.
Angkutan Laut	n.a	6.053.530	460.848.512	15.387.691	17.755.873
Angkutan Darat	n.a	n.a	11.412.231	9.135.250	n.a
Angkutan Kereta Api	n.a	11.861.228	11.412.231	12.972.904	14.070.108

2.4.2.1.1 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun

Jumlah Orang dan Barang Melalui Pelabuhan di Sumatera Selatan

Jumlah orang dan barang yang melalui Pelabuhan merupakan indikasi pergerakan ekonomi di suatu wilayah. Angkutan perairan, khususnya di Indonesia memang menjadi salah satu moda transportasi yang terjangkau (murah) dan mempunyai kemampuan angkut yang besar. Sumatera Selatan yang memang dikenal memiliki wilayah perairan yang cukup luas menjangkau hingga ke wilayah pelosok, juga memanfaatkan transportasi perairan ini. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas orang dan barang yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan di provinsi ini. Data pada tabel di bawah ini memberikan gambaran bahwa proses perdagangan dalam dan luar negeri dipelabuhan di Sumatera Selatan berjalan dinamis dan cukup fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 107

Bongkar Orang dan Barang Melalui Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan

No	URAIAN	SATUAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	PERDAGANGAN LUAR NEGERI						
	Import	Ton/M3	311.919	295.198	508.918	615.343	577.685
	Eksport	Ton/M3	2.648.976	1.349.632	1.618.691	1.507.455	5.528.055
	Sub Jumlah 1	Ton/M3	2.960.895	164.483	2.127.609	2.122.798	610.574
2	PERDAGANGAN DALAM NEGERI						
	Bongkar	Ton/M3	3.181.979	1.192.466	1.083.594	1.779.173	2.483.534
	Muat	Ton/M3	4.821.939	3.051.679	3.552.502	3.968.691	7.004.429
	Sub Jumlah 1	Ton/M3	8.003.918	4.244.145	4.636.096	5.747.864	9.487.963
	JUMLAH I + II	Ton/M3	10.964.813	4.408.628	6.763.705	7.870.662	10.098.537
3	PENUMPANG						
	Naik	Org	147.986	132.540	141.724	183.280	126.902
	Turun	Org	165.677	135.329	145.576	204.501	174.593
	JUMLAH III	Ton/M3	313.663	313.663	287.300	387.781	301.495

Bongkar Orang dan Barang Melalui Bandara di Sumatera Selatan

Angkutan udara di Sumatera Selatan kini mulai menunjukkan peningkatan aktivitas, terutama di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, merupakan Bandara Internasional yang dapat didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus 330. Banyaknya event bertaraf internasional di Kota Palembang sejak tahun 2011 memberikan lonjakan arus penumpang dan barang yang cukup signifikan. Misalnya, pada tahun 2008 aktivitas kedatangan dan keberangkatan penerbangan internasional baru sekitar 469 kali, meningkat menjadi 634 kali di tahun 2014. Sementara

penerbangan domestik lalu lintas penerbangan mencapai 11.098 kali ditahun 2012, dimana pada tahun 2008 baru 7.432 kali.

Tabel 2. 108

Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional Bandar Udara SMB II

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	PESAWAT DATANG BERANGKAT	469 469	544 544	245 245	351 351	634 634
2	PENUMPANG DATANG BERANGKAT	49.543 44.679	47.174 46.405	19.180 19.473	31.291 30.089	56.143 54.905
3	BAGASI BONGKAR MUAT	522.870 415.373	476.497 627.365	271.507 218.697	363.802 324.802	550.223 432.901
4	KARGO BONGKAR MUAT	25.846 107.815	145.596 139.019	19.640 83.073	104.652 67.376	419.771 64.684

Tabel 2. 109

Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik Bandar Udara SMB II

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	PESAWAT DATANG BERANGKAT	7.432 7.432	7.121 7.121	8.080 8.080	10.637 10.638	11.098 11.098
2	PENUMPANG DATANG BERANGKAT	763.285 761.945	854.846 862.009	1.072.033 1.042.727	1.279.417 1.169.836	1.371.719 1.402.971
3	BAGASI BONGKAR MUAT	7.641.061 7.658.074	5.790.499 5.699.989	8.430.299 8.746.185	9.883.866 7.839.765	10.260.145 10.240.114
4	KARGO BONGKAR MUAT	6.812.868 1.792.674	3.411.714 183.821	7.525.909 2.180.228	6.663.451 3.334.327	950.212 4.050.758
5	POS BONGKAR MUAT	441.179 170.189	183.821 113.953	452.362 199.603	479.133 150.781	327.985 172.519

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan masih berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2019, yang dijabarkan dalam kawasan andalan provinsi guna perencanaan pemanfaatan ruang termasuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

2.4.2.2. Penataan Ruang

2.4.2.2.1. Ketaatan terhadap RTRW

Penataan Ruang, proses revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan telah diajukan ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan guna mendapatkan persetujuan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Terkait ketaatan kabupaten/kota dalam mempedomani Undang-Undang Penataan Ruang, sebanyak 13 kabupaten/kota yang telah menerbitkan perda tentang RTRW Kabupaten/Kota, sedangkan 4 kabupaten/kota lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 110

Ketaatan Terhadap Perda RTRW

No	Wilayah	No. Perda RTRW	Tgl Perda RTRW
1	Provinsi Sumatera Selatan	Dalam Proses Pembahasan Pansus DPRD	
Kabupaten			
1	Banyuasin	No. 28 Tahun 2012	28-Des-12
2	Empat Lawang	No. 9 Tahun 2012	27-Jul-12
3	Lahat	No.11 Tahun 2012	28-Des-12
4	Muara Enim	No.13 Tahun 2012	28-Des-12
5	Musi Banyuasin	Menunggu Perda Prov. Sumsel	
6	Musi Rawas	No.02 Tahun 2013	21-Okt-13
7	Musi Rawas Utara (MURATARA)	Bergabung dengan Musi Rawas	
8	Ogan Ilir	No. 10 Tahun 2012	17-Sep-12
9	Ogan Komering Ilir	No. 9 Tahun 2013	09-Jul-13
10	Ogan Komering Ulu	No. 22 Tahun 2012	27-Des-12
11	OKU Selatan	No. 13 Tahun 2012	28-Des-12
12	OKU Timur	No. 13 Tahun 2012	19-Okt-12
13	Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	Bergabung dengan Muara Enim	
Kota			
14	Lubuklinggau	No. 1 Tahun 2012	31-Agust-12
15	Pagar Alam	No. 07 Tahun 2012	19-Nop-12
16	Palembang	No. 15 Tahun 2012	27-Des-12
17	Prabumulih	Tahap Evaluasi Gubernur Sumatera Selatan	

Catatan : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Musi Rawas Utara baru terbentuk tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013.

2.4.2.2.2. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: Sk.822/Menhet-II/2013 tanggal 19 Nopember 2013, bahwa luas kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 7.312.933 hektar dengan rincian kawasan hutan seluas ± 2.098.658 hektar dan non kawasan hutan seluas ± 5.214.275 hektar.

2.4.2.2.3. Luas kawasan industri

Sesuai data RTRW kabupaten/kota, luas kawasan industri di Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 37.000 hektar dengan berbagai fokus pengembangan jenis industri, antara lain industri besar, industri kecil dan UMKM. Industri besar diarahkan di Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, OKU Timur, Kota Palembang.

2.4.2.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

2.4.2.3.1 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Jumlah Restoran di Provinsi Kabupaten kota terutama di Perkotaan dan daerah transit mengalami peningkatan maupun pengembangan dalam hotel tertentu yg dapat dilihat dari jumlah rumah makan dan peningkatan jumlah meja kursi.

Tabel 2. 111

Banyaknya Rumah Makan/Restoran, Meja dan Kursi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011

No	Wilayah	Rumah Makan	Meja	Kursi
1	Ogan Komering Ulu	71	753	3133
2	Ogan Komering Ilir	21	359	1165
3	Muara Enim	317	1299	5641
4	Lahat	20	246	1077
5	Musi Rawas	28	269	1252
6	Musi Banyuasin	21	171	836
7	Banyuasin	8	62	459
8	OKU Selatan	6	43	228
9	OKU Timur	15	61	252
10	Ogan Ilir	6	83	311
11	Empat Lawang	0	0	0
12	Kota Palembang	144	1997	9504
13	Kota Prabumulih	28	298	1531
14	Kota Pagar Alam	15	106	695
15	Kota Lubuk Linggau	54	2158	8345

2.4.2.3.2 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Peningkatan hotel di Provinsi Sumatera Selatan terutama di Perkotaan terjadi peningkatan yang signifikan seiring dengan pelaksanaan pesta olah raga dan pariwisata sehingga membuat perkembangan hotel menjadi maju hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana kota Palembang telah

membangun beberapa hotel baru seiring pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional yang menjadi daya Tarik pengunjung untuk masuk ke kota tersebut.

Tabel 2. 112

Jumlah Hotel Berbintang dan kamar di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Hotel Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Hotel Berbintang	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
Palembang	Bintang Lima Bintang Empat	2 5	336 786
	Bintang Tiga Bintang Dua Bintang Satu	8 10 4	793 690 110
Ogan Komering Ilir	Bintang Dua	2	50
Ogan Ilir	Bintang Dua	1	36
Lubuk Linggau	Bintang Empat Bintang Tiga Bintang Dua Bintang Satu	1 2 2 4	80 109 56 117
Muara Enim	Penginapan	1	28
Prabumulih	Penginapan	1	31
Lahat	Bintang Tiga Bintang Satu	1 1	94 34
Musi Banyuasin	Bintang Tiga	1	48

Sumber : BPS Sumsel 2012 (data diolah)

2.4.2.4 Lingkungan Hidup

2.4.2.4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Capaian persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk 5 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Namun jika dilihat dari rata-rata nilai Provinsi beberapa Kabupaten/Kota telah berada diatas rata-rata Provinsi dan apabila melihat angka yang dibawah rata-rata Provinsi masih ada Kabupaten yang harus menjadi prioritas dalam program untuk mendukung akses air bersih yakni Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir. Persentase

terendah untuk akses air bersih ialah Kabupaten OKU Selatan sedangkan persentase tertinggi ialah Kota Palembang.

Tabel 2. 113
Persentase Akses Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2012

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
	Kab/Kota					
1	Ogan Komering Ulu	26,90	62,78	53,45	67,16	62,52
2	Ogan Komering Ilir	24,73	39,84	46,06	49,02	46,81
3	Muara Enim	36,62	46,16	46,68	59,56	61,09
4	Lahat	29,02	38,31	37,42	39,56	42,19
5	Musi Rawas	22,33	40,62	43,05	41,86	60,48
6	Musi Banyuasin	28,68	43,17	42,84	46,75	47,66
7	Banyuasin	23,36	31,10	37,16	43,02	43,19
8	OKU Selatan	20,92	29,17	30,39	27,34	29,91
9	OKU Timur	23,27	58,46	57,06	63,21	62,20
10	Ogan Ilir	39,02	40,11	46,13	46,18	43,00
11	Empat Lawang	13,66	15,86	15,12	22,23	20,80
12	Kota Palembang	77,85	94,40	90,32	95,08	94,23
13	Kota Prabumulih	54,82	48,47	58,80	74,49	69,65
14	Kota Pagar Alam	34,19	42,88	38,25	37,34	44,29
15	Kota Lubuk Linggau	55,09	59,91	58,36	62,12	54,41
Sumatera Selatan		45,89	48,53	45,99	45,17	43,76

Sumber : BPS Sumsel 2008-2012

2.4.2.5 Komunikasi dan Informatika

2.4.2.5.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Tingkat elektrifikasi di Sumsel baru mencapai 56,2 %, dan saat ini pembangkit tenaga listrik khususnya di pedesaan masih dominan menggunakan bahan bakar solar. Oleh karena itu dengan ketersediaan batubara maka di daerah ini telah ada rencana dan upaya untuk membangun pembangkit tenaga listrik memakai batubara sebagai bahan bakar, yaitu :

- PLTU Sp-Belimbing, 2x113.5 MW (PT Guo Hua Energi Musi Makmur, 2011),
- PLTU Banjarsari, 2x100 MW (PT Bukit Pembangkit Inovatif, 2013),
- PLTU Sumsel-2 (Keban Agung) 2x112.5 MW (PT Primanaya Power Energi, 2013)
- PLTU Baturaja, 2x10 MW (IPP, 2013), PLTU Sumsel-5, 2x150 MW (IPP, 2015),

- PLTU Sumsel-6, 2x300 MW (IPP, 2014/2015), PLTU Sumsel-7, 2x150 MW (IPP, 2015/2016), dan
- PLTU Sumatera Mulut Tambang, 5x600 MW (IPP, 2016/2018).

Sampai dengan akhir tahun 2012, tercatat yang terdiri dari PLN Pembangkitan dan Pembangkit Swasta dengan total 1,306.12MW sebagai berikut:

PLN Pembangkit (MW):

- PLTU (Batubara) : 260
- PLTU (gas) : 25
- PLTG (Gas turbin) : 449.85
- PLTGU : 40
- PLTD : 25,20
- PLTD Isolated : 5,24.

Pembangkit Swasta (MW):

- PLTGU (IPP/Borang) : 150,00
- PLTG Gunung megang : 80,00
- PLTG Prabumulih : 12,00
- PLTG Sako : 12,00
- PLTG/U Musi-2 : 19,83
- PLTU Sim.Belimbing : 227,00

Tabel 2. 114

Capaian Kinerja Pembangunan Prioritas Energi di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2012

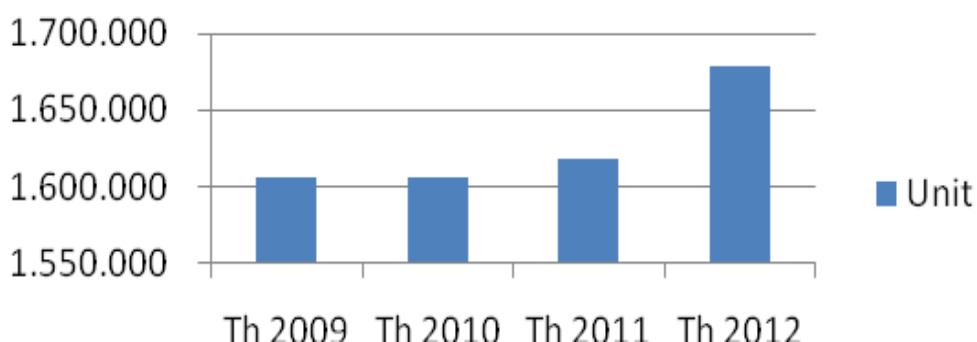
A	Indikator Output	Satuan	2009	2010	2011	2012
1	Pelanggan PLN	RTx1.000	890.395	943.476	1.106.410	1.250.761
2	Daya tersambung	VA	398.356.555	1.259.514.015	1.512.094.775	1.737.464.630
B	Indikator Outcome	Satuan	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah desa mandiri energi	Desa	-	-	1	1
2	Distribusi penggunaan listrik : - Rumah	Jumlah /G Tarif	835.567	884.656	1.041.281	1.179.848

tangga -Industri -Sosial -Bisnis -Lainnya		351 14.397 34.394 5.686	373 15.343 37.273 5.831	407 17.211 41.066 6.445	449 10.286 41.740 9.484
C	Indikator Impact	Satuan	2009	2010	2011
1	Rasio elektrifikasi	%	81,24	60,57	60,73
2	Rasio Desa Berlistrik	%	73,9	83,28	81,50
3	Pertumbuhan pemakaian BBM bersubsidi	%	-	-	-

2.4.2.5.2 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Gambar 2. 19

Data Rumah Tangga Yang Teraliri Listrik



Untuk rumah tangga yang telah dialiri listrik, terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2009 sebanyak 1.605.703 unit dan ditahun 2012 meningkat menjadi 1.605.703 unit. Ada kenaikan rata rata setiap tahun 10%. Adapun target persentase capaian indikator kinerja dan capaian kinerja pembangunan sumatera selatan pada tahun 2012 mencapai 92% rumah tangga teraliri listrik, pada kenyataannya persentase rumah tangga yang teraliri listrik naik dari target capaian dengan rata rata kenaikan setiap tahun 5 %, secara keseluruhan setiap tahun terjadi peningkatan baik target dari pemerintahan maupun realisasi hasil evaluasi. Ini terlihat pada gambar 2.19 Data rumah tangga yang teraliri listrik.

Terjadi peningkatan setiap tahun untuk rumah yang teraliri listrik di Sumatera Selatan ini, ini dapat terlihat pada gambar 2.19 Data rumah yang teraliri listrik. Terjadi peningkatan setiap tahun dengan rata rata peningkatan sebesar 10%. Peningkatan ini terjadi juga akibat pembangunan perumahan

dan penambahan kapasitas listrik yang di alokasikan untuk Sumatera Selatan.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki sumber listrik rata-rata telah mencapai persentase rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dimana untuk tahun 2012 terjadi peningkatan dari tahun 2008 yakni dari persentase 82,1 persen menjadi 94,02 persen. Kabupaten OKU Selatan memiliki persentase dibawah rata-rata Provinsi dan terjadi penurunan persentase dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 115

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Memiliki Sumber Listrik

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
1	Ogan Komering Ulu	91,84	93,06	91,22	94,06	93,85
2	Ogan Komering Ilir	76,35	84,94	79,14	90,74	92,95
3	Muara Enim	86,71	90,84	92,45	96,27	97,13
4	Lahat	84,66	89,30	91,83	94,87	95,31
5	Musi Rawas	81,29	82,03	82,57	90,29	93,68
6	Musi Banyuasin	77,78	87,29	85,02	88,33	93,25
7	Banyuasin	66,70	78,69	88,00	86,4	95,76
8	OKU Selatan	52,33	72,13	74,04	70,89	68,3
9	OKU Timur	84,01	86,04	89,76	95,55	97,61
10	Ogan Ilir	78,24	83,51	81,76	83,64	88,15
11	Empat Lawang	68,39	82,45	80,60	85	88,57
12	Kota Palembang	98,42	99,48	98,47	99,58	97,75
13	Kota Prabumulih	94,96	98,40	96,26	96,6	99,23
14	Kota Pagar Alam	95,06	97,57	94,96	98,22	98,24
15	Kota Lubuk Linggau	92,39	96,04	98,02	99,06	99,22
	Sumatera Selatan	82,1	88,05	88,69	92,01	94,02

Sumber : BPS Sumsel 2008-2012

2.4.2.5.3 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Seluler

Angka Kepemilikan telepon seluler jauh lebih besar dibandingkan kepemilikan telepon rumah. Pada tahun 2012 persentase rumah tangga yang memiliki minimal 1 telepon seluler mencapai 86,38 persen. Dibandingkan tahun 2008, angka kepemilikan telepon seluler juga meningkat cukup besar, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang meningkat cukup besar, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang meningkat pesat akhir-akhir ini.

Tabel 2. 116

Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi 2008-2012

Persentase Rumah Tangga	2008	2009	2010	2011	2012
Memiliki Telepon Rumah	8,25	8,36	8,64	7,05	5,11
Ada ART Memiliki Telepon Seluler	51,7	58,91	75,03	81	86,38
Memiliki Komputer	6,96	9,08	9,45	9,95	12,04
Akses Internet*)	na	na	9,2	9,25	10,87
Akses Internet di Rumah*)	3,57	1,76	2,49	2,42	2,86
Ada ART Akses Internet di Luar Rumah*)	5,42	9,18	8,56	8,67	10,21

*) Angka 2010-2012 adalah persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki akses internet dalam 3 bulan terakhir

Sumber : BPS-Susenas 2006-2012

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

2.4.3.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

2.4.3.1.1 Angka Kriminalitas

Tindak kejahatan yang dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi secara garis besar terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir, angka jenis kejahatan yang signifikan terjadi peningkatan ialah pencurian/perampokan, penganiayaan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran-pelanggaran. Perlu menjadi perhatian dalam menangani keamanan di Provinsi Sumatera Selatan untuk menekan angka kriminalitas dan mengurangi rasa khawatir dan rasa aman terhadap masyarakat.

Tabel 2. 117

Jumlah Tindak Kejahatan Pada Kejaksaan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kejahatan Tahun 2012 dan Series 2008-2012

No	Kabupaten/Kota	Ketertiban Umum	Pencurian/Perampokan	Penganiayaan	Pembunuhan	Penipuan	Kesusilaan	Pelanggaran
1	Palembang	168	90	125	40	175	15	16.680
2	Lubuk Linggau	18	470	45	47	74	42	1.878
3	Kayu Agung	33	42	15	7	4	20	2.265
4	Muara Enim	32	87	15	18	37	28	2.877
5	Baturaja	6	86	17	22	46	29	8.455
6	Lahat	18	90	32	8	23	16	11.642
7	Sekayu	64	356	48	37	45	14	8.645
8	Prabumulih	16	172	12	3	18	7	1.085
9	Pagaralam	7	18	9	3	8	19	1.324
10	Pangkalan Balai	44	58	39	16	18	7	1.436

No	Kabupaten/Kota	Ketertiban Umum	Pencurian/Perampokan	Penganiayaan	Pembunuhan	Penipuan	Kesusilaan	Pelanggaran
	Tahun							
	2012	406	1469	357	201	448	197	56.287
	2011	330	1348	276	147	366	117	52.430
	2010	510	2490	312	13	178	42	44.316
	2009	660	1548	504	120	120	72	42.510
	2008	190	578	103	61	177	86	42.286

Sumber : BPS Sumsel 2012

2.4.3.1.2 Lama Proses Perijinan

Layanan perizinan di Sumatera Selatan sedang mengalami proses transformasi dari layanan yang lambat menuju layanan yang cepat. Hal ini telah dibentuknya kantor layanan terpadu di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, tetapi prosedur layanan seringkali belum efisien. Rata-rata lama waktu layanan perizinan masih lebih lambat dari target yang dinyatakan dalam dokumen rencana pembangunan daerah, terutama terkait perbaikan birokrasi perizinan lambat berkembang. Namun demikian, sejak berdiri PTSP terdapat perubahan signifikan terhadap masa atau waktu pengurusan perizinan di bidang investasi dan non perizinan. Pada tahun 2009 rata-rata lama penyelesaian perizinan bisa mencapai waktu 1 bulan, namun setelah tahun 2010, masa penyelesaian perizinan tersebut rata-rata kurang dari 1 bulan. Bahkan di tahun 2012, pengurusan perizinan bisa diselesaikan dalam waktu berkisar 7 – 15 hari, meskipun rata-ratanya masih selama 15 hari.

Tabel 2. 118
Rata-Rata Lama waktu Pelayanan Perizinan Usaha
di Provinsi Sumatera Selatan

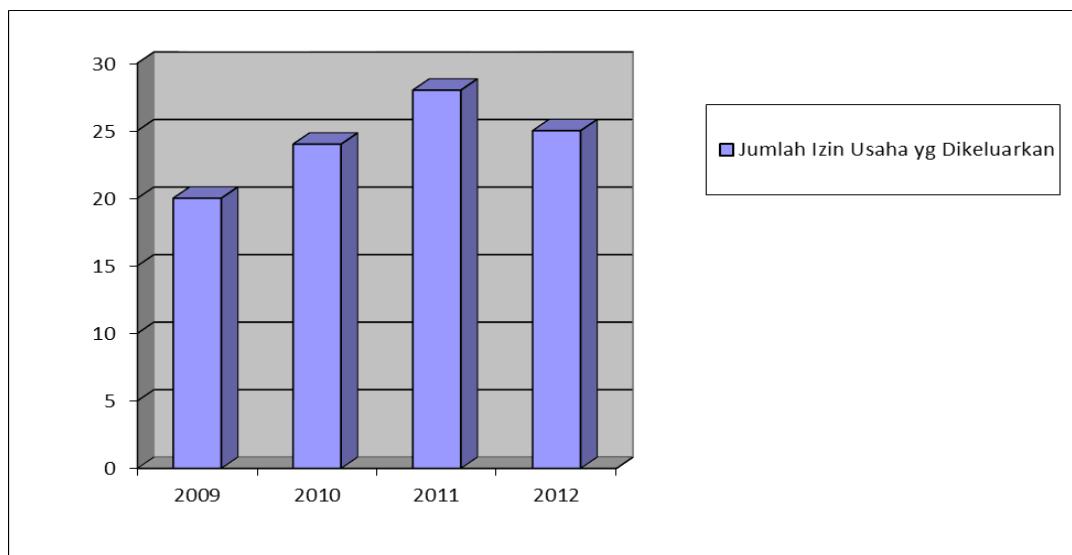
Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012
Rata-rata lama waktu pelayanan perijinan usaha di Provinsi	Hari	30	21	21	15

Sumber : EKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

2.4.3.1.3 Perkembangan jumlah izin usaha

Perkembangan jumlah izin usaha semakin berkembang, namun tahun 2012 mengalami sedikit penurunan akibat perlambatan kegiatan ekonomi global dan sulitnya melakukan usaha yang memiliki margin keuntungan yang prospektif.

Gambar 2. 20
Perkembangan Jumlah Izin Usaha Yang Dikeluarkan



Sumber : EKPD Sumsel 2013

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Ketenagakerjaan

2.4.4.1.1 Rasio Ketergantungan

Tabel 2. 119

Angka Beban Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Angka Beban Tanggungan
2000	61,42
2005	53,91
2010	52,57
2012	50,90

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur, dimana jika jumlah proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dari usia tidak produktif, maka beban tanggungan akan ikut turun pula. Dilihat dari angka beban tanggungan terlihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2000 hingga 2012.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2012 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP).

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2008-2013 menunjukkan bahwa pendapatan daerah meningkat dari Rp. 2.397.685,72 juta pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp.5.028.742,10 juta pada tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2009-2012 adalah 28,06 persen. Dengan membandingkan target atau rencana yang telah ditetapkan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2009 -10,83 persen kemudian meningkat menjadi 1,25 persen pada tahun 2010, 4,68 persen pada tahun 2011 dan 1,81 persen pada tahun 2012. Realisasi Pendapatan Asli Daerah juga terus meningkat dari Rp.1.054.332,69 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.1.907.709,08 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,70 persen. Sementara,

pendapatan transfer meningkat dari Rp.1.333.161,33 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.2.240.011,91 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,40 persen.

Tabel 3. 1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012 (Rp. Juta)

Tahun	PAD		Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan	Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
2009	T	1.173.768,28	1.505.609,79	9.419,25	2.688.797,32	43,65
	R	1.054.332,69	1.333.161,33	10.191,71	2.397.685,72	43,97
2010	T	1.363.164,45	1.773.543,42	11.141,95	3.147.849,81	43,30
	R	1.369.935,86	1.805.252,14	12.090,23	3.187.278,22	42,98
2011	T	1.687.295,62	1.995.073,49	74.022,60	3.756.391,70	44,92
	R	1.849.642,59	1.998.680,31	83.885,88	3.932.208,77	47,04
2012	T	1.899.649,70	2.205.077,54	834.420,72	4.939.147,95	38,46
	R	1.907.709,08	2.240.011,91	881.021,11	5.028.742,10	37,94

Keterangan: *T = Target R=Realisasi*

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2013

Struktur pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 42,98 persen per tahun selama 2009-2012. Sementara, sumbangan pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 51,90 persen per tahun. Struktur pendapatan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan daerah periode 2013-2018 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 88,90 persen per tahun, rata-rata sumbangan Retribusi Daerah terhadap PAD adalah 1,04 persen per tahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4,71 persen per tahun dan lain-lain PAD yang sah 5,36 persen per tahun. Struktur PAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2012 tersebut mengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain adalah peningkatan penagihan pajak, sosialisasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, intensifikasi pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Langkah lain yang telah dilakukan adalah penguatan koordinasi antardinas/instansi pemungut retribusi, peningkatan penerimaan dari BUMD, peningkatan kinerja BUMD, dan peningkatan koordinasi dengan BUMN dan BUMS dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga. Berbagai langkah tersebut secara bertahap telah meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. 2

**Struktur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2012**

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		Lain-lain PAD yang sah		Total	
	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp.Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)
2009	895.326,99	84,92	14.770,37	1,40	56.809,95	5,39	87.425,39	8,29	1.054.332,69	100,0
2010	1.226.712,55	89,55	17.747,28	1,30	62.606,13	4,57	62.869,90	4,59	1.369.935,86	100,0
2011	1.671.518,57	90,37	11.530,97	0,62	78.674,37	4,25	87.918,67	4,75	1.849.642,59	100,0
2012	1.731.326,70	90,75	15.958,74	0,84	87.969,00	4,61	72.454,64	3,80	1.907.709,08	100,0
Rata-rata	1.381.221,20	88,90	15.001,84	1,04	71.514,86	4,71	77.667,15	5,36	1.545.405,05	100,0

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2013

Sumber pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan juga berasal dari Pendapatan Transfer. Dalam kurun waktu 2009-2012 Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Selatan rata-rata mencapai Rp. 1.884.276,42 juta per tahun, sedangkan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 1.227.719,01 juta per tahun, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 836.960,10 juta per tahun, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 595.601,51 juta per tahun. Dari segi pertumbuhan selama periode tersebut, penerimaan total dana transfer meningkat rata-rata sebesar 10,13 persen per tahun, pendapatan dari Dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 9,76 persen per tahun, Pendapatan Bagi Hasil Pajak rata-rata sebesar 13,44 persen per tahun, Bagi Hasil Bukan Pajak rata-rata sebesar 17,99 persen dan Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 5,28 persen per tahun.

Struktur penerimaan Provinsi Sumatera Selatan dari Dana Transfer menunjukkan bahwa Dana Perimbangan rata-rata menyumbang 98,86 persen dan dana transfer lainnya sebesar 1,14 persen. Sementara, Dana Alokasi Umum rata-rata menyumbang sebesar 32,29 persen, Bagi Hasil Bukan Pajak rata-rata sebesar 66,57 persen dan Bagi Hasil Pajak rata-rata sebesar 32,23 persen per tahun.

Tabel 3. 3

Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2012 (Rp. Juta)

URAIAN	2009	2010	2011	2012	Rata-rata	Pertumbuhan Per Tahun
Pendapatan Transfer	1.333.161,33	1.805.252,14	1.998.680,31	2.240.011,91	1.844.276,42	10,13
1. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.333.161,33	1.805.252,14	1.960.258,13	2.194.610,48	1.823.320,52	9,76
(1) Bagi Hasil Pajak	825.805,44	1.293.168,56	1.313.444,83	1.478.457,22	1.227.719,01	13,44
(2) Bagi Hasil Bukan Pajak	502.680,05	862.163,72	933.824,10	1.049.172,54	836.960,10	17,99
(3) Dana Alokasi Umum	507.355,88	512.083,58	646.813,30	716.153,26	595.601,51	5,28
(4) Dana Alokasi Khusus	-	17.807,10	32.287,00	45.401,43	23.873,88	24,84
2. Transfer Pemerintah Lainnya	-	17.503,49	38.422,17	-	13.981,42	
(1) Dana Otonomi Khusus	-	-	13.500,00	-	3.375,00	
(2) Dana Penyesuaian	-	17.503,49	24.922,17	-	10.606,42	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2013

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2009-2012 meningkat dari Rp. 2.341.327,09 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 5.386.053,39 juta pada tahun 2012 atau rata-rata meningkat sebesar 32,23 persen per tahun. Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasional meningkat dari Rp. 1.323.028,77 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 3.813.397,52 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata 43,53 persen per tahun. Belanja Modal meningkat dari Rp. 640.664,24 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 1.070.815,22 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata -4,63 persen per tahun. Sementara, transfer ke kabupaten/kota meningkat dari Rp. 377.068,04 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 500.000,00 juta pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata 12,94 persen per tahun

Struktur belanja menunjukkan bahwa alokasi dana belanja operasi rata-rata sebesar 59,73 persen, belanja modal 27,60 persen, dan transfer ke kabupaten/kota sebesar 12,64 persen per tahun. Struktur Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 2009-2012 sebagian besar masih digunakan untuk belanja aparatur dan kurang dari 30 persen digunakan untuk Belanja Modal. Struktur belanja daerah terebut kurang mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara, transfer daerah relatif kecil.

Tabel 3. 4
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Urusan Tahun 2008-2013 (Rp.Juta)

Uraian	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Share
Belanja Daerah	2.341.327,09	3.107.701,11	3.808.837,92	5.386.053,39	100,00
1. Belanja Tidak Langsung/Operasional	1.323.028,77	1.596.059,30	2.295.634,25	3.813.397,52	59,73
(1) Belanja Pegawai	731.213,81	916.679,62	704.427,90	706.256,18	23,08
(2) Belanja Barang dan Jasa	348.977,88	430.723,11	552.338,40	904.060,24	15,01
(3) Belanja Subsidi	-	-	1.217,16	2.606,95	0,02
(4) Belanja Hibah	51.422,98	81.473,38	523.331,10	1.622.115,98	12,17
(5) Belanja Bantuan Sosial	48.972,75	49.205,52	54.795,95	817,00	1,28
(6) Belanja Bantuan Keuangan	142.441,36	117.977,68	459.523,74	577.541,17	8,17
2. Belanja Modal/Langsung	640.664,24	1.032.890,02	1.139.120,16	1.070.815,22	27,60
(1) Tanah	45.594,84	37.334,48	76.248,45	-	1,29
(2) Peralatan dan Mesin	104.405,04	135.921,07	153.712,78	-	3,22
(3) Gedung dan Bangunan	111.678,27	182.423,04	292.571,33	-	4,58
(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	363.921,21	655.814,96	615.704,08	-	13,20
(5) Aset Tetap lainnya	-	102,31	-	-	0,00
(6) Aset lainnya	15.064,89	21.294,16	883,52	-	0,34
3. Belanja Tidak Terduga	566,04	586,73	688,50	1.840,66	0,02
4. Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	377.068,04	478.165,06	373.395,02	500.000,00	12,64
(1) Bagi Hasil Pajak	377.068,04	478.165,06	373.395,02	500.000,00	12,64
(2) Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
(3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
Surplus/Defisit	56.358,63	79.577,11	123.370,85	-357.311,29	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun 2009-2012 antara lain adalah:

- (1) Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan anggaran, mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- (2) Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi, juga telah menyebabkan keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah;
- (3) Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja;
- (4) Belum adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah;

- (5) Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja;
- (6) Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Dinas, Kantor, Badan maupun Biro menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 5

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2012 (Rp.Juta)

NO	URAIAN	2009		2010		2011		2012	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	PEMBIAYAAN	258,684.482	258,684.450	(46,456.917)	482,603.523	318,003.779	321,505.915	(196,695.678)	357,311.291
1.	Penerimaan Daerah	288,684.482	288,684.450	315,043.083	522,603.523	390,138.345	392,550.083	213,204.322	477,175.785
	Penggunaan Sisa (1) Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	288,684.482	288,684.450	315,043.083	315,043.083	390,138.345	392,550.083	213,204.322	477,175.785
	(2) Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan (3) Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
	(4) Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	207,560.44	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali (5) Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	(6) Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengeluaran Daerah	30,000.00	30,000.00	361,500.00	40,000.00	72,134.57	71,044.17	409,900.000	119,864.494
	(1) Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	324,900.00	-
	Penyertaan Modal (2) (Investasi) Pemerintah Daerah	30,000.000	30,000.000	40,000.000	40,000.000	20,000.000	20,000.000	85,000.00	89,750.00
	(3) Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	52,134.566	51,044.168	-	30,114.494

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen Pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan daerah dan pada akhirnya akan mengarah kepada fleksibilitas keuangan (*financial flexibility*) serta mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan entitas dalam hal ini meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tergambar dari tabel 3.6 Pertumbuhan Neraca Daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3. 6
Pertumbuhan Neraca Daerah
Tahun 2009-2012 (Rp)

URAIAN	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
ASET				
ASET LANCAR				
Kas	315,043,083,496.18	392,373,606,952.83	377,175,784,943.54	521,334,563,016.89
Kas di Kas Daerah	308,669,977,823.51	390,542,904,883.83	376,638,619,293.54	296,311,838,934.89
Kas di Bendahara	-	-	-	-
Penerimaan				
Kas di Bendahara	6,373,105,672.67	1,830,702,069.00	537,165,650.00	22,724,082.00
Pengeluaran				
Setara Kas			100,000,000,000.00	225,000,000,000.00
Piutang	377,928,497,308.40	47,831,738,864.77	570,431,322.24	132,556,303,934.65
Piutang Retribusi	239,680,380.00	346,848,940.00	473,506,925.00	612,014,740.00
Piutang Pajak	-	-	-	116,068,765,625.00
Daerah				
Piutang Kepada		772,128,624.77	-	-
Pemerintah				
Daerah Lainnya				
Piutang Lainnya	377,688,816,928.40	46,712,761,300.00	96,924,397.24	15,875,523,569.65
Persediaan	15,686,781,513.00	28,911,552,754.89	18,480,789,248.00	140,537,320,513.00
JUMLAH ASET LANCAR	708,658,362,317.58	469,116,898,572.49	496,227,005,513.78	794,428,187,464.54
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen	24,652,040,000.00	501,218,025,000.00	381,854,025,000.00	332,929,140,000.00
Investasi Dalam Saham	12,256,125,000.00	489,179,250,000.00	369,815,250,000.00	321,856,500,000.00
Investasi Bergulir	12,395,915,000.00	12,038,775,000.00	12,038,775,000.00	11,072,640,000.00
Investasi Permanen	319,620,503,213.94	372,391,924,381.53	432,973,314,674.46	572,104,914,586.35
Penyertaan Modal	319,620,503,213.94	372,391,924,381.53	428,761,869,075.86	567,213,573,169.24
Investasi Permanen Lainnya	-	-	4,211,445,598.60	4,891,341,417.11
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	344,272,543,213.94	873,609,949,381.53	814,827,339,674.46	905,034,054,586.35
ASET TETAP				
Tanah	2,174,998,321,825.80	2,208,433,309,070.00	2,330,848,285,021.69	2,303,935,931,049.69
Tanah				
Peralatan dan Mesin	583,836,336,414.00	718,239,943,294.00	1,083,646,647,414.00	1,209,720,560,451.86
Alat-alat Besar	14,954,696,250.00	23,265,870,250.00		
Alat-alat Angkutan	128,437,526,480.00	149,864,620,507.00		
Alat-alat Bengkel	3,384,605,800.00	4,378,412,300.00		
Alat-alat Pertanian dan Peternakan	10,756,966,290.00	14,293,410,530.00		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	277,027,511,695.00	338,319,081,926.00		
Alat-alat Studio dan Komunikasi	20,318,487,866.00	31,491,361,126.00		
Alat-alat Ukur	12,227,410,600.00	12,361,832,600.00		
Alat-alat Kedokteran	49,170,054,161.00	60,860,257,233.00		

URAIAN	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
Alat-alat Laboratorium	54,733,106,690.00	70,178,833,240.00		
Alat-alat Keamanan	691,537,550.00	793,847,550.00		
Alat-alat Peraga	12,134,433,032.00	12,432,416,032.00		
Gedung dan Bangunan	1,087,595,752,739.52	1,207,870,289,017.00	1,161,932,082,228.92	1,499,620,870,496.21
Bangunan Gedung	1,082,283,767,739.52	1,202,558,304,017.00		
Bangunan Monumen	5,311,985,000.00	5,311,985,000.00		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,763,866,516,566.26	7,400,424,835,770.00	7,947,936,082,228.92	8,604,988,774,057.89
Jalan dan Jembatan	6,411,571,860,137.26	6,963,351,027,989.00		
Bangunan Air (Irigasi)	202,212,432,511.00	252,424,778,823.00		
Instalasi	47,158,986,505.00	49,455,271,845.00		
Jaringan	87,088,905,483.00	116,743,461,183.00		
Rambu lalulintas, Penerangan Jalan, Taman, & Hutan Kota	15,834,331,930.00	18,450,295,930.00		
Aset Tetap Lainnya	25,023,694,918.00	41,792,739,908.00	104,717,202,835.00	126,739,639,985.00
Buku Perpustakaan	18,894,109,158.00	34,526,725,148.00		
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2,951,481,050.00	3,468,840,050.00		
Website	2,585,382,040.00	2,585,382,040.00		
Hewan/Ternak	592,722,670.00	1,211,792,670.00		
Tanaman/Tumbuhan	-	-		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	94,214,941,925.45	177,109,779,210.00	288,134,010,960.00	121,441,883,912.76
Konstruksi Dalam Pengerjaan	94,214,941,925.45	177,109,779,210.00		
Akumulasi Penyusunan Aset Tetap	-	-	-	-
Ak. Peny. Aset Tetap-Peralatan dan Mesin				
Ak. Peny. Aset Tetap-Gedung Bangunan				
Ak. Peny. Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Ak. Peny. Aset Tetap Lainnya				
JUMLAH ASET TETAP	10,729,535,564,389.00	11,753,870,896,269.00	12,917,214,454,019.50	13,866,447,659,953.40
DANA CADANGAN	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-
ASET LAINNYA	-	-	-	-

URAIAN	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perpendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain	1,867,033,155.00 649,808,776.07 418,595,357.93 120,111,000,000.00 8,397,049,500.00 10,111,961,500.33	1,166,172,173.00 644,308,776.07 391,159,000.00 120,111,000,000.00 8,397,049,500.00 43,724,674,981.64	919,392,173.00 643,308,776.07 429,940,000.00 308,402,365,295.64 8,505,799,500.00 48,960,167,533.28	1,068,931,523.00 - 1,086,796,776.07 328,159,352,755.00 5,049,184,000.00 50,665,145,762.74
JUMLAH ASET LAINNYA	141,555,448,289.33	174,434,364,430.71	367,860,973,277.99	386,029,410,816.81
JUMLAH ASET	11,924,021,918,209.90	13,271,032,108,653.70	14,596,129,772,485.70	15,951,939,312,821.10
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Kepada Pemerintah Daerah Lain Utang Jangka Pendek Lainnya	- 78,266,888,771.16 8,197,575,486.92	2,235,262,093.00 50,813,594,897.00 1,320,971,381.00	- 259,509,430,443.00 30,246,468,016.63	- 460,630,557,043.00 20,252,455,224.91
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	86,464,464,258.08	54,369,828,371.00	289,755,898,459.63	480,883,012,267.91
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	86,464,464,258.08	54,369,828,371.00	289,755,898,459.63	480,883,012,267.91
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Untuk Piutang Cadangan Untuk Persediaan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	315,043,083,496.18 - 377,928,497,308.40 15,686,781,513.00 (86,464,464,258.08)	390,138,344,859.83 - 47,831,738,864.77 28,911,552,754.89 (52,134,566,278.00)	477,175,784,943.54 - 570,431,322.24 18,480,789,248.00 (289,755,898,459.63)	521,334,563,016.89 - 132,556,303,934.65 140,537,320,513.00 (480,883,012,267.91)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	622,193,898,059.50	414,747,070,201.49	206,471,107,054.15	313,545,175,196.63

URAIAN	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	344,272,543,213.94 10,729,535,564,389.00 141,555,448,289.33 -	873,609,949,381.53 11,753,870,896,269.00 174,434,364,430.71 -	814,827,339,674.46 12,917,214,454,019.50 367,860,973,277.99 -	905,034,054,586.35 13,866,447,659,953.40 386,029,410,816.81 -
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	11,215,363,555,892.30	12,801,915,210,081.20	14,099,902,766,972.00	15,157,511,125,356.60
EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA	11,837,557,453,951.80	13,216,662,280,282.70	14,306,373,874,026.10	15,471,056,300,553.20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11,924,021,918,209.80	13,271,032,108,653.70	14,596,129,772,485.70	15,951,939,312,821.10

1. Aset

Aset lancar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami angka yang fluktuatif, dari Rp. 708 miliar di tahun 2009 mengalami penurunan hingga Rp. 469 miliar di tahun 2010, namun kembali meningkat di tahun 2012 mencapai Rp. 794 miliar. Bila dilihat secara detail maka terlihat penyumbang peningkatan aset lancar adalah dari sisi kas yang mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2012. Selain itu dari piutang juga menyumbang peningkatan yang berasal dari piutang retribusi yang pertumbuhannya 30 persen di tahun 2010 dan 22 persen di tahun 2012.

Sementara investasi jangka panjang rata-rata meningkat kecuali ditahun 2011, yang mengalami penurunan diakibatkan menurunnya nilai investasi dalam saham yang semula pada angka Rp. 489 miliar di tahun 2010 menurun hingga Rp. 369,8 miliar di tahun 2011. Peningkatan juga disumbang dari aset tetap lainnya yang rata-rata tumbuh sebesar 39 persen. Aset tetap dalam neraca keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata mencapai 8 persen selama kurun waktu 2009 – 2012. Aset tetap yang disumbang dari tanah mengalami pertumbuhan di tahun 2011 yang meningkat Rp. 122 miliar dibanding tahun 2010. Selain itu peningkatan aset tetap juga disumbang dari meningkatnya aset dari jalan serta irigasi dan jaringan. Selain itu selama kurun waktu 2009-

2012 Pemprov Sumsel tidak mengalokasikan dana cadangan Aset, sedangkan aset lainnya juga mengalami peningkatan tiap tahunnya dimana rata-rata pertumbuhan mencapai 25 persen.

2. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2009-2012 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif disebabkan terjadinya peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2009 kewajiban jangka pendek berjumlah Rp. 86,4 miliar kemudian tahun 2010 menurun menjadi sebesar Rp. 54,4 miliar, dan di tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 289,8 miliar dan 2012 menjadi Rp. 480,9 miliar. Faktor utama penyebab pertumbuhan kewajiban jangka pendek ini adalah pertumbuhan utang kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota meliputi diantaranya kekurangan pembayaran bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota. Untuk itu ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mengurangi kewajiban jangka pendek tersebut. Sementara dari kewajiban jangka panjang tidak ada yang yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan secara keseluruhan bahwa jumlah kewajiban periode 2009-2012 adalah mengalami pertumbuhan yang mencapai 21 persen.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, serta Ekuitas Dana Cadangan. Dimana pada setiap komponen terdiri dari pos – pos yang turut andil dalam naik dan turunnya pertumbuhan Ekuitas. Ekuitas Dana Lancar yang terdiri dari SILPA, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, mengalami penurunan rata – rata mengalami penurunan. Penurunan Ekuitas Dana Lancar utamanya karena penurunan pada dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Adapun untuk Ekuitas Dana Investasi, yang terdiri dari dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, dana diinvestasikan dalam aset tetap, dana diinvestasikan dalam aset lainnya, serta dana pembayaran utang jangka panjang, menunjukkan peningkatan tiap tahunnya untuk periode 2009-2012. Sementara itu, Ekuitas Dana Cadangan tidak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis lebih lanjut terhadap neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, sebagai berikut:

4. Rasio Likuiditas

Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Untuk Sumatera Selatan rasio likuiditas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 7

Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Rasio Likuiditas	2009	2010	2011	2012
Rasio Lancar	8,19	8,62	1,71	1,65
Rasio quick	9,06	8,09	1,65	1,36

Rasio Lancar

Rasio Lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dengan aset lancarnya dapat menjamin pembayaran hutang. Semakin tinggi rasio berarti hutang-hutang yang ada semakin terjamin, sementara untuk Sumatera Selatan rasionalnya cukup rendah sehingga diindikasikan perlu diperbaiki pengelolaan keuangan agar tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Quick

Rasio quick adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah membayar hutangnya dengan cepat. Rasio ini dinilai lebih baik dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang. Nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan hasil bahwa kemampuan aset lancar setelah dikurangi persediaan yang dimiliki cukup sulit untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimiliki.

5. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Tabel 3. 8

Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Rasio Solvabilitas	2009	2010	2011	2012
Rasio total hutang terhadap aset	0,007	0,004	0,02	0,03
Rasio hutang terhadap modal	0,007	0,004	0,02	0,03

Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rasio ini diukur dengan:

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari hutang. Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti semakin baik rasio hutang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur. Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap total aset adalah sebesar 0,007 dan meningkat menjadi 0,03 di Tahun 2012.

Rasio Total Hutang Terhadap Modal

Rasio ini perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan Pemda dan menunjukkan kemampuan modal Pemda untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Hasil perhitungan menunjukkan rasio ini pada angka 0,007 di tahun 2009 dan meningkat menjadi 0,03 di tahun 2012.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 2008-2013 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang antara lain adalah perlunya percepatan pengembangan ekonomi daerah, pembentahan administrasi perpajakan dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pajak daerah. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan PAD adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.

3.2.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis

kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun dibedakan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan prasarana, peningkatan produksi dan produktivitas, dan penciptaan nilai tambah daerah yang lebih tinggi.

Dalam periode 2009-2012, pengelolaan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung didasarkan pada kebijakan sebagai berikut.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk:

- (1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
- (2) Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
- (3) Meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antarunit organisasi.

Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:

- (1) Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan 2008-2013 terutama peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
- (2) Mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- (3) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Tantangan pengelolaan belanja daerah dalam lima tahun mendatang (2013-2018) diarahkan pada perubahan struktur belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal dan transfer ke kabupaten/kota. Perubahan struktur belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan percepatan pembangunan daerah. Langkah ini didukung dengan reformasi dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kinerja PNSD.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 2013-2018, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2009-2013).

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dilakukan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dengan memperhitungkan perubahan dalam lima tahun mendatang, pendanaan pembangunan diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong penambahan dan pemupukan modal melalui investasi. Perkiraan kebutuhan investasi Provinsi Sumatra Selatan tahun 2014-2018 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari 6,00 persen pada tahun 2014 menjadi 6,50 persen pada tahun 2016 dan 7,00 persen pada tahun 2017;
- (2) Nilai ICOR (*incremental capital to output ratio* atau rasio penambahan modal terhadap produksi) dari 3,50 persen pada tahun 2014 menjadi 3,25 pada tahun 2016 dan 3,00 pada tahun 2018;
- (3) Tingkat depresiasi diperkirakan 5,00 persen per tahun;
- (4) Tingkat tabungan per tahun merupakan hasil perkalian dari pertumbuhan ekonomi ditambah depresiasi dan nilai ICOR;
- (5) Tingkat inflasi diperkirakan sebesar 4 persen per tahun;

- (6) Kapasitas fiskal Provinsi Sumatera Selatan dihitung berdasarkan jumlah belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditambah belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan kenaikan belanja modal sebesar 10 persen per tahun;
- (7) Investasi Pemerintah Pusat dihitung dari nilai investasi tahun 2013 dengan memperhitungkan pertumbuhan 10 persen per tahun;
- (8) Perkiraan pertumbuhan nilai investasi swasta (Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing) sebesar 10 persen per tahun; dan
- (9) Perkiraan nilai investasi KEK Tanjung Api-api.

Dengan memperhitungkan berbagai asumsi tersebut, sampai dengan tahun 2018 diperkirakan akan terjadi kesenjangan investasi. Kebutuhan investasi tersebut hanya akan dapat dipenuhi oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan yang telah dicapai selama ini, kondisi sosial yang kondusif, dan kondisi ketertiban dan keamanan yang terjaga dengan baik sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Sumatera Selatan (lihat Tabel 3.5).

Tabel 3. 9

Perkiraan Kebutuhan Investasi Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018

No.	SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	7,00
2	ICOR	3,50	3,50	3,50	3,25	3,25	3,00
3	Tingkat depresiasi (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Tingkat tabungan (%)	38,5	38,5	38,5	37.38	37.38	36.00
5	PDRB Konstan Tahun 2000 Dengan Migas (Rp. Miliar)	206,3	226,93	249,62	265,85	283,13	302,94
6	Ingkat Inflasi (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)	79.426	87.368	96.104	99.360	105.818	109.060
8	Kapasitas Fiskal (Rp. Miliar)	8.960	10.130	11.500	13.110	14.990	17.240
	b. Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rp. Miliar)	1.310	1.720	2.250	2.930	3.800	4.920
	c. Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rp. Miliar)	7.650	8.410	9.250	10.180	11.190	12.320
9	Kesenjangan Investasi (Rp. Miliar)	70.466	77.238	94.954	86.250	90.828	91.820
10	Perkiraan Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)	9.700	9.900	10.890	11.990	13.090	14.400
11	Kebutuhan Investasi Swasta (Rp. Miliar)	60.766	67.338	84.064	74.260	77.738	77.420

No.	SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Perkiraan Investasi Swasta KEK (Rp. Miliar)		9.558	36.791	58.976	10.000	15.000
13	Perkiraan Investasi Swasta PMDN (Rp. Miliar)	6.900	7.590	8.349	9.184	10.100	11.110
14	Perkiraan Investasi Swasta PMA (Rp. Miliar)	9.050	9.955	10.950	12.050	13.250	14.580
15	Kebutuhan Investasi Swasta (PMA+PMDN) Baru (Rp. Miliar)	44.816	49.793	64.765	53.026	54.388	51.730

Sumber: Hasil Analisis 2013

3.3.3 Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.3.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2013-2018 diarahkan pada hal-hal berikut.

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan.
 - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat

memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;

- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Sumsel, PD Perhotelan Swarna Dwipa dan laba atas penyertaan modal pada PT. Tambang Bukit Asam;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
- Berdasarkan hasil evaluasi keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2012, maka dapat disiapkan asumsi penghitungan perkiraan pendapatan pendapatan daerah tahun 2014-2018 sebagai berikut:
- (1) Rata-rata Pertumbuhan PAD selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 22,70 persen per tahun dengan rincian: (a) rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 25,62 persen, (b) rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 7,84 persen, (c) rata-rata pertumbuhan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 15,89 persen, dan (d) rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 5,00 persen.
 - (2) Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Transfer selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 19,40 persen per tahun dengan rincian: (a) rata-rata

pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 18,65 persen, (b) rata-rata pertumbuhan Dana Transfer Lainnya sebesar 0,00 persen.

- (3) Rata-rata Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 10,81persen per tahun dengan rincian: (1) rata-rata pertumbuhan pendapatan hibah sebesar 30,00 persen, dan (b) rata-rata pertumbuhan Dana BOS sebesar 10,00 persen

Dengan berbagai kebijakan dan asumsi tersebut, pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat dari Rp. 6.000,78 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp. 12.905,07 miliar pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 20,52 persen per tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan meningkat dari Rp. 2.214,42 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp. 4.177,69 miliar pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 24,67 persen per tahun (lihat Tabel 3.10).

Sejalan dengan meningkatnya PAD, struktur pendapatan daerah secara bertahap akan bergeser dari dominasi Dana Perimbangan menjadi PAD. Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat dari 38,72 persen pada tahun 2013 menjadi 44,10 persen pada tahun 2016 dan 47,05 persen pada tahun 2018. Sementara, sumbangan dana transfer terhadap pendapatan daerah akan menurun dari 44,82 persen pada tahun 2013 menjadi 41,89 persen pada tahun 2016 dan 42,79 persen pada tahun 2018. Struktur pendapatan daerah tersebut diharapkan akan mendorong kemandirian Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Tabel 3. 10
Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018 (Rp. Miliar)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Daerah		6,000.78	7,104.28	8,186.28	9,460.39	11,011.49	12,905.07
I	Pendapatan Asli Daerah	2,214.42	2,609.42	2,788.59	3,161.96	3,618.16	4,177.69
1.	Hasil Pajak Daerah	1,999.72	2,394.72	2,571.11	2,931.07	3,370.73	3,910.04
2.	Hasil Retribusi Daerah	16.77	16.77	17.84	19.27	21.00	23.10
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.94	92.94	119.14	126.29	135.13	145.94
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	104.99	104.99	80.50	85.33	91.30	98.61
II	Pendapatan Transfer	2,951.33	3,681.53	4,576.22	5,468.75	6,555.35	7,881.01
1.	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	2,951.33	3,681.53	4,576.22	5,468.75	6,555.35	7,881.01
	(1) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	2,055.62	2,665.82	3,423.09	4,200.31	5,160.06	6,346.20
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	569.36	814.90	785.48	903.30	1,038.79	1,194.61

	b.	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	1,486.26	1,850.92	2,637.61	3,297.02	4,121.27	5,151.59
	(2)	Pendapatan Dana Alokasi Umum	870.52	970.52	1,084.10	1,192.51	1,311.76	1,442.93
	(3)	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	25.19	45.19	69.03	75.93	83.53	91.88
2		Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-
	(1)	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
	(2)	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah		835.04	813.34	821.47	829.68	837.98	846.36
1		Pendapatan Hibah	21.70	-	-	-	-	-
2		Dana Insentif Pendidikan	0.78	0.78	0.79	0.80	0.80	0.81
3		Dana Bantuan Operasional Sekolah	812.56	812.56	820.68	828.89	837.18	845.55

Sumber: Hasil Proyeksi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan

3.3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan redefinisi dan reposisi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh SKPD dengan berbagai langkah.

- (1) alokasi belanja dalam dokumen anggaran setiap unit satuan kerja harus dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif yang menjadi target daerah untuk dicapai dalam lima tahun;
- (2) alokasi anggaran dalam dokumen anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus secara jelas menunjukkan keselarasan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit satuan kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Hal ini harus dilakukan untuk menjamin setiap alokasi dana publik untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD), dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya. Langkah ini harus dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh proses kerja yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi serta tidak secara substansial memberikan kontribusi kepada pencapaian sasaran kebijakan daerah.

(3) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melakukan penilaian kembali dan penghematan pada kegiatan yang bersifat tidak substansif dalam mendukung pencapaian keluaran dan hasil. Sebaliknya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengidentifikasi keluaran atau hasil yang sangat krusial untuk mencapai sasaran kebijakan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga alokasi anggaran menghasilkan secara nyata peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2013-2018 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Meningkatkan wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis bagi masyarakat miskin dan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Program berobat gratis bagi masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan Non Askes, Asabri, Jamsostek, Jamkesmas.
- (4) Mengoptimalkan belanja langsung untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya.
- (5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah perdesaan, tertinggal, dan daerah pemekaran baru.
- (7) Meningkatkan sinergi anggaran melalui dana sharing antara APBN dan APBD Provinsi, dan antara APBD Provinsi dan PABD Kabupaten/Kota.
- (8) Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun (*multiyears*) yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan kebijakan belanja daerah tersebut, komposisi belanja daerah secara beratahapan akan berubah, yaitu rasio belanja daerah atau Belanja Langsung terhadap belanja daerah akan meningkat dari 21,92 persen pada tahun 2013 menjadi 28,22 persen pada tahun 2016 dan 32,42 persen pada tahun 2018, sedangkan belanja operasional atau Belanja Tidak Langsung menurun dari 68,05 persen pada tahun 2013 menjadi 59,80 persen pada tahun 2016 dan 54,30 persen pada tahun 2018. Peningkatan belanja modal diharapkan akan mendorong percepatan penyediaan pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi Sumatera Selatan.

Perkiraan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2018 secara rinci pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 11

Perkiraan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018 (Rp. Miliar)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Daerah	6.000,78	7.136,88	8.186,28	9.460,39	11.011,49	12.905,07
1. Belanja Operasional	4.083,61	4.660,47	5.120,63	5.657,44	6.282,20	7.007,62
(1) Belanja Pegawai	840,11	999,16	1.146,08	1.324,46	1.541,61	1.806,71
(2) Belanja Barang dan Jasa	900,12	1.070,53	1.227,94	1.419,06	1.651,72	1.935,76
(3) Belanja Subsidi	1,20	1,43	1,64	1,89	2,20	2,58
(4) Belanja Hibah	1.657,23	1.792,57	1.851,49	1.903,14	1.939,89	1.950,85
(5) Belanja Bantuan Sosial	1,20	1,43	1,64	1,89	2,20	2,58
(6) Belanja Bantuan Keuangan	683,75	795,36	891,84	1.007,00	1.144,57	1.309,14
2. Belanja Modal	1.315,29	1.714,18	2.138,15	2.669,60	3.338,54	4.183,65
(1) Tanah						
(2) Peralatan dan Mesin						
(3) Gedung dan Bangunan						
(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan						
(5) Aset tetap Lainnya						
(6) Aset lainnya						
3. Belanja Tidak Terduga	1,80	2,14	2,46	2,84	3,30	3,87
4. Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	600,08	760,08	925,05	1.130,52	1.387,45	1.709,92
(1) Bagi Hasil Pajak	600,08	760,08	925,05	1.130,52	1.387,45	1.709,92
(2) Bagi Hasil Retribusi						
(3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya						

Sumber: Hasil Analisis 2013

3.3.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a) Mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.
- b) Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman daerah baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui pembiayaan untuk penyerataan modal BUMD. Penyerataan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

- b) Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.
- c) Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung proses pembangunan Sumatera Selatan. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 diarahkan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat dalam pembangunan Sumatera Selatan. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

- a) Mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses perijinan;
- b) Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Sumatera Selatan;
- c) Mengelola kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati bersama;
- d) Meningkatkan kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
- e) Mendorong kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; serta industri pengolahan hasil tambang;
- f) Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat;
- g) Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional dan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Daerah

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah dan mendorong pemerataan pembangunan antardaerah melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan terutama program pengembangan pendidikan melalui Sekolah Gratis, program peningkatan kesehatan masyarakat melalui Berobat Gratis (Jamsoskes Sumsel Semesta), program Rumah Murah, program Bantuan Hukum Gratis, Pembangunan Pertanian, Peningkatan Usaha UMKMK dan beberapa program/kegiatan lainnya yang mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pembangunan Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan selama 2008-2013 selain membawa kemajuan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga menyisakan berbagai permasalahan yang harus diatasi secara terencana, terukur dan tuntas. Permasalahan pembangunan daerah di Sumatera Selatan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2014-2018) adalah sebagai berikut:

4.1.1 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan terus menurun dari 1,254 juta orang (17,73%) pada tahun 2008 menjadi 1,104 juta orang (15,47%) pada tahun 2010. Jumlah penduduk miskin terus menurun dari 1,042 juta orang pada tahun 2012 menjadi 1,110 juta orang pada tahun 2013. Sementara, persentase kemiskinan justru meningkat dari 13,48 persen pada tahun 2012 menjadi 14,24 persen pada tahun 2013. Kondisi ini menyiratkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin lebih lambat dari peningkatan jumlah penduduk.

Permasalahan kemiskinan juga menyangkut tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menurun dari 2,63 pada tahun 2010 menjadi 2,41 tahun 2011 dan menjadi 1,85 pada tahun 2012. Tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan juga menurun dari 0,71 tahun 2010 menjadi 0,65 pada tahun 2011, dan 0,43 pada tahun 2012. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk

miskin semakin membaik dan mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin berkurang.

Penduduk miskin sebagian besar tinggal di perdesaan, yaitu sebanyak 725,60 ribu (14,50%) lebih besar dibanding jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 384,77 ribu (13,77%). Perbandingan antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa daerah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Lubuk Linggau. Karakteristik kemiskinan di Sumatera Selatan antara lain adalah terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan; terbatasnya akses pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kecukupan pangan.

Permasalahan kemiskinan di perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian mengindikasikan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian, rendahnya kepemilikan lahan yang menyebabkan penduduk menjadi buruh tani, rendahnya sertifikasi kepemilikan lahan mengakibatkan rendahnya akses untuk permodalan dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi, terjadinya alih fungsi lahan utamanya pertanian yang menyebabkan pengangguran, masih adanya kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, yang menyebabkan rendahnya kemampuan SDM terutama generasi muda miskin yang selanjutnya akan menyebabkan pengangguran atau menjadi buruh.

Dengan membandingkan kondisi kemiskinan secara nasional, tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan berada di atas rata-rata kemiskinan nasional. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011 termasuk peringkat ke-14 provinsi termiskin, bahkan pada tahun 2012 memburuk pada peringkat ke-13 termiskin. Hal ini berarti bahwa laju penurunan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan masih relatif lambat dibanding provinsi lainnya, meskipun tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Selatan telah berhasil ditekan dengan signifikan.

Dalam kurun waktu tahun 2008-2013 tingkat penurunan kemiskinan di Sumatera Selatan cenderung mengalami pelambatan yang disebabkan oleh tersebarnya penduduk miskin, belum optimalnya belanja pemerintah daerah, belum sinergisnya kebijakan, program dan kegiatan SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, dan belum optimalnya peran dunia usaha/swasta dan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pembangunan berbasis wilayah khususnya daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pinggiran sungai dengan revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan; mengoptimalkan pelayanan publik dengan memperkuat kerjasama SKPD Provinsi dan SKPD kabupaten/kota; serta dan mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

4.1.2 Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan pada Februari 2013 mencapai 3.904.978 orang atau meningkat 158.605 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 dan berkurang sebanyak 24.483 orang dibanding Februari 2012. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2013 mencapai 3.690.603 orang atau meningkat sebesar 157.671 orang dibanding Agustus 2012 dan berkurang sebanyak 19.080 orang dibanding Februari 2012. Sementara, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat sekitar 2,38 persen dari 69,56 persen pada Agustus 2012 menjadi 71,94 persen pada Februari 2013.

Struktur lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian, perdagangan, dan sektor jasa kemasyarakatan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Pada Februari 2013 sekitar 52,96 penduduk Sumatera Selatan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sementara penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 16,41 persen, serta penduduk yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan mencapai 13,84 persen. Selain itu, sekitar 2.435,8 ribu orang atau 66 persen pekerja di Provinsi Sumatera Selatan bekerja di sektor informal.

Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Selatan pada Februari 2013 mencapai 5,49 persen atau menurun 0,21 persen dibanding Agustus 2012 dan menurun 0,10 persen dibanding Februari 2012. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan khususnya di Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau jauh lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan alamiah penduduk, arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan, dan banyaknya pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu, kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja. Di sisi lain, tingkat pendidikan penduduk di perdesaan umumnya relatif masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan di sektor tradisional.

Penyebab utama pengangguran adalah terbatasnya lapangan kerja, tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja tidak dengan kesempatan kerja dan tidak sesuaiannya pendidikan tenaga kerja dengan pasar kerja. Permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur. Dalam lima tahun mendatang, permasalahan dan tantangan bidang ketenagakerjaan yang harus diatasi adalah: (1) terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yang dicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi, (2) tingginya persentase pekerja di sektor informal, (3) adanya kesenjangan upah diantara kelompok pekerja, (4) rendahnya kualitas tenaga kerja

khususnya keahlian yang dimiliki sebagai akibat kurangnya pelatihan berbasis kompetensi dan masih adanya mismatch antara kebutuhan pasar kerja dengan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan maupun pelatihan kerja, (5) masih tingginya angka setengah pengangguran.

4.1.3 Pendidikan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah bekerja keras meningkatkan derajat pendidikan penduduk melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan khususnya sekolah gratis. Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.

a. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas

Kesempatan memperoleh pendidikan di Sumatera Selatan terus meningkat, tetapi rata-rata lama sekolah masih rendah, APS juga masih rendah khususnya pada jenjang SLTP dan SLTA. Tantangan ke depan adalah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang mencakup pemerataan dan efisiensi internal pendidikan dasar; meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas; meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi; meningkatkan keberaksaraan; meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

b. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.

Apabila ditilik dari aspek kualitas terlihat dengan masih rendahnya kualitas siswa, pendidik/tenaga kependidikan serta prasarana sarana. Sementara hasil Nilai Ujian Akhir Nasional belum optimal yaitu masih di kisaran angka 6-7. Ke depan ditargetkan dapat mencapai nilai 7 untuk SD/MI dan 7,5 untuk SMP/MTs.

Di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti. Disamping itu terkait dengan keberadaan pendidik/tenaga kependidikan adalah masih masih rendahnya kesejahteraan, kualifikasi S1/D4 (mencapai sekitar 70%) dan sertifikasi pendidik. Kondisi prasarana sarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi, dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga belum optimalnya

pengembangan muatan lokal. Muatan lokal penting bagi sarana untuk mengolah kekhasan “identitas” sebagai bagian tidak terpisahkan dari watak. Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian merupakan subyek potensial guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa.

4.1.4 Kesehatan

Permasalahan terkait dengan pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan adalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan yaitu meningkat dari 114,42 (tahun 2008) menjadi 116,34 (Tahun 2012). Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat dari 9,71 (tahun 2008) menjadi 10,75 (Tahun 2012) yang disebabkan masalah neonatal seperti *asfiksia* (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) serta infeksi neonatus; *pneumonia*, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang.

a. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah

Kondisi saat ini adalah masih tingginya persalinan yang ditolong oleh dukun bersalin, masih tingginya angka kematian bayi, serta masih rendahnya balita yang mendapat imunisasi lengkap. Tantangan ke depan adalah memperkecil persalinan oleh dukun bersalin dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

b. Status gizi masyarakat masih rendah

Kekurangan gizi pada anak balita telah menurun, namun masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup penting. Tantangan ke depan adalah meningkatkan status gizi masyarakat dengan fokus pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, meningkatkan pola hidup sehat, menjamin kecukupan zat gizi dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

c. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi

Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit. Tantangan ke depan adalah meningkatkan

cakupan dan kualitas pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, peningkatan survailans epidemiologi, peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan tatalaksana kasus, peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan kerjasama lintas sektor, serta kesiap siagaan menghadapi pandemi penyakit zoonotik.

d. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas

Tantangan ke depan adalah memperbaiki kualitas perencanaan, produksi dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan persebaran SDM kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan daerah kepulauan yang didukung dengan penguatan regulasi termasuk akreditasi dan sertifikasi.

e. Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas masih rendah

Jumlah fasilitas kesehatan terus meningkat tetapi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masih rendah khususnya di daerah pedesaan. Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk merespons dinamika karakteristik penduduk dan kondisi geografis.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaan Jamkesmas dan Jamkesda. Masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memerlukan akses layanan kesehatan namun belum tersentuh seluruhnya seperti anak-anak berkebutuhan khusus, perempuan bekerja dengan resiko tinggi untuk kesehatan reproduksinya, difabel dan lansia. Di sisi lain pelaksanaan Jamkesda yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi permasalahan terkait dengan tunggakan maupun penatakelolaan program jaminan layanan kesehatan secara umum.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya sehingga masih diperlukan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mampu dan mau melakukan PHBS untuk mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

Sarana pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah masih dominannya pelayanan kuratif yang mengandalkan industri obat dan belum optimalnya pengembangan kearifan lokal melalui pengembangan obat-obatan herbal atau jamu tradisional.

4.1.5 Keadilan Gender dan Perlindungan Anak

Kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional telah tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 yang pada intinya menginstruksikan kepada seluruh Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengintegrasikan perspektif gender (aspirasi, pengalaman, masalah dan kebutuhan perempuan serta laki-laki) ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.

Dalam kaitan ini perspektif keadilan gender berfungsi sebagai cara pandang untuk semua upaya penguatan kapasitas birokrasi dalam kapasitasnya melayani kepentingan masyarakat. Melalui perspektif gender sangat membantu birokrasi dalam menjalankan tata kerja dan tupoksinya. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keadilan gender dan perlindungan anak adalah masih lemahnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya. Sementara itu dalam tataran publik berbagai permasalahan terlihat dengan masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Permasalahan lain adalah peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masih rendah. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di politik serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif.

Dari sisi perlindungan anak permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya sistem perlindungan anak utamanya terhadap anak yang rentan (kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak). Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pencegahan, penanganan dan pengurangan resiko terhadap anak-anak yang rentan sedangkan terhadap anak yang berkebutuhan khusus lebih ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

4.2. Analisis Lingkungan Strategis

Analisa isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang (2013-2018).

4.2.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Identifikasi dan analisa lingkungan internal Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang (2013-2018).

4.2.1.1 Identifikasi dan Analisa Kekuatan Daerah

- a. Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, khususnya sumberdaya pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- b. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah pertanian yang sangat potensial bagi perolehan devisa, khususnya dari komoditi kelapa sawit, karet dan hasil perkebunan lainnya;
- c. Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan pesisir yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah;
- d. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi wisata alam, wisata sungai, wisata budaya, wisata religi, wisata olah raga dan wisata kuliner yang sangat kaya dan beragam;
- e. Provinsi Sumatera Selatan memiliki akses transportasi darat, laut, sungai dan udara yang terjangkau untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan, dan keterkaitan Provinsi Sumatera Selatan dengan daerah lainnya.

4.1.1.2 Identifikasi dan Analisa Kelemahan Daerah

- a. Belum meratanya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana perhubungan; prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana ekonomi seperti pasar, air bersih, tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;
- b. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu termasuk perbaikan status gizi masyarakat;
- c. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan yang disebabkan oleh belum tertatanya manajemen kinerja, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- e. Belum optimalnya kinerja BUMD, dan usaha mikro kecil menengah

- dan koperasi (UMKM) dalam pengembangan ekonomi daerah;
- f. Meningkatnya jenis dan bobot permasalahan sosial di Provinsi Sumatera Selatan.

4.2.2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam lima tahun mendatang berkaitan dengan tiga arus utama perubahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.

4.2.2.1 Identifikasi dan Analisa Peluang Daerah

- (1) Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
- a. Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Sumatera Selatan;
 - b. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan terutama komoditi yang dihasilkan Provinsi Sumatera Selatan seperti karet, kelapa sawit, hasil pertanian dan perikanan;
 - c. Perluasan jaringan dan kerjasama internasional akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan pariwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner maupun wisata budaya Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat telah memberikan peluang bagi Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:

- a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat;
 - b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, keistimewaan, kekhususahan, dan keragaman masyarakat.;
 - c. Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat.
- (3) Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- a. Dengan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
 - b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal, keragaman, kekhususahan dan keragaman masyarakat.

4.2.2.2 Identifikasi dan Analisa Ancaman Daerah

- (1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
- a. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan akan mendorong eksplorasi sumberdaya alam termasuk tambang, hutan, laut, pesisir dan sumberdaya alam lainnya secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan;

- b. Arus masuk barang dari luar baik dari daerah maupun dari negara lain akan mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Demokratisasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi kelangsungan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
- a. Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat;
 - c. Peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.
- (3) Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
- a. Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. Persaingan antardaerah dalam penguasaan sumberdaya alam, aset daerah, penetapan arah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur yang cenderung meningkat dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;
 - c. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
 - d. Meningkatnya kesenjangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah.

4.3 Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun (2013-2018) mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, sumber daya dan lingkungan hidup;
- b. Belum meratanya akses dan mutu layanan pendidikan yang antara lain dipengaruhi oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
- c. Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan di daerah perdesaan, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan perkebunan, serta kelautan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, dan tingginya fluktuasi harga pasar;
- e. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan, pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh belum meratanya pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan lingkungan yang menghubungkan antarkabupaten/kota dan antarkecamatan; serta belum terpadunya sistem transportasi antara darat-laut-dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana ketenagalistrikan;
- g. Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antardaerah;

- h. Belum optimalnya layanan di bidang hukum dan pemerintahan terutama dalam memberikan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
- i. Belum optimalnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan teknologi dan inovasi daerah;
- j. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
- k. Lemahnya koordinasi antarSKPD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
- l. Potensi wilayah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak yang tidak produktif dalam jenis penggunaan tegalan dan tanah belukar (20%) yang masih bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan produktifitasnya sebagai kawasan budidaya. Pemanfaatan dan peningkatan produktifitas pada kawasan ini akan memberikan dukungan pada program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional. Program lumbung pangan nasional memiliki pengertian bahwa Sumatera Selatan sebagai produsen pangan dan penyedia cadangan pangan nasional, sebagai pusat pengembangan agribisnis dan agroindustri sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Tentu saja pemanfaatan ini harus didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan.
- m. Provinsi Sumatera Selatan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 November 2004 dicanangkan sebagai Provinsi Lumbung Energi Nasional : Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyedia dan pemasok energi yang bersumber dari bahan bakar fosil dan non fosil untuk kebutuhan berbagai sektor seperti industri komersil, transportasi, dan rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan, Nasional, dan untuk ekspor energi primer dan sekunder sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan program ini telah disusun sebuah perencanaan yang komprehensif tahun 2006. Rencana-rencana tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten dan disinkronkan dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan.
- n. Belum optimalnya peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan dalam

wilayah yang lebih luas terutama pusat-pusat permukiman yang berada di sekitar perbatasan dengan provinsi lain dan pusat-pusat permukiman yang berada di sekitar Kota Palembang (PKN) serta pusat-pusat permukiman hasil pemekaran. Selain itu juga, masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antar pusat-pusat permukiman/pertumbuhan tersebut. Dengan kata lain sistem kota-kota menunjukkan dominasi Kota Palembang (*primate city*) sehingga terjadi ketergantungan secara wilayah terhadap Kota Palembang yang mengakibatkan ketidakefisienan struktur ruang. Pola *primate city* demikian pada masa yang akan datang perlu dihindari dengan melakukan penguatan kota-kota berhirarki di bawah *primate city*, yaitu PKW. Penguatan dilakukan terutama pada PKW yang jauh dari Kota Palembang (seperti Lubuk Linggau, Lahat, Baturaja) sehingga kota-kota tersebut dapat berperan lebih besar dalam pelayanan skala wilayah secara seimbang.

- o. Adanya sebagian wilayah, terutama pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan provinsi lain, pusat pelayanannya mengarah pada kota-kota besar di Provinsi Lampung (seperti Tanjung Karang, Kotabumi dan Menggala) yang secara geografis lebih dekat dengan kawasan tersebut (seperti sebagian Kabupaten OKU Selatan, sebagian Kabupaten OKU Timur, sebagian Kabupaten OKI). Strategi yang perlu dilakukan adalah penguatan sistem kota-kota dengan meningkatkan fungsi dan hirarki kota serta aksesibilitas kota-kota yang berada pada kawasan perbatasan atau pinggiran tersebut.
- p. Peran yang besar secara nasional yang dimisikan oleh Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang handal, khususnya transportasi. Saat ini, sistem transportasi yang ada masih kurang terpadu dan kapasitas moda transportasi masih rendah. Perlu pengembangan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api, dan terminal peti kemas. Dalam muatan rencana RTRWN sebenarnya sudah ada rencana yang mendukung hal tersebut, yaitu adanya rencana jalan bebas jembatan Pulau Sumatera yang juga menghubungkan kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta adanya rencana Pelabuhan Tanjung Api-API.
- q. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai banyak sungai, baik sungai besar maupun kecil yang selain merupakan potensi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila penanganan lingkungan tidak dilakukan dengan cermat, misalnya timbulnya masalah banjir. Diharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini dapat mempertimbangkan perwilayahannya DAS dalam pengaturan sistem kota-kota dan dalam pengembangan/pemanfaatan ruangnya memperhatikan tata air secara berkelanjutan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

5.1 Arahan RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, dan Arahan Gubernur Sumatera Selatan

5.1.1 Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 menyebutkan bahwa tahap ketiga pembangunan Sumatera Selatan (2013-2018) mengutamakan pembangunan menyeluruh di semua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, iptek, dan suasana wilayah yang kondusif dengan 4 (empat) strategi: (1) menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi, (2) menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, (3) mengembangkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan (4) mendorong pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggungjawab.

5.1.2 Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033

Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang produktif, efisien dan berkualitas menuju Provinsi unggul dan terdepan dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga menyebutkan bahwa penataan ruang terdiri dari pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Pengembangan struktur ruang diarahkan untuk: (1) Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan, (2) Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan, (3) Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah, (4) Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Sementara, pengembangan pola ruang meliputi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan lindung diarahkan untuk: (1) memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung dan (2) menjaga dan

meningkatkan kualitas kawasan lindung. Pengembangan kawasan budidaya diarahkan untuk: (1) meningkatkan produktivitas lahan tidur (lahan non produktif) dan meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Sumatera Selatan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional; (2) mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan (3) meningkatkan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

5.1.3 Arahan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2013-2018 menegaskan arah pembangunan untuk: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan yang seimbang baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi dan pengendalian inflasi; (2) meningkatkan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, dan stabilitas politik dengan memantapkan pertahanan dan keamanan dan memantapkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; (3) meningkatkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan; dan (4) meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana dengan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tabel 5. 1

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025,
Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033 dan
Arahan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025	Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033	Arahan Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018
<p>1. Menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) pertumbuhan ekonomi lebih dari 6,5 persen per tahun (2) penguatan struktur ekonomi yg didukung peningkatan nilai tambah industri dan jasa 	<p>1. Mengembangkan sistem perkotaan provinsi yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu keluar-masuk (<i>multi-gate</i>) dalam menciptakan keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya</p>	<p>1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang baik dari sisi produksi maupun permintaan dan pengendalian inflasi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Peningkatan daya beli masyarakat (2) Peningkatan iklim investasi (3) Peningkatan penyerapan anggaran, perbaikan kualitas belanja

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025	Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033	Arahan Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018
<p>(3) pengembangan sektor-sektor baru potensial</p> <p>(4) peningkatan surplus perdagangan dan investasi</p> <p>(5) penurunan pengangguran terbuka kurang dari 10 persen</p> <p>(6) penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui pemberdayaan UMKM, dan</p> <p>(7) penguatan kualitas SDM.</p> <p>2 . Menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan:</p> <p>(1) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan</p> <p>(2) penguasaan iptek</p> <p>(3) peningkatan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>(4) perbaikan kualitas permukiman dan perumahan</p> <p>(5) pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pekerja anak, dan kelompok marginal lainnya, peningkatan kualitas kehidupan beragama, seni dan budaya lokal.</p> <p>3 . Mengembangkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dengan kebijakan:</p> <p>(1) pemanfaatan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan</p> <p>(2) penataan ruang yang adil dan seimbang</p> <p>(3) penguatan sistem transportasi wilayah revitalisasi pertanian dan agribisnis.</p> <p>4 . Mendorong pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggungjawab dengan kebijakan:</p> <p>(1) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah</p>	<p>2. Mengembangkan sistem infrastruktur wilayah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional</p> <p>3. Mengembangkan tata ruang yang akomodatif dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam membutuhkan pertimbangan aspek lingkungan, khususnya perwilayah DAS dan sub DAS. Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya air bagi pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah sungai strategis nasional seperti WS Musi, Sugihan, dan Banyuasin</p> <p>4. Mengoptimalkan kedudukan dan peranan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai "salah satu titik sentuh" dan "pintu gerbang" Kawasan Barat Indonesia ke wilayah Internasional (Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan lain-lain), serta ke wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang</p>	<p>(4) Peningkatan daya saing ekspor</p> <p>(5) Peningkatan nilai tambah industri</p> <p>(6) Peningkatan perdagangan antarwilayah</p> <p>(7) Peningkatan infrastruktur</p> <p>2. Meningkatkan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek stabilitas ekonomi, stabilitas sosial dan stabilitas politik, yaitu:</p> <p>(1) menjaga stabilitas harga dan nilai tukar</p> <p>(2) mencegah konflik sosial, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; b. Pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. <p>c. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bermuansa membangun harmoni sosial;</p> <p>(3) Stabilitas politik :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memantapkan pertahanan dan keamanan <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks; • Meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025	Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033	Arahan Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018
(2) peningkatan kualitas pelayanan umum (3) penguatan kapasitas keuangan daerah (4) penguatan peran serta masyarakat (5) pengembangan keterbukaan informasi (6) pembangunan politik lokal (7) peningkatan penegakan hukum (8) peningkatan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana peningkatan keamanan dan ketertiban	dapat memberi peluang pasar ekspor bagi Provinsi Sumatera Selatan 5. Mendorong pembentukan sistem kota-kota secara hirarkis dengan memperhatikan keseimbangan antarsub wilayah.	kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme. b. Memantapkan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada <ul style="list-style-type: none">• Mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan pemilukada.• Memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No.2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
		3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan, yaitu : (1) Pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat. (2) Peningkatan SDM yang

Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025	Arahan Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033	Arahan Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018
		<p>berkualitas berbasis kompetensi.</p> <p>(3) Penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (<i>sustainable livelihood</i>) dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (<i>public-people-private partnerships</i>).</p> <p>4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.(2) Mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran.(3) Meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu.(4) Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

5.2. Visi dan Misi

5.2.1. Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.

Lebih maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.

Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperan serta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung didalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslahatan masyarakat.

Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai:

- (1) Kemakmuran Daerah
- (2) Kesejahteraan Rakyat
- (3) Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional

5.2.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Memantapkan stabilitas daerah;
- (3) Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan;
- (4) Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana.

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antarwilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan stabilitas daerah

Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin komplek; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif

masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada dengan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilukada; memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB).

Misi 3: Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan

Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk kerjasama dan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana

Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan, visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, dan memperhatikan Tujuan Pembangunan Milenium,

mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014; maka tujuan dan sasaran pembangunan makro daerah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Sasaran					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan mutu sumber daya manusia	Nilai IPM		73,99	74,29	74,60	74,90	75,20	75,51
2	Mengurangi kesenjangan pendapatan	Indeks Gini	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,01	6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	7,00
4	Mengendalikan harga	Angka Inflasi (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Mengurangi pengangguran	Angka pengangguran terbuka (%)	5,70	5,49	4,86	4,27	3,63	2,92	2,06
6	Mengurangi kemiskinan	Angka kemiskinan (%)	13,48	13,66	13,37	13,24	12,75	12,27	11,78
7	Mengurangi laju penurunan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,59	61,41	58,86	56,55	53,77	51,23	48,90

Dengan memperhitungkan tujuan dan sasaran pembangunan makro daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan mewujudkan misi Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai pada tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu

Tujuan 1: Mengembangkan pertanian yang unggul dan berdaya saing, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya produksi pertanian antara lain ditandai dengan meningkatnya produksi pertanian;
- (2) Meningkatnya kemampuan SDM di sektor pertanian antara lain ditandai dengan ragam teknologi terapan pertanian dan jumlah penyuluh pertanian;
- (3) Meningkatnya jumlah rumah tangga jasa (UMKM) di sektor pertanian antara lain ditandai dengan pertumbuhan usaha ekonomi rumah tangga berbasis produk pertanian;
- (4) Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pertanian antara lain ditandai dengan harga jual produk pertanian di tingkat petani;

- (5) Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertanian antara lain ditandai dengan penerimaan retribusi usaha pertanian.

Tujuan 2: Mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya IKM berbasis pertanian antara lain ditandai dengan jumlah IKM berbasis pertanian;
- (2) Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan antara lain ditandai dengan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor industri pengolahan;
- (3) Meningkatnya produk IKM antara lain ditandai dengan pertumbuhan produk sektor industri pengolahan;
- (4) Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha IKM antara lain ditandai dengan penerapan teknologi tepat guna;
- (5) Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha industri pengolahan antara lain ditandai dengan pendapatan daerah Kabupaten/Kota dari usaha industri pengolahan.

Tujuan 3: Mengembangkan pariwisata, dengan sasaran:

- (1) Berkembangnya jasa pariwisata antara lain ditandai dengan jumlah wisatawan;
- (2) Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pariwisata antara lain ditandai dengan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata per tahun;
- (3) Meningkatnya nilai tambah objek wisata antara lain ditandai dengan jumlah daya tarik objek wisata yang dikembangkan;
- (4) Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pariwisata antara lain ditandai dengan jumlah sanggar seni yang berkembang dan jumlah IKM yang mendukung pariwisata;
- (5) Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pariwisata antara lain ditandai dengan jumlah jasa transportasi dan pendapatan daerah kabupaten/kota dari usaha industri pariwisata.

Tujuan 4: Mengembangkan pengelolaan pertambangan yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya produksi pertambangan antara lain ditandai dengan jumlah produksi hasil tambang per tahun;
- (2) Meningkatnya nilai tambah sektor pertambangan ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan per tahun;
- (3) Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertambangan antara lain ditandai dengan besaran PNBP, retribusi, land rent dan royalty.

Tujuan 5: Mengembangkan perusahaan daerah, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya pendapatan daerah dari perusahaan daerah antara lain ditandai angka bagi hasil dari perusahaan daerah dan angka penyertaan modal provinsi;
- (2) Meningkatnya pendapatan perusahan daerah antara lain ditandai dengan nilai penjualan perusahaan daerah dan nilai keuntungan perusahaan daerah.

Tujuan 6: Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran:

- (1) Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-API antara lain ditandai dengan jumlah sarana dan prasarana penunjang KEK;
- (2) Meningkatnya investasi antara lain ditandai dengan nilai investasi swasta per tahun dan pertumbuhan nilai investasi per tahun;
- (3) Berkembangnya Klaster Industri Unggulan Daerah (KIUD) antara lain ditandai dengan berkembangnya jumlah KIUD, dan jumlah prasarana pendukung KIUD;
- (4) Meningkatnya perdagangan internasional antara lain ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor dan pertumbuhan nilai ekspor.

Tujuan 7: Mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antarwilayah, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya mobilitas barang antarwilayah antara lain ditandai dengan jumlah barang yang terangkut dengan transportasi darat, jumlah barang yang terangkut dengan transportasi udara, jumlah barang yang terangkut dengan transportasi sungai, danau dan laut;

- (2) Meningkatnya perdagangan antarwilayah antara lain ditandai dengan nilai perdagangan antarwilayah.

Tujuan 8: Meningkatkan jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah, dengan sasaran:

- (1) Terbangunnya jalan dan jembatan antara lain ditandai dengan panjang jalan dengan kondisi baik dan mantap;
- (2) Terbangunnya prasarana, sarana dan jaringan transportasi daerah yang terpadu dan merata antara lain ditandai dengan jumlah penumpang pengguna transportasi darat, jumlah penumpang pengguna transportasi sungai, danau dan laut, persentase penduduk pengguna transportasi udara;
- (3) Meningkatnya mutu pengelolaan lalu lintas antara lain ditandai dengan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (*over loading*) dan kendaraaan laik jalan;
- (4) Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman yang sehat dan layak huni antara lain ditandai dengan jumlah kawasan permukiman sehat dan layak huni;
- (5) Meningkatnya pelayanan daerah rawan sanitasi antara lain ditandai dengan cakupan pelayanan drainase permukiman dan cakupan penanganan TPA sampah.

Tujuan 9: Mengembangkan dan mendayagunakan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) secara bersistem, dengan sasaran:

- (1) Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa) antara lain ditandai dengan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) yang terdaftar dan jumlah ruang kreatif publik;
- (2) Berkembangnya jaringan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) antara lain ditandai dengan jumlah kawasan pusat belajar IPTEKIN, jumlah kemitraan strategis IPTEKIN, jumlah *technopark* yang mengacu pada standar WTA (*World Trade Asean*);
- (3) Berkembangnya bisnis inovatif antara lain ditandai dengan jumlah Pusat Inovasi (PI), dan persentase produk bisnis inovatif yang memenuhi standar internasional;
- (4) Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah pelayanan IPTEKIN di daerah dan tingkat pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan strategis daerah.

Tabel 5. 2

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kesatu
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Mengembangkan pertanian yang unggul dan berdaya saing	1.1 Meningkatnya produksi pertanian	1.1.1 Jumlah produksi bidang pertanian per tahun
	1.2 Meningkatnya kemampuan SDM di sektor pertanian	1.2.1 Ragam teknologi terapan pertanian 1.2.2 Jumlah penyuluh pertanian
	1.3 Meningkatnya jumlah rumah tangga jasa (UMKM) di sektor pertanian	1.3.1 Pertumbuhan usaha ekonomi rumah tangga berbasis produk pertanian
	1.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pertanian	1.4.1 Harga jual produk pertanian di tingkat petani
	1.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertanian	1.5.1 Penerimaan retribusi usaha pertanian
2. Mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian	2.1 Meningkatnya IKM berbasis pertanian	2.1.1 Jumlah IKM berbasis pertanian
	2.2 Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan	2.2.1 Pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri pengolahan
	2.3 Meningkatnya produk IKM	2.3.1 jumlah produksi sektor industri pengolahan
	2.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha IKM	2.4.1 Penerapan teknologi tepat guna
	2.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha industri pengolahan	2.5.1 Pendapatan daerah kabupaten/kota dari usaha industri pengolahan
3. Mengembangkan pariwisata	3.1 Berkembangnya jasa pariwisata	3.1.1 Jumlah wisatawan
	3.2 Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pariwisata	3.2.1 Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata per tahun
	3.3 Meningkatnya nilai tambah objekwisata	3.3.1 Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan
	3.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pariwisata	3.4.1 Jumlah sanggar seni yang berkembang 3.4.2 Jumlah IKM yang mendukung pariwisata
	3.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pariwisata	3.5.1 Jumlah Jasa Transportasi 3.5.2 Pendapatan daerah kabupaten/kota dari usaha industri pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
4. Mengembangkan pengelolaan pertambangan yang partisipatif dan berkelanjutan	4.1 Meningkatnya produksi pertambangan 4.2 Meningkatnya nilai tambah sektor pertambangan 4.3 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertambangan	4.1.1 Jumlah produksi hasil tambang per tahun 4.2.1 Angka pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan per tahun 4.3.1 Besaran PNBP, retribusi, land rent dan royalty
5. Mengembangkan perusahaan daerah	5.1 Meningkatnya pendapatan daerah dari perusahaan daerah 5.2 Meningkatnya pendapatan perusahaan daerah	5.1.1 Angka Bagi Hasil dari Perusahaan Daerah 5.1.2 Angka Penyertaan Modal Provinsi 5.2.1 Nilai penjualan perusahaan daerah 5.2.2 Nilai keuntungan perusahaan daerah
6. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	6.1 Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) TAA 6.2 Meningkatnya investasi 6.3 Berkembangnya Klaster Industri Unggulan Daerah (KIUD)	6.1.1 Jumlah sarana dan prasarana penunjang KEK 6.2.1 Nilai investasi swasta/thn 6.2.2 Pertumbuhan nilai investasi per tahun 6.3.1 Pertumbuhan nilai investasi per tahun 6.3.2 Jumlah klaster industri unggulan daerah 6.3.3 Jumlah infrastruktur pendukung KIU
	6.4 Meningkatnya perdagangan internasional	6.4.1 Nilai ekspor 6.4.2 Pertumbuhan nilai ekspor
7. Mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antarwilayah	7.1 Meningkatnya mobilitas barang antarwilayah 7.2 Meningkatnya perdagangan antarwilayah	7.1.1 Jumlah barang yang terangkut dengan transportasi darat 7.1.2 Jumlah barang yang terangkut dengan transportasi udara 7.1.3 Jumlah barang yang terangkut dengan transp. sungai, danau dan laut 7.2.1 Nilai perdagangan antarwilayah
8. Meningkatkan jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah	8.1 Terbangunnya jalan dan jembatan 8.2 Terbangunnya prasarana, sarana dan jaringan transp. yang terpadu dan merata	8.1.1 Panjang jalan dengan kondisi baik dan mantap 8.2.1 Jumlah penumpang pengguna transport. darat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	8.2.2 Jumlah penumpang pengguna transportasi sungai, danau dan laut 8.2.3 Persentase penduduk pengguna transportasi udara	
	8.3. Meningkatnya mutu pengelolaan lalu lintas	8.3.1 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 8.3.2 Menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading) 8.3.3 Kendaraan laik jalan
	8.4 Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman yang sehat dan layak huni	8.4.1 Jumlah kawasan permukiman sehat dan layak huni
	8.5 Meningkatnya pelayanan daerah rawan sanitasi	8.5.1 Cakupan pelayanan drainase permukiman 8.5.2 Cakupan penanganan TPA sampah
9. Mengembangkan dan mendayagunakan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) secara bersistem	9.1 Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)	9.1.1 Jumlah HKI yang terdaftar 9.1.2 Jumlah ruang kreatif publik
	9.2 Berkembangnya jaringan IPTEKIN	9.2.1 Jumlah kawasan pusat belajar IPTEKIN 9.2.2 Jumlah kemitraan strategis IPTEKIN 9.2.3 Jumlah technopark yang mengacu pada standar WTA (<i>World Trade Asean</i>)
	9.3 Berkembangnya bisnis inovatif	9.3.1 Jumlah Pusat Inovasi (PI) 9.3.2 Jumlah produk bisnis inovatif baru
	9.4 Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah	9.4.1 Jumlah pelayanan IPTEKIN di daerah 9.4.2 Tingkat pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan strategis daerah

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: **Meningkatkan Stabilitas Daerah**; tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 10: Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah, dengan sasaran:

- (1) Terwujudnya ketahanan pangan daerah antara lain ditandai dengan jumlah pasokan pangan dan distribusi pangan;
- (2) Terwujudnya ketahanan energi daerah antara lain ditandai dengan jumlah pasokan listrik.

Tujuan 11: Meningkatkan stabilitas sosial daerah, dengan sasaran:

- (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan adil antara lain ditandai dengan indeks kepuasan masyarakat, tingkat kecepatan pemberian ijin usaha dan kualitas pelayanan aparatur, persentase desa terlayani fasilitas teknologi, komunikasi dan informatika di wilayah Sumsel, persentase pelayanan informasi online berbasis ICT yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel;
- (2) Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik antara lain ditandai dengan status laporan keuangan daerah, jumlah SKPD dengan laporan keuangan dan kinerja baik, jumlah ringkasan dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik, dan persentase peningkatan nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (3) Berkembangnya perencanaan yang partisipatif dan berbasis kinerja antara lain ditandai dengan persentase penerapan sistem perencanaan berbasis informasi (*e-planning*);
- (4) Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai antara lain ditandai dengan jumlah kasus konflik kepengurusan partai politik, jumlah konflik pendirian rumah ibadah yang ditangani, jumlah forum pemuda antar umat beragama yang aktif; jumlah anggota FKUB yang aktif, dan jumlah kasus konflik antar umat beragama;
- (5) Meningkatnya solidaritas, ketahanan dan modal sosial budaya masyarakat antara lain ditandai dengan jumlah organisasi dan lembaga budaya masyarakat yang aktif, persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, jumlah anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang aktif, jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat, jumlah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif; jumlah organisasi masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah;
- (6) Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah antara lain ditandai dengan jumlah arsip yang tertata dan terdata dengan baik dan jumlah perangkat sarana layanan informasi arsip.

Tujuan 12: Meningkatkan stabilitas politik dan ketertiban daerah, dengan sasaran:

- (1) Terwujudnya tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifan lokal antara lain ditandai dengan persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik, jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik, jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik;
- (2) Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil antara lain ditandai dengan persentase penduduk yang ikut dalam pemilu dan pemilukada, jumlah kasus sengketa pemilu dan pemilukada, dan persentase penyelesaian kasus sengketa pemilu dan pemilukada;
- (3) Terwujudnya penegakan hukum secara adil, konsisten dan bertanggung jawab antara lain ditandai dengan jumlah kasus pelanggaran perda.

Tabel 5. 3

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kedua
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
10. Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah	10.1 Terwujudnya ketahanan pangan daerah	10.1.1 Jumlah pasokan pangan 10.1.2 Distribusi pangan
	10.2 Terwujudnya ketahanan energi daerah	10.2.2 Jumlah pasokan listrik
11. Meningkatkan stabilitas sosial daerah	11.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil	11.1.1 Tingkat kepuasan masyarakat 11.1.2 Tingkat kecepatan pemberian ijin usaha 11.1.3 Kualitas pelayanan aparatur
	11.2 Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik	11.2.1 Status laporan keuangan daerah 11.2.2 Jumlah SKPD dengan laporan keuangan dan kinerja dengan status baik 11.2.3 Jumlah ringkasan laporan keuangan dan perencanaan yang dapat diakses publik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		11.2.4 Persentase peningkatan nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
	11.3 Berkembangnya perencanaan yang partisipatif dan berbasis kinerja	11.3.1 Persentase penerapan sistem perencanaan berbasis informasi (<i>e-planning</i>)
	11.4 Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	11.4.1 Jumlah kasus konflik kepengurusan partai politik 11.4.2 Jumlah konflik pendirian rumah ibadah yang ditangani 11.4.3 Jumlah Forum Pemuda Antar Umat Beragama yang aktif 11.4.4 Jumlah Anggota FKUB yang aktif 11.4.5 Jumlah kasus konflik antar umat beragama
	11.5 Meningkatnya solidaritas, ketahanan dan modal sosial budaya masyarakat	11.5.1 Jumlah organisasi dan lembaga budaya masyarakat yang aktif 11.5.2 Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 11.5.3 Jumlah Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang Aktif 11.5.4 Jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat 11.5.5 Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif 11.5.6 Jumlah Organisasi Masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah
	11.6 Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	11.6.1 Jumlah arsip yang tertata dan terdata dengan baik 11.6.2 Jumlah perangkat sarana layanan informasi arsip

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		
12. Meningkatkan stabilitas politik dan ketertiban daerah	12.1 Terwujudnya tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifan lokal	12.1.1	Percentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik	
		12.1.2	Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik	
		12.1.3	Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	
	12.2 Terlaksananya pemilihan kepala daerah (Pilkada)pemilihan umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	12.2.1	Percentase penduduk yang ikut dalam pemilu dan pemilukada	
		12.2.2	Jumlah kasus sengketa pemilu dan pemulikada	
	12.3 Terwujudnya penegakan hukum secara adil, konsisten dan bertanggung jawab	12.3.2	Percentase penyelesaian kasus sengketa pemilu dan pemilukada	
	12.4 Terwujudnya aparat yang andal dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	12.4.1	Frekuensi pertemuan Forkompimda	
			Jumlah kasus pelanggaran Perda	

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: **Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan**; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 13: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat antara lain ditandai dengan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan angka harapan hidup;
- (2) Meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat antara lain ditandai dengan jumlah kasus gangguan jiwa, jumlah kunjungan penderita gangguan jiwa, dan jumlah kasus pasung;
- (3) Meningkatnya status gizi masyarakat antara lain ditandai dengan menurunnya prevalensi balita dengan berat badan rendah atau angka gizi buruk;

- (4) Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi antara lain ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan meningkatnya persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;
- (5) Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik antara lain ditandai dengan jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela), angka kesembuhan penderita TB Paru (BTA+), angka kesakitan penyakit DBD per 100.000 penduduk, *Annual Parasit Insidence* (API), jumlah kasus narkoba yang direhabilitasi, jumlah kunjungan penderita narkoba meningkat;
- (6) Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan antara lain ditandai dengan persentase rumah sehat dan persentase keluarga yang memiliki akses air bersih.

Tujuan 14: Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah antara lain ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murid (APM) SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, APM SMP, APK SMP, APM SMA/K, APK SMA/K, Angka Putus Sekolah (APtS) SD, SMP, SMA/K, Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan Inklusif; serta jumlah SMP, SMA satu atap;
- (2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah antara lain ditandai dengan meningkatnya angka kelulusan SD, angka kelulusan SMP, dan angka kelulusan SMA/K serta Angka melek huruf;
- (3) Meningkatnya keterampilan siswa SMA antara lain ditandai dengan jumlah SMA yang memiliki LAB bengkel dan keterampilan;
- (4) Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan perguruan tinggi antara lain ditandai dengan APK perguruan tinggi;
- (5) Meningkatnya minat baca masyarakat antara lain ditandai dengan jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan, jumlah diversifikasi layanan perpustakaan, jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka, dan jumlah perpustakaan yang dibina.

Tujuan 15: Mengembangkan Keluarga Berencana dan Sejahtera, dengan sasaran:

- (1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk antara lain ditandai dengan meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur, rasio kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi, *Total Fertility Rate* (TFR);
- (2) Terwujudnya keluarga sejahtera antara lain ditandai dengan berkembangnya persentase kelompok usaha perempuan.

Tujuan 16: Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, dengan sasaran:

- (1) Berkembangnya mutu dan layanan kegiatan kepemudaan antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah pemuda yang difasilitasi, jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi, jumlah sarana dan prasarana kepemudaan, jumlah anggota pramuka yang difasilitasi dalam kepanuan;
- (2) Berkembangnya kewirausahaan para pemuda antara lain ditandai dengan jumlah usaha-usaha baru yang dikelola oleh pemuda;
- (3) Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni dan budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain ditandai dengan jumlah pemuda yang mengikuti fasilitasi peningkatan pengetahuan terhadap bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDS.

Tujuan 17: Mengembangkan industri jasa olahraga, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Berkembangnya industri olahraga, jasa, peralatan dan partisipasi masyarakat antara lain ditandai dengan berkembangnya jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikat, jumlah sarana dan prasarana olahraga, jumlah produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi, jumlah masyarakat yang ikut permassalan olahraga, jumlah medali emas atlet PPLP, jumlah prestasi atlet dalam PON;

Tujuan 18: Meningkatkan perlindungan anak dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya peran kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak antara lain ditandai dengan jumlah SKPD yang mengimplementasikan PPRG;
- (2) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan antara lain ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), jumlah SKPD provinsi yang memiliki dan memanfaatkan data terpisah;

- (3) Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak antara lain ditandai dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani, jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani, jumlah pelanggaran hak-hak anak yang dilaporkan dan ditangani.

Tujuan 19: Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja antara lain ditandai dengan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri secara legal, angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK dan telah ditempatkan, dan jumlah sarana dan prasarana BLKI;
- (2) Berkurangnya pengangguran antara lain ditandai dengan jumlah penduduk yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka;
- (3) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat antara lain ditandai dengan meningkatnya rasio upah/gaji pekerja lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja.

Tujuan 20: Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Berkembangnya wilayah perdesaan di kawasan transmigrasi antara lain ditandai dengan jumlah KK Transmigrasi yang memperoleh bantuan untuk usaha produktif, jumlah sarana dan prasarana di lokasi KTM, serta jumlah transmigrasi lokal yang ditempatkan (KK);
- (2) Terwujudnya percepatan pembangunan daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal antara lain ditandai dengan persentase desa dengan akses air bersih, persentase desa dengan akses listrik, persentase desa yang terlayani transportasi, dan persentase desa yang terlayani jaringan komunikasi.

Tujuan 21: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Menurunnya angka kemiskinan antara lain ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosial, jumlah waduk dan embung dengan kondisi baik, panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik, persentase akses pelayanan air bersih, tingkat kapasitas pengolahan sampah, tingkat kapasitas pengolahan limbah, persentase jaringan sanitasi yang aman dan sehat.

Tujuan 22: Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat desa antara lain ditandai dengan jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif, dan persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa;
- (2) Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa antara lain ditandai dengan persentase masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan persentase desa yang melaksanakan Musrenbangdes;
- (3) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa antara lain ditandai dengan persentase aparatur pemerintah desa yang tertib administrasi, dan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (akte, KTP, Jamkesmas), serta persentase aparatur desa yang profesional.

Tujuan 23: Meningkatkan produktivitas nilai tambah dan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM), dengan sasaran sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya surplus usaha koperasi antara lain ditandai dengan meningkatnya nilai modal koperasi dan nilai usaha koperasi;
- (2) Meningkatnya pendapatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) antara lain ditandai dengan meningkatnya nilai modal UMKM, omzet UMKM, penyerapan tenaga kerja sektor UMKM.

Tabel 5. 4

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ketiga
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	
13. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	13.1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat	13.1.1 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	13.1.2 Angka harapan hidup
	13.2 Meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat	13.2.1 Jumlah kasus gangguan jiwa	13.2.2 Jumlah kunjungan penderita gangguan jiwa
		13.2.3 Jumlah kasus pasung	
	13.3 Meningkatnya status gizi masyarakat	13.3.1 Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	
	13.4 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi	13.4.1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	13.4.2 Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
	13.5 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	13.5.1 Jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela)	13.5.2 Angka kesembuhan Penderita TB Paru (BTA+)
14. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	14.1 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	13.5.3 Angka kesakitan Penyakit DBD per 100.000 Penduduk	13.5.4 <i>Annual Parasit Incidence (API)</i>
		13.5.5 Jumlah kasus narkoba yang direhabilitasi	13.5.6 Jumlah kunjungan penderita narkoba
		13.6.1 Persentase Rumah Sehat	13.6.2 Persentase Keluarga yang memiliki akses air bersih
	14.2 Meningkatnya kualitas dan relevansi kurikulum	14.1.1 APM SD	14.1.2 APK SD
		14.1.3 APM SMP	14.1.4 APK SMP
		14.1.5 APM SMA/K	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		14.1.6 APK SMA/K 14.1.7 APtS SD 14.1.8 APtS SMP 14.1.9 APtS SMA/K 14.1.10 Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif 14.1.11 Jumlah SMP/SMA satu atap
	14.2 Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	14.2.1 Angka kelulusan SD 14.2.2 Angka kelulusan SMP 14.2.3 Angka kelulusan SMA/K 14.2.4 Angka Melek Huruf
	14.3 Meningkatnya keterampilan siswa SMA	14.3.1 SMA yang memiliki LAB bengkel dan keterampilan
	14.4 Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan PT	14.4.1 APK Perguruan Tinggi
	14.5 Meningkatnya minat baca masyarakat	14.5.1 Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan 14.5.2 Jumlah diversifikasi layanan perpustakaan 14.5.3 Jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka 14.5.4 Jumlah perpustakaan yang dibina
15. Mengembangkan keluarga berencana dan sejahtera	15.1 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	15.1.1 Angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur 15.1.2 Rasio kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi 15.1.3 <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>
	15.2 Terwujudnya keluarga sejahtera	15.2.1 Persentase kelompok usaha perempuan
16. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	16.1 Berkembangnya mutu dan layanan kegiatan kepemudaan	16.1.1 Jumlah pemuda yang difasilitasi 16.1.2 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi 16.1.2 Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan 16.1.3 Jumlah Anggota pramuka yang difasilitasi dalam kepanduan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	
	16.2. Berkembangnya kewirausahaan para pemuda	16.2.1.	Jumlah usaha-usaha baru yang dikelola oleh pemuda
	16.3 Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni dan budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi	16.3.1	Jumlah pemuda yang mengikuti fasilitasi peningkatan pengetahuan terhadap bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDS
17. Mengembangkan industri jasa olahraga	17.1 Berkembangnya industri olahraga, jasa services, peralatan (goods) dan partisipasi masyarakat	17.1.1	Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikat
		17.1.2	Jumlah sarana dan prasarana olahraga
		17.1.3	Jumlah produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi
		17.1.4	Jumlah masyarakat yang ikut permassalan olahraga
		17.1.5	Jumlah medali emas atlet PPLP
		17.1.6	Jumlah prestasi atlet dalam PON
18. Meningkatkan perlindungan anak dan peran perempuan dalam pembangunan	18.1 Meningkatnya peran kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	18.1.1	Jumlah SKPD provinsi yang mengimplementasikan PPRG
	18.2 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	18.2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		18.2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		18.2.2	Jumlah SKPD provinsi yang memiliki dan memanfaatkan data terpilih
	18.3 Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak	18.3.1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani
		18.3.2	Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani
		18.3.3	Jumlah pelanggaran hak-hak anak yang dilaporkan dan ditangani

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	
19. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja	19.1 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja	19.1.1 Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	19.1.2 Jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri secara legal
		19.1.3 Angka pencari kerja yang dilatihdi BLK/LLK dan telah ditempatkan	19.1.4 Jumlah sarana dan prasarana BLKI
	19.2 Berkurangnya pengangguran	19.2.1 Jumlah penduduk yang bekerja	19.2.2 Tingkat partisipasi angkatan kerja
20. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota	19.3 Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat	19.3.1 Upah/Gaji pekerja lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja	19.3.2 Jumlah penyelesaian
	20.1 Berkembangnya wilayah perdesaan dan kawasan transmigrasi	20.1.1 Jumlah KK Transmigrasi yang memperoleh bantuan untuk usaha produktif	20.1.2 Jumlah sarana dan prasarana di lokasi KTM
	20.2 Terwujudnya percepatan pembangunan daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal	20.2.1 Persentase desa dengan akses air bersih	20.2.2 Persentase desa dengan akses listrik
		20.2.3 Persentase desa yang terlayani transportasi	20.2.4 Persentase desa yang terlayani jaringan komunikasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
21. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	21.1 Menurunnya angka kemiskinan	21.1.1 Jumlah penduduk miskin 21.1.2 Persentase penduduk miskin 21.1.3 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosial 21.1.4 Jumlah waduk dan embung dengan kondisi baik 21.1.5 Panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik 21.1.6 Persentase akses pelayanan air bersih 21.1.7 Tingkat kapasitas pengolahan sampah 21.1.8 Tingkat kapasitas pengolahan limbah 21.1.9 Persentase jaringan sanitasi yang aman dan sehat
22. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa	22.1 Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat desa	22.1.1 Jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif 22.1.2 Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa
	22.2 Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa	22.2.1 Persentase masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan 22.2.2 Persentase desa yang melaksanakan Musrenbangdes
	22.3 Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	22.3.1 Persentase aparatur pemerintah desa yang tertib administrasi dan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (akte, KTP, Jamkesmas) 22.3.2 Persentase aparatur desa yang profesional
23. Meningkatkan produktivitas nilai tambah dan	23.1 Meningkatnya surplus usaha koperasi	23.1.1 Nilai Modal koperasi 23.1.3 Nilai volume usaha koperasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
pendapatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	23.2 Meningkatnya pendapatan pelaku UMKMK	23.2.1 Nilai modal UMKMK 23.2.2 Omzet UMKMK 23.2.3 Penyerapan tenaga kerja sektor UMKMK

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Keempat

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: **Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana;** maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 24: Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dengan sasaran:

- (1) Tersedianya peraturan penataan ruang di daerah antara lain ditandai dengan jumlah peraturan daerah tentang penataan ruang;
- (2) Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang antara lain ditandai dengan menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang;
- (3) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program pemanfaatan ruang antara lain ditandai dengan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang;
- (4) Penyelesaian batas wilayah antara lain ditandai dengan panjang garis batas daerah yang disahkan dan persentase penyelesaian sengketa batas wilayah.

Tujuan 25: Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, dengan sasaran:

- (1) Terkelolanya kawasan hutan antara lain ditandai dengan jumlah identifikasi/rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas, jumlah kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan/KPH yang beroperasi dan luasan inventarisasi sumber daya hutan tingkat Provinsi.

Tujuan 26: Mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan hutan, dengan sasaran:

- (1) Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan pengelolaan DAS terpadu antara lain ditandai dengan jumlah lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehabilitasi HL/KSA/KPA dan HKm/HD);

- (2) Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan antara lain ditandai dengan jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Tujuan 27: Mengembangkan laju penurunan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran:

- (1) Berkurangnya laju penurunan kualitas lingkungan hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan antara lain ditandai dengan laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tujuan 28: Mengendalikan laju peningkatan emisi GRK, dengan sasaran:

- (1) Terkendalinya laju peningkatan emisi GRK di Provinsi Sumsel antara lain ditandai dengan jumlah penurunan laju emisi GRK di 6 sektor (ton CO₂eq)

Tujuan 29: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran:

- (1) Terselenggaranya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan LH antara lain ditandai dengan jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Terwujudnya ketataan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH antara lain ditandai dengan persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan Peraturan Daerah bidang LH yang diterbitkan;
- (3) Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan ditandai dengan Laboratorium LH yang terakreditasi.

Tujuan 30: Meningkatkan pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana dengan sasaran:

- (1) Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana antara lain ditandai dengan persentase sistem peringatan dini (*early warning system*);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat bencana antara lain ditandai dengan persentase kerugian akibat bencana;

- (3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana antara lain ditandai dengan jumlah masyarakat siaga bencana dan jumlah desa tangguh;
- (4) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana antara lain ditandai dengan jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana serta persentase penurunan titik kebakaran (*hotspot*).

Tabel 5.5

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Keempat
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
24. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	24.1 Tersedianya peraturan penataan ruang di daerah	27.1.1 Jumlah peraturan daerah tentang penataan ruang
	24.2 Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang	27.2.1 Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang
	24.3 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program pemanfaatan ruang	24.3.1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
	24.4 Penyelesaian Batas Wilayah	24.4.1 Panjang garis batas daerah yang disahkan 24.4.2 Persentase penyelesaian sengketa batas wilayah
25. Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan	25.1 Terkelolanya kawasan hutan	25.1.1 Jumlah identifikasi/rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat diindaklanjuti dengan tata batas 25.1.2 Jumlah kelembagaan kesatuan pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi 25.1.3 Luasan inventarisasi sumber daya hutan tingkat Provinsi
26. Mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan hutan	26.1 Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu	26.1.1 Jumlah lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehabilitasi HL/KSA/KPA & HKm/HD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	26.2 Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan	26.2.1 Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan
27. Mengendalikan laju penurunan kualitas lingkungan hidup	27.1 Berkurangnya laju penurunan Kualitas Lingkungan Hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan	27.1.1 Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
28. Mengendalikan laju peningkatan emisi GRK	28.1 Terkendalinya laju peningkatan emisi GRK di Prov. Sumsel	28.1.1 Jumlah penurunan laju emisi GRK di 6 sektor (ton CO ₂ eq)
29. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	29.1 Terselenggaranya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan LH 29.2 Terwujudnya ketaatan masyarakat & pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH 29.3 Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan	29.1.1 Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup 29.2.1 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 29.2.2 Peraturan Daerah bidang LH yang diterbitkan 29.3.1 Laboratorium LH yang terakreditasi
30. Meningkatkan pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana	30.1 Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana 30.2 Berkurangnya kerugian akibat bencana 30.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana 30.4 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	30.1.1 Persentase Sistem Peringatan Dini (<i>early warning system</i>) 30.2.1 Persentase kerugian akibat bencana 30.3.1 Jumlah masyarakat siaga bencana 30.3.2 Jumlah desa tangguh 30.4.1 Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana 30.4.2 Persentase penurunan titik kebakaran (<i>hotspot</i>)

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033, serta arahan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Arahan tersebut menuntun Provinsi Sumatera Selatan pada prioritas pembangunan daerah sekaligus strategi terhadap penjabaran misi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2013-2018.

6.1. Prioritas Pembangunan Daerah 2013-2018

Dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- (1) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- (2) Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
- (3) Penanggulangan Kemiskinan
- (4) Pembangunan Pertanian
- (5) Infrastruktur dan Energi
- (6) Investasi dan Pengembangan Usaha
- (7) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana
- (8) Pengembangan Wilayah.

6.1.1 Prioritas 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- (1) Mewujudkan pemerintahan Sumatera Selatan yang professional, semangat kewirausahaan, disiplin dan solid PEDE (*Professional-Entrepreneurship-Discipline-Entity*) dengan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik,

terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, taat kepada hukum dan transparan.

- (2) Mewujudkan ekonomi Sumatera Selatan yang kuat dengan optimalisasi penerimaan daerah, efisiensi belanja, peningkatan jejaring ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Mengembangkan penyediaan data dan informasi pembangunan yang baik berbasis kepada ICT (*Information, Communication and Telecommunication*).
- (4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pembinaan (preemptif), pencegahan (preventif) dan penindakan (korektif) yang didukung dengan pendekatan terpadu melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Bakorinda.

6.1.2 Proritas 2: Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya

- (1) Mengembangkan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi melalui sekolah dan berobat gratis.
- (2) Membangun sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Meningkatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit Pratama di setiap kabupaten dan Rumah Sakit Provinsi.
- (4) Meningkatkan kualitas guru, layanan dan pengelolaan sekolah.
- (5) Meningkatkan penyediaan pemenuhan tenaga medis.
- (6) Mengembangkan seni budaya masyarakat Sumatera Selatan.
- (7) Meningkatkan pariwisata melalui perbaikan akses sarana dan prasarana tujuan wisata.
- (8) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat.
- (9) Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga dengan pengembangan institut olah raga nasional.
- (10) Mengendalikan jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana (KB)

6.1.3 Prioritas 3: Penanggulangan Kemiskinan dengan memperkuat sistem perlindungan sosial berdasarkan siklus hidup manusia:

- (1) Masa kehamilan, anak usia dini melalui: persalinan gratis, pemberian nutrisi, makanan bergizi, imunisasi dan berobat gratis;

- (2) Anak usia sekolah: berobat gratis, sekolah gratis, rehabilitasi/ pendampingan terhadap anak yang bermasalah hukum, bantuan sosial anak terlantar;
- (3) Usia remaja: berobat dan sekolah gratis, beasiswa pendidikan tinggi, pelatihan wirausaha dan ketrampilan; serta pencegahan narkoba.
- (4) Usia pekerja dewasa: berobat gratis, jaminan ketenagakerjaan, penetapan upah minimum provinsi, penyediaan lapangan kerja layak, dan bantuan modal usaha, bantuan hukum gratis, sertifikasi lahan gratis dan bantuan hukum murah.
- (5) Lanjut usia: berobat gratis dan bantuan sosial untuk lansia.

6.1.4 Prioritas 4: Pembangunan Pertanian

- (1) Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian.
- (2) Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi, jalan dan logistik.
- (3) Memperluas dan meningkatkan akses untuk memperoleh pembiayaan pertanian dalam meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian dan jaminan petani dalam menghadapi resiko kegagalan panen karena adanya dampak perubahan iklim (bencana).
- (4) Meningkatkan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian dari pra-panen, pascapanen hingga distribusi hasil pertanian dengan dukungan tenaga penyuluh dan pendamping, serta jaringan kemitraan dengan usaha besar, BUMN, untuk mendapatkan nilai tambah berbasis agroindustri serta perluasan pasar nasional dan internasional.
- (5) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mekanisasi pembangunan pertanian sesuai dengan skala ekonomi, teknis dan lingkungan menurut kondisi daerah.
- (6) Mengembangkan integrasi sapi sawit

6.1.5 Prioritas 5: Infrastruktur dan Energi

- (1) Mendorong konsolidasi penanganan dan pemanfaatan lahan dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.
- (2) Membangun transportasi darat dan peningkatan jalan dan jembatan strategis, jalan tol sebagai bagian dari *Trans Sumatera Highway*, dan jalan-jalan akses pedesaan.
- (3) Mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api;

- (4) Mengembangkan jalur kereta api *Trans Sumatera Railway*, kereta api perkotaan dan jalur kereta api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api.
- (5) Mengembangkan dan meningkatkan transportasi udara.
- (6) Membangun transportasi khusus untuk keperluan pengangkutan komoditi baik jalan, kereta api ataupun pelabuhan/dermaga.
- (7) Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pertanian.
- (8) Mengembangkan sumber daya air dengan perluasan jaringan irigasi, transportasi air, serta sarana dan prasarana pengendalian banjir.
- (9) Meningkatkan kapasitas dan produksi energi listrik dari pemanfaatan berbagai sumber energi daerah untuk melayani kebutuhan dasar, komersial, dan pemasokan regional (luar daerah) secara berkelanjutan.
- (10) Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas dan arif demi kepentingan masyarakat luas
- (11) Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman, air bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan pengelolaan sampah.

6.1.6 Prioritas 6: Investasi dan Pengembangan Usaha

- (1) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan industri kecil dan menengah khususnya industri rumah tangga dan kegiatan produktif perempuan melalui bantuan permodalan, dana bergulir, subsidi bunga pinjaman, dan pemasaran.
- (2) Membangun kemitraan strategis antara koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) dengan usaha besar.
- (3) Meningkatkan hilirisasi produk pertanian dan pertambangan melalui pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing, penciptaan nilai tambah, serta penguatan kemitraan hulu-hilir dan industri kecil, menengah dan besar.
- (4) Mendorong pembentukan klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi melalui pengembangan Kawasan Perhatian Industri (KPI): Muara Enim, Banyuasin, Palembang dan Ogan Komering Ilir sebagai klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi.
- (5) Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri, perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional, dan internasional)

- (6) Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, Kawasan Industri Terpadu Pendopo, dan pelaksanaan proyek-proyek MP3EI.
- (7) Mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Jakabaring Sport City untuk menunjang industri olah raga.

6.1.7 Prioritas 7: Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana

- (1) Meningkatkan pengelolaan dan konservasi hutan, rawa, lahan gambut, lahan pertanian dan perkebunan di hulu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
- (2) Mengendalikan kerusakan lingkungan dan menurunkan pencemaran lingkungan melalui reboisasi dan konservasi hutan dan pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran.
- (3) Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan penjaminan berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini.
- (4) Meningkatkan pengelolaan DAS terpadu dan konservasi sempadan sungai, serta pembangunan danau dan embung di hulu untuk menjamin ketersediaan air.
- (5) Meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca di 6 (enam) sumber emisi: pertanian, hutan dan lahan gambut, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah.
- (6) Menerapkan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan.
- (7) Melakukan optimalisasi waduk, situ daerah hulu sungai untuk menampung aliran banjir di hulu.
- (8) Menerapkan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

6.1.8 Prioritas 8: Pengembangan Wilayah

- (1) Mendorong pengembangan 21 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) antara lain Perkotaan Palembang Metropolitan, Pesisir Pantai Timur Sumatera Selatan, Kawasan Terpadu Danau Ranau, Kawasan Agropolitan, pusat-pusat pertumbuhan baru dan pembangunan pedesaan.
- (2) Meningkatkan kerjasama dan keterkaitan antarwilayah terutama peningkatan infrastruktur baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

- (3) Percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyelesaian batas wilayah, kerjasama pembangunan di wilayah perbatasan, pemekaran wilayah dan penyelesaian batas wilayah.
- (4) Perwujudan *One Map Sumsel* melalui pengembangan Jaringan Data dan Informasi Spasial Provinsi Sumatera Selatan yang mudah diakses.

Dengan memperhatikan arahan RPJPD, RTRW, dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta prioritas pembangunan daerah tersebut, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang (2013-2018) mendatang mengutamakan keterpaduan dan keseimbangan antara pendekatan pembangunan sektor atau bidang dengan pendekatan pembangunan wilayah.

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan suatu rangkaian langkah terpadu dan komprehensif dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 secara efisien, efektif dan terarah dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya.

6.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu: **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi**; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang mengutamakan peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah dari usaha pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, pariwisata dan pertambangan yang berkelanjutan; serta didukung dengan pengembangan perusahaan daerah, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan kerjasama ekonomi antarwilayah, peningkatan mutu dan jangkauan infrastruktur wilayah; serta pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN).

Tabel 6. 1

Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengembangkan pertanian yang unggul dan berdaya saing	1.1 Meningkatnya produksi pertanian	Pengembangan komoditas pertanian unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian • Mengembangkan pusat pembibitan dan perbenihan • Menyediakan peralatan pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas dan meningkatkan akses untuk memperoleh pembiayaan pertanian dan jaminan bagi petani dan nelayan dalam menghadapi resiko kegagalan panen akibat perubahan iklim dan bencana • Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi • Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan
	1.2 Meningkatnya kemampuan SDM di sektor pertanian	Peningkatan kapasitas petani dan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan • Mengembangkan kelompok petani dan nelayan • Meningkatkan penyuluhan petani dan nelayan • Mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan latihan petani dan nelayan
	1.3 Meningkatnya jumlah rumah tangga jasa (UMKM) di sektor pertanian	Optimalisasi peran UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM • Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif
	1.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pertanian	Peningkatan perdagangan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas jaringan kemitraan kelompok petani, pengusaha besar dan BUMN dalam distribusi dan pemasaran hasil pertanian
	1.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertanian	Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi dari usaha petanian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem pencatatan dan pengumpulan pajak dan retribusi usaha pertanian • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi usaha pertanian
2. Mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian	2.1 Meningkatnya IKM berbasis pertanian	Pengembangan klaster industri pengolahan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pendukung • Mengembangkan teknologi produksi dan teknologi pengolahan
	2.2 Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan	Pengembangan industri padat tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar • Memberikan kemudahan perijinan investasi
	2.3 Meningkatnya produk IKM	Peningkatan mutu hasil IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan standar mutu IKM • Mengembangkan teknologi produksi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha IKM	Peningkatan perdagangan hasil IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas jaringan distribusi dan pemasaran IKM
	2.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha industri pengolahan	Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi dari industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem pencatatan dan pengumpulan pajak dan retribusi • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi
3. Mengembangkan pariwisata	3.1 Berkembangnya jasa pariwisata	Pengembangan destinasi wisata yang modern	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan prasarana dan sarana pariwisata
	3.2 Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pariwisata	Pengembangan sumber daya manusia pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan latihan pariwisata
		Peningkatan investasi di sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas kerjasama dan kemitraan pariwisata
	3.3 Meningkatnya nilai tambah objek wisata	Peningkatkan mutu layanan wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan standar mutu layanan pariwisata • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pariwisata
		Pengembangan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan industri kecil dan kerajinan rumah tangga
	3.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pariwisata	Pengembangan wisata daerah berbasis komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata • Mengembangkan wisata seni dan budaya • Mengembangkan wisata olah raga • Mengembangkan wisata kuliner • Mengembangkan wisata religius • Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata
	3.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pariwisata	Pengembangan sistem pengelolaan pajak dan retribusi dari pariwisata yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem informasi pencatatan dan pengumpulan pajak dan retribusi • Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi pariwisata
4. Mengembangkan pengelolaan pertambangan yang partisipatif dan berkelanjutan	4.1 Meningkatnya produksi pertambangan	Pengembangan sistem pertambangan yang modern	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pertambangan • Membangun dan memperbaiki infrastruktur pertambangan
	4.2 Meningkatnya nilai tambah sektor pertambangan	Optimalisasi upaya hilirisasi hasil pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan perijinan investasi • Meningkatkan standar mutu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>pengolahan hasil tambang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengolahan pertambangan terkini
5. Mengembangkan perusahaan daerah	4.3 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertambangan	Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi dari usaha pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem pencatatan dan pengumpulan pajak dan retribusi • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi
	5.1 Meningkatnya pendapatan daerah dari perusahaan daerah	Optimalisasi potensi perusahaan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan standar pelayanan perusahaan daerah • Meningkatkan kapasitas SDM perusahaan daerah • Mengoptimalkan prasarana dan sarana
6. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	5.2 Meningkatnya pendapatan perusahaan daerah	Peningkatan efisiensi perusahaan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan manajemen perusahaan daerah berbasis kinerja • Meningkatkan promosi dan pemasaran perusahaan daerah • Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan perusahaan daerah
	6.1 Berkembangnya kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-Api	Pengembangan prasarana dan sarana terpadu KEK Tanjung Api-Api	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kompetensi BUMD pengelola KEK Tanjung Api-Api • Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah, pemerintah dan swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana pendukung KEK Tanjung Api-Api
	6.2 Meningkatnya investasi	Penciptaan iklim investasi dan usaha yang sehat dan kondusif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu • Mengurangi hambatan investasi • Menyediakan prasarana dan sarana pendukung investasi
	6.3 Berkembangnya Klaster Industri Unggulan Daerah (KIUD)	Peningkatan daya saing klaster industri unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Kawasan Perhatian Industri (KPI) sebagai klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi di Muara Enim, Banyuasin, Palembang dan Ogan Komering Ilir • Mengembangkan kawasan industri terpadu Pendopo • Mengembangkan infrastruktur klaster industri unggulan daerah dalam KEK Tanjung Api-Api
	6.4 Meningkatkan perdagangan internasional	Peningkatan ekspor terhadap produk-produk unggulan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang industri unggulan daerah • Mengembangkan kemampuan absorpsi industri khususnya UKM • Meningkatkan difusi, inovasi, dan praktik baik/terbaik klaster industri
7. Mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antarwilayah	7.1 Meningkatnya mobilitas barang antarwilayah	Penataan sistem transportasi antarwilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kerjasama transportasi antarwilayah dengan Provinsi Jambi, Lampung, Riau dan Sumatera Barat
	7.2 Meningkatnya perdagangan antarwilayah	Penghapusan hambatan perdagangan antarwilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Menghapus peraturan yang menghambat perdagangan • Mengoptimalkan kerjasama perdagangan antarwilayah dengan Provinsi Jambi, Lampung, Riau dan Sumatera Barat
8. Meningkatkan jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah	8.1 Terbangunnya jalan dan jembatan	Pengelolaan jalan dan jembatan secara efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan strategis dan jalan tol sebagian bagian dari <i>Trans Sumatera Highway</i> • Mengoptimalkan kerjasama pengelolaan jalan dan jembatan dengan Provinsi Jambi, Lampung, Riau dan Sumatera Barat
	8.2 Terbangunnya prasarana, sarana dan jaringan transportasi yang terpadu dan merata	Pengelolaan sistem transportasi daerah yang modern, terpadu dan merata	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan transportasi massal terpadu antarmoda • Membangun dan memperluas jaringan transportasi kereta api Trans Sumatera Railway, kereta api perkotaan dan jalur kereta api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api • Membangun dan memperluas jaringan transportasi sungai • Membangun dan memperluas jaringan transportasi laut • Membangun dan memperluas jaringan transportasi udara • Membangun transportasi khusus untuk pengangkutan komoditi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	8.3 Meningkatnya mutu pengelolaan lalu lintas	Optimasi manajemen pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektifitas penggunaan kapasitas dan ruas jalan • Meningkatkan peranan moda transportasi
	8.4 Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman yang sehat dan layak huni	Pengembangan dan pengelolaan sistem permukiman dan perumahan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembangunan perumahan layak huni dan terjangkau • Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman
	8.5 Meningkatnya pelayanan daerah rawan sanitasi	Peningkatan pelayanan penanganan daerah rawan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota • Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sanitasi pemukiman • Mengoptimalkan kontribusi pihak ketiga dalam pembangunan sanitasi
9. Mengembangkan dan mendaya-gunakan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) secara bersistem	9.1 Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)	Pengembangan dan pengelolaan sistem dan manajemen inovasi daerah yang produktif dan modern	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerangka umum inovasi daerah yang kondusif bagi pengembangan dan penanaman modal • Meningkatkan prasarana dan saran inovasi • Meningkatkan kapasitas inovasi di lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi • Meningkatkan kapasitas badan dan lembaga litbang daerah
	9.2 Berkembangnya IPTEKIN	Pengembangan pusat-pusat kawasan belajar IPTEKIN	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang • Memperluas kerjasama dan kolaborasi di bidang IPTEKIN • Meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil penelitian pengembangan
	9.3 Berkembangnya bisnis inovatif	Pengembangan budaya dan usaha inovatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan budaya <i>technopreneurship</i> di kalangan pemuda • Mengoptimalkan kerjasama Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan inovasi di kalangan pemuda
	9.4 Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah	Pengembangan dan penerapan teknologi dan inovasi unggulan bagi peningkatan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan riset dan inovasi unggulan daerah • Mendayagunakan hasil riset & inovasi bagi peningkatan produktivitas daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan hasil riset dan inovasi bagi peningkatan mutu pelayanan publik daerah • Memperkuat keterkaitan dan interaksi litbang dan industri • Meningkatkan keterkaitan kapasitas lembaga IPTEK dan Industri

6.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua: **Meningkatkan stabilitas daerah**; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun adalah meningkatkan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) meningkatkan stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) meningkatkan stabilitas sosial dengan: (a) mencegah konflik sosial melalui pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif, dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; dan (3) meningkatkan stabilitas politik dengan: (a) memantapkan pertahanan dan keamanan melalui kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks; peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme, dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; (b) mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilukada, (c) memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dan (d) memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi: Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak (FKDPM) dan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Tabel 6. 2

Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
10. Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah	10.1 Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan produksi dan cadangan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan • Mengembangkan standar mutu dan keamanan produk pangan lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem penyimpanan atau lumbung pangan daerah Mengembangkan kesadaran penggunaan produk lokal
	Pengendalian harga pangan		<ul style="list-style-type: none"> Mengamankan jalur distribusi pangan Melaksanakan operasi pasar Mengoptimalkan penanganan daerah rawan pangan
	10.2 Terwujudnya ketahanan energi daerah	Peningkatan akses masyarakat terhadap energi	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sumber energi alternatif yang terbarukan Meningkatkan ketersediaan dan cadangan energi Mengembangkan sistem penyimpanan dan penyaluran energi daerah Mengamankan jalur distribusi energi Mengembangkan kesadaran hemat energi
11. Meningkatkan stabilitas sosial daerah	11.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil	Pelaksanaan reformasi birokrasi secara nyata dan konsisten	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pelayanan prima Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan disiplin pegawai Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
	11.2 Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik	Pengembangan sistem administrasi keuangan daerah yang maju berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> Menegakkan tertib pengelolaan keuangan SKPD Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah Mengoptimalkan pelaksanaan <i>e-procurement</i> Meningkatkan pengelolaan dan sertifikasi aset daerah Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
	11.3 Berkembangnya perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan berbasis kinerja	Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran daerah	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (<i>e-planning</i>) Mengembangkan sistem dan tata cara perencanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>pembangunan daerah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah • Mengoptimalkan forum dialog dan konsultasi publik
	Perwujudan <i>One Map Sumsel</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Pusat Jaringan Data dan Informasi Spasial Provinsi Sumatera Selatan yang mudah diakses
	11.4 Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	Penguatan toleransi dan solidaritas antarpemeluk agama	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman tentang toleransi kehidupan beragama • Mengembangkan forum dialog bersama antarpemeluk agama
	11.5 Meningkatnya solidaritas, ketahanan dan modal sosial budaya masyarakat	Pemberdayaan organisasi dan lembaga budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga sosial budaya masyarakat • Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung lembaga sosial budaya masyarakat
		Perluasan kerjasama antarkelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pusat-pusat budaya daerah • Mengoptimalkan forum dialog dan kerjasama budaya masyarakat
	11.6 Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan prasarana dan sarana penyimpan arsip daerah
12. Meningkatkan stabilitas politik dan ketertiban daerah	12.1 Terwujudnya tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifan lokal	<p>Pengembangan pendidikan politik berbasis HAM dan kearifan lokal</p> <p>Pengembangan proses politik dan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman nilai-nilai HAM dan kearifan lokal • Meningkatkan peran masyarakat sipil • Mengoptimalkan uji publik dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah • Mengoptimalkan uji publik dalam penyusunan dan penetapan anggaran daerah • Mengoptimalkan uji publik dalam penyusunan dan penetapan pengelolaan asset daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengembangan kerjasama dan kemitraan antarpelaku politik	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kerjasama, dialog dan kemitraan pemerintah, partai politik dan masyarakat sipil Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam lembaga legislatif daerah
	12.2 Terlaksananya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pemilihan umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilu legislatif dan pilpres yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penataan sistem informasi kependudukan dan Daftar Pemilih Menyediakan prasarana dan sarana pendukung pemilihan umum Menyiapkan lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu
	12.3 Terwujudnya penegakan hukum secara adil, konsisten dan bertanggung jawab	<p>Pencegahan tindakan pelanggaran hukum</p> <p>Pemberian sanksi dan advokasi hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman aparat tentang hukum Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum

6.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: **Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan**; maka strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Strategi di dalam meningkatkan pemerataan yang berkeadilan, yaitu: pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (*public-people-private partnerships*).

Tabel 6. 3

**Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
13. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	13.1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Perluasan jangkauan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan imnisasi dan berobat gratis • Meningkatkan fasilitas kesehatan Puskemas dan RSUD • Menyediakan perlengkapan Puskemas dan RSUD • Membangun RS Pratama di kabupaten/kota • Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat • Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di Puskemas dan RSUD
	13.2 Meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan Pos Pelayanan Terpadu • Menyediakan pemberian nutrisi dan makanan bergizi, • Meningkatkan pengawasan bahan pangan
	13.3 Meningkatnya status gizi masyarakat	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan Pos Pelayanan Terpadu • Menyediakan pemberian nutrisi dan makanan bergizi, • Meningkatkan pengawasan bahan pangan
	13.4 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi	Peningkatan jumlah dan mutu layanan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan persalinan gratis • Mengembangkan desa siaga
		Peningkatan pengetahuan & pemahaman kesehatan reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pusat-pusat Pelayanan Keluarga Berencana
	13.5 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	Pengembangan pola hidup sehat dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengetahuan masy. tentang pola hidup sehat dan bersih • Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba
	13.6 Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Pengembangan permukiman yang sehat, bersih dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rehabilitasi permukiman kumuh • Mengembangkan sanitasi aman terpadu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
14. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	14.1 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pendidikan (sekolah) gratis • Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) • Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah • Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan kejuruan • Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan luar biasa • Meningkatkan jumlah dan pemerataan tenaga pengajar
	Pengembangan pendidikan non-formal		<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pendidikan Paket Kejar dan pendidikan keterampilan
	14.2 Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Pengembangan pendidikan berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah • Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar • Mengembangkan manajemen pendidikan yang maju • Meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar
	14.3 Meningkatnya keterampilan siswa SMA	Pengembangan model pembelajaran keterampilan praktik dan teknologi terapan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan laboratorium dan peralatan praktik • Meningkatkan pelatihan keterampilan dan teknologi terapan
	14.4 Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan perguruan tinggi	Perluasan akses bagi lulusan SMA untuk meneruskan ke pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA yang meneruskan kuliah • Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi • Meningkatkan kerjasama dengan swasta
	14.5 Meningkatnya minat baca masyarakat	Pengembangan budaya membaca	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan perpustakaan daerah • Mengembangkan perpustakaan keliling
	14.6 Tertatanya dokumen dan arsip daerah	Penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan prasarana dan sarana penyimpanan arsip daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
15. Mengembangkan keluarga berencana dan sejahtera	15.1 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Revitalisasi Gerakan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan memperluas pelayanan keluarga berencana
	15.2 Terwujudnya keluarga sejahtera	Peningkatan partisipasi perempuan dalam usaha sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan usaha bersama kelompok perempuan
16. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	16.1 Berkembangnya mutu dan layanan kegiatan kepemudaan	Pengembangan organisasi dan lembaga kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga kepemudaan Mengembangkan forum dialog dan kerjasama pemuda Meningkatkan pertukaran pemuda Revitalisasi Gerakan Pramuka
	16.2 Berkembangnya kewirausahaan para pemuda	Pengembangan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan prasarana dan sarana pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha Memperluas kerjasama dan magang dengan pelaku usaha swasta
	16.3 Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni dan budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pengembangkan pusat-pusat seni dan budaya, dan pusat-pusat ilmu pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan prasarana dan sarana seni dan budaya Mengembangkan festival seni dan budaya Meningkatkan prasarana dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
17. Mengembangkan industri jasa olahraga	17.1 Berkembangnya industri olahraga, jasa, peralatan dan partisipasi masyarakat	Perluasan dan pengembangan jasa peralatan dan partisipasi masyarakat dalam olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan prasarana dan sarana olah raga Meningkatkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan internasional Meningkatkan promosi dan memperluas kerjasama pengembangan olahraga Meningkatkan kapasitas pelaku usaha jasa olahraga Meningkatkan peluang bisnis jasa olahraga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
17. Meningkatkan perlindungan anak dan peran perempuan dalam pembangunan	18.1 Meningkatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pengembangan organisasi dan lembaga perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga perempuan • Mengembangkan forum dialog dan kerjasama organisasi dan lembaga perempuan
	18.2 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data dan informasi data terpisah • Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah daerah tentang hak-hak dasar perempuan • Meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan dan program pembangunan
	18.3 Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak	Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan Mengembangkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak perempuan • Peningkatan pemahaman tentang hak-hak dasar anak • Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak
19. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja	19.1 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja	Revitalisasi Balai Laihan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan prasarana dan sarana Balai Latihan Kerja • Meningkatkan kapasitas tenaga pelatih • Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penempatan tenaga terlatih
	19.2 Berkurangnya pengangguran	Perluasan akses bagi pencari kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem layanan online pembuatan kartu pencari kerja • Mengembangkan pusat-pusat informasi kesempatan kerja • Memperluas kerjasama dengan pelaku usaha dalam penempatan dan pengisian lowongan kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	19.3 Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat	Mengoptimalkan kerjasama tiga pihak (tripartit) pemerintah daerah, serikat pekerja, dan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan upah minimum regional sesuai kebutuhan layak hidup • Penguatan jaringan dan komunikasi ketenagakerjaan
20. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota	20.1 Berkembangnya wilayah perdesaan dan kawasan transmigrasi	Pengembangan Kota Terpadu Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan prasarana dan sarana kota terpadu mandiri • Mengembangkan dan memperluas kegiatan ekonomi kota terpadu mandiri
	20.2 Terwujudnya percepatan pembangunan daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal	Pengembangan prasarana dasar di daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi perdesaan • Meningkatkan penyediaan listrik perdesaan • Memperluas layanan komunikasi dan transportasi perdesaan • Mengembangkan pasar desa • Mengembangkan industri kerajinan dan rumah tangga • Mengembangkan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan masyarakat perdesaan
21. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	21.1 Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatkan daya beli masyarakat petani, pekebun, peternak dan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan akses permodalan, bibit/benih, peralatan, dan informasi • Pengembangan promosi dan pemasaran
		Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi perlindungan dan jaminan sosial • Pengendalian dan pengawasan perlindungan dan jaminan sosial
22. Meningkatkan kapasitas masyarakat	22.1 Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat desa	Pengembangan kelompok, organisasi dan lembaga masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus kelompok, organisasi dan lembaga masyarakat desa
	22.2 Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa	Revitalisasi Musyawawah Perencanaan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas perencanaan • Memperkuat sistem perencanaan partisipatif
	22.3 Meningkatnya tertib administrasi pemdes	Peningkatan mutu pelayanan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
23. Meningkatkan nilai tambah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	23.1 Meningkatnya surplus usaha koperasi	Revitalisasi koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan desa Peningkatan kapasitas pengurus koperasi Perluasan kerjasama koperasi dan pelaku usaha
	23.2 Meningkatnya pendapatan pelaku UMKM	Meningkatkan kapasitas pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses permodalan, bibit/benih, peralatan, dan informasi Pengembangan promosi dan pemasaran Pengembangan kerjasama UMKM dan pengusaha

6.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: **Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana**; serta memperhatikan tujuan ketujuh dari Tujuan Pembangunan Milenium, dan prioritas kesembilan dari Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2010-2014; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang mengutamakan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga diarahkan antara lain untuk meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang, mewujudkan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan hutan, mengendalikan laju penurunan kualitas lingkungan hidup, mengendalikan laju peningkatan emisi GRK, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatkan pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana.

Tabel 6. 4

Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
24. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	24.1 Tersedianya peraturan penataan ruang di daerah	Mempercepat penyusunan dan pengesahan rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan peran BKPRD Mengembangkan sistem informasi berbasis spasial (<i>one Map Policy</i>)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas aparat dalam penataan ruang • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang • Mencegah penyalahgunaan tata ruang • Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggar RTRW
	24.2 Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan penataan ruang • Meningkatkan kualitas data spasial dan a-spasial
	24.3 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program pemanfaatan ruang	Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan RTRW	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi antar sektor
	24.4 Penyelesaian Batas Wilayah	Penetapan batas administrasi daerah secara jelas dan tegas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan data dan sistem informasi spasial dalam penetapan batas administrasi wilayah • Mendorong dialog dan komunikasi terbuka • penyelesaian batas administrasi
25. Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan	25.1 Terkelolanya kawasan hutan	Pengembangan kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerjasama dan kemitraan pengelolaan hutan • Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dan pengelolaan hutan
26. Mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan hutan	26.1 Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu	Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan gambut	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penanganan kerusakan hutan • Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan hutan • Optimalisasi KPH
	26.2 Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya	Pengembangan budaya konservasi hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran pemeliharaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan	dan lahan gambut	<p>hutan dan lahan gambut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pilot kegiatan pengelolaan hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan • Meningkatkan kemampuan Aparat dalam Monitoring, Reporting and Verification (MRV)
27. Mengendalikan laju penurunan kualitas lingkungan hidup	27.1 Berkurangnya laju penurunan Kualitas Lingkungan Hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi perencanaan lingkungan hidup • Penyediaan sistem informasi lingkungan hidup • Meningkatkan koordinasi antar sektor
28. Mengendalikan laju peningkatan emisi GRK	28.1 Terwujudnya pembangunan rendah karbon	Pengarustamaan pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman aparat tentang pembangunan rendah karbon dan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim • Menerapkan kajian lingkungan hidup strategis dalam seluruh kebijakan • Menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam seluruh kebijakan
29. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	29.1 Terselenggaranya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan LH	Pengembangan kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerjasama dan kemitraan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan • Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan
	29.2 Terwujudnya ketataan masyarakat & pelaku usaha kegiatan dalam	Penegakan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pencegahan pembalakan liar, penambangan liar dan perusakan lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pengelolaan LH hidup		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemberian sanksi hukum bagi pelaku pembalakan liar, penambangan liar dan perusak lingkungan hidup
	29.3 Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan	Terakreditasinya laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana Peningkatan kompetensi SDM Peningkatan pelayanan dan mutu laoboratorium
30. Meningkatkan pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana	30.1 Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas penanganan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem data dan informasi daerah rawan bencana Meningkatkan kapasitas kelembagaan Mengembangkan sistem peringatan dini
	30.2 Berkurangnya kerugian akibat bencana	Peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penanganan daerah bencana
	30.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	Pengembangan budaya sadar bencana	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesadaran pencegahan dan penanggulangan bencana Mengembangkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Memberikan penghargaan kepada masyarakat pelopor dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
	30.4 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	Pengembangan kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kerjasama dan kemitraan pencegahan dan penanggulangan bencana Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pencegahan dan penanggulangan bencana

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah dan rancangan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam lima tahun mendatang (2013-2018) diarahkan pada: (1) pengembangan sistem perkotaan provinsi yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu keluar-masuk (*multi-gate*) dalam menciptakan keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya; (2) pengembangan sistem infrastruktur wilayah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional; (3) pengembangan tata ruang yang akomodatif dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam membutuhkan pertimbangan aspek lingkungan, khususnya perwilayahannya DAS dan sub DAS. Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya air bagi pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah sungai strategis nasional seperti WS Musi, Sugihan, dan Banyuasin; (4) penguatan kedudukan dan peranan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai “salah satu titik sentuh” dan “pintu gerbang” Kawasan Barat Indonesia ke wilayah Internasional (Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan lain-lain), serta ke wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang dapat memberi peluang pasar ekspor bagi Provinsi Sumatera Selatan; serta (5) pembentukan sistem kota-kota secara hirarkis dengan memperhatikan keseimbangan antarsub wilayah.

Selain itu, sesuai dengan rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai berikut.

Tabel 6. 5
Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Prioritas
Penataan Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Selatan

Pusat Kegiatan	Lokasi Kabupaten/Kota	Prioritas
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1. Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, khususnya Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung)

Pusat Kegiatan	Lokasi Kabupaten/Kota	Prioritas
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Sungsang (Tanjung Api-Api) 2. Kayuagung 3. Prabumulih 4. Baturaja 5. Muara Enim 6. Lahat 7. Lubuk Linggau 8. Sekayu	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)	1. Indralaya 2. Pagar Alam 3. Martapura 4. Tanjung Api-api	
4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Pangkalan Balai 2. Muara Beliti 3. Tebing Tinggi 4. Muara Dua 5. Gumawang 6. Tugumulyo 7. Talang Ubi 8. Peninjauan 9. Muara Rupit 10. Sungai Lilin 11. Bayung Lencir 12. Tanjung Raja 13. Muara Lakitan 14. Pengadongan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan
5. Kawasan Strategis Nasional (KSN)	1. Taman Nasional Kerinci Seblat	

Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan arahan tentang pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 6
Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
1	Kawasan Perkotaan Metropolitan Palembang	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek: 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan metropolitan • Pengembangan pembangunan vertikal • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas pembangunan antarwilayah
2	Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sektor unggulan perdagangan, jasa, industri yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan perkotaan • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional • Perlu sinergitas infrastruktur • Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga
3	Kawasan Muara Enim dan sekitarnya	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sektor unggulan pertanian, pertambangan, dan perkebunan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 3) Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; 4) Mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu sinergitas pembangunan antar sektor. • Perlu sinergitas infrastruktur. • Pengembangan Kawasan Agribisnis.
4	Kawasan Perkotaan Pagar Alam	<p>Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah provinsi. Kawasan ini memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Situs bersejarah dunia; 2) Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 3) Tempat perlindungan peninggalan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan perkotaan. • Perlu sinergitas infrastruktur. • Menyelaraskan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. • Pengembangan kawasan wisata budaya dan alam. • Pelestarian cagar budaya.

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
5	Kawasan Tanjung Api Api	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek : 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang pelabuhan dan kawasan industri • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan hutan • Mengembangkan pelabuhan internasional • Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya • Kerjasama dengan pihak swasta
6	Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek : 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas pembangunan antar daerah • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian
7	Kawasan Koridor Lahat - Muara Enim	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek : 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas pembangunan antar daerah • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan • Perlu pelestarian cagar budaya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata.
8	Kawasan Koridor Baturaja-Martapura	Pusat berbagai kegiatan ekonomi yang medukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas pembangunan antar daerah • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan
9	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan kegiatan ekonomi yang dikembangkan bagi dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan 2) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu sinergitas pembangunan antar daerah • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan • Mengembangkan kawasan wisata terpadu dan agroindustri • Mengoptimalkan pemanfaatan Danau Ranau untuk kegiatan pariwisata & kegiatan khusus sesuai daya dukungnya.

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
10	Kawasan Agropolitan Musi Rawas	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, dan perikanan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 3) Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan daerah lumbung padi nasional • Mempertahankan luasan lahan sawah/perkebunan • Meningkatkan produktivitas lahan sawah/perkebunan • Meningkatkan pendapatan petani dengan program multiaktivitas agribisnis dan perbaikan irigasi • Memperkecil resiko banjir dan kekeringan • Mengembangkan kawasan agribisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan
11	Kawasan Agropolitan OKI	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sektor unggulan pertanian yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 3) Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan daerah lumbung padi nasional • Mempertahankan luasan lahan sawah/perkebunan • Meningkatkan produktivitas lahan sawah/perkebunan • Meningkatkan pendapatan petani dengan program multiaktivitas agribisnis dan perbaikan irigasi • Memperkecil resiko banjir dan kekeringan • Mengembangkan kawasan agribisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan
12	Kawasan Pesisir OKI	<p>Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan • Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan mangrove • Pengembangan/ peningkatan kegiatan ekonomi pesisir • Peningkatan kualitas pemukiman nelayan • Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
		2) Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.	
13	Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai Rantau Dadap (Semendo Darat Laut, Darat Tengah, Darat Ulu Kabupaten Muara Enim) dan Ulu Danau (Kec Sindang Danau, OKU Selatan)	Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi yang: 1) Memiliki sumber daya alam geotermal strategis; 2) Memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. • Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar.
14	Kawasan Tulung Salapan - Cengal Kabupaten OKI	Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan infrastruktur • Pengembangan ekonomi kawasan
15	Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan Kayuagung)	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek: 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) Sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, perikanan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 4) Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau 5) Mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; 6) Sebagai kawasan andalan nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas pembangunan antar daerah • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan • Pengembangan kawasan agribisnis;

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
16	Kawasan Obyek Militer Baturaja (OMIBA)	Kawasan yang memiliki fungsi pertahanan keamanan sebagai kawasan latihan militer.	Pengembangan/peningkatan kualitas kawasan.
17	Kawasan Agropolitan OKU Timur	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek : <ol style="list-style-type: none"> 1) Sektor unggulan pertanian yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 3) Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan daerah lumbung padi nasional • Mempertahankan luasan lahan sawah/perkebunan • Meningkatkan pendapatan petani dengan program multiaktivitas agribisnis dan perbaikan irigasi • Memperkecil resiko banjir dan kekeringan • Mengembangkan kawasan agribisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan
18	Kawasan Koridor Lubuk Linggau - Muara Beliti	Pusat berbagai kegiatan ekonomi yang medukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas pembangunan antar daerah • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan
19	Kawasan Taman Nasional Sembilang	Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang : <ol style="list-style-type: none"> 1) Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 2) Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan • Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan mangrove • Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan
20	Kawasan Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang (Perlindungan Buaya Senyulong)	Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang :	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan • Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan mangrove • Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
		1) Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 2) Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian.	
21	Kawasan Minapolitan a. Ogan Ilir b. Ogan Komering Ilir c. Ogan Komering Ulu d. OKU Timur e. Banyuasin f. OKU Selatan g. Musi Banyuasin h. Musi Rawas i. Kota Palembang	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek : <ol style="list-style-type: none"> 1) Sektor unggulan perikanan dan industri yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 3) Mempertahankan tingkat produksi pangan dari sektor perikanan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan luasan lahan budidaya perikanan • Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya • Meningkatkan pendapatan nelayan/pembudidaya dengan program multiaktivitas minabisnis • Mengembangkan kawasan minabisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan

Dengan memperhatikan potensi wilayah, rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2031, maka berikut ini strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

6.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Struktur ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu bertumpu pada sektor pertanian (26,99 persen), pertambangan dan penggalian (19,49persen), jasa-jasa, (14,18 persen), serta perdagangan, hotel dan restoran (13,40 persen) sebagai penyumbang nilai tambah tinggi. Sementara sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (59,79 persen),

perdagangan hotel dan restoran (31,66 persen), pertambangan dan penggalian (8,55 persen) Sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa termasuk angkutan dan komunikasi (13,51 persen); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (8,57 persen); jasa-jasa (7,93 persen); serta perdagangan, hotel dan restoran (7,54 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu diarahkan pada revitalisasi pertanian, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan jasa pariwisata serta pengolahan pertambangan dan penggalian secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, serta sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.7.

6.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir ditopang oleh sektor pertanian (47,53 persen); perdagangan, hotel dan restoran (14,24 persen), industri pengolahan (7,88 persen) sebagai penyumbang nilai tambah tinggi. Sementara sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (75,53 persen), industri pengolahan (6,90 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor bangunan (8,44 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan pada pengembangan kawasan pesisir, pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis padi sawah dan peningkatan kualitas produk pertanian.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.8.

6.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim

Sumber utama penciptaan share terhadap PDRB perekonomian Kabupaten Muara Enim adalah sektor pertambangan dan penggalian (57,36 persen), pertanian (16,61 persen), industri pengolahan (6,96 persen), serta perdagangan, hotel dan restoran (4,08 persen). Sementara sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (65,32 persen); perdagangan, hotel dan restoran (11,06 persen); jasa-jasa (10,60 persen), pertambangan dan penggalian (3,43 persen); dan industri pengolahan (2,28 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa-jasa termasuk angkutan dan komunikasi (9,96 persen); jasa-jasa (9,74 persen);

bangunan (9,48 persen); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (8,88 perusahaan); serta perdagangan, hotel dan restoran (8,44 persen) serta industry pengolahan (6,16 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Muara Enim diarahkan pada revitalisasi pertanian (peningkatan mutu dan produktivitas), pengelolaan pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan, pengembangan teknologi industri pengolah hasil pertanian, peningkatan penyedian fasilitas dan regulasi iklim usaha.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.9.

6.3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lahat

Struktur ekonomi Kabupaten Lahat didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan dan penggalian (34,11 persen), pertanian (27,54 persen), jasa-jasa (11,34 persen, serta perdagangan, hotel dan restoran (8,18 persen) dan bangunan (7,07 persen) sebagai penyumbang nilai tambah tinggi. Sementara sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (67,75 persen); perdagangan, hotel dan restoran (12,71 persen), jasa-jasa (9,97 persen), bangunan (3,56 persen), angkutan dan komunikasi (2,35 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa termasuk angkutan dan komunikasi (12,09 persen); jasa-jasa (8,33 peren); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (7,27 persen); bangunan (6,47 persen); serta perdagangan, hotel dan restoran (6,19 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Lahat diarahkan pada revitalisasi pertanian, serta pengelolaan pertambangan dan penggalian secara berkelanjutan pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, peningkatan jasa angkutan, hotel dan keuangan.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lahat dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.10.

6.3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas

Sektor utama yang menyumbang penciptaan share terhadap PDRB bagi perekonomian Kabupaten Musi Rawas adalah sektor pertanian (40,00 persen), pertambangan dan penggalian (30,63 persen), industri pengolahan

(9,26 persen), jasa-jasa (7,47 persen) serta perdagangan, hotel dan restoran (5,22 persen) sebagai penyumbang nilai tambah tinggi. Sementara sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (87,87 persen); perdagangan, hotel dan restoran (6,88 persen), jasa-jasa (3,24 persen); dan industri pengolahan (2,01 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor angkutan dan komunikasi (12,66 persen), bangunan (8,97 persen), listrik, gas dan air (7,45 persen), sektor pertanian (7,41 persen), serta keuangan, asuransi,dan jasaperusahaan (7,40 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada peningkatan kualitas produk pertanian dan perkebunan, pengembangan industry pengolahan, serta pengembangan agrowisata.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.11.

6.3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Struktur ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian (53,94 persen), pertanian (14,26 persen); serta industri pengolahan (7,14 persen) sebagai penyumbang share terhadap PDRB tinggi. Sementara sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (79,17 persen), jasa-jasa (12,14 persen) dan industry pengolahan (7,14 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (12,52 persen), jasa-jasa (10,45 persen), perdagangan, hotel dan restoran (9,82 persen) serta pengangkutan dan komunikasi (9,41 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan pada pengendalian pertambangan dan penggalian, pengembangan industri pengolahan, peningkatan sarana jasa perdagangan,hotel dan restoran serta angkutan.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, dan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.12

6.3.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyuasin

Sektor utama yang menciptakan share terhadap PDRB bagi perekonomian Kabupaten Banyuasin adalah sektor pertanian (30,54 persen);

industri pengolahan (24,13 persen); serta perdagangan, hotel and restoran (13,67 persen) sebagai penyumbang share terhadap PDRB. Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (64,39 persen), perdagangan, hotel dan restoran (14,74 persen) serta jasa kemasayarakatan (7,93 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor bangunan (11,18 persen); pengangkutan dan komunikasi (10,62 persen), serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (8,30 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Banyuasin diarahkan pada revitalisasi pertanian melalui pemanfaatan lahan pasang surut, penataan sistem manajemen sumberdaya laut, hilirasi produk pertanian, pengembangan kawasan dan peningkatan jasa pariwisata

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Banyuasin dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.13.

6.3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Struktur ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengandalkan sektor pertanian (46,68 persen), perdagangan, hotel dan restoran (16,77 persen), jasa-jasa (14,51 persen), bangunan (8,26 persen) dan industri pengolahan (6,09 persen) sebagai penyumbang share terhadap PDRB tinggi. Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (64,98 persen), industri pengolahan (24,99 persen) dan jasa (10,03 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa-jasa termasuk angkutan dan komunikasi (11,24 persen); jasa-jasa (9,66 persen); perdagangan, hotel dan restoran (7,60 persen); bangunan (6,45 persen); serta keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (5,05 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian, pengembangan industri pengolah produk pertanian, dan peningkatan daya saing jasa pariwisata.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, dan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.14

6.3.9 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didominasi oleh sektor pertanian (35,27 persen); perdagangan, hotel and restoran (18,09

persen); jasa-jasa (17,26 persen); bangunan (12,09 persen), dan industri pengolahan (9,26 persen) sebagai penyumbang share terhadap PDRB tinggi. Sementara sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian, bangunan dan industri pengolahan. Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa termasuk angkutan dan komunikasi (11,13 persen); listrik, gas dan air bersih (10,06 persen); perdagangan, hotel dan restoran (8,00 persen); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (7,85 persen); dan jasa-jasa (7,46 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan pada revitalisasi pertanian, pengembangan industri pengolah produk pertanian, dan peningkatan daya saing jasa pariwisata.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, dan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.15.

6.3.10 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir

Perekonomian Kabupaten Ogan Ilir ditopang oleh sektor pertanian (28,36 persen); industri pengolahan (9,39 persen) dan pertambangan dan penggalian (4,1 persen) sebagai penyumbang share PDRB tinggi. Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (58,57 persen), pertambangan (41,43 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan pada revitalisasi pertanian, pengembangan industri pengolah hasil pertanian, peningkatan produksi perikanan budidaya serta optimalisasi jasa dan pariwisata.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, dan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Ilir dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.16.

6.3.11 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Empat Lawang

Perekonomian Kabupaten Empat Lawang ditopang oleh sektor pertanian (43,65 persen); jasa-jasa (14,23 persen); perdagangan, hotel dan restoran (13,03 persen); bangunan (9,65 persen); dan industri pengolahan (9,45 persen) sebagai penyumbang share terhadap PDRB tinggi. Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (73,37 persen), industri pengolahan (22,82 persen) dan jasa (3,80 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa-jasa termasuk keuangan, asuransi

dan jasa perusahaan (9,85 persen); bangunan (9,77 persen); perdagangan, hotel dan restoran (6,76 persen) dan jasa-jasa (6,50 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Empat Lawang diarahkan pada revitalisasi pertanian, pengembangan industri pengolah hasil pertanian, serta optimalisasi pelayanan jas keuangan, angkutan dan komunikasi.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, dan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Empat Lawang dalam lima tahun mendatang (2014-2018) adalah sebagai berikut.

6.3.12 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Palembang

Perekonomian Kota Palembang bertumpu pada sektor industri pengolahan (47,37 persen); perdagangan, hotel dan restoran (16,41 persen); jasa-jasa (12,23 persen); angkutan dan komunikasi (10,34 persen); dan bangunan (6,50 persen) sebagai penyumbang share terhadap PDRB. Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah perdagangan, hotel dan restoran (53,54 persen); bangunan (16,04 persen); jasa-jasa (12,03 persen), industri pengolahan (7,82 persen); dan pertanian (7,23 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa termasuk angkutan dan komunikasi (12,62 persen); perdagangan, hotel dan restoran (10,33 persen), bangunan (10,11 persen); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (9,38 persen); serta jasa-jasa (7,45 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kota Palembang diarahkan pada pengembangan hortikultura dan peternakan, pengembangan industri pengolahan berbasis produk makanan, peningkatan daya saing pariwisata.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, serta sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Palembang dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.18.

6.3.13 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Pagaralam

Perekonomian Kota Pagar Alam didukung oleh sektor pertanian (25,87 persen); perdagangan, hotel dan restoran (24,52 persen); bangunan (15,98 persen); jasa-jasa (14,90 persen); serta angkutan dan komunikasi (9,76 persen) sebagai penyumbang share terhadap PDRB. Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (53,16 persen); perdagangan, hotel dan restoran (17,19 persen); jasa-jasa (15,55 persen); angkutan dan komunikasi 5,59 persen); dan bangunan (4,92 persen). Sedangkan sektor

yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa termasuk angkutan dan komunikasi (9,41 persen); bangunan (8,98 persen); jasa-jasa (7,12 persen); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (7,04 persen); serta listrik, gas dan air minum (4,88 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kota Pagar Alam diarahkan pada peningkatan kualitas dan produksi tanaman tanaman pangan holtikultura (sayuran), peningkatan jasa angkutan dan komunikasi; dan peningkatan fasilitas pendukung objek pariwisata.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, dan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Pagar Alam dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.19.

6.3.14 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau

Perekonomian Kota Lubuk Linggau ditopang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (26,49 persen); bangunan (20,20 persen); jasa-jasa (16,20 persen); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (11,79 persen) dan industri pengolahan (8,82 persen) sebagai penyumbang share terhadap PDRB. Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (28,21 persen), jasa-jasa (25,85 persen); perdagangan, hotel dan restoran (23,50 persen); angkutan dan komunikasi (7,95 persen) dan bangunan (7,58 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa termasuk angkutan dan komunikasi (8,44 persen); jasa-jasa (7,29 persen); dan bangunan (7,25 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kota Lubuk Linggau diarahkan pada pengembangan agrobisnis dan agrowisata, peningkatan nilai tambah produk unggulan dan pengembangan pariwisata.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Lubuk Linggau dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.20.

6.3.15 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Prabumulih

Perekonomian Kota Prabumulih mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian (27,55 persen); perdagangan, hotel dan restoran (24,22 persen); bangunan (11,17 persen); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (9,47 persen); dan jasa-jasa (9,02 persen) sebagai penyumbang share PDRB tinggi. Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (26,62 persen); perdagangan, hotel dan restoran (23,34 persen); jasa-jasa (19,37

persen); pertambangan dan penggalian (8,49 persen); serta angkutan dan komunikasi,(6,71 persen). Sedangkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor jasa termasuk angkutan dan komunikasi (9,00 persen); keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (8,45 persen); bangunan (8,24 persen); jasa-jasa (7,38 persen); serta perdagangan, hotel dan restoran (6,73 persen). Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kota Prabumulih diarahkan pada peningkatan mutu produk pertanian unggulan lokal dan mengoptimalkan posisi strategis sebagai kota perlintasan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, serta sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Prabumulih dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.21.

6.3.16 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan daerah otonom baru dengan perekonomian yang oleh sektor pertambangan dan penggalian (73,33 persen), sektor pertanian (11,66 persen), perdagangan hotel dan restoran (4,54 persen), sektor bangunan (3,38 persen), serta industry pengolahan (3,01 persen). Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (25,65 persen) dan industri pengolahan (1,01 persen). Sektor yan mendukung pendorong pertumbuhan ekonomi ialah sektor pengangkutan dan komunikasi (11,97 persen), sektor bangunan keuangan, persewaan, dan jasa keuangan (11,43 persen) Dengan struktur ekonomi tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diarahkan pada revitalisasi pertanian, penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar serta permodalan.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, dan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.22.

6.3.17 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah otonom baru dengan perekonomian yang mendukung share terhadap PDRB ialah sektor pertambangan dan penggalian (38,2 persen), pertanian (37,00 persen), dan perdagangan hotel dan restoran (5,7 persen) . Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah pertanian (81,37 persen), perdagangan hotel dan restoran (7,1 persen) dan bangunan (1,14 persen). Dengan struktur ekonomi

tersebut, percepatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan pada revitalisasi pertanian, perkebunan dan kehutanan; penyediaan infrastruktur dasar, dan penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, dan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam lima tahun mendatang (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 6.23.

Tabel 6. 7

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
	1 Pertanian (59,79 %)	1 Pertanian (26,99%)	Karet, Kelapa Sawit	- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Pertanian	- Hilirisasi Produk lingkup Pertanian	- Program Peningkatan Nilai Tambah dan Kualitas Produk lingkup pertanian Pertanian
	3 Pertambangan dan Penggalian (8,55 %)	2 Pertambangan dan Penggalian (19,49%)	Batu Kapur (Gol C)	- Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	- Penambangan yang tidak merusak lingkungan	- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan (Galian C)
		4 Industri Pengolahan (10,86)	Kelapa Sawit, Batu Kapur	- Pengembangan industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian (arti luas)	- Perbaikan iklim usaha dan Pengembangan agribisnis serta agroindustri	- Program Hilirisasi Produk Pertanian (arti luas) dan Pertambangan Gol. C
1 Angkutan dan Komunikasi (13,51) 2 Keuangan, Asuransi dan Jasa Persrhn (8,57%) Jasa-jasa (7,93%) 3 Perdagangan, Hotel dan Restoran (7,54%)	2 Perdagangan, Hotel dan Restoran (31,66 %)	3 Jasa-jasa (14,18%)	Gua Putri, Gua Harimau, Gua Selabe	- Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	- Penataan dan pengembangan tempat wisata - Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya	- Program Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 6. 8

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
	1. Pertanian (75,53 %)	1. Pertanian (47,53 %)	- Budidaya Ikan tambak, jaring dan sawah Unggas : Ayam buras, ayam pedaging, itik, Ternak : Sapi, kambing	- Pengembangan kawasan metropolitan, agropolitan, kawasan pesisir - Pengembangan kerbau rawa	- Pembangunan jalan infrastruktur jalan kab, desa - Bantuan/fasilitasi kepada petambak	- Program pembangunan jalan, jembatan - Bantuan bibit ikan, pupuk - Program bantuan bibit ayam
			- Karet	- Meningkatkan kualitas mutu karet, dengan kadar air baik, tidak ada kotoran) sehingga harganya dapat meningkat	- Pembangunan gudang Bokar di pedesaan dan gudang lelang karet yang dikelola oleh KUD	- Program Sarana dan Prasarana Pertanian
			- Tanaman Pangan : Padi Sawah	- Pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis padi sawah	- Penguatan kelembagaan pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis padi lebak	- Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian - Program peningkatan Kesejahteraan Petani

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
					utk mendorong petani selain menanam padi juga palawija lainnya	
					- Membentuk Perusahaan Daerah yang bertugas untuk membeli gabah petani dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga kesejahteraan petani dapat lebih terjamin.	- Program Padat Karya Pangan
	2 Industri Pengolahan (6,90 %)	4. Industri Pengolahan (7,88 %)	- Industri Makanan, minuman : gula aren, kerupuk kemplang, terasi	- Bantuan Permodalan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	- Pendirian "Bank"/Lembaga permodalan yang berorientasi pada warga berpenghasilan rendah.	- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Bangunan (8,44 %)		3. Bangunan (14,02 %) 2. Perdagangan, Hotel dan restoran (14,24 %)	- Komoditi dari sektor pertanian dan industri	- Fasilitasi pekerja di sektor bangunan	- Pengembangan SDM sektor informal	

Tabel 6. 9
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
6. Pertanian (6,81%)	1. Pertanian (65,32%)	2. Pertanian (16,61%)	Sawit, Karet Kopi	Revitalisasi Pertanian (Peningkatan Mutu dan Produktivitas) Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kopi	- Pengendalian Hama Penyakit Penyediaan Akses Permodalan - Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian - Penyediaan Benih Bibit Unggul - Stabilitas Produksi dan Mutu Kopi - Pendampingan UKM Kopi dengan Sentuhan Teknologi (Kemasan Hasil Produksi) - Fasilitasi Outlet - Pengembangan Sentra UKM/Industri Pengolahan Kopi	- Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian - Program Proteksi Tanaman Perkebunan

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
	3. Pertambangan dan Penggalian (3,43%)	1. Pertambangan dan Penggalian (57,36%)	Batubara Minyak Bumi	Pengelolaan Pertambangan yang Berkelanjutan	- Pengendalian Kegiatan Pertambangan Ilegal - Reklamasi dan Revegetasi Hutan dan Lahan di Kawasan Bekas Pertambangan - Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	- Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara - Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas
6. Industri Pengolahan (6,16%)	4. Industri Pengolahan (2,28%)	2. Industri Pengolahan (6,96%)	Industri Menengah dan Besar	Hilirisasi Produk-Produk Hasil Pertanian dan Tambang	- Iklim Investasi yang Kondusif - CSR	- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Bangunan (9,48%)						
1. Angkutan dan Komunikasi (9,96%)	1. Perdagangan, Hotel dan Restoran (11,06%)	3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (4,08%)	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Fasilitasi dan regulasi Iklim Usaha	Penataan Kawasan Permodalan	- Program Penataan Kawasan
2. Jasa-jasa (9,74%)	2. Jasa-jasa (10,60%)				Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha	- Program Perkuatan Permodalan UMKM

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
4. Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahaan (8,88%) 5. Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,44%)					Penyediaan dan Penataan Fasilitas Umum	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Tabel 6. 10

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN LAHAT**

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
	1. Pertanian (67,75%)	2. Pertanian (27,54%)	Padi	Revitalisasi Pertanian	- Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pertanian Terpadu - Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi - Pembangunan Jalan dan Jembatan daerah pertanian
		1. Pertambangan dan Penggalian (34,11%)	Kopi			<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi Kebun Rakyat - Pembinaan dan Pengembangan Industri berbasis Kopi
			Batubara	- Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian - Pengembangan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan agroindustri hasil perkebunan - Pembinaan pertambangan rakyat

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
					pertambangan dengan melibatkan masyarakat setempat	
			Split & Pasir	Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam	- Pengembangan Industri Bangunan	- Pembangunan SMK dan Poltek Pertambangan Pembinaan Home Industri Bangunan Pembangunan Industri Pra Cetak
4. Bangunan (6,47%)	4. Bangunan (3,56%)	5. Bangunan (7,07%)		Peningkatan Daya Saing Pekerja Konstruksi	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pekerja Konstruksi	Pembinaan Jasa Konstruksi Peningkatan SDM sektor konstruksi
1. Angkutan dan komunikasi (12,09%)	5. Angkutan dan komunikasi (2,35%)		Sarana komunikasi dan transportasi umum	Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan	Optimalisasi Trayek Angkutan Darat Perkotaan dan Trayek antar kota/kabupaten dalam provinsi	Pengembangan Lalu Lintas Penataan Bangunan dan Kawasan Angkutan Jalan
5. Perdagangan Hotel dan Restoran (6,19%)	2. Perdagangan Hotel dan Restoran (12,97%)	4. Perdagangan Hotel dan Restoran (8,18%)	Pasar, Hotel dan Restoran	Pengembangan Fasilitas Hotel Villa dan Resort	Pembangunan Fasilitas Hotel Villa dan Resort yang ramah lingkungan	Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
2. Jasa - Jasa (8,33%) 3. Keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (7,27%)	3. Jasa - Jasa (9,97%)	3. Jasa - Jasa (11,34%)	Sektor Jasa keuangan dan perbankan	Peningkatan Pelayanan Jasa Optimalisasi sektor keuangan dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Kemudahan dalam perizinan investasi usaha Peningkatan investasi daerah dan penyehatan iklim usaha	

Tabel 6. 11

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
4. Pertanian (7,41 %)	1. Pertanian (85,87 %)	1. Pertanian (40,00 %)	- Padi	- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Padi	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Bibit Unggul - Pengembangan Irigasi Teknis - Pengembangan Teknologi Pertanian - Penanganan Pasca Panen dan Agroindustri - Stop alih fungsi lahan pertanian pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawas dan Jaringan Pengairan Lainnya
			- Karet	- Peningkatan Kualitas dan Nilai Tambah Produk Karet	<ul style="list-style-type: none"> - Peremajaan Pohon Karet Rakyat - Penggunaan Bibit Unggul 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Penerapan Teknologi - Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Pertanian Berkelanjutan - Program Peremajaan Kebun Karet

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
			<ul style="list-style-type: none"> · Kelapa Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan Nilai Tambah Produk Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Pupuk berkualitas - Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Karet - Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) Petani Karet - Pengembangan Hilirisasi (industri rumah tangga) Karet - Pembukaan Akses Jalan ke Lokasi Perkebunan Karet Rakyat - Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Atap - Pengembangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan - Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan - Program Peningkatan Proteksi Karet Rakyat - Program Peningkatan Kualitas Koperasi - Program Pengembangan Industri Hilir Karet - Program Pembangunan Jalan Usaha Perkebunan - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Pengembangan Industri Hilirisasi Kelapa Sawit

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
2. Bangunan (8,97 %) 3. Listrik, Gas dan Air Bersih (7,45%)	4 Industri Pengolahan (2,01 %)	2 Pertambangan dan Penggalian (30,63 %)	- Ikan	- Peningkatan Produksi Perikanan	- Meningkatkan Aksesibilitas Pembudidaya Ikan terhadap Sumber Permodalan dan Teknologi - Perbaikan Sistem Pola Perikanan yang menggunakan Sumber Air Irigasi	- Program Pengembangan Budaya Perikanan - Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
			- Minyak dan Gas Bumi	- Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	- Good Mining Practice - Penyelesaian Sengketa Wilayah Pertambangan - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Program Penanganan Sengketa Wilayah Pertambangan - Program Listrik Perdesaan
2. Bangunan (8,97 %) 3. Listrik, Gas dan Air Bersih (7,45%)	4 Industri Pengolahan (2,01 %)	3 Industri Pengolahan (9,26 %)	Padi, CPO dan Karet	Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Padi, CPO dan Karet	- Pengembangan agribisnis dan agroindustri Mengurangi komponen bahan baku impor - Mendorong penggunaan produk lokal	- Program Hilirisasi Produk Pertanian dan Perkebunan - Program Pengembangan Sentra Industri Berbahan Baku Unggulan Lokal - Program Promosi Produk Unggulan Lokal

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
					<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan pola kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam pengembangan industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Kerjasama Pemerintah dan Swasta
1. Angkutan dan Komunikasi (12,66 %) 5. Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahaan (7,40 %)	2. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (6,88 %) 3. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Perorangan (3,24 %)	4. Jasa-jasa (7,47 %) 5. Perdagangan, Hotel dan Restoran (5,22 %)	- Kawasan Agropolitan dan Agrowisata	- Pengembangan Agrowisata berbasis Kawasan Agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan pengembangan tempat wisata khususnya Agrowisata - Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu - Pengembangan Kawasan Koridor Lubuklinggau - Muara Beliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Agrowisata - Program Pengembangan Terminal Agrobisnis Terpadu - Program Pengembangan Kawasan Strategis Cepat tumbuh

Tabel 6. 12

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
	1 Pertanian (79,17 %)	1 Pertambangan dan Penggalian (53,94 %) 2 Pertanian (14,26 %)	- Minyak dan Gas Bumi - Padi dan Ubi - Kopi dan Karet	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi melalui teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Melakukan intensifikasi lahan padi dan mengembangkan pertanian pada lahan kering untuk ubi kayu Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian/perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan gas bumi Mengoptimalkan cadangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan aspek lingkungan Pengembangan Pertanian Terpadu Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian/perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengawasan dan pembinaan bidang pertambangan Program Peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahanan pertanian dan perkebunan

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
			Rotan dan Cerucuk	- Pengelolaan Hutan lestari	- Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu	- Program perencanaan dan pengembangan hutan
	3 Industri Pengolahan (7,14 %)	3 Industri Pengolahan (7,14 %)	- Makanan, minuman, pengolahan kayu dan karet	- Pengembangan Industri pengolahan	- Mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi	- Program pengembangan industri kecil dan menengah
1 Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (12,52 %)	2 Jasa-jasa (12,14 %)		<ul style="list-style-type: none"> - Angkutan Jalan raya - Pos dan Telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sarana dan perdagangan, hotel, dan restoran - Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan kawasan perdagangan - Optimalisasi Sarana angkutan darat 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan sentra-sentra perdagangan - Program Pengembangan Sarana Angkutan Darat
2 Jasa-jasa (10,45 %)						
3 Perdagangan, hotel, dan restoran (9,82 %)						
4 Pengangkutan dan Komunikasi (9,41 %)						

Tabel 6. 13

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN BANYUASIN**

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
	1. Pertanian (64,39%)	1. Pertanian (30,54%)	Padi, Jagung Perikanan tangkap (udang & Ikan) Perikanan budidaya ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemanfaatan lahan pasang surut untuk meningkatkan produksi padi dan jagung melalui intensifikasi, diversifikasi dan rekayasa teknologi. - Penataan sistem manajemen sumber daya laut yang secara ekonomi dan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Swasembada pangan untuk beras dan jagung baik kualitas maupun kuantitas - Sistem ketahanan pangan melalui antisipasi perubahan iklim - Meningkatkan akses permodalan - Meningkatkan kapasitas petani dan penyuluhan pertanian - Meningkatkan pembangunan prasarana pertanian: jaringan irigasi dan jalan produksi untuk rawa pasang surut - Meningkatkan kapasitas nelayan - Meningkatkan kualitas hidup nelayan melalui bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Produksi Pertanian untuk padi dan jagung - Program pengembangan kelembagaan petani padi dan jagung - Pengembangan lumbung pangan - Program Peningkatan kapasitas petani - Program Kemitraan dengan Bulog (Rice Estate Telang I) dan Industri Pengolahan Pakan Ternak. - Program Pengembangan Mikro Finance - Program Bimbingan teknis dan penerapan teknologi tepat guna - Program pengembangan mikro finance

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
				<ul style="list-style-type: none"> - menguntungkan - Meningkatkan Pengelolaan Hutan Bakau dan Kawasan Konservasi Taman Nasional Sembilang - Perlindungan Nelayan Dari Ancaman Bencana Akibat Perubahan Iklim - Perlindungan Nelayan Dari Ancaman Bencana Akibat Perubahan Iklim 	<ul style="list-style-type: none"> - pembiayaan, bantuan peralatan, perbaikan sarana dan prasarana nelayan - Meningkatkan ketahanan pangan melalui revitalisasi perikanan dan pengembangan kawasan minapolitan Sungsang - Meningkatkan ketahanan pangan melalui revitalisasi perikanan dan pengembangan kawasan minapolitan Sungsang - Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Sembilang, dan mangrove. - Meningkatkan adaptasi dan mitigasi resiko bencana akibat perubahan iklim - Peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program kemitraan antara industri dan nelayan (CSR) dengan dikembangkannya KEK TAA - Program peningkatan sarana prasarana TPI, dermaga, pabrik es, kapal perikanan, alat tangkap dan kapal pengawasan. - Program peningkatan sarana prasarana TPI, dermaga, pabrik es, kapal perikanan, alat tangkap dan kapal pengawasan. - Program pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan. - Program penataan kawasan tambak (bagan) - Program penerapan asuransi nelayan dalam menghadapi resiko bencana akibat perubahan iklim

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
					pengawasan illegal fishing	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyiapan peraturan daerah terhadap pengamanan kelautan.
			Perikanan Budidaya ; patin, nila	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya patin, nila dan emas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sentra-sentra produksi patin, nila dan ikan mas (Sentra produksi Budidaya ikan kolam di Kec. Talang Kelapa) - Meningkatnya branding produk patin, nila dan ikan mas dari Banyuasin - Meningkatkan kapasitas SDM (petani ikan) dan penerapan teknologi tiga guna. - Meningkatnya pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan - Meningkatnya pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyediaan bibit unggul ikan patin, nila dan ikan mas. - Program penataan kawasan dan sentra produksi

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
			Sawit, Karet Minyak Bumi, Tanah Urug, pasir	- Optimalisasi produksi hasil perkebunan sawit, karet melalui peran serta sektor swasta (sebagian besar dikuasai oleh swasta) - Mendorong Pengembangan pertambangan minyak bumi yang berkelanjutan	- Meningkatkan kemitraan antara swasta dan masyarakat - Meningkatkan kapasitas petani sawit dan karet - Mendorong fungsi lingkungan hidup agar kualitas dan dukung tetap terjaga.	- Program Micro Finance bagi petani - Program sertifikasi lahan - Pengendalian dan pemantauan lingkungan
1.Bangunan (11,18%)		Industri Pengolahan (24,13%)	Semen & Barang Galian Bukan Logam Makanan, Minuman & Tembakau	- Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi)	- Mewujudkan KEK Tanjung Api-Api	- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
2. Pengangkutan & Komunikasi (10,62%)	1. Perdagangan (14,74%)	Perdagangan, Hotel & Restoran (13,67%) - Adm. Pemerintahan & Pertahanan - Sosial	- Angkutan Jalan Raya - Pos dan Telekomunikasi - Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	- Pengembangan Kawasan	- Mengembangkan sistem pelayanan kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Tanjung Api-Api - Mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perkotaan	- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh - Program Pembangunan Infrastruktur
3. Perdagangan, Hotel & Restoran (8,30%)	2. Jasa Kemasyarakatan (7,93%)					

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
		- Perorangan & Rumah Tangga Kemasyarakatan			Metropolitan Palembang Mengembangkan KSP Taman Nasional Sembilang - Mengembangkan KSP Minapolitan - Mengembangkan Kawasan Tanjung Api-Api sebagai KEK Tanjung Api-Api dan Simpul pelabuhan laut sebagai Pelabuhan Internasional	
				Pengembangan Jasa dan Pariwisata	- Menata dan mengembangkan tempat wisata - Mengembangkan jenis wisata khas lokal Kabupaten Banyuasin, wisata alam (TN Sembilang dan Pusat Latihan Gajah Sebokor), wisata agro, wisata minat khusus (kawasan pesisir) - Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata	Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Tabel 6. 14
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN OKU TIMUR

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
	1. Pertanian (64,98 %)	1. Pertanian (46,68%)	Padi (Organik), Jagung	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Pertanian (arti luas)	- Hilirisasi Produk Pertanian (arti luas)	- Program Peningkatan Nilai Tambah dan Kualitas Produk Pertanian (arti luas) - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
4. Bangunan (6,45%)	4. Industri Pengolahan (10,03 %)	5. Industri Pengolahan (6,09%) 4. Bangunan (8,26 %)	- Beras Organik	- Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian	- Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan	- Program Promosi Produk Unggulan Lokal
1. Angkutan dan Komunikasi (11,24%) 2. Jasa-jasa (9,66%) 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (7,60%) Keuangan, 5. Asuransi dan Jasa Prshn (5,05%)	2. Jasa-jasa (24,99%)	2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (16,77%) 3. Jasa-jasa (14,51%)	- Bendungan Upper Komering	- Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional	- Penataan dan pengembangan tempat Penataan dan pengembangan tempat wisata wisata	- Program Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 6. 15

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN OKU SELATAN**

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
	1. Pertanian (%)	1. Pertanian (35,27%)	Kopi, Lada	- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Pertanian (arti luas)	- Hilirisasi Produk Pertanian (arti luas)	- Program Peningkatan Nilai Tambah dan Kualitas Produk Pertanian (arti luas)
2. Listrik, Gas dan Air Bersih (10,06%)	3. Industri Pengolahan (%)	5. Industri Pengolahan (9,26%)	Kopi Luwak, Kopi Pala, Kopi Pinang		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas IKM - Mengurangi komponen bahan baku impor - Peningkatan Akses Listrik - Mendorong penggunaan produk lokal - Peningkatan penggunaan pola kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam pengembangan industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Industri Kecil Berbasis UMKM dan Koperasi - Program Pengembangan Sentra Industri Berbahan Baku Unggulan Lokal PLTMH, PLTS - Program Promosi Produk Unggulan Lokal

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
		4. Bangunan (12,09 %)	Bangunan Sarang Walet	Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Lokal	- Peningkatan Kualitas IKM	- Pembinaan Industri Kecil Berbasis UMKM dan Koperasi
1. Angkutan dan Komunikasi (11,13%) 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,00%) 4. Keuangan, Asuransi dan Jasa Prshn (7,85%) 5. Jasa-jasa (7,46%)	2. Jasa (%)	2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (18,09%) 3. Jasa-Jasa (17,26%)	Danau Ranau, Air Panas Ulu Danau	- Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional - Festival Danau Ranau	- Penataan dan pengembangan tempat wisata - Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya	- Program Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 6. 16

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

Sektor Utama			Komoditas Unggulan	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
1 Pertanian (58,57 %)	1. Pertanian (28,36 %)		Tebu Kelapa Sawit Karet Padi Sawah	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan sengketa lahan perkebunan tebu - Penanganan sengketa lahan perkebunan tebu - Peningkatan produksi karet rakyat - Penguatan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian - Revitalisasi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi Penanganan sengketa lahan - Regulasi Penanganan sengketa lahan - Peningkatan skill petani karet - Pelatihan pengolahan petani khusus sawah - Bantuan akses pemodalank untuk petani 	<ul style="list-style-type: none"> - Program ganti rugi lahan - Sosialisasi penanganan konflik lahan - Pelatihan petani karet - Program pelatihan petani - Program Peningkatan Penerapan Teknologi - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Sektor Utama			Komoditas Unggulan	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
			Ubi kayu	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ubi kayu	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Prasarana pertanian - Rehabilitasi pintu-pintu Air Ogan Keramasan I dan Ogan Keramasan II - Rehabilitasi jalan-jalan produksi sepanjang sungai keramasan - Introduksi bibit unggul varietas ubi kayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Prog Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Program pembangunan infrastruktur perdesaan - Program rehabilitasi jaringan irigasi Program - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan - Program pengembangan varietas unggul

Sektor Utama			Komoditas Unggulan	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share terhadap PDRB				
			<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan lebak lebung - Peningkatan produksi perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan mekanisme pengelolaan lebak lebung - Pengembangan produktivitas perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Perda baru pengelolaan lebak lebung yang mengakomodir akses dan kontrol nelayan - Pengembangan produkivitas ikan patin, ikan nila dll - Program penyediaan bibit unggul ikan patin, nila dll
	3 Pertambangan (41,43 %) 2 Industri Pengolahan	3. Pertambangan & Penggalian (4,1 %) 4. Industri Pengolahan (9,39 %)	- Pasir galian C, kayu & hasil hutan lainnya, Kayu Gelam, Semen dan barang galian bkn logam			

Tabel 6. 17

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
	1. Pertanian (73,37%)	1.Pertanian (43,65%)	Padi	Revitalisasi Pertanian Tanaman pangan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian (terutama padi)	<ul style="list-style-type: none">- Program Pengembangan Pertanian Terpadu- Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan- Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi- Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang- Penyusunan regulasi perlindungan lahan pertanian padi
			Buah Durian	Revitalisasi dan peningkatan mutu buah durian lokal	Pengembangan agroindustri	<ul style="list-style-type: none">- Peremajaan tanaman durian- Pembinaan dan pengembangan Industri kerajinan rakyat berbasis buah durian (seperti lempok)

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
			Kopi	Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Kopi	Pengembangan agroindustri	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pengarusutamaan Peran Gender Dalam Pengembangan Home Industry Berbasis Durian - Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Tanaman Produktif (Durian) - Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat - Pembinaan dan Pengembangan Industri berbasis Kopi - Peningkatan produktifitas kopi Luwak - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi - Program Pelestarian dan Perlindungan Hutan dari Petani Perambah
2.Bangunan (9,77%)		4.Bangunan (9,65%)	Infrstruktur dan bangunan perkantoran	Peningkatan Daya Saing Pekerja Konstruksi	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pekerja Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Jasa Konstruksi Bangunan, Pemanfaatan bahan lokal untuk bangunan - Program Pemanfaatan dan Pengend. Tata Ruang

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
						<ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Bangunan dan Gedung - Program Perlindungan Tenaga Kerja Konstruksi - Program Pembangunan Infrastruktur Perdagangan dan Jasa berbasis KPS
5.Jasa-jasa (6,5%) 1. Keuangan, asuransi dan jasa perusahaan (9,85%) 4. Perdagangan hotel dan restoran (6,76%)	3. Jasa - Jasa (3,8%) 2. Industri pengolahan (22,82%)	2. Jasa - Jasa (14,23%) 5.Industri pengolahan (9,45%) 3. Perdagangan hotel dan restoran (13,03%)	Sektor Jasa keuangan dan perbankan Industri rumah tangga untuk kopi dan durian Pasar, Hotel dan Restoran	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan Jasa - Optimalisasi sektor keuangan dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah - Optimalisasi industri berbasis kerakyatan Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan dalam perizinan investasi usaha - Peningkatan investasi daerah dan penyehatan iklim usaha - Peningkatan industri berbasis hasil pertanian Mendorong percepatan berkembangnya investasi perdagangan, hotel dan restoran	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan pelayanan terpadu sistem perizinan daerah - Bantuan kredit bunga rendah bagi usaha kerakyatan dan koperasi - Pengembangan industri hilir Pembangunan pasar tradisional dan menengah, Program kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan hotel dan restoran.

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
3. Angkutan dan komunikasi			Sarana komunikasi dan transportasi umum	Optimalisasi Pelayanan Jasa Komunikasi dan Angkutan Peningkatan aksesibilitas antar kecamatan dan desa	Peningkatan sarana komunikasi dan penyediaan trayek angkutan pedesaan Peningkatan aksesibilitas antar kecamatan dan desa	Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembangunan dan peningkatan jalan kecamatan dan jalan desa

Tabel 6. 18
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KOTA PALEMBANG**

Sektor Utama			Komoditas Unggulan	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah				
	5. Pertanian (7,23 %)		<ul style="list-style-type: none"> - Peternakan Ternak : Sapi Potong/ Kerbau, Telur - Tanaman Bahan Makanan Padi Sayuran: Ketimun, Terong Palawija : Ubi Kayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan Palembang sebagai pusat pengembangan hortikultura dan peternakan - Pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan rumah potong hewan modern - Pembangunan Cold Storage untuk hortikultura - Menyusun kebijakan pengupahan buruh yang menarik investasi di Kota Palembang 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian (Pertanian Organik) - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Program Pengembangan Sentra2 potensial - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Sektor Utama			Komoditas Unggulan	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah				
	Industri Pengolahan (7,82 %)	Industri Pengolahan (47,37 %)	- Industri Tanpa Migas : Industri pengolahan bahan makanan : Pempek dan sejenisnya dan lain-lain Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	- Pengembangan industri pengolahan berbasis pada produk bahan makanan	- Pengembangan ekonomi kreatif (pengembangan kawasan pengrajin songket, produsen pempek, kawasan pengrajin ukiran Palembang) - Pengembangan wisata Kuliner (wisata kuliner palembang; wisata kuliner Sumatera; wisata kuliner Nusantara) - Perbaikan iklim usaha dan investasi	- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah
3. Bangunan (10,11 %)	4 Industri Pengolahan (7,82 %) 2. Bangunan (16,04 %)	1. Industri Pengolahan (47,37 %) 5. Bangunan (6,50 %)	Pengilangan Minyak Bumi - Perumahan	- Pemberdayaan tenaga kerja lokal Penataan izin mendirikan bangunan		- Program Pemanfaatan Ruang - Prog Pengembangan Kemitraan

Sektor Utama			Komoditas Unggulan	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah				
2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (10,33 %)	1. Perdagangan, Hotel dan restoran (53,54 %)	2. Perdagangan, Hotel dan restoran (16,41 %)		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pariwisata berdaya saing nasional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wisata olahraga (penyelenggaraan event-event olahraga berskala nasional maupun internasional di Jakabaring Sport City - Pengembangan wisata sungai (revitalisasi Benteng Kuto Besak; Pengembangan wisata Sungai Musi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi - Prog Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Angkutan dan komunikasi (12,62 %)		4. Pengangkutan dan komunikasi (10,34 %)		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pariwisata berdaya saing nasional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wisata sungai (revitalisasi Benteng Kuto Besak; Pengembangan wisata Sungai Musi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Prog Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sektor Utama			Komoditas Unggulan	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah				
4 Keuangan, Asuransi dan jasa Perusahaan (9,38 %)					<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wisata belanja (pengembangan pusat grosir, dengan merevitalisasi pasar 16 Ilir; Pengembangan pusat fashion; pengembangan pusat kerajinan daerah Sumsel) 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan System Pendukung Usaha Kecil menengah
5 jasa-jasa (7,45 %)	3.Jasa-jasa (12,03 %)	3. Jasa-jasa (12,23 %)			<ul style="list-style-type: none"> - Prog Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah - Program Pengembangan Industri Olahraga - Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga 	

Tabel 6. 19

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KOTA PAGAR ALAM**

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Kontribusi Thd PDRB				
	1. Pertanian (53,16%)	1. Pertanian (25,87%)	Sayur-sayuran Bunga	Peningkatan kualitas dan produksi tanaman sayur Pengembangan Pagaralam sebagai Kota Bunga	Pengembangan tanaman sayur unggul Pengembangan kelompok petani sayur binaan Bantuan perkriditan bagi pengembangan tanaman bunga yang bernilai ekonomis	Pengembangan kebun sayur rakyat terpadu Bantuan perkeriditan dan koperasi untuk petani sayur Pengembangan industri bunga potong. Pengembangan paket wisata ke perkebunan sayur dan bunga Pembangunan dan peningkatan Jalan jembatan ke sentra sayura dan sentra bunga
2. Bangunan (8,98%)	5. Bangunan (4,92 %)	3. Bangunan (15,98%)	Infrastruktur, Perkantoran dan Perumahan	Peningkatan kualitas bangunan & daya saing pekerja konstruksi	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pekerja Konstruksi, Penetapan standar mutu bangunan yang ramah lingkungan dan berkualitas	Pembinaan sektor Jasa Konstruksi, Penerapan bangunan yang bercorak budaya Basemah dan ramah lingkungan

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Kontribusi Thd PDRB				
1. Angkutan dan Komunikasi (9,41 %)	4. Angkutan dan Komunikasi (5,59 %)	6. Angkutan dan Komunikasi (9,76%)	sarana/prasarana angkutan dan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan dan komunikasi	Optimalisasi Trayek Angkutan Darat Perkotaan dan Trayek antar kota/kabupaten dalam provinsi, Peningkatan jaringan komunikasi antar wilayah Peningkatan aksesibilitas antar wilayah kecamatan dan desa	Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pengembangan jaringan komunikasi sampai ke pelosok desa
3. Jasa-Jasa (7,12%)	3. Jasa-Jasa (15,55%)	4. Jasa-Jasa (14,90%)	Obyek Wisata Alam dan Jasa Wisata	Pengembangan Fasilitas Pendukung Obyek Wisata	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Obyek wisata	Penataan Bangunan dan Kawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Perdagangan, Hotel & Restoran (17,19%)	2. Perdagangan, Hotel & Restoran (24,52%)	Villa & Resort	Pengembangan Fasilitas Hotel Villa dan Resort yang mendukung kepariwisataan	Pengembangan Sarana/Prasarana dan Transportasi Pendukung Industri Wisata Pembangunan Fasilitas Hotel Villa dan Resort yang ramah lingkungan	Pengembangan Transportasi Udara, Pembangunan jalan menuju kawasan wisata Penataan Bangunan dan Kawasan (pasar, hotel dan restoran) Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengembangan Transportasi Udara, Pembangunan jalan menuju kawasan wisata Penataan Bangunan dan Kawasan (pasar, hotel dan restoran) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tabel 6. 20
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KOTA LUBUK LINGGAU**

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
4. Pertambangan dan Penggalian (6,00 %)	1. Pertanian (28,21%)		- Padi, Tanaman Hortikultura dan Ikan Air Tawar	- Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata	- Hilirisasi Produk Pertanian (arti luas) - Intensifikasi Pertanian (arti luas)	- Program Peningkatan Nilai Tambah dan Kualitas Produk Pertanian (arti luas) - Program Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pertanian (arti luas)
			- Galian C	- Penggalian Mineral berwawasan lingkungan	- Good Mining Practice	- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan (Galian C)
3. Bangunan (7,25%)	5. Bangunan (7,58 %)	2. Bangunan (20,10%)	- Konstruksi	- Pembinaan Jasa Konstruksi	- Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan	- Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
			- Industri Berbahan Baku Produk Unggulan Lokal	- Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Lokal	- Peningkatan Kualitas IKM - Mempermudah bantuan permodalan bagi IKM	- Program Pembinaan Industri Kecil Berbasis UMKM dan Koperasi - Program Kerjasama Pemkot dengan Lembaga Keuangan

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
1. Angkutan dan Komunikasi (8,44%) 2. Jasa-jasa (7,29%) 5. Perdagangan, Hotel dan Restoran (5,90%)	4. Angkutan dan Komunikasi (7,95 %) 2. Jasa-jasa (24,85%) 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (23,50%)	1. Perdagangan, Hotel dan Restoran (26,49%) 3. Jasa-jasa (16,20%) 4. Keuangan, Asuransi dan Perusahaan (11,79%)	- Air Terjun Temam, Bukit Sulap, Water-vang, Kuliner & Kerajinan Lokal	- Pengembangan Pariwisata Berbasis Ecotourism, Sporttourism dan MICE - Mengupayakan Lubuk Linggau sebagai Host Event berskala Nasional dan Internasional (olahraga, MICE dan lain-lain) - Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisataan - Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah (BOT dan sebagainya)	- Penataan dan pengembangan tempat wisata - Mengupayakan Lubuk Linggau sebagai Host Event berskala Nasional dan Internasional (olahraga, MICE dan lain-lain) - Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisataan - Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah (BOT dan sebagainya)	- Program Pengembangan Pariwisata Berbasis Ecotourism, Sporttourism dan MICE - Program Cyber City

Tabel 6. 21

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KOTA PRABUMULIH**

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
	4. Pertambangan dan Penggalian (8,49%) 1. Pertanian (26,62%)	1. Pertambangan dan penggalian (27,55%) 6. Pertanian (8,45%)	Minyak Karet Nanas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Mutu Produksi Karet - Pengembangan Nanas Sebagai Produk Unggulan Daerah (Prabumulih "Kota Nanas") 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan benih bibit unggul - Penyediaan akses permodalan - Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian - Pengendalian Hama Penyakit - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Buah Nanas - Pembangunan Kawasan "Agro Wisata Nanas" (Lahan, Sentra Produksi Pengolahan Nanas, Outlet) 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Pertanian - Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian - Program Proteksi Tanaman Perkebunan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian - Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (Nanas) - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
						<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Akses Permodalan - Penyediaan Benih Bibit Unggul - Program Inovasi Komoditas Nanas
3. Bangunan (8,24%)	7. Industri pengolahan (4,95%) 6. Bangunan (6,50%)	7. Industri pengolahan (6,30%) 3. Bangunan (11,17%)	Industri Pengolahan Makanan (UKM)	Optimalisasi Pemanfaatan Posisi Strategis sebagai Kota Perlintasan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan penataan kawasan outlet - Permodalan Peningkatan keterampilan pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan - Program Perkuatan Permodalan UMKM
1. Angkutan dan Komunikasi (9,00%) 2. Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahaan (8,45%) 4. Jasa-jasa (7,38%) 5. Perdagangan, Hotel & Restoran (6,73%)	2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (23,34%) 3. Jasa-jasa (19,37%)	2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (24,22%) 4. Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahn (9,47%) 5. Jasa-jasa (9,02%)	Perdagangan Besar dan Eceran		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan penataan fasilitas umum - Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Tabel 6. 22

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
	1. Pertanian (25,65%)	1. Pertambangan dan Penggalian (73,33%) 2. Pertanian (11,66%)	Minyak Bumi Karet Sawit	- Revitalisasi Pertanian	Penyediaan benih bibit unggul Penyediaan akses permodalan Pengendalian Hama Penyakit Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Program Pembangunan Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Program Proteksi Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
	Industri Pengolahan (1,01%)	5. Industri Pengolahan (3,01%)		Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar serta Permodalan	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik Penyediaan Infrastruktur Sosial Penyediaan Infrastruktur Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sektor Utama			Komoditas	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
6. Listrik, Gas dan Air Bersih (7,80%) 2. Bangunan (11,93%)		4. Bangunan (3,38%)	Perumahan dan Perkantoran			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Program Pengembangan Kinerja Pengembangan Air Minum dan Air Limbah
1. Pengangkutan dan Komunikasi (11,97%) 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Keuangan (11,43%) 4. Perdagangan Hotel dan Restoran (9,53%) 5. Jasa-jasa (9,43%)		3. Perdagangan Hotel dan Restoran (4,54%)	Restoran/Rumah Makan			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan jaringan Listrik - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM - Program Perkuatan Permodalan UMKM

Tabel 6. 23

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
3 Pertanian (6,65 %)	1 Pertanian (81,37 %)	2 Pertanian (37,00 %)	- Tanaman Pangan - Karet	- Peningkatan Ketahanan Pangan - Peningkatan Kualitas dan Nilai Tambah Produk Karet	- Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang rusak - Peremajaan Pohon Karet Rakyat - Penggunaan Bibit Unggul dan Pupuk Berkualitas - Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Karet - Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) Petani Karet - Akses Jalan ke Lokasi Perkebunan Karet Rakyat	- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan - Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan - Program Peningkatan Proteksi Karet Rakyat - Program Peningkatan Kualitas Koperasi - Program Pembangunan Jalan Usaha Perkebunan

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
4 Pertambangan dan Penggalian (1,54 %)	4 Pertambangan dan Penggalian (0,92 %)	1 Pertambangan dan Penggalian (38,2 %)	- Kelapa Sawit - Minyak, Gas Bumi dan Batubara	- Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan - Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	- Pengembangan Hilirisasi Karet - Good Plantation Practice - Zero Waste Industry - Good Mining Practice	- Program Pengembangan Industri Hilir Karet - Program Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan - Program Pengembangan Pengawasan Kelembagaan Usaha Perkebunan - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2 Bangunan (10,81 %)	3 Bangunan (1,14 %)	3 Bangunan (5,5 %)	- Sekolah - Rumah Sakit - Pasar	- Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar serta Permodalan	- Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik - Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar - Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Sosial	- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - Program Pengembangan Kinerja Pengembangan Air Minum dan Air Limbah

Sektor Utama			Komoditi	Strategi	Kebijakan	Program
Pendorong Pertumbuhan	Penyerap Tenaga Kerja	Share Terhadap PDRB				
			<ul style="list-style-type: none"> - Perkantoran - Terminal 			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengemb. Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar - Program Pengembangan jaringan Listrik
2 Perdagangan, Hotel dan Restoran (7,5%)	2 Perdagangan, Hotel dan Restoran (7,1%)	4 Perdagangan, Hotel dan Restoran (5,7%)	TNKS Goa Air Terjun Danau Arung Jeram Gunung	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan pengembangan ODTW khususnya Ekowisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisataan - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Produk Kerajinan Tangan UMKMK - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan keuangan daerah, aspirasi masyarakat, serta tekad dan keinginan kuat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional, maka kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 2013-2018 adalah sebagai berikut.

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 meliputi: reorientasi, reposisi dan revitalisasi.

7.1.1. Reorientasi

Kebijakan reorientasi diarahkan untuk mengubah paradigma pembangunan dari pendekatan pencapaian pertumbuhan ekonomi saja menjadi pendekatan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan mengutamakan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengurangan dan pencegahan kerusakan lingkungan, serta mitigasi bencana. Kebijakan reorientasi juga diarahkan untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan bagi wilayah kabupaten/kota yang relatif tertinggal dengan tetap menjaga momentum pembangunan bagi wilayah kabupaten/kota yang sudah berkembang.

Kebijakan reorientasi dalam pelayanan publik diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan sekaligus mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, air bersih, transportasi dan listrik terutama kabupaten yang relatif tertinggal. Dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan mewujudkan SDM aparat pemerintah yang bersih, profesional dan berwibawa.

Kebijakan reorientasi juga mengutamakan pembangunan yang lebih partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam seluruh proses

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

7.1.2 Reposisi

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peran dan fungsi yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN memberikan peluang bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menempatkan kembali posisi (repositori) Sumatera Selatan baik di tataran nasional maupun ASEAN.

Dalam lima tahun mendatang, kebijakan reposisi diarahkan untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan, fasilitasi, integrasi dan distribusi pembangunan. Peran dan posisi Provinsi Sumatera Selatan harus bergeser dari daerah penerima menjadi daerah penyumbang pada pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui upaya terpadu dan sinergis yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan berbasis pada kemampuan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengembangkan dan meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang saling menguntungkan secara intensif sebagai sarana percepatan pembangunan daerah.

Perubahan peran dan posisi Provinsi Sumatera Selatan mengharuskan perubahan pola kerja pimpinan puncak Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan khususnya seluruh Kepala SKPD dan Bupati/Walikota dari mengatur ke dalam (*inward looking*) menjadi mencari ke luar (*outward looking*) terutama tataran nasional dan ASEAN. Seluruh pimpinan SKPD dan Bupati/Walikota tidak dapat sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumberdaya alam dan anggaran daerah (APBD) yang tersedia, tetapi harus mampu membangun jejaring yang lebih luas melalui pengembangan skema pembiayaan, peningkatan kerjasama pemerintah daerah dan swasta, perluasan pasar nasional, global dan pengembangan investasi jangka panjang.

Dengan reposisi peran tersebut, pimpinan SKPD dan Bupati/Walikota harus bekerja sama secara penuh dan konsisten untuk melakukan perbaikan pelayanan ke dalam, serta peningkatan kemudahan akses dan kepercayaan yang tinggi dari luar melalui pengembangan birokrasi yang bersih, profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

7.1.3 Revitalisasi

Kebijakan revitalisasi dimaksudkan untuk menyusun satu acuan pembangunan sebagai peta jalan (*road map*) menuju kesejahteraan dan menguatkan kembali perencanaan jangka panjang yang berlanjut. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai perencana, pelaksana dan

pembiaya pembangunan menegaskan bahwa hanya ada satu rencana pembangunan induk yang menjadi acuan semua pihak yang terkait dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan sehingga memungkinkan terjadinya keterpaduan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan revitalisasi juga diarahkan untuk mengangkat nilai dan ciri khas budaya daerah sebagai acuan dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga ciri khas daerah menjadi signifikan. Kedudukan pimpinan atau perencana tradisional perlu dilibatkan untuk mewarnai pembangunan dengan potensi dan kearifan lokal. Dalam perspektif inilah pemaknaan kesejahteraan menjadi sesuai dengan nilai budaya, norma dan nilai daerah.

7.3 Program Pembangunan

Program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 memuat program pembangunan yang mendukung langsung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018 dan program pembangunan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rencana program pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan terbagi ke dalam 26 (duapuluhan enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan sebagai berikut.

7.3.1 Urusan Wajib

7.3.1.1 Urusan Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- (3) Program Pendidikan Menengah
- (4) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
- (5) Program Pendidikan Luar Biasa
- (6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.3.1.2 Urusan Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- (3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- (4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- (7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- (8) Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
- (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- (10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata
- (11) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
- (12) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- (13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA
- (14) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- (15) Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak
- (16) Program Penanganan Keluarga Berencana
- (17) Program Pendidikan Kesehatan

7.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- (2) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
- (3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- (4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- (6) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong
- (7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- (8) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- (9) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- (10) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

7.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pembangunan Perumahan
- (2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- (3) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- (4) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi
- (5) Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan
- (6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

7.3.1.5 Urusan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Perencanaan Tata Ruang
- (2) Program Penataan Bangunan

- (3) Program Penataan Kawasan
- (4) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7.3.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- (2) Program Kerjasama Pembangunan
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- (5) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- (6) Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- (7) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam.

7.3.1.7. Urusan Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- (2) Program Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
- (3) Program Pengembangan Transportasi Udara
- (4) Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (*Over Loading*)
- (5) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan
- (6) Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut
- (7) Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api
- (8) Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor.

7.3.1.8 Urusan Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
- (2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

7.3.1.9 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- (2) Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- (3) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

- (4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- (5) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

7.3.1.10 Urusan Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- (2) Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
- (3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- (4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- (5) Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- (6) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- (7) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- (8) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
- (9) Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan.

7.3.1.11 Urusan Ketenagakerjaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

7.3.1.12 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- (2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM
- (4) Program Perkuatan Permodalan UMKMK
- (5) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK
- (6) Program Pengembangan Kemitraan
- (7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK

7.3.1.13 Urusan Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- (2) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

7.3.1.14 Urusan Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- (2) Program Pengembangan Nilai Budaya
- (3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- (4) Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya Sumsel.

7.3.1.15 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- (2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- (3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS
- (4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- (5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- (7) Program Kependidikan/Kepramukaan

7.3.1.16 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- (4) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat
- (5) Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
- (6) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

7.3.1.17 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- (3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- (4) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- (5) Program Penataan Daerah Otonom Baru
- (6) Program Kerjasama Wilayah Perbatasan
- (7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- (8) Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
- (9) Program Pembangunan Bidang Ekonomi
- (10) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- (11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- (12) Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan

- (13) keuangan dan Aset Daerah
- (14) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kab/Kota
- (15) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
- (16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- (17) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- (18) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan
- (19) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan
- (20) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
- (21) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
- (22) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- (23) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- (24) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- (25) Program Litbang dan Inovasi Bidang Pelayanan Publik
- (26) Program Sentra HKI
- (27) Program Kemitraan Jaringan IPTEK
- (28) Program Inkubator Teknologi
- (29) Program Desiminasi Iptek Hasil Litbang dan Inovasi
- (30) Program Pendayagunaan Iptek
- (31) Program Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan
- (32) Program Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan
- (33) Program Litbang dan Inovasi Bidang Pertambangan dan Energi
- (34) Program Litbang dan Inovasi Bidang Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
- (35) Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
- (36) Program Litbang dan Inovasi Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan IPTEK
- (37) Program Litbang dan Inovasi Bidang Kemitraan, Desiminasi dan Inovasi IPTEK
- (38) Program Litbang dan Inovasi Bidang Informasi dan Komunikasi

7.3.1.18 Urusan Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
- (3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

- (4) Program Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan KORPRI
- (5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Kesehatan Jasmani
- (6) Program Pendidikan Kedinasan

7.3.1.19 Urusan Ketahanan Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
- (2) Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
- (3) Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan
- (4) Program Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan
- (5) Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

7.3.1.20 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- (2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

7.3.1.21 Urusan Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah

- (1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

7.3.1.22 Urusan Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- (2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- (3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

7.3.1.23 Urusan Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
- (2) Program Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
- (3) Program Penguatan Isi Siaran
- (4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- (5) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- (6) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
- (7) Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi

7.3.1.24 Urusan Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

7.3.2 Urusan Pilihan

7.3.2.1 Urusan Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
- (2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura
- (3) Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- (4) Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- (5) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- (6) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian
- (7) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- (8) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
- (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan
- (10) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan
- (11) Program Proteksi Tanaman Perkebunan
- (12) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan / P2HP
- (13) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP
- (14) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan
- (15) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak
- (16) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- (17) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- (18) Program Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan
- (19) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- (20) Program Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- (21) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
- (22) Program Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna
- (23) Program Penyuluhan Dukungan Ketahanan Pangan
- (24) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Perikanan
- (25) Program Pengembangan Teknologi Perikanan Tepat Guna
- (26) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan
- (27) Program Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna

7.3.2.2 Urusan Kehutanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengukuhan Kawasan Hutan
- (2) Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH
- (3) Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi
- (4) Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi
- (5) Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan
- (6) Program Penurunan Laju Deforestasi
- (7) Program Penurunan Laju Degradasi Hutan
- (8) Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK
- (9) Program Peningkatan Target Penanaman Hutan
- (10) Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI
- (11) Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan
- (12) Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu

7.3.2.3 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara
- (2) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM
- (3) Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas
- (4) Program Pemanfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat
- (5) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

7.3.2.4 Urusan Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- (3) Program Pengembangan Kemitraan

7.3.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- (2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- (3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- (4) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- (5) Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal
- (6) Program Optimalisasi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil (LPPMHP)

7.3.2.6 Urusan Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- (2) Program Peningkatan Iklim Usaha Perdagangan
- (3) Program Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Perdagangan
- (4) Program Peningkatan Sarana/Prasarana Perdagangan
- (5) Program Penguatan Sistem Logistik Daerah
- (6) Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- (7) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- (8) Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan

7.3.2.7 Urusan Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- (2) Program Pengembangan Klaster Industri
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi
- (4) Program Pengembangan dan Pembinaan Ovop
- (5) Program Pengembangan Industri Kreatif

7.3.2.8 Urusan Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah

- (1) Program Transmigrasi Lokal
- (2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Sumsel

Selain program pembangunan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, setiap SKPD akan melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kinerja pelayanan internal dan mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 memuat indikasi program prioritas yang mendukung langsung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018, dan program pembangunan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikasi rencana program prioritas dengan kerangka pendanaan tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut.

8.1 Rencana Program Prioritas

Rencana program prioritas merupakan sekumpulan program pembangunan yang menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Penetapan program prioritas memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan, tugas pokok dan fungsi SKPD, dan peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan memperhatikan pembagian tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan program prioritas adalah sebagai berikut.

8.1.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Kesatu

Rencana program prioritas untuk mewujudkan Misi Kesatu RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 8. 1

Rencana Program Prioritas Misi Kesatu: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
RPJMD Sumatera Selatan 2013-2018

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
1.1 Meningkatnya produksi	Pembangunan Pertanian	Urusan Perencanaan Pembangunan (1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	• Bappeda
1.2 Meningkatnya kemampuan SDM di sektor pertanian pertanian		Urusan Pertanian (1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	• Balitbangnonda • Dinas Pertanian, TPH
1.3 Meningkatnya jumlah rumah tangga jasa (UMKM) di sektor pertanian		(2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	• Dinas Perkebunan • Bakorluh
1.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pertanian		(3) Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	• Dinas Kehutanan
1.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertanian		(4) Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	• Dinas Kelautan dan Perikanan
		(5) Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian	
		(6) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	
		(7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	
		(8) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan	
		(9) Program Proteksi Tanaman Perkebunan	
		(10) Program pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan/P2HP	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		(11) Program pengembangan kelembagaan usaha perkebunan/PKUP (12) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan (13) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak (14) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (15) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (16) Program Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan (17) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (18) Program Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (19) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (20) Program Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna (21) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Perikanan (22) Program Pengembangan Teknologi Perikanan Tepat	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		<p>Guna</p> <p>(23) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyaluh Kehutanan</p> <p>(24) Program Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna</p> <p>Urusan Kehutanan</p> <p>(1) Program peningkatan produksi kayu dari HTI</p> <p>(2) Program peningkatan penerimaan sub sektor kehutanan</p> <p>(3) Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu</p> <p>Urusan Kelautan dan Perikanan</p> <p>(1) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan</p> <p>(2) Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan</p> <p>(3) Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>(4) Program Optimalisasi laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP)</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
2.1 Meningkatnya IKM berbasis pertanian	Investasi dan Pengembangan Usaha	Urusan Perencanaan Pembangunan (1) Program Kerjasama Pembangunan	• Bappeda • Dinas Koperasi, UKM • BP3MD
2.2 Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri pengolahan		Urusan Koperasi dan UKM (1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.3 Meningkatnya produk IKM		(2) Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UKM	
2.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha IKM			
2.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha industri pengolahan			
3.1 Berkembangnya jasa pariwisata		Urusan Penanaman Modal (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	
3.2 Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pariwisata		(2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	
3.3 Meningkatnya nilai tambah objek wisata			
3.4 Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pariwisata			
3.5 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pariwisata		Urusan Pariwisata (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
4.1 Meningkatnya produksi pertambangan		(2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
4.2 Meningkatnya nilai tambah sektor pertambangan		(3) Program Pengembangan Kemitraan	
4.3 Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertambangan			
5.1 Meningkatnya pendapatan daerah dari perusahaan daerah		Urusan Perdagangan (1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
5.2 Meningkatnya pendapatan		(2) Program	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
6.1 perusahaan daerah Berkembangnya kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-api		Peningkatan Iklim Usaha Perdagangan (3) Program Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Perdagangan	
6.2 Meningkatnya investasi		(4) Program Peningkatan Sarana/Prasarana Perdagangan (5) Program Penguatan Sistem Logistik Daerah	
6.3 Berkembangnya Klaster Industri Unggulan Daerah (KIUD)		(6) Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (7) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (8) Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan Urusan Perindustrian (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (2) Program Pengembangan Klaster Industri (3) Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi (4) Program Pengembangan dan Pembinaan Ovop (5) Program Pengembangan Industri Kreatif	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
7.1 Meningkatnya mobilitas barang antarwilayah	Infrastruktur dan Energi	Urusan Pekerjaan Umum (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	• Dinas PU Bina Marga
7.2 Meningkatnya perdagangan antarwilayah		(2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	• Dinas PU Cipta Karya
8.1 Terbangunnya jalan dan jembatan		(3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	• Dinas PU Pengairan
8.2 Terbangunnya prasarana, sarana dan jaringan transportasi yang terpadu dan merata		(4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	• Dinas Perhubungan, Kominfo
8.3 Meningkatnya mutu pengelolaan lalu lintas		(5) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	• Dinas Pertambangan dan Energi
8.4 Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman yang sehat dan layak huni		Urusan Perumahan Rakyat (1) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
8.5 Meningkatnya pelayanan daerah rawan sanitasi			
9.1 Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)		Urusan Penataan Ruang (1) Program Perencanaan Tata Ruang	
9.2 Berkembangnya jaringan IPTEKIN		(2) Program Penataan Bangunan	
9.3 Berkembangnya bisnis inovatif		(3) Program Penataan Kawasan	
9.4 Berkembangnya IPTEKIN strategis daerah		(4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
		Urusan Perhubungan (1) Program Pengembangan Lalu Lintas dan	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		(2) Angkutan Jalan (LLAJ) (3) Program Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) (4) Program Pengembangan Transportasi Udara (5) Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (<i>Over Loading</i>) (6) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan (7) Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (8) Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (1) Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara (2) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		(3) Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas (4) Program Pemanfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat	

8.1.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Kedua

Rencana program prioritas untuk mewujudkan Misi Kedua RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 8. 2

Program Prioritas Misi Kedua: Memantapkan Stabilitas Daerah
RPJMD Sumatera Selatan 2013-2018

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggungjawab
10.1 Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Urusan Ketahanan Pangan (1) Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan	• Badan Ketahanan Pangan • Sekretariat Korpri • Badan Kepegawaian Daerah • Badan Diklat • Bappeda • Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia • Biro Kesejahteraan Rakyat • Biro Organisasi dan Tatalaksana • Sekretariat DPRD
10.2 Terwujudnya ketahanan energy daerah		(2) Program Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan	
11.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil		(3) Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	
11.2 Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik		Urusan Kepegawaian (1) Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	
11.3 Berkembangnya perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan berbasis kinerja		(2) Program Penguatan Organisasi KÖRPRI (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/KÖRPRI (4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Kesehatan Jasmani Bagi PNS/Anggota KÖRPRI	
11.4 Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai		(5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
11.5 Meningkatnya			• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Dinas Pendapatan Daerah • Inspektorat Provinsi • Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggungjawab
11.6 solidaritas, ketahanan dan modal social budaya masyarakat Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah		(6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Urusan Perencanaan (1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan (1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (3) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan (4) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan (5) Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi (6) Program Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga (7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat (9) Program Peningkatan dan Pengembangan Peng. Keuangan dan Aset Daerah (10) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota (11) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat (13) Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa	• Badan Arsip Daerah • KPID • Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Satuan Polisi Pamong Praja
12.1 Terwujudnya tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifan lokal			
12.2 Terlaksananya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pemilihan umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil			

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggungjawab
		<p>(1) Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</p> <p>Urusan Kearsipan</p> <p>(1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</p> <p>(2) Program Peningkatan Pelayanan Informasi</p> <p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> <p>(1) Program Peningkatan Kelembagaan KPID Dok/Arsip Daerah</p> <p>(2) Program Pengawasan Isi Siaran</p> <p>(3) Program Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran</p> <p>(4) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</p> <p>(5) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi</p> <p>(6) Program Pengemb. Aplikasi Telekomunikasi</p> <p>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</p> <p>(1) Program Pengemb.Wawasan Kebangsaan</p> <p>(2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>(3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingk.</p> <p>(4) Program Pendidikan Politik Masyarakat</p> <p>(5) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal</p> <p>(6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat</p>	

8.1.3 Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Ketiga

Rencana program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 8. 3

Program Prioritas Misi Ketiga: Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan RPJMD Sumatera Selatan 2013-2018

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
13.1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	Urusan Kesehatan (1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	• Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • RS. DR.Ernaldi Bahar
13.2 Meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat		(2) Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	• Badan Pemberdayaan Perempuan
13.3 Meningkatnya status gizi masyarakat		(3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS JIWA, RS PARU dan RS MATA	• Dinas Sosial • Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
13.4 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi		(4) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA	• Dinas Pemuda dan Olahraga • Badan Perpustakaan Daerah
13.5 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic		(5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA	• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • BPMPD • Bappeda
13.6 Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan		(6) Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	
14.1 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah		(7) Program Penanganan Keluarga Berencana	
14.2 Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah		Urusan Pendidikan (1) Peningkatan Pendidikan Non Formal	
14.3 Meningkatnya keterampilan siswa SMA		(2) Program Pendidikan Luar Biasa	
14.4 Meningkatnya		(3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		(4) Program Manajemen Pelayanan	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
14.4 Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan perguruan tinggi 14.5 Tertatanya minat baca masyarakat 15.1 Menurunnya dokumen dan arsip daerah 15.2 Pertumbuhan penduduk 16.1 Berkembangnya laju 16.2 Berkembangnya pertumbuhan keluarga sejahtera 16.3 Kepemudaan 17.1 Berkembangnya prestasi 18.1 Masyarakat 18.2 Meningkatnya		<p>Pendidikan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>(1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak (2) Program Kelembagaan PUG dan Anak (3) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan (4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (5) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> <p>Urusan Sosial</p> <p>(1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya (2) Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial (3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Urusan Ketenagakerjaan</p> <p>(1) Program Peningkatan Kualitas</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
18.3 peran perempuan dalam pembangunan Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak		<p>dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>(2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>(3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>Urusan Transmigrasi</p> <p>(1) Program Transmigrasi Lokal</p> <p>(2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>(3) Program Transmigrasi Sumsel</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>(1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</p> <p>(2) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</p> <p>(3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</p> <p>(4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <p>(5) Program Kependidikan/Kependidikan</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> <p>(1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		<p>Urusan Kebudayaan</p> <p>(1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>(2) Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>(3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</p> <p>(4) Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya Sumsel</p> <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>(1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</p> <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> <p>(1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>(2) Program Perencanaan Pembangunan Sosial</p>	
19.1 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian 19.2 Berkurangnya pengangguran tenaga kerja 19.3 Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat 20.1 Berkembangnya wilayah perdesaan dan kawasan	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	<p>Urusan Pendidikan</p> <p>(1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>(2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>(3) Program Pendidikan Menengah</p> <p>Urusan Kesehatan</p> <p>(1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>(2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>(3) Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Koperasi, UKM • Dinas PU CK • Dinas PU Pengairan • Dinas Pertanian • Dinas Perkebunan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Badan ketahanan Pangan

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
<p>transmigrasi</p> <p>20.2. Terwujudnya percepatan pembangunan daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal</p> <p>21.1 Menurunnya angka kemiskinan</p> <p>22.1 Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat desa</p> <p>22.2 Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa</p> <p>22.3 Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa</p> <p>23.1 Meningkatnya surplus usaha koperasi</p> <p>23.2 Meningkatnya pendapatan pelaku UMKMK</p>		<p>Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>(4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>(5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>(6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p> <p>(7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</p> <p>(8) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>(9) Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>(1) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</p> <p>(2) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS</p> <p>Urusan Ketenagakerjaan</p> <p>(1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>Urusan Koperasi dan UKM</p> <p>(1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		<p>Keunggulan Kompetitif UKM</p> <p>(2) Program Perkuatan Permodalan UMKMK</p> <p>(3) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK</p> <p>(4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK</p> <p>Urusan Perumahan Rakyat</p> <p>(1) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>(2) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</p> <p>Urusan Pekerjaan Umum</p> <p>(1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</p> <p>Urusan Pertanian</p> <p>(1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian</p> <p>(2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan</p> <p>Urusan Kelautan dan Perikanan</p> <p>(1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		<p>(2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap</p> <p>Urusan Ketahanan Pangan</p> <p>(1) Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan</p> <p>(2) Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan</p>	

8.1.4 Indikasi Rencana Program Prioritas Misi Keempat

Rencana program prioritas untuk mewujudkan Misi Keempat RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 8. 4

Program Prioritas Misi Keempat: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari
dan Penanggulangan Bencana
RPJMD Sumatera Selatan 2013-2018

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
<p>5.1 Terkelolanya kawasan hutan</p> <p>26.1 Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu</p> <p>26.2 Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan</p> <p>27.1 Berkurangnya laju penurunan Kualitas Lingkungan Hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan</p> <p>28.1 Terwujudnya pembangunan rendah karbon</p> <p>29.1 Terselenggaranya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan LH</p> <p>29.2 Terwujudnya ketaatan masyarakat & pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH</p> <p>29.3 Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam</p>	Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana	<p>Urusan Kehutanan</p> <p>(1) Program Pengukuhan Kawasan Hutan</p> <p>(2) Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH</p> <p>(3) Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi</p> <p>(4) Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi</p> <p>(5) Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan</p> <p>(6) Program Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan</p> <p>(7) Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK</p> <p>(8) Program Peningkatan Target Penanaman Hutan</p> <p>Urusan Pekerjaan Umum</p> <p>(1) Program Pengendalian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU Pengairan • Badan Lingkungan Hidup • BPBD • Balitbangnovid

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
<p>pengujian parameter kualitas lingkungan</p> <p>30.1 Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana</p> <p>30.2 Berkurangnya kerugian akibat bencana</p> <p>30.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana</p> <p>30.4 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana</p>		<p>(2) Banjir Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong</p> <p>Urusan Lingkungan Hidup (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</p> <p>(2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Urusan Sosial (1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>(2) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>(3) Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana</p> <p>(4) Program Tanggap Darurat Bencana</p> <p>(5) Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian (1) Program Litbang dan Inovasi Bidang</p>	

Sasaran	Prioritas Pembangunan	Urusan dan Program	SKPD Penanggung Jawab
		Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kemasyarakatan	
24.1 Tersedianya peraturan penataan ruang di daerah 24.2 Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang 24.3 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program pemanfaatan ruang 24.4 Penyelesaian Batas Wilayah	Pengembangan Wilayah Urusan Perencanaan Pembangunan (1) Program Perencanaan Tata Ruang (2) Program Pemanfaatan Ruang (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian (1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Setda 	

8.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2014-2018

Penghitungan kerangka pendanaan didasarkan pada kebijakan belanja daerah tahun 2014-2018 sebagai berikut:

- (1) Membayai belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- (2) Memenuhi secara bertahap alokasi belanja sebesar 20 persen untuk pembiayaan pendidikan.
- (3) Membayai program kegiatan yang menjadi prioritas Sumatera Selatan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- (4) Memenuhi standar pelayanan minimal dan operasional;
- (5) Mengutamakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan;

8.2.1 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2014-2018

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat tahun 2013-2018 menjadi dasar perhitungan kapasitas riil keuangan daerah sebagai berikut.

Tabel 8. 5

**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018**

No	Jenis Belanja	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak langsung	1,026.33	1,412.68	1,426.80	1,441.07	1,455.49	1,470.04
1	Belanja Pegawai	780.57	804.69	812.73	820.86	829.07	837.36
2	Belanja bagi Hasil Kabupaten/Kota	239.57	600.00	606.00	612.06	618.18	624.36
3	Belanja Tidak Terduga	6.19	7.99	8.07	8.15	8.24	8.32
B	Belanja Langsung	1,251.83	1,264.35	1,276.99	1,289.77	1,302.66	1,315.68
1	Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja, Beasiswa)	67.89	68.57	69.25	69.95	70.65	71.35
2	Belanja Barang dan Jasa	1,183.94	1,195.78	1,207.74	1,219.82	1,232.01	1,244.33
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	300.59	893.42	902.36	911.38	920.49	1,429.70
1	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2	Penyertaan Modal	300.59	893.42	902.36	911.38	920.49	929.70
Total (A+B+C)		2,578.75	3,570.45	3,606.15	3,642.22	3,678.64	4,215.42

Dengan memperhitungkan proyeksi pendapatan daerah, pembayaran hutang, serta belanja dan pengeluaran pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat, proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014-2018.

Tabel 8. 6

**Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018**

No	Jenis Belanja	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Daerah	6,000.78	7,104.28	8,186.28	9,460.39	11,011.49	12,905.07
2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)	521.33	295.72	200	200	200	200
	Total Penerimaan	6,522.11	7,400.00	8,386.28	9,660.39	11,211.49	13,105.07
	Dikurangi:						
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	300.59	893.42	902.36	911.38	920.49	929.7
	Kapasitas riil keuangan daerah	6,221.52	6,506.58	7,483.92	8,749.01	10,291.00	12,175.37

Dengan memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah tahun 2014-2018, distribusi alokasi belanja dikelompokkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III. Setiap tingkatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas di atasnya terpenuhi.

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan program unggulan (*dedicated*) Gubernur Sumatera Selatan 2013-2018 sebagaimana dijanjikan pada kampanye Pemilukada. Selain itu, alokasi anggaran juga memuat prioritas nasional dan prioritas belanja wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari belanja daerah. Prioritas I mengutamakan pelayanan publik, serta memiliki manfaat dan dampak yang tinggi bagi masyarakat.

Prioritas II merupakan program unggulan SKPD yang mempunyai dampak bagi masyarakat sesuai dengan kelompok sasaran. Penetapan prioritas II mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kinerja dan standar pelayanan minimum yang harus dicapai SKPD.

Prioritas III merupakan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Tabel 8. 7

**Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018**

No	Jenis Belanja	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kapasitas Keuangan Daerah	6,522.11	7,400.00	8,386.29	9,660.40	11,211.49	13,105.08
2	Prioritas I (Wajib dan Mengikat)	2,578.75	3,570.45	3,606.15	3,642.22	3,678.64	4,215.42
	2.1 Belanja Tidak Langsung	1,026.33	1,412.68	1,426.80	1,441.07	1,455.49	1,470.04
	2.2 Belanja Langsung	1,251.83	1,264.35	1,276.99	1,289.77	1,302.66	1,315.68
	2.3 Pengeluaran pembiayaan daerah	300.59	893.42	902.36	911.38	920.49	1,429.70
3	Kapasitas riil keuangan daerah	4,215.83	4,427.26	4,780.14	6,018.18	7,532.85	8,889.66
4	Prioritas II (Pencapaian Visi dan Misi Gubernur)	1,271.16	1,448.36	2,190.00	3,409.14	4,904.75	6,242.36
	4.1 Prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban		109.24	208.18	410.29	421.58	512.00
	4.2 Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya		196.76	294.37	310.07	548.68	675.70
	4.3 Prioritas Penanggulangan kemiskinan		387.21	511.45	625.58	878.32	1,106.95
	4.4 Prioritas Pertanian		98.29	159.39	344.22	575.70	707.81
	4.5 Prioritas Infrastruktur dan Energi		558.03	866.16	1,442.32	2,070.23	2,577.16
	4.6 Prioritas Investasi dan Pengembangan usaha		27.23	42.01	127.55	202.84	302.41
	4.7 Prioritas Lingkungan dan Pengendalian Bencana		67.38	102.53	139.11	182.40	320.33
	4.8 Prioritas Pengembangan Wilayah		4.22	5.90	10.00	25.00	40.00
5	Prioritas III	2,944.67	2,978.90	2,590.14	2,609.04	2,628.10	2,647.30
	5.1 Bantuan Hibah	2,118.19	1,800.54	1,400.00	1,407.00	1,414.04	1,421.11
	5.2 Bantuan Sosial	0.6	0.6	0.6	0.61	0.61	0.61
	5.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
	5.4 Belanja Bantuan Keuangan	825.88	1,177.76	1,189.54	1,201.43	1,213.45	1,225.58
6	Surplus/Defisit	-272.47	-597.71	0.00	0.00	0.00	0.00

8.3 Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan untuk Mewujudkan Misi Pembangunan

Rencana program prioritas dan kerangka pendanaan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

8.3 Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan untuk Mewujudkan Misi Pembangunan

Rencana program prioritas dan kerangka pendanaan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 8.8
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Kesatu Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018		
					Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	
	Prioritas Pembangunan Pertanian														
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					1,76			2,42		3,63		5,75		8,05
1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Perencanaan Ekonomi yang diimplementasikan	60	65	70	0,88	75	1,18	80	1,89	85	3,32	90	4,64	90
2	Program Perencanaan Prasarana dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil analisa Pengembangan Infrastruktur wilayah	2	3	2	0,89	2	1,24	2	1,74	3	2,43	3	3,41	12
	Badan Penelitian & Pengemb. Inovasi Daerah					8,20			20,60		65,50		77,90		92,10
3	Program Sentra HKI	Jumlah HKI terdaftar	0	0	5 WBTB,2 HKI	0,1	5 WBTB,3 HKI	0,1	5 WBTB,3 HKI	0,2	5 WBTB,3 HKI	0,2	5 WBTB,3 HKI	0,2	15 WBTB, 14 HKI
4	Program Kemitraan Jaringan Iptek	Jumlah technopark	0	0	0	0	1	2,2	1	2,5	1	3,5	1	4,5	1
		jumlah kemitraan strategis iptekin	0	10	2	0,6	3	0,8	3	1,0	3	1,2	3	2,0	24
		jumlah kawasan pusat belajar IPTEKIN	0	1	3	1,0	3	0,2	4	1,0	4	1	5	1	23
5	Program Desiminasi Iptek hasil litbang dan Inovasi	Persentase desiminasi hasil litbang dan Inovasi	0	0	10	0,7	10	1,0	20	2,3	30	2,9	30	3,6	100%
6	Program Pendayagunaan Iptek	jumlah pusat inovasi	0	0	3	0,2	3	0,3	3	0,4	4	0,8	4	1	17
		jumlah pos pelayanan teknologi (posyantek) untuk pengembangan teknologi tepat guna (TTG)	0	0	1	0,5	1	0,5	1	0,5	2	0,6	2	0,6	7

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
		persentase produk bisnis inovatif baru yang memenuhi standar internasional	0	0	0	4,5	0	4,5	30	6,3	30	9,3	40	12,8	100%	
		jumlah pelayanan IPTEKIN didaerah	0	3	2	0,5	2	0,5	3	0,3	3	0,4	3	0,4		
7	Program litbang dan Inovasi bidang Pertambangan dan energi	Jumlah teknologi bidang Pertambangan dan energi yang dimanfaatkan	0	1	1	0,3	2	0,5	2	1,0	2	1,5	3	2,0	11	
8	Program litbang dan Inovasi bidang Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah teknologi bidang Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan yang dimanfaatkan	0	0	4	0,5	4	1,0	5	1,7	5	2,5	5	3,5	23	
9	Program Litbang dan Inovasi Bidang Lingkup Pertanian	Jumlah teknologi bidang Lingkup Pertanian yang dimanfaatkan	0	0	1	0,5	1	10,60	1	44,00	1	48,00	1	50,0	5	
10	Program litbang dan Inovasi bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah teknologi bidang Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan	0	1	0,2	2	0,6	2	1,0	2	1,3	2	2,5	9		
11	Program Inkubator Teknologi	Jumlah kelompok tenant yang diinkubasi	0	0	1	0,90	1	1,1	2	2,5	2	3,5	2	4,5	8	
12	Program litbang dan Inovasi bidang Pendidikan	Jumlah teknologi bidang Pendidikan yang dimanfaatkan	0	1	1	0,3	1	0,5	2	1,0	2	1,5	3	2,5	10	
13	Program litbang dan Inovasi bidang Kesehatan	Jumlah teknologi bidang kesehatan yang dimanfaatkan	0	1	1	0,3	1	0,3	2	1,0	2	1,5	2	2,0	9	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPJMD		
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018		
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura				33,79		55,72		86,20		120,84		162,01		
14	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan				4,94		12,88		25,81		27,66		32,73	104,02	
		Jumlah Produksi : (ton)													
		- Padi	3.295.246	3.676.722	3.986.098		4.125.611		4.270.088		4.419.461		4.574.142	21.375.400	
		- Jagung	112.918	167.457	172.481		177.655		182.985		188.474		194.128	915.723	
		- Kedelai	12.162	5.135	15.886		16.459		17.317		18.219		19.168	87.049	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	124,54	124,22	99,82		103,09		106,96		109,96		113,57	113,57	
15	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Jumlah Produksi : (Ton)			3,77		7,55		12,07		18,13		25,58	67,10	
		- Jeruk	17.934	17.934	18.472		19.026		19.595		20.772		22.018	99.883	
		- Durian	28.343	28.343	28.910		29.777		30.670		31.511		32.456	153.324	
		- Duku	26.710	26.710	27.511		28.337		29.187		30.062		31.964	147.061	
		- Kentang	1.704	15.109	35.549		36.616		3.714		38.846		40.011	154.736	
		- Cabe Merah	17.858	2.823	3.608		3.608		3.825		4.054		4.297	19.392	
		- Bawang merah	17	19	772		772		803		835		869	4.051	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	113,37	113,48	110,95		113,49		116,09		118,75		121,47	121,47	
16	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi benih :			15,19		18,51		22,81		35,42		45,39	137,32	
		- Padi (Ton)	600	684	1.134		1.134		1.623		1.866		2.146	7.904	
		- Buah-buahan (Batang)	4500	19.600	27.887		7.500		50.250		57.788		66.456	209.880	
		- Sayuran (Kg)	3500	3.370	3.750		176		5.700		6.555		7.538	23.719	
		- Tanaman hias (Batang)	-	2.500	5.000		2.272		6.000		6.500		7.000	26.772	
17	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura				2,37		3,20		5,12		6,95		8,50		
		- Prosentasi Tingkat Serangan OPT dan DPI	0%	3%	3%		3%		3%		3%		3%		
18	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian				7,52		12,17		18,57		30,45		45,26		
		- Jumlah Alat Penanganan pasca panen dan pengolahan tanaman pangan dan hortikultura (Unit)	63	5.757	461		231		257		257		257	1.463	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
19	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Jumlah Petugas Teknis Pertanian PNS dan Non PNS serta Pengurus Kelembagaan Petani yang Terlatih			1,05		1,41		1,82		2,23		4,55			
		60	180	270		390		360		420		480		1.920		
	Dinas Perkebunan					28,56		20,76		45,60		71,88		105,42		
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Persentase peningkatan prasarana dan sarana perkebunan	5	5	5	0,40	5,00	0,85	5,00	8,00	5,00	10,53	5,00	20,53	5	
21	Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan	Meningkatnya jumlah benih bersertifikat yang beredar	80.000.000	98.534.880	60.000.000	0,50	70.000.000	0,95	80.000.000	1,60	90.000.000	2,35	90.000.000	4,89	390.000.000	
22	Program Proteksi Tanaman Perkebunan	Meningkatnya jumlah areal yang terkendali serangan OPT	800	800	1.250	3,75	1.450	3,80	2.750	7,00	2.750	12,00	2.750	15,00	10.950	
23	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan / P2HP	Persentase peningkatan harga komoditas	1,5	1,5	1,5	4,69	1,50	4,53	1,50	9,00	1,50	15,00	1,50	20,00	7,5	
24	Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP	Meningkatnya jumlah usaha perkebunan dan peningkatan unit usaha perkebunan yang terawasi	200	200	200	0,81	200,00	1,63	210,00	5,00	220,00	7,00	220,00	10,00	220	
25	Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan	Meningkatnya areal perkebunan	2.429.132	2.409.788	2.420.000	18,40	2.450.000	9,00	2.475.000	15,00	2.500.000	25,00	2.530.000	35,00	2.530.000	
	Dinas Peternakan					11,44		15,44		37,72		61,49		84,91		
26	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya kab/kota yang akan dilakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ternak	15 kab/kota	15 kab/kota	17 kab/kota	1,80	17 kab/kota	2,43	17 kab/kota	5,89	17 kab/kota	9,80	17 kab/kota	15,53	17 kab/kota	
27	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi daging hasil peternakan yang akan ditingkatkan (Ton)	58.282,03 Ton	62.780 Ton	65.350 Ton	6,139	69.240 Ton	8,28765	73.370 Ton	15,26	77.750 Ton	24,21	82.315 Ton	33,49	82.315 Ton	
28	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya Promosi dan standarisasi pemasaran hasil produksi peternakan	2 kali	2 kali	3 kali	1,49	3 kali	2,01	3 kali	5,22	3 kali	8,63	3 kali	10,89	15	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
29	Program Pengembangan Informasi & Statistik Peternakan	Meningkatnya buku yang mendukung pengembangan informasi dan statistik peternakan	25 buku	25 buku	20 buku	0,10	20 buku	0,14	20 buku	5,22	20 buku	8,63	20 buku	10,89	100	
30	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya kelompok dalam penerapan teknologi peternakan	3 kelompok	3 kelompok	4 kelompok	1,91	4 kelompok	2,58	4 kelompok	6,13	4 kelompok	10,22	4 kelompok	14,11	20	
Badan Koordinasi Penyuluhan					9,26		12,56		22,28		29,40		36,04			
31	Program Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Persentase peningkatan kerjasama penyuluhan	0	0	45	0,60	60	0,81	75	2,98	80	4,00	90	6,04	90	
32	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian	0	10	25	6,96	40,00	9,40	60,00	12,10	70,00	14,75	80,00	16,00	80	
33	Program Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama yang terlatih	0	0	20	0,20	40,00	0,50	50,00	2,50	60,00	3,50	75	4,50	245	
34	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Perikanan	Persentase peningkatan prestasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan perikanan	0	15	25	0,30	40	0,45	50	0,70	60	0,80	75	1,00	75	
35	Program Pengembangan Teknologi Perikanan Tepat Guna	Meningkatnya jumlah klmpk tani dan nelayan yang dilatih	0	0	25	0,35	40	0,40	50	1,50	55	2,50	60	3,50	230	
36	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan	Persentase peningkatan prestasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan kehutanan	0	0	35	0,75	50,00	0,80	60,00	2,00	75,00	3,00	85,00	4,00	85	
37	Program Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna	Meningkatnya penyuluhan kehutanan yang mendapatkan diseminasi tek. tepat guna	0	0	20	0,10	30	0,20	45	0,50	50	0,85	55	1,00	200	
Dinas Kehutanan					1,06		1,29		1,31		1,43		1,57			

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
38	Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI	Jumlah Produksi Kayu dari HTI (Juta M3/tahun)	3,92	4,14	4,25	0,42	4,50	0,58	6,00	0,53	7,00	0,58	7,50	0,63	37,31	
39	Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan	Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan meningkat (PSDH) (Rp.M /tahun)	40,1	11,86	13,5	0,42	22,69	0,46	21,00	0,50	19,35	0,55	20,32	0,61	148,82	
40	Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu	Jumlah Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu ((m3/tahun))	30.357,27	30.357,27	113.995,67	0,23	113.995,67	0,25	113.995,67	0,28	113.995,67	0,30	113.995,67	0,33	630.692,89	
	Dinas Kelautan dan Perikanan				3,37		4,58		9,83		15,15		20,85			
41	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Penurunan Kasus Illegal Fishing dibandingkan tahun sebelumnya (%)	80	100	85	0,20	65	0,30	45	0,56	25	0,83	15	1,20	15	
42	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (ton)	84.521,26	101.452,53	121.710,61	1,38	146.052,73	1,86	175.763,27	3,50	210.315,93	5,22	252.679,11	7,30	252.679,11	
43	Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Prov. Sumatera Selatan	Jumlah Produksi Benih (ekor)	0	253.200.000	278.520.000	0,97	306.372.000	1,31	337.009.200	4,00	370.710.120	6,00	407.781.132	8,00	407.781.132	
44	Program Optimalisasi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)	Volume ekspor komoditas kelautan dan perikanan (ton)	2.352,04	1.558,00	1.589,16	0,82	1.620,94	1,11	1.653,35	1,77	1.686,41	3,10	1.720,09	4,35	1.720,09	
	Prioritas Infrastruktur dan Energi															
	Dinas PU Bina Marga				466,66		716,81		1.139,7		1.662,13		3.638,81			
45	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan terbangun dan panjang jalan ditingkatkan/dilebar kan	13,03%	16,15%	4,41%	362,98	7,59%	489,89	6,83%	808,32	21,72%	1.178,06	25,85%	1.545,71	82,55%	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	1.545,71	100%	
46	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	76,61%	81,59%	82%	64,10	84%	150,09	85%	204,38	85%	296,34	85%	331,91	80%	
47	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Jaringan Jalan dan Jembatan yang tersedia (dokumen)	13 Dokumen	19 Dokumen	6 Dokumen	37,09	6 Dokumen	71,20	6 Dokumen	117,47	6 Dokumen	170,33	6 Dokumen	190,77	49 Dokumen	
48	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia (unit)	16 Unit	18 Unit	2 Unit	2,49	4 Unit	5,63	5 Unit	9,51	5 Unit	17,40	5 Unit	24,71	39 Unit	
	Perumahan															
	Dinas PU Cipta Karya					6,92		11,73		17,28		27,01		35,91		
49	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Penanganan Drainase Permukiman	35%	45,00%	3 Kab/Kota	6,92	3 Kab/Kota	11,73	3 Kab/Kota	17,28	3 Kab/Kota	27,01	3 Kab/Kota	35,91	15 Kab/Kota	
	Penataan Ruang															
	Dinas PU Cipta Karya					28,15		46,48		32,91		42,98		58,41		
50	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen dan Arahan Penataan Ruang Kawasan sesuai dengan dokumen RTRW provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2,25	2 Dokumen	2,25	2 Dokumen	2,36	2 Dokumen	5,40	2Dokumen	10,44	10 Dokumen	
51	Program Penataan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Tertata	100%	100%	3 Unit	18,75	3 Unit	26,99	3 Unit	6,60	3 Unit	7,76	3 Unit	8,94	15 Unit	
52	Program Penataan Kawasan	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	25 kab/kota	20 kab/kota	3 Kawasan	3,20	3 Kawasan	1,80	3 Kawasan	3,87	3 Kawasan	4,26	3 Kawasan	4,69	15 Kawasan	
53	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan TPA Sampah	60,00%	70,00%	2 Kab/Kota	3,95	2 Kab/Kota	15,44	2 Kab/Kota	20,08	2 Kab/Kota	25,56	2 Kab/Kota	34,34	10 Kab/Kota	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
	Dinas PU Pengairan					2,50			3,62		5,98		8,67		9,71	
54	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah kawasan yang memiliki sistem air baku	2,00	2,00	1,00	2,50	1,00	3,62	1,00	5,98	1,00	8,67	1,00	9,71	5 Kawasan	
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					33,96			68,38		196,52		266,46		300,43	
55	Program Pengembangan LLAJ	Prosentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	28%	25%	22%	6,24	19%	10,66	15%	30,96	13%	44,90	10%	50,29	10%	
56	Program Pengembangan LLASDP	Jumlah penumpang yang terlayani melalui angkutan sungai dan danau	105 rb pnp/thn	115 rb pnp/thn	121 rb pnp/thn	14,09	127 rb pnp/thn	10,03	133 rb pnp/thn	60,45	140 rb pnp/thn	76,05	147 rb pnp/thn	85,18	147 rb pnp/thn	
57	Program Pengembangan Transportasi Udara	Meningkatnya ketertarikan penumpang pesawat udara pada SMB II ataupun kawasan barat Sumsel dan tumbuhnya penerbangan perintis antar daerah	2,7 jt pnp/thn	2,8 jt pnp/thn	2,9 jt pnp/thn	0,72	3 jt pnp/thn	5,16	3,1 jt pnp/thn	16,18	3,18 jt pnp/thn	23,46	3,2 jt pnp/thn	26,28	3,2 jt pnp/thn	
58	Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading)	Prosentase menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading)	50%	45%	40%	3,00	30%	6,64	20%	8,49	15%	12,31	10%	13,79	10%	
59	Program Pengembangan Transportasi Perkotaan	Prosentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas perkotaan, khususnya kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan unmotorized	28%	25%	22%	0,57	19%	22,19	15%	25,23	13%	29,69	10%	35,25	10%	
60	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	Jumlah penumpang melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api	0	0	48 rb pnp/thn	5,96	60 rb pnp/thn	10,30	75 rb pnp/thn	40,98	90 rb pnp/thn	59,43	100 rb pnp/thn	66,56	100 rb pnp/thn	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
61	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api	Jumlah Pengguna KA Perkotaan Palembang Metropolitan (Plg-Inderalaya)	100 rb pnp/thn	110 rb pnp/thn	120 rb pnp/thn	1,29	130 rb pnp/thn	1,24	135 rb pnp/thn	8,48	140 rb pnp/thn	12,30	145 rb pnp/thn	13,77	145 rb pnp/thn	
62	Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang laik jalan	30%	36%	40%	2,09	50%	2,16	58%	5,74	65%	8,32	70%	9,32	70%	
	Dinas Pertambangan dan Energi					7,56			4,51		14,46		11,52		21,98	
63	Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara	Meningkatnya dana bagi hasil PNBP batubara menjadi 866 miliar rupiah melalui peningkatan produksi batubara 122 juta ton pada tahun 2018	141 Miliar Rupiah; 22,4 juta ton	438 Miliar Rupiah; 84,81 juta ton	152 Miliar Rupiah; 23,13 juta ton	0,68	164 Miliar Rupiah; 23,8 juta ton	1,00	176 Miliar Rupiah; 24,5 juta ton	1,00	190 Miliar Rupiah; 25,2 juta ton	1,03	204 Miliar Rupiah; 26 juta ton	7,76	204 Miliar Rupiah; 26 juta ton	
64	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM	Persentase pemanfaatan sumber daya kegeologian	NA	NA	25%	1,03	25%	1,20	25%	2,25	25%	0,75	25%	0,75	25%	
65	Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas	Meningkatnya dana bagi hasil PNBP Migas menjadi 5,7 triliun rupiah; lifting minyak bumi 136,5 juta barel; lifting gas bumi 3 miliar MMBTU pada 2018	PNBP migas 978 Miliar rupiah; lifting minyak bumi 132,24 juta barel; lifting gas bumi 605 ribu MMBTU	PNBP migas 3,6 trilyun rupiah; 26,90 ribu barrel minyak bumi; 609 ribu MMBTU gas Bumi	1,03 triliun rupiah; 27,11 ribu barrel minyak bumi; 613 ribu MMBTU gas Bumi	0,35	1,08 triliun rupiah; 27,11 ribu barrel minyak bumi; 617 ribu MMBTU gas Bumi	0,58	1,14 triliun rupiah; 27,50 ribu barrel minyak bumi; 621 ribu MMBTU gas Bumi	0,56	1,20 triliun rupiah; 27,50 ribu barrel minyak bumi; 626 ribu MMBTU gas Bumi	0,57	1,27 triliun rupiah; 27,70 ribu barrel minyak bumi; 626 ribu MMBTU gas Bumi	0,57	1,27 triliun rupiah; 27,70 ribu barrel minyak bumi; 626 ribu MMBTU gas Bumi	
66	Program Pemanfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat	Meningkatnya KK yang mendapat aliran listrik	0	0	500 KK	5,50	500 KK	1,73	500 KK	10,65	500 KK	9,17	500 KK	12,90	500 KK	
	Prioritas Investasi dan Usaha															
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					0,35			0,35		0,35		0,35		0,35	
67	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase meningkatnya kerjasama pembangunan	70%	70%	70%	0,35	75%	0,61	80%	0,98	85%	1,67	90%	2,34	90%	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					1,55			2,31		6,73		11,75		18,63	
68	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif	0	0	0	0	200 Unit Kop	1,03	200 Unit Kop	1,79	200 Unit Kop	2,87	200 Unit Kop	4,88	200 Unit Kop	
69	Program Pengembangan System Pendukung Usaha Bagi UKM	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	1%	1%	1%	1,55	150 UKM	1,29	250 UKM	4,94	300 UKM	8,88	350 UKM	13,75	8,57	
	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah					3,63			5,17		7,75		8,44		9,23	
70	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Kerjasama Investasi	2,01	2,66	PMDN : 7,59 PMA : 9,955	2,73	PMDN : 8,349 PMA : 10,95	3,36	PMDN : 9,184 PMA : 12,05	4,79	PMDN : 10,1 PMA : 13,25	5,26	PMDN : 11,11 PMA : 14,58	5,81	PMDN : 11,11 PMA : 14,58	
71	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	1,02	1,08	189 izin dan non izin	0,90	208 izin dan non izin	1,81	229 izin dan non izin	2,96	252 izin dan non izin	3,18	277 izin dan non izin	3,42	277 izin dan non izin	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					10,71			21,49		41,03		72,90		121,50	
72	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Sumsel	3.255.378	3.274.721	3.372.962	7,81	3.474.151	13,67	3.578.375	23,87	3.685.726	40,17	3.796.297	58,04	3.796.297	
73	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	21	26	28	2,20	33	6,60	38	15,20	42	29,40	46	58,80	46	
74	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja usaha pariwisata	-	42.662	43.869	0,70	45.110	1,23	46.386	1,96	47.698	3,33	49.047	4,66	49.047	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					9,59			10,07		21,08		28,29		46,61	
	Perdagangan					3,83			4,02		4,43		5,31		6,64	
75	Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase terciptanya Konsumen Yg mandiri	90%	90%	90%	0,17	90%	0,18	90%	0,20	90%	0,24	90%	0,30	90%	
76	Program Peningkatan Iklim Usaha Perdagangan	Prosentase meningkatnya tertib Niaga dan Iklim usaha Perdagangan	-	-	20 pasar	0,04	20 pasar	0,04	20 pasar	0,04	20 pasar	0,05	20 pasar	0,06	20 pasar	
77	Program Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Perdagangan	Meningkatnya SDM terlatih	-	-	30 Orang	0,06	30 Orang	0,06	30 Orang	0,06	30 Orang	0,08	30 Orang	0,10	30 Orang	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD	
			2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
78	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Perdagangan	Meningkatnya sarana dan prasarana Perdagangan	-	1.125 Unit	123 Unit	0,38	125 Unit	0,39	125 Unit	0,43	125 Unit	0,52	125 Unit	0,65	623 unit	
79	Program Penguatan Sistem Logistik Daerah	meningkatnya monev dan penyelenggaran pasar murah	-	-	12 kali	0,37	12 kali	0,39	12 kali	0,43	12 kali	0,51	12 kali	0,64	12 kali	
80	Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Meningkatnya peserta yang mengerti PPDN	-	-	100 Orang	0,06	100 Orang	0,06	100 Orang	0,07	100 Orang	0,08	100 Orang	0,11	100 Orang	
81	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Nilai dan Volume Ekspor	4.488,2	2.779,2	2.790,15	2,57	2.858,2	2,69	2.926,25	2,96	2.994,30	3,56	3.062,35	4,45	3.062,35	
82	Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan	Jml Dokumen pembinaan dan Pengembangan Indag	25 Set	25 Set	25 Set	0,20	25 Set	0,21	25 Set	0,23	25 Set	0,28	25 Set	0,35	25 Set	
	Industri					5,76			6,04		16,65		22,98		39,97	
83	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Prosentase Peningkatan Daya Saing dan Mutu IKM	90	90	90	1,88	90	1,98	90	4,17	90	5,61	90	9,26	90	
84	Program Pengembangan Klaster Industri	Meningkatnya Klaster Industri	-	4	5	0,70	5,00	0,74	5,00	2,81	5,00	3,97	5,00	7,21	25,00	
85	Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi	Meningkatnya peserta terlatih	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0,38	60 Orang	0,40	60 Orang	2,44	60 Orang	3,52	60 Orang	6,66	300 Orang	
86	Program Pengembangan dan Pembinaan OVOP	Meningkatnya Produk OVOP	-	-	170 orang	1,80	190 orang	1,89	200 orang	4,07	210 orang	5,49	210 orang	9,11	980 Orang	
87	Program Pengembangan Industri Kreatif	Prosentase Pertumbuhan Kreatif	-	-	3%	1,00	3%	1,05	3,5%	3,16	3,5%	4,39	3,5%	7,73	3,5%	

Tabel 8.9
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Kedua Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar										Kondisi Akhir RPJMD
					2014		2015		2016		2017		2018		
			2012	2013	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	
	Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kamtibmas														
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					1,00		0,40		1,00		1,00		1,00	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Penerapan sistem perencanaan dan Penganggaran berbasis informasi (e-Palnning)	na	na	0	1,00	25	0,40	50	1,00	75	1,00	90	1,00	90
	Badan Ketahanan Pangan					4,58		5,42		18,93		11,07		12,73	
2	Program Peningkatan Pangan dan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	88,89	100	21,2	2,35	21,2	2,29	36,3	9,93	28	5,67	31	6,53	137,7
3	Program Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	90	90	62	0,75	50	1,06	21,7	3,00	24,3	1,82	27	2,10	185
4	Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rumusan Kebijakan	100	100	14,5	1,48	13,4	2,07	10,9	6,00	11,9	3,57	12,9	4,10	63,6
	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat					10,79		12,37		14,60		16,10		17,3	
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat	NA	30	0,45	3,22	50	3,51	55	5,00	65	5,50	70	6,2	70
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terhadap organisasi kemasyarakatan	NA	0,3	0,35	1,4	0,4	1,96	0,45	2,00	0,5	2,50	0,65	2,6	0,65
7	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Provinsi Sumsel		0	0,2	3,23	0,25	3,4	0,3	3,60	0,35	3,80	0,45	4	0,45

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar								Kondisi Akhir RPJMD		
			2014		2015		2016		2017		2018				
			2012	2013	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target		
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat di Sumsel		0,3	0,4	2,94	0,45	3,5	0,5	4,00	0,55	4,30	0,65	4,5	0,65
	Satuan Polisi Pamong Praja					2,18		4,62		8,98		12,49		7,5	
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase ketentraman dan kenyamanan lingkungan	0,32	0,11	0,51	0,67	0,028	0,48	0,039	4,00	0,043	7,25	0,01	1,3	0,12
10	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	0,07	0,04	0,017	0,39	0,2	2,34	0,22	3,38	0,25	3,35	0,27	3,5	0,27
11	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat	Persentase meningkatnya ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	NA	NA	0,71	1,12	0,1	1,8	0,11	1,60	0,11	1,89	0,79	2,7	0,79
	Sekretariat Daerah														
	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia					2		4,5		7,00		5,20		7,4	
12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perUU yang sesuai ketentuan yang berlaku		50%	50	2	50	4,5	55	7,00	60	5,20	65	7,4	65
	Biro Kesejahteraan Rakyat					5,75		7		9,90		10,20		12,4	
13	Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan	Persentase perumusan kebijakan di bidang keagamaan	60%	60%	60%	3,2	65%	3,5	65%	5,20	70%	5,50	70%	7	70%
14	Program Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesehatan	60%	60%	60%	1	65%	1,2	65%	2,20	70%	2,00	70%	2,5	70%
15	Program Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Persentase perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	60%	60%	60%	0,75	65%	1,2	65%	1,30	70%	1,40	70%	1,5	70%
16	Program Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga	Persentase perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemuda dan olahraga	60%	60%	60%	0,8	65%	1,1	65%	1,20	70%	1,30	70%	1,4	70%

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar								Kondisi Akhir RPJMD		
			2014		2015		2016		2017		2018				
			2012	2013	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target		
	Biro Organisasi dan Tata Laksana					1,06		1,88		4,92		4,97		6,73	
17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perumusan kebijakan penataan peraturan perundang-undangan		60%	60%	0,2	65%	0,28	65%	0,42	70%	0,48	70%	0,56	70%
18	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang dibina dan dikembangkan		60%	60%	0,86	65%	1,6	65%	4,50	70%	4,49	70%	6,17	70%
	Sekretariat DPRD					11,78		18,29		28,93		33,27		40,26	
19	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase anggota dewan yang meningkatkan kapasitasnya		60%	62	11,78	65	18,29	70	28,93	75	33,27	80	40,26	80
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					11,275		6,631		8,550		9,410		10,354	
20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WDP	WDP	WTP	10,41	WTP	5,49	WTP	7,97	WTP	8,77	WTP	9,65	WTP
21	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.	Persentase Raperda APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu	100	100	100	0,815	100	1,141	100	0,58	100	0,64	100	0,704	100
22	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terselesaikannya kasus TP/TGR di Pemerintahan Prov. Sumsel	100	100	100	0,05	100	0	100	-	100	-	100	0	100
	Inspektorat					2,63		8		9,40		10,00		14,5	
23	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		70%	0,7	2,63	70%	8	70 %	9,40	75%	10,00	80%	14,5	80

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar								Kondisi Akhir RPJMD	
			2014		2015		2016		2017		2018			
			2012	2013	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	
	Badan Penelitian & Pengemb. Inovasi Daerah				0,2		0,6		1,00		1,30		2,5	
24	Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Teknologi Bidang Sosial Kemasyarakatan yang Dimanfaatkan	0	0	1	0,2	2	0,6	2	1,00	2	1,30	2	2,5
	Sekretariat KORPRI				1,57		2,19		3,31		3,79		4,36	
25	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	Presentase PNS mengikuti pelatihan kewirausahaan		40%	0,4	0,25	40%	0,35	50%	0,53	60%	0,60	60	0,69
26	Program Penguatan Organisasi KORPRI	Presentase penguatan organisasi KORPRI		60%	60	0,13	60	0,18	60	0,27	65	0,31	75	0,36
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI	Percentase kegiatan meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota KORPRI		40%	0,4	0,7	60%	0,98	70%	1,48	0,75	1,70	80%	1,95
28	Program Pembinaan dan PeMasyarakat Olahraga dan Kesehatan Jasmani Bagi PNS/Anggota KORPRI	Percentase PNS/anggota KORPRI AKTIF dalam berolahraga		30%	30	0,49	40%	0,68	50	1,03	60	1,18	70	1,36
	Badan Kepegawaian Daerah				1,67		3		7,00		4,00		8,3	
29	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Percentase Pelanggaran Disiplin PNS Prov. Sumsel	na	30%	20%	0,42	12%	3	9%	4,00	6%	4,00	3%	4,5
30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Percentase Pelayanan Informasi Data Kepegawaian Bebrbasis Web		70%	70%	1,25	70%	1,70	75%	3,00	75%	2,50	80%	3,8
	Dinas Pendapatan Daerah				na		na		7,18		8,26		11,5	
31	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah	na	na	na	na	na	15,56	7,18	16,39	8,26	17,19	11,5	17,19
	Badan Pendidikan dan Pelatihan				12,2		13,9		25,00		20,70		20,9	
32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Percentase aparatur profesional yang berkompetensi	na	75%	80%	12,2	80%	13,9	85%	25,00	85%	20,70	90%	20,9

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar										Kondisi Akhir RPJMD	
					2014		2015		2016		2017		2018			
			2012	2013	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar		
	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pem. Desa				2		1,8		3,00		3,50		4			
33	Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat	na	na	5,00%	2	5,50%	1,8	6,00%	3,00	6,50%	3,50	7,00%	4	7,00%	
	Badan Arsip Daerah				1,07		1,49		2,24		2,57		2,96			
34	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	NA	30%	30%	0,5	40%	0,7	60%	1,05	80%	1,21	100%	1,39	100%	
35	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi	Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi	NA	30%	30%	0,57	40%	0,79	55%	1,19	80%	1,36	100%	1,57	100%	
	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah				1,19		1,66		2,25		2,78		3,47			
36	Program Penguatan Kelembagaan KPID	Angka melek media		1600	1900	0,45	2400	0,63	2900	0,95	3400	1,20	5000	1,5	5000	
37	Program Pengawasan Isi siaran	Jumlah lembaga Penyiaran yg dimonitoring	na	3	95	0,5	106	0,7	115	0,90	117	1,10	159	1,3	159	
38	Program Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran	Jumlah rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan KPID untuk proses penerbitan izin penyelenggaraan	na	35	54	0,24	85	0,33	100	0,40	120	0,48	178	0,67	178	
	Dishubkominfo				14,80		18,28		41,46		60,12		67,34			
39	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase penyebarluasan informasi melalui kerjasama dengan media	40%	45%	50%	5,59	60%	8,20	65%	15,46	70%	22,41	75%	25,10	75%	
40	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Persentase desa terlayani fasilitas teknologi, komunikasi dan informatika di wilayah Sumsel	30%	35%	40%	0,77	45%	1,68	50%	3,83	55%	5,55	60%	6,22	60%	
41	Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi	Persentase pelayanan informasi online berbasis ICT yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel	50%	76%	80%	8,44	84%	8,40	87%	22,18	89%	32,16	94%	36,02	94%	

Tabel 8.10
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Ketiga Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar										Kondisi Akhir RPJMD	
			2014		2015		2016		2017		2018					
			2012	2013	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
	Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya					196,76		294,37		310,17		548,68		675,70		
	Dinas Pendidikan					24,27		32,55		36,80		48,75		53,11		
1	Program Pendidikan Non Formal	% Angka Melek Huruf	97,78%	98%	9,00	98,24%	9,80	98,41%	10,20	99,01%	11,00	99,10%	11,50	99,10%		
2	Program Pendidikan Luar Biasa	Prosentase Sekolah menerapkan Pendidikan Inklusi	na	30%	2,64	35,00%	3,17	39%	4,6	45%	5,75	51%	6,61	51%		
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KePendidikan	Prosentase Guru Berkualifikasi S1	61.78%	70%	7,16	78%	7	84%	8	91%	14	100%	15	100		
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah SOP/SPM	na	na	5,47	2 SOP	12,58	3 SOP	14	4 SOP	18	6 SOP	20	6 SOP		
	Dinas Kesehatan				115,38		174,36		162,59		360,00		463,52			
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	52	51	4,84	50	5,81	49	8,42	48	10,52	47	12,1	47		
6	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS terakreditasi	0%	5%	0,37	10%	0,45	15%	0,65	20%	0,81	25%	0,93	25		
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata	Persentase masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	15%	15%	108,88	15%	164,25	15%	148,17	15%	342,26	15%	442,76	15%		
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS JIWA/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase rumah sakit yang memenuhi standar			87%	0,13	89%	0,16	91%	0,23	93%	0,29	95%	0,33	95	
9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSTIA	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	55%	55%	0,28	60%	0,33	70%	0,48	80%	0,6	90%	0,69	90		
10	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi persyaratan kesehatan	43,20%	55%	0,88	70%	1,06	80%	1,54	90%	1,92	100%	2,21	100		
11	Program Penanganan Keluarga Berencana	Presentase Cakupan KB pada PUS	56,60%	56,50%	0	60%	1,1	64,00%	1,2	68%	1,5	70%	2	70%		
		TFR	2,28%	2,26%	0	2,20%	0,5	2,15%	1,1	2%	1,2	2%	1,5	2		
		Unmet need	8,10%	8,00%	0	7,5%	0,7	6%	0,8	6%	0,9	5%	1	5		

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar								Kondisi Akhir RPJMD	
			2014		2015		2016		2017		2018			
			2012	2013	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	
	RS. Dr. Eraldi Bahar					9,69		9,37		11,7		15,7		17,36 100%
12	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit		100%	100%	9,29	100%	8,89	100%	11	100%	14,83	100%	16,36 100
13	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara		100%	100%	0,4	100%	0,48	100%	0,7	100%	0,87	100%	1 100
	Badan Pemberdayaan Perempuan					3,51		6,60		9,60		11,98		13,78 0,35
14	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		1,50%	1,50%	1,17	1,5%	3,8	1,50%	5,52	2%	6,89	2%	7,93 2
15	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak		25%	25%	0,35	30%	0,41	30%	0,6	35%	0,75	35%	0,86 35
16	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		1,50%	1,50%	1,39	1,50%	1,67	2%	2,43	2%	3,03	2%	3,49 2
17	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan	Persentase peningkatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		80%	80%	0,31	85%	0,37	85%	0,54	90%	0,67	90%	0,77 90
18	Program Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan Anak	Persentase peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak		20%	20%	0,29	25%	0,35	25%	0,51	30%	0,64	30%	0,73 30
	Dinas Sosial					6,37		14,90		18,79		25,68		29,40
19	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya jumlah fakir dan miskin dan KAT yang mendapat bantuan		2.509 KK	5.840 KK	3,2	6.040 KK	7	6.240 KK	8,2	6.440 KK	11,5	6.640 KK	12,2 53.245 org
20	Program Pelayanan, Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan		2.480 org	2.523 org	1,67	3.070 org	4,4	3.425 org	5,29	3.780 org	7,98	4.135 org	9,8 4.135

No	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar										Kondisi Akhir RPJMD	
			2014		2015		2016		2017		2018					
			2012	2013	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan		25.691 org	25.691 org	1,5	42.120 org	3,5	42.445 org	5,3	47.695 org	6,2	53.245 org	7,4	53.245 org	
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi					4,42		7,69		11,15		13,93		16,03	0,7	
22	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK	Prosentase meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang telah dilatih	40%	45%	60%	0,64	63%	1,96	65%	2,85	75%	3,56	80%	4,09	100 KK	
23	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yang diserap pasar kerja	57,69%	65,57%	65%	2	65%	2,4	70%	3,47	70%	4,34	70%	4,99	70	
24	Program Transmigrasi Lokal	Meningkatnya transmigrasi lokal yang ditempatkan	25 KK	-	-	0,09	25 KK	0,1	25 KK	0,15	25 KK	0,18	25 KK	0,21	1705 dan 2 (dua) lokasi	
25	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat , serta terlaksananya pengawasan pelaksanaan aturan dibidang ketenagakerjaan	65%	65%	70%	0,94	70%	1,13	70%	1,63	70%	2,04	70%	2,35	70	
26	Program Pengembangan Transmigrasi Sum Sel	Jumlah KK transmigrasi yang memperoleh bantuan usaha produktif dan jumlah lokasi KTM untuk peningkatan sarana prasarana	791 dan 2 (dua) lokasi		1690 dan 2 (dua) lokasi	0,75	1690 dan 2 (dua) lokasi	2,1	1695 dan 2 (dua) lokasi	3,05	1700 dan 2 (dua) lokasi	3,81	1705 dan 2 (dua) lokasi	4,39	1705 dan 2 (dua) lokasi	
	Dinas Pemuda dan Olah Raga					15,04		23,88		27,67		32,86		36,64	1100 org	
27	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya pemuda dan organisasi kepemudaan yang difasilitasi		3097 org/ 15 OKP	2421 org/ 15 OKP	3,32	3637 org/ 17 OKP	5,02	5388 org/ 18 OKP	6,02	5388 org/ 19 OKP	7,28	5388 org/ 20 OKP	8,97	11435 org/ 7 cabor	
28	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatnya fasilitasi kejuaraan cabang olahraga			150 org	0,65	500 org	0,78	700 org	1,13	900 org	1,41	1100 org	1,62	50 ponpes/ 150 klub/krg taruna	
29	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi atlet dan pemasarakatan olahraga		5328 org/ 7 cabor	8775 org/ 7 cabor	4,84	10435 org/ 7 cabor	8,21	11785 org/ 7 cabor	9,40	10445 org/ 7 cabor	11,48	11435 org/ 7 cabor	12,11	4530 org	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar										Kondisi Akhir RPJMD	
			2014		2015		2016		2017		2018					
			2012	2013	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga		40 ponpes/ 21 cabor	50 ponpes/ 150 klub/krg taruna	4,29	50 ponpes/ 150 klub/krg taruna	7,55	50 ponpes/ 150 klub/krg taruna	8,55	50 ponpes/ 150 klub/krg taruna	9,69	50 ponpes/ 150 klub/krg taruna	10,74	50 ponpes/ 150 klub/krg taruna	
31	Program Kependidikan / Kepramukaan	Meningkatnya anggota pramuka yang difasilitasi		3300 org	3300 org	1,94	4300 org	2,32	4530 org	2,57	4530 org	3,00	4530 org	3,20	4530 org	
	Badan Perpustakaan Daerah					6,75		8,10		10,75		14,69		16,89		
32	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan minat baca masyarakat dan jumlah perpustakaan yang terbitna		40%	50%	6,75	65%	8,1	70%	10,75	75%	14,69	80%	16,89	80%	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					4,15		6,18		8,96		11,20		12,88	400	
33	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya jumlah Sanggar Seni Yang Berkembang (Sanggar)	90	100	210	1,35	220	2,82	230	4,09	240	5,11	250	5,88	250	
34	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya jumlah situs dan tempat bersejarah	90,51	395	200	0,43	250	0,51	300	0,74	350	0,92	400	1,06	400	
35	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Sanggar Seni Yang Berkembang (Sanggar)	90	100	210	1,30	220	1,56	230	2,26	240	2,83	250	3,25	250	
36	Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya Sumsel	Meningkatnya Situs dan Tempat Bersejarah	90,51	395	200	1,08	250	1,29	300	1,87	350	2,34	400	2,69	400	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa					2,91		5,80		6,65		7,00		7,50		
37	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat		5%	5%	2,91	5,5%	5,8	6%	6,65	6,5%	7	7%	7,5	7%	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					4,27		4,94		5,51		6,89		8,59		
38	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		70%	70%	3,47	75%	3,54	80%	3,61	85%	3,69	90%	3,69	90%	
39	Program Perencanaan Pembangunan Sosial	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan bidang sosial budaya		70%	70%	0,80	70%	1,40	75%	1,90	78%	3,20	80%	4,90	80%	

			Kondisi Kinerja Pada Awal	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar										Kondisi Akhir RPJMD	
				2015		2016		2017		2018					
				Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target		
	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan			373,13		483,88		602,80		837,40		1.060,51			
	Dinas Pendidikan			154,36		170,86		175,86		186,86		190,86			
40	Program Pendidikan Anak Usia Dini	%APK	54,68%	58%	2,16	66%	8,06	72 %	8,06	76 %	8,06	90 %	8,06	86,22%	
41	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	%APK SMP	86,62%	89,65%	14,2	90,11%	16,8	93,86%	16,8	95,71%	16,8	100%	16,8	100%	
42	Program Pendidikan Menengah	%APK	69%	72,11%	138	75,19%	146	78,61%	151	83,55%	162	86,22%	166	86,22%	
	Dinas Kesehatan			33,02		39,635		57,47		71,84		82,61	0,8		
43	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	87%	90%	9,77	93%	11,73	96%	17,01	98%	21,26	100%	24,45	100%	
44	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat	62,60%	70%	3,46	73%	4,16	76%	6,02	78%	7,53	80%	8,66	80%	
45	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase industry rumah tangga (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi persyaratan kesehatan	43,20%	55%	0,17	70%	0,2	80%	0,29	90%	0,37	100%	0,42	100%	
46	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	86,70%	87%	10,85	88%	13,02	88,50%	18,88	89%	23,6	90%	27,14	90%	
47	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0,14%	<1	2,94	<1	3,52	<1	5,11	<1	6,38	<1	7,34	<1	
48	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Lingkungan sehat	64,70%	67,70%	1,06	70,80%	1,27	73,90%	1,85	76,40%	2,31	80%	2,65	1	
49	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan komprehensif	100%	100%	0,33	100%	0,4	100%	0,58	100%	0,72	100%	0,83	1	
50	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat Sumsel yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	2,86	100%	3,44	100%	4,98	100%	6,23	100%	7,16	100%	
51	Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak	Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten	93,10%	94%	1,58	95%	1,9	98%	2,75	99%	3,44	100%	3,96	100%	
	Dinas Pemuda dan Olah Raga			1,02		1,22		1,78		2,22		2,55			
52	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh pemuda	-	40 org	0,32	40 org	0,38	40 org	0,56	50 org	0,7	50 org	0,8	50 org	

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar										Kondisi Akhir RPJMD	
			2014		2015		2016		2017		2018					
			2012	2013	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar		
53	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS	tertanganiinya pengguna narkoba dan ODHA (Orang dengan HIV-AIDS)			1000 org	0,7	2700 org	0,84	2700 org	1,22	2700 org	1,52	2700 org	1,75	2700 org	
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi					2,00			2,40		3,47		4,34		4,99	
54	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yang diserap pasar kerja	57,96%	65,57%	65%	2,00	65%	2,40	70%	3,47	70%	4,34	70%	4,99	70%	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					2,84			21,01		23,04		40,05		59,29	
55	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	0	0	150 UKM	0	400 UKM	5,55	700 UKM	5,71	1.050 UKM	9,34	1500 UKM	13,38	1500 UKM	
56	Program Perkuatan Permodalan UMKMK	Meningkatnya permodalan Koperasi (Rp. Juta)	1.715.908	1.692.789	1.726.645	0,625	1.760.501	4,78	1.794.357	4,94	1.828.213	8,88	1.862.069	13,75	1.862.069	
57	Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK	Meningkatnya volume Usaha (Rp.Juta)	2.638.338	2.688.467	2.742.236	0,625	2.796.005	3,28	2.849.775	3,69	2.903.544	6,72	2.957.313	10,30	2.957.313	
58	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya jumlah UMKM	1.984.121 UMKM	2.002.836 UMKM	2.031.787 UMKM	0,612	2.066.420 UMKM	3,42	2.095.350 UMKM	3,74	2.128.876 UMKM	6,18	2.166.132 UMKM	8,00	2.166.132 UMKM	
59	Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK	Meningkatnya omset UKM (Rp. Miliar)	24.700,542	24.720.838	24.968.046	0,982	25.217.727	3,98	25.469.904	4,96	25.724,60	8,93	25.981,85	13,86	25.981,85	
	Dinas PU Cipta Karya					89,22			123,05		153,12		255,04		378,67	
60	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Akses Pelayanan Air Minum	42,84%	54,26%	61,56%	58,32	70%	71,85	72,31%	87,64	75,92%	96,27	79,71%	103,89	79,71%	
61	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah Kawasan Agropolitan yang Tertangi	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	30,90	2 Kawasan	51,20	2 Kawasan	65,48	2 Kawasan	158,77	2 Kawasan	274,78	2 Kawasan	
	Dinas PU PENGAIRAN					33,45			45,16		72,26		126,46		177,04	
62	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Luas area pertanian yang diairi irigasi,sistem tata air rawa dan jaringan pengairan lainnya	169,38 Ha	217,3 Ha	12500 Ha	33,45	12500 Ha	45,16	12500 Ha	72,26	12500 Ha	126,46	12500 Ha	177,04	12500 Ha	
	Dinas Pertanian, TPH					15,92			15,92		15,92		15,92		15,92	
63	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Luas lahan yang dapat diairi (Ha)		200	600		600		600		400		200			
		- JITUT		100	300		300		300		200		100		1.200	
		- JIDES		100	300		300		300		200		100		1.200	
		Luas areal tanaman peningkatan IP	740	1.600	650		800		5.500		6.000		6.500		19.450	
		Jumlah sarana Alsintan (Unit)														
		- Hand traktor	500	510	356		231		350		350		350		1.637	
		- Pompa Air 3 inchi	356	220	153		100		150		150		150		703	
		- Pompa Air 4 inchi			15		-		17		17		17		66	
		Tersedianya Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)	-	12	15		15		17		17		17		81	

No	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar										Kondisi Akhir RPJMD	
			2014		2015		2016		2017		2018					
			2012	2013	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar	Target	Rp.Milyar		
	Dinas Perkebunan				19,45		34,90		62,25		90,00		95,55			
64	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertahun (Ton)	3.561.990	3.585.390	3.632.100	19,45	3.665.500	34,90	3.707.800	62,25	3.751.000	90,00	3.796.000	95,55	3.796.000	
	Dinas Kelautan dan Perikanan				17,16		23,17		27,80		33,36		40,03		96678,3	
65	Program Pengembangan Perikanan budaya	Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya (ton)	404.922	435.000	478.500	6,90	526.350	9,32	578.985	11,18	636.884	13,42	700.572	16,10	700.572	
66	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap (ton)	95.528,50	95.717,30	95.908,70	10,26	96.100,50	13,85	96.292,70	16,62	96.485,40	19,94	96.678,30	23,93	96.678,30	
	Badan Ketahanan Pangan				4,68		6,55		9,83		11,31		13,00			
67	Program Peningkatan Sistem DistrIbusi dan Stabilitas Harga Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	93,3	100,46	23,00	0,26	27,00	0,36	92,00	0,54	10,00	0,63	11,2	0,72	163,2	
68	Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	73,03	88,91	34,3	4,42	35,3	6,19	64,8	9,29	74,8	10,68	82,5	12,28	291,7	

Tabel 8.11
Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Misi Keempat Berdasarkan SKPD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar								Kondisi Akhir RPJMD	
			2014		2015		2016		2017		2018			
			2012	2013	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	
	Prioritas Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana													
	Dinas Kehutanan					5,03		5,67		6,27		6,32		23,79
1	Program Pengukuhan Kawasan Hutan	Jumlah Identifikasi/Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan (lokasi/tahun)	1	1	16	0,235	16	0,259	10	0,250	10	0,275	8	0,500
2	Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH	Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang dibentuk (unit)	7	11	2	0,17	2	0,18	3	0,20	3	0,22	3	0,40
3	Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi	Luasan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi (Ha/Tahun)	4	3	156.281	0,480	338.964	0,700	657.114	0,900	473.972	0,500	473.972	0,600
4	Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan Terpadu DAS Musi (kegiatan/tahun ; unit/tahun)	4	4	5	1,122	5	1,234	5	1,358	5	1,500	5	1,650
5	Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan	Luas Rehabilitasi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan (Ha/Tahun)	100	200	270	1,69	270	1,86	270	2,00	270	2,10	1.000	10,00
6	Program Penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan	Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan(ha/tahun ; ton CO2-eq/tahun)	0	3.544	5.765	0,850	7.397	0,935	6.504	1,030	5.488	1,140	10.178	10,000
7	Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK	Jumlah Peningkatan, Penyerapan dan Penyimpanan Karbon Hutan (ton CO2/tahun)	3	3	4	0,294	3	0,295	3	0,300	3	0,330	3	0,360
8	Program Peningkatan Target Penanaman Hutan	Jumlah Peningkatan, Penyerapan dan Penyimpanan Karbon Hutan (ton CO2/tahun)	91.472,92	102.701,02	70.000	0,190	75.000	0,209	80.000	0,230	80.000	0,253	80.000	0,280
	Dinas PU Pengairan					46,46		64,91		91,63		130,43		208,75
9	Program Pengendalian Banjir	Jumlah kawasan Banjir yang ditangani	18	18	6	43,62	6	61,07	5	85,49	5	119,69	3	193,71
10	Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong	Jumlah kawasan bantaran sungai yang ditangani	15	15	4	2,84	4	3,84	5	6,14	6	10,74	8	15,04
	Badan Lingkungan Hidup					8,37		15,78		19,37		23,63		41,46

NO	Urusan, SKPD dan Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar										Kondisi Akhir RPJMD
					2014		2015		2016		2017		2018		
			2012	2013	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	Target	Rp.Miliar	
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Laju Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,59	61,41	58,86	7,023	56,55	8,892	53,77	9,730	51,23	10,129	48,90	20,559	48,90
12	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH	19.000 Orang	20.000 Orang	1000 Orang	1,35	1000 org	6,89	1000 org	9,64	1000 org	13,50	1000 org	20,90	25000 orang
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				0,000		9,970		16,920		23,650		26,710		26,850
13	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Penurunan Resiko Akibat Bencana	40 buah buku (Rp. 280.000.000)	1 paket brosur, leaflet dan poster bencana (Rp. 50.000.000)	1 paket	0,93	1 paket	2,140	1 paket	3,100	1 paket	3,130	1 paket	2,850	12,150
14	Program Tanggap Darurat Bencana	Terbantunya Korban Bencana Alam	149 Org, 1 Keg, 1 Paket (Rp. 428.800.000)	5 keg, 15 hari, 45 paket dan 12 kab/kota (Rp. 2.695.800.000)	5 kagiatan	4,820	5 kegiatan	8,380	5 kegiatan	12,800	5 kegiatan	15,230	5 kegiatan	13,850	59,850
15	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya Pembangunan dan Penanganan Pasca Bencana	3 Keg (Rp. 120.000.000)	14 kab/kota (Rp. 300.000.000)	14 kab/kota	3,150	17 kab/kota	4,620	17 kab/kota	5,550	17 kab/kota	5,870	17 kab/kota	7,500	27,190
16	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Teratasinya Penanganan Resiko Akibat Bencana	3 Keg, 12 bulan (Rp. 257.360.000)	700 org, 14 kab/kota (Rp. 1.300.000.000)	14 kab/kota	0,97	17 kab/kota	1,530	17 kab/kota	1,850	17 kab/kota	1,980	17 kab/kota	2,050	13,150
17	Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Korban Bencana Yang Berobat	4 Keg (Rp. 36.000.000)	-	150 orang	0,10	200 orang	0,25	250 orang	0,35	300 orang	0,50	350 orang	0,60	1,800
	Prioritas Pengembangan Wilayah														
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					1,80		2,51		3,52		6,00		10,35	
18	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Perencanaan Penataan Ruang	20	20	20,00	1,795	40,00	2,51	60,00	3,52	80,00	6,00	100,00	7,90	100
19	Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase peningkatan Pemanfaatan Ruang		0	50	-	60	-	75	0,3	90	0,4	100	2,45	100
20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			50		60		75		90		100		100
	Biro Pemerintahan					3,57		2,48		5,12		14,07		19,30	
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase terfasilitasinya DOB	100	100	100	3,57	100	2,48	100	5,12	100	14,07	100	19,30	100
	Biro Otonomi dan Kerjasama					0,28		0,39		0,58		1,00		2,76	
22	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase tertatanya DOB	100	100	100	0,28	100	0,39	100	0,58	100	1,00	100	2,76	100

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dengan memperhatikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai selama periode 2013-2018, maka tahapan pembangunan dan penetapan indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

9.1 Tahapan Pembangunan

Tahun 2013 merupakan penyiapan atau pra-kondisi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan stabil. Dengan landasan tersebut, pelaksanaan strategi, kebijakan dan program pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 meliputi lima (5) tahap pembangunan.

9.1.1 Tahap Konsolidasi: Penegasan Komitmen (2014)

Tahap pembangunan 2014 merupakan tahap pembangunan untuk menjaga, meneruskan dan melanjutkan capaian RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013. Selain itu, tahap pembangunan ini juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Tahap pembangunan 2014 terutama diarahkan tercapainya hal-hal berikut:

- 1) Meningkatnya mutu sumber daya manusia dengan memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja;
- 3) Tersedianya prasarana dasar seperti jalan, air bersih dan permukiman;
- 4) Terbangunnya infrastruktur strategis terutama pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api;
- 5) Terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- 6) Berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, dan pertambangan sebagai utama peningkatan nilai tambah, pencapaian masyarakat dan pendapatan daerah;
- 7) Tertatanya kawasan pertambangan dan pengelolaan hasil tambang;

- 8) Tertatanya dan berkembangnya tempat-tempat wisata daerah;
- 9) Berkembangnya pusat-pusat inovasi dan pengembangan daerah;
- 10) Terbangunnya perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi (*e-planning*).

9.1.2 Tahap Penguatan: Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Hasil Pertanian, dan Pariwisata (Hilirisasi) (2015)

Tahap pembangunan 2015 merupakan tahapan untuk mendorong transformasi Provinsi Sumatera Selatan melalui peningkatan peran industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian dan pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan. Tahap pembangunan ini mengutamakan peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata; pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan; pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan infrastruktur lainnya untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api; pembangunan prasarana dan sarana termasuk transportasi untuk mendukung pariwisata; serta pemberdayaan dan penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM).

Tahap pembangunan 2015 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dan tidak berbelit-belit;
- (2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
- (3) Meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat sinergi antarSKPD, antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota dan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah, serta kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan swasta;
- (4) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan;
- (5) Terbangunnya infrastruktur strategis pendukung KEK TAA;
- (6) Terbangunnya prasarana pendukung pengembangan pariwisata;
- (7) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) terutama dengan meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- (8) Berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi, masyarakat dan swasta;
- (9) Tertatanya proses inovasi teknologi berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

9.1.3 Tahap Penguatan dan Percepatan: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis (2016)

Tahap pembangunan 2016 menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan infrastruktur lainnya untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api; pemantapan hilirisasi industri pengolah hasil dan pertanian dan pertambangan; pengembangan pariwisata berstandar internasional. Selain itu, tahap ini tetap mengutamakan peningkatan mutu sumber daya manusia, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, serta percepatan pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal.

Tahap pembangunan 2016 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya mutu sumber daya manusia;
- (2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- (3) Terbangunnya infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api
- (4) Terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- (5) Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- (6) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan;
- (7) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- (8) Berkembangnya pusat-pusat inovasi dan bisnis inovatif dalam menghasilkan keunggulan daerah;
- (9) Meningkatnya kerjasama riset unggulan.

9.1.4 Tahap Pemantapan: Percepatan dan Perluasan Hilirisasi Industri, dan Pengembangan Pariwisata Berstandar Internasional (2017)

Tahap pembangunan 2017 merupakan percepatan (akselerasi) dan perluasan hilirisasi industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan dengan didukung oleh pemantapan Kawasan Ekonomi khusus Tanjung Api-Api, pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM);

dan pengembangan pariwisata berstandar internasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Tahap pembangunan 2017 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya standar pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai standar nasional dan ASEAN;
- (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- (3) Terbangunnya dan tertatanya jaringan infrastruktur strategis pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api;
- (4) Terbangunnya dan tertatanya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur pariwisata;
- (5) Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan;
- (6) Berkembangnya kawasan/klaster industri sebagai simpul industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan;
- (7) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- (8) Meningkatnya mutu jasa pariwisata sesuai dengan standar nasional dan ASEAN;
- (9) Meningkatnya nilai tambah dan perdagangan komoditas unggulan dari hasil pengembangan pusat-pusat inovasi;
- (10) Berkembangnya kerjasama riset unggulan sesuai standar nasional dan ASEAN.

9.1.5 Tahap Perwujudan: Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional (2018)

Tahap pembangunan 2018 merupakan tahapan untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing Internasional yang berkelanjutan. Pada tahap pembangunan ini Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi salah satu pusat pendidikan dan kesehatan, pusat agribisnis dan agroindustri, dan pusat pariwisata yang maju dan berkembang di ASEAN.

Tahap pembangunan 2018 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya standar pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai standar nasional dan ASEAN;
- (2) Tercapainya target pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

- (3) Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api sebagai kawasan/klaster dan simpul industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan, dan perdagangan internasional;
- (4) Tercapainya kemandirian pangan daerah;
- (5) Terbangunnya industri olahraga dan jasa parwisata yang bermutu sesuai dengan standar internasional;
- (6) Berkembangnya pusat inovasi dan *technopark* sesuai standar nasional dan ASEAN.

9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian.

9.2.1 Indikator Makro Daerah

Indikator makro daerah merupakan indikator ekonomi dan sosial yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018).

Tabel 9. 1

Indikator Makro Daerah
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PDRB Harga Berlaku	Rp.Miliar	232,30	257,40	267,25	277,11	286,96	296,81
2	PDRB Harga Konstan 2000	Rp.Miliar	77.994	82.674	87.634	93.111	99.163	106.105
4	Pendapatan Per Kapita atas dasar harga konstan 2000	Rp. 000	9.987	10.440	10.913	11.435	12.010	12.673
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	7,00
6	Inflasi	Persen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Pendapatan Daerah	Rp.Miliar	5.165,75	6.323,54	7.364,81	8.630,71	10.173,51	12.058,71
	• Pendapatan Asli Daerah	Rp.Miliar	2.214,42	2.482,13	2.788,59	3.161,96	3.618,16	4.177,69
	• Dana Perimbangan	Rp.Miliar	2.951,33	3.841,41	4.576,22	5.468,75	6.555,35	7.881,01
	• Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.Miliar	813,34	813,34	821,47	829,68	837,98	846,36

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
8	Investasi:							
	Nilai Investasi PMDN	Rp.Miliar	6.900	7.590	8.349	9.184	10.100	11.110
	Nilai Investasi PMA	Rp.Miliar	9.050	9.955	10.950	12.050	13.250	14.580
9	Jumlah Penduduk	Ribu jiwa	7.809,53	7.919,06	8.030,13	8.142,77	8.257,00	8.372,84
10	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
11	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,66	13,37	13,24	12,75	12,27	11,78
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,49	4,86	4,27	3,63	2,92	2,06
13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,99	74,29	74,60	74,90	75,20	75,51
14	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,30	70,50	70,70	70,90	80,10	80,30

9.2.2 Indikator Pembangunan Kabupaten/Kota

Indikator pembangunan kabupaten/kota merupakan indikator sosial dan ekonomi yang akan dicapai oleh kabupaten/kota melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018). Penetapan indikator kinerja pembangunan kabupaten/kota dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antarSKPD Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antarkabupaten/kota.

Tabel 9. 2

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ogan Komering Ulu	7,31	7,32	7,32	7,33	7,33	7,34
2	Ogan Komering Ilir	6,57	6,58	6,58	6,59	6,59	6,60
3	Muara Enim	5,42	5,44	5,44	5,46	5,46	5,50
4	Lahat	6,09	6,09	6,10	6,20	6,20	6,40
5	Musi Rawas	5,59	5,61	5,61	5,63	5,63	5,66
6	Musi Banyuasin	3,31	3,31	3,33	3,33	3,33	3,35
7	Banyuasin	6,25	6,26	6,27	6,28	6,30	6,32
8	OKU Selatan	7,31	7,33	7,34	7,35	7,37	7,40
9	OKU Timur	7,18	7,19	7,20	7,21	7,23	7,30
10	Ogan Ilir	7,00	7,15	7,19	7,22	7,24	7,27

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	Empat Lawang	6,22	6,24	6,26	6,34	6,39	6,45
12	Palembang	8,70	8,73	8,76	8,81	8,89	9,01
13	Prabumulih	5,70	5,72	5,75	5,77	5,80	5,90
14	Pagaralam	6,35	6,36	6,36	6,38	6,40	6,41
15	Lubuk Linggau	6,54	6,55	6,58	6,60	6,62	6,64
16	Penukal Abab Lematang Ilir						
17	Musi Rawas Utara						
18	Sumatera Selatan	6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	7,00

Tabel 9. 3

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Percentase Kemiskinan					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ogan Komering Ulu	11,19	10,83	10,56	10,29	10,03	9,78
2	Ogan Komering Ilir	14,53	13,81	13,07	12,37	11,71	11,08
3	Muara Enim	13,21	12,89	12,52	12,15	11,80	11,46
4	Lahat	17,45	16,86	16,29	15,74	15,20	14,68
5	Musi Rawas	17,67	17,20	16,71	16,24	15,78	15,33
6	Musi Banyuasin	18,29	17,82	17,45	17,09	16,73	16,38
7	Banyuasin	11,27	10,84	10,39	9,95	9,53	9,13
8	OKU Selatan	10,49	10,14	9,65	9,19	8,75	8,33
9	OKU Timur	8,98	8,71	8,46	8,21	7,98	7,75
10	Ogan Ilir	12,79	12,26	11,74	11,25	10,77	10,32
11	Empat Lawang	13,36	13,10	12,63	12,17	11,72	11,30
12	Palembang	13,59	13,06	12,44	11,84	11,27	10,73
13	Prabumulih	11,71	11,30	10,90	10,52	10,15	9,79
14	Pagaralam	9,00	8,59	8,17	7,78	7,41	7,05
15	Lubuk Linggau	13,88	13,64	13,36	13,08	12,81	12,55
16	Penukal Abab Lematang Ilir						
17	Musi Rawas Utara						
18	Sumatera Selatan	13,66	13,37	13,24	12,75	12,27	11,78

Tabel 9. 4

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Percentase Pengangguran Terbuka					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ogan Komering Ulu	5,40	5,01	4,61	4,21	3,80	3,39
2	Ogan Komering Ilir	10,95	8,37	8,74	8,52	8,25	7,94
3	Muara Enim	4,59	4,17	3,87	3,37	2,78	2,10
4	Lahat	4,46	4,20	4,14	3,98	3,72	3,41
5	Musi Rawas	1,78	1,84	1,92	1,85	1,79	1,53
6	Musi Banyuasin	6,39	5,97	5,37	4,81	4,15	3,47
7	Banyuasin	5,17	5,13	5,02	4,85	4,57	4,24

8	OKU Selatan	2,81	2,79	2,69	2,50	2,22	1,93
9	OKU Timur	2,62	2,64	2,45	2,29	2,08	1,82
10	Ogan Ilir	5,86	5,40	4,89	4,33	3,81	3,09
11	Empat Lawang	2,87	2,85	2,83	2,78	2,68	2,54
12	Palembang	10,06	10,02	9,75	9,53	9,25	8,93
13	Prabumulih	8,83	8,62	8,15	7,72	7,22	6,67
14	Pagaralam	3,91	4,03	3,97	3,95	3,87	3,76
15	Lubuk Linggau	6,85	6,34	5,47	4,66	4,75	4,66
16	Penukal Abab Lematang Ilir						
17	Musi Rawas Utara						
18	Sumatera Selatan	5,49	4,86	4,27	3,63	2,92	2,06

Tabel 9. 5

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ogan Komering Ulu	74,01	74,32	74,64	74,95	75,26	75,58
2	Ogan Komering Ilir	71,45	71,73	72,00	72,28	72,55	72,83
3	Muara Enim	71,65	71,92	72,19	72,45	72,72	72,99
4	Lahat	72,29	72,64	73,00	73,35	73,70	74,05
5	Musi Rawas	69,01	69,33	69,66	69,98	70,31	70,63
6	Musi Banyuasin	73,15	73,57	73,99	74,41	74,83	75,26
7	Banyuasin	70,70	70,95	71,20	71,46	71,71	71,96
8	OKU Selatan	72,29	72,53	72,77	73,01	73,25	73,50
9	OKU Timur	70,72	71,03	71,34	71,65	71,96	72,27
10	Ogan Ilir	70,52	70,80	71,08	71,37	71,65	71,93
11	Empat Lawang	69,69	69,99	70,29	70,60	70,90	71,20
12	Palembang	77,38	77,67	77,97	78,26	78,55	78,84
13	Prabumulih	75,45	75,80	76,16	76,51	76,86	77,21
14	Pagaralam	74,15	74,44	74,74	75,03	75,33	75,62
15	Lubuk Linggau	71,46	71,73	71,99	72,26	72,53	72,79
16	Penukal Abab Lematang Ilir						
17	Musi Rawas Utara						
18	Sumatera Selatan	73,99	74,29	74,60	74,90	75,20	75,51

9.2.3 Indikator Kinerja Pembangunan Misi Kesatu

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Kesatu: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 9. 6

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Kesatu
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018**

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satu-an	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Urusan Wajib							
A. Urusan Pekerjaan Umum								
1	Cakupan Penanganan Drainase Permukiman	Kab/Kota	3	3	3	3	3	3
2	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	Kawa-san	3	3	3	3	3	3
3	Jumlah kawasan layak huni yang tertangani	Kawa-san	3	2	2	2	2	2
4	Cakupan penanganan TPA Sampah	Kab/Kota	3	2	2	2	2	2
5	Jumlah kawasan agropolitan yang tertangani	Kab/Kota	2	2	2	2	2	2
6	Persentase panjang jalan terbangunan panjang jalan ditingkatkan/dilebarkan	%	16,15	4,41	7,59	6,83	21,72	25,85
7	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	81,6	82	84	85	85	85
B. Urusan Perencanaan Pembangunan								
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang KEK:							
	- Jalan	Km	Na	na	9,75	na	na	na
	- Air Bersih	L/Det	na	na	na	2.399	na	Na
	- Lahan	Ha	na	na	217	na	na	na
	- Drainase	Km	na	na	na	9,24	na	na
	- IPAL	Unit	na	na	na	1	na	na
	- WTP	Unit	na	na	na	1	na	na
	- Perkantoran	Ha	na	na	na	9,12	na	na
C. Urusan Perhubungan								
1	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	<25	<22	<19	<15	<13	<10
2	Jumlah penumpang yang terlayani melalui angkutan sungai dan danau	org/th	115.000	121.000	127.000	133.000	140.000	147.000
3	Meningkatnya keterangkutan penumpang pesawat udara pada SMB II ataupun kawasan barat Sumsel dan tumbuhnya penerbangan perintis antar daerah	org/th	2,8 jt	2,90 jt	3,00 jt	3,10 jt	3,18 jt	3,20 jt

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satu-an	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	Persentase menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading)	%	45	40	30	20	15	10
5	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas perkotaan, khususnya kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan unmotorized	%	<25	22	19	15	13	10
6	Jumlah penumpang dan kendaraan melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api	Org/th	na	48.000	60.000	75.000	90.000	100.000
7	Jumlah Pengguna KA Perkotaan Palembang Metropolitan (Plg-Inderalaya)	Org/th	110.000	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
8	Jumlah penumpang angkutan laut	Org/th	510.857	536.400	563.220	591.381	620.920	651.997
9	Jumlah barang dengan angkutan laut	Ton/th	17.755.873	18.643.667	19.575.850	20.554.642	21.582.375	22.661.493
10	Jumlah barang dengan angk. darat	Ton/th	9.705.112	10.190.368	10.699.886	11.234.880	11.796.624	12.386.456
11	Jumlah barang dengan angkutan kereta api	Ton/th	14.070.108	1.773.613	15.512.294	16.287.909	17.102.304	17.957.419
12	Jumlah barang dengan angkutan udara	Ton/th	11.730	12.317	12.932	13.579	14.258	14.971
13	Persentase kendaraan yang laik jalan	%	36	40	50	58	65	70
14	Jumlah bus pariwisata	Unit Bus	76	86	96	106	116	126
D. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	UKM	na	150	400	700	1.050	1.500
E. Urusan Penanaman Modal								
1	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. Triliun	3,129	7,59	8,349	9,184	10,1	11,11
2	Nilai Realisasi Investasi PMA	Rp. Triliun	14,825	9,96	10,95	12,05	13,25	14,58
E. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah								
a Penelitian & Pengembangan Inovasi Daerah								
1	Jumlah pusat belajar Iptekin	Pusat Belajar	10	2	3	3	3	3
2	Jumlah HKI terdaftar	HKI	2 HKI	3 HKI	3 HKI	3 HKI	3 HKI	14 HKI
3	Jumlah Technopark	STP	0	0	0	0	1	1
4	Jumlah Pusat Inovasi di Kab/kota	PI	3	3	3	4	4	17

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satu-an	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Jumlah Produk bisnis inovatif baru	%	0	0	30	30	40	100
6	Jumlah teknologi hasil litbang yg dimanfaatkan	Teknologi	9	9	10	12	12	52
7	Jumlah kemitraan strategis IPTEKIN yang menjalin PKS dan MoU	Dokumen perjan-jian	10	2	3	3	3	3
8	Jumlah pelayanan IPTEKIN di daerah	Unit	3	2	2	3	3	3
Urusan Pilihan								
A. Urusan Pertanian								
1	Produksi Pertanian							
	Produksi Padi	Ton	3.676.722	3.986.098	4.125.611	4.270.088	4.419.461	4.574.142
	Produksi Jagung	Ton	167.457	172.481	177.655	182.985	188.474	194.128
	Produksi Kedelai	Ton	5.135	15.886	16.459	17.317	18.219	19.168
	Produksi Karet	Ton	1.091.146	1.100.000	1.150.000	1.180.000	1.200.000	1.250.000
	Produksi Kelapa Sawit	Ton	2.214.349	2.250.000	2.260.000	2.270.000	2.280.000	2.300.000
	Produksi Kelapa	Ton	60.095	60.000	61.000	61.500	62.000	62.500
	Produksi Kopi	Ton	139.754	140.000	141.000	142.000	144.000	145.000
	Produksi Daging	Ton	62.670	65.350	69.240	73.370	77.750	82.315
	Produksi Susu	liter	78.984	86.880	95.568	105.128	115.640	127.208
	Produksi Telur	ton	67.284	71.364	75.692	80.283	85.152	90.316
	Produksi Ikan Tangkap	Ton	95.717,3	95.908,7	96.100,5	96.292,7	96.485,4	96.678,3
	Produksi Ikan Budidaya	Ton	435.000	478.500	526.350	578.985	636.884	700.572
2	Penyuluh Pertanian	Org	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
3	Jumlah peningkatan kelas kelompok pelaku utama	Unit	na	300	375	450	525	600
4	Jumlah penumbuhan gabungan kelompok pelaku utama	Unit	na	100	125	150	175	200
5	Jumlah pelaku usaha terregistrasi	Unit	na	25	75	125	175	200
6	Jumlah teknologi yang dikembangkan	Unit	na	3	8	13	18	23
7	Rata-rata Harga Produk Pertanian di Tingkat Petani	%	2,02	3,04	2,80	3,10	2,70	2,77

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satu-an	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
B. Urusan Kehutanan								
1.	Jumlah produksi kayu dan HTI	Juta m ³ /th	70	4,25	4,50	5,00	5,50	6,00
2	Sumbangan Sektor Kehutanan	Rp. M	30,357	13,5	22,69	21,00	19,35	20,32
C. Urusan Kelautan dan Perikanan								
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	111,96	113,00	114,00	115,00	116,00	117,00
D. Urusan Perdagangan								
1	Nilai Ekspor	US \$ Jt /th	2.722,10	2.790,15	2.858,20	2.926,25	2.994,30	3.062,35
2	Pertumbuhan Ekspor	(%)	2,00	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00
3	Nilai Perdagangan Antar Wilayah/ Perdagangan Antar Pulau (Moda Transportasi Laut)	(Ton)	1.604.086	1.727.752	1.851.418	1.975.084	2.098.750	2.222.416
E. Urusan Industri								
1	Jumlah Produksi Industri Pengolahan	Ton	1.769.864	1.814.110	1.858.357	1.902.603	1.946.850	1.991.097
2	Pertumbuhan Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan	%	2,50	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00
3	Pertumbuhan Investasi di Sektor Industri Pengolahan	%	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00
4	Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah	Unit Usaha	4	5	5	5	5	5
5	Jumlah IKM Pangan	Unit Usaha	23.305	24.233	25.161	26.089	27.017	27.945
6	Jumlah IKM kerajinan sandang dan kulit serta kerajinan dan umum	Unit Usaha	7.784	8.053	8.321	8.590	8.858	9.127
7	Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah / Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)/Rencana Inti Pengembangan Industri Daerah (RIPID) yang Ditetapkan	Perda/ Perka-da	na	na	2	2	2	2
F. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Produksi Batubara	Juta Ton	84,81	23,13	23,80	24,50	25,20	26,00
2	Lifting Minyak bumi	Ribu Barrel	132.236	26.917	27.116	27.316	27.518	27.721

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satu-an	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Lifting Gas Bumi	Ribu MMBTU	2.741.311	609.246	613.410	617.602	621.822	626.072
4	Nilai PNBP Pertambangan (Royalti dan Landrent)	Milyar	438,60	152,34	163,93	176,40	189,83	204,28
5	Nilai PNBP Minyak Bumi	Milyar	1.123,34	293,69	305,66	318,12	331,09	344,58
6	Nilai PNBP Gas Bumi	Milyar	2.451,30	737,02	780,58	826,71	875,57	927,31
7	PAD	Juta	170,96	82,98	90,06	97,75	106,09	115,15
9	Rasio Desa Berlistrik	Persen	66,77	71,03	75,57	80,39	85,53	90,99
10	Jumlah produksi listrik	Gwh	6.678	6.878	7.085	7.298	7.517	7.743
11	Share PDRB Sektor Pertambangan	%	1,45	1,48	1,50	1,51	1,53	1,55
G.	Urusan Pariwisata							
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	3.243.313	3.340.612	3.440.830	3.554.055	3.650.377	3.759.888
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	31.408	32.350	33.321	34.320	35.349	36.409
3	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	DTW/ Tempat wisata	26	28	32	38	42	46
4	Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang	Sang-gar	200	210	220	230	240	250
5	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Pariwisata	Orang	42.662	43.869	45.110	46.386	47.698	49.047

9.2.4 Indikator Kinerja Misi Kedua

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Kedua: Memantapkan Stabilitas Daerah.

Tabel 9. 7

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Kedua RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satu-an	Target							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Urusan Wajib										
A. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Jumlah ringkasan dokumen Perencanaan yang dapat diakses publik	Doku-men	15	16	16	16	17	18		
2	Persentase penerapan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	%	na	na	66	85	100	100		

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
B.	Urusan Penanaman Modal							
	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan	Ijin/no ijin	172	189	208	229	252	277
	Jangka waktu perijinan dan non perijinan pada unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP	Hari	7	7	6	6	5	5
C.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
a.	Kesatuan Bangsa							
1	Jumlah Kasus Konflik Kepengurusan Partai Politik	kali	1	0	0	0	0	0
2	Jumlah Konflik Pendirian rumah ibadah yang ditangani	Kali	2	1	1	1	0	0
3	Jumlah Forum Pemuda Antar Umat Beragama yang aktif	forum	1	1	3	6	9	18
4	Jumlah Anggota FKUB yang aktif	orang	200	276	310	310	310	310
5	Jumlah kasus konflik antar umat beragama	kali	1	0	0	0	0	0
6	Jumlah organisasi dan lembaga budaya masyarakat yang aktif	ormas	23	35	52	64	72	85
7	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	%	20	20	20	20	20	20
8	Jumlah Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang Aktif	orang	200	225	235	245	275	300
9	Jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat	kali	20	18	15	12	10	8
10	Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif	orang	105	105	119	125	136	153
11	Jumlah Organisasi Masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah	Orkes-mas	558	600	615	630	650	675
12	Persentase penduduk yang ikut dalam Pemilu dan Pemilukada	%	67	76	70	70	70	70
13	Jumlah kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	Kasus	3	1	3	0	1	5
14	Persentase kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	%	100	100	100	100	100	100

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
b.	Satuan Polisi Pamong Praja							
1	Jumlah kasus pelanggaran perda	kasus	75	75	150	225	225	225
D.	Urusan Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah							
a.	Sekretariat Daerah							
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	B	B	B
b.	Sekretariat DPRD							
1	Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik	%	60	65	70	75	78	80
2	Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	40	40	40	40	40	40
3	Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	na	12	15	18	20	22
c.	BPKAD							
1	Status Laporan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
d.	Inspektorat							
1	Persentase SKPD dengan status laporan kinerja baik	%	60	65	75	75	80	85
2	Persentase peningkatan nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	na	75	78	80	82	84
e.	KORPRI							
1	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani	Orang	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000	3.500
2	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan sikap kepedulian sosial	Orang	200	220	250	260	340	460
3	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembekalan keterampilan kewirausahaan	Orang	250	250	260	280	320	400

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
E.	Urusan Kepegawaian							
a.	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional	orang	440	640	680	710	640	690
2	Jumlah sumber daya Widya-iswara yang kompeten dan profesional	Widya-iswara	24	27	30	34	37	40
b.	Kepegawaian							
1	Percentase pelanggaran disiplin PNS Prov. Sumsel	%	30	20	12	9	6	3
2	Pelayanan administrasi data kepegawaian berbasis WEB	%	20	23	55	77	85	96
Urusan Pilihan								
A.	Urusan Ketahanan Pangan							
1	Ketersediaan dan cadangan pangan - Ketersediaan energi per kilo kalori per kapita per hari minimal 2.200	Kkal/kap/hari	4.121	4.327	4.543	4.770	5.009	5.259
	- Ketersediaan protein per gram per kapita per hari minimal 57	Gram/Kap/hari	98	103	108	113	119	125
2	Distribusi dari akses pangan - Sistem distribusi pangan yang lancar antara waktu antar wilayah dan stabilitas harga pangan pokok strategis	Komo-diti	9	10	13	13	13	13
3	Pengaruh ragaman dan keamanan pangan - Pola pangan harapan	skor	89,39	85,76	88,61	91,46	94,31	97,15
	- Pangan segar yang aman dikonsumsi	Sampel	30	21	51	68	85	102
4	Penanganan Rawan pangan	%/tahun	10	20	60	60	60	60

9.2.4 Indikator Kinerja Misi Ketiga

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Ketiga: Meningkatkan Pemerataan yang Berkadilan.

Tabel 9. 8

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Ketiga
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Urusan Wajib										
A. Urusan Pendidikan										
a. Pendidikan										
1	APK SD	%	110,81	111,02	111,80	112	112,06	113		
2	APM SD	%	95,06	97	99	101	102	103		
3	APK SMP	%	85,85	87	90	94	97	100		
4	APM SMP	%	71,78	72	74	76	78	80		
5	APK SMA/K	%	62,78	64	68	72	76	80		
6	APM SMA/K	%	50,92	53	56	59	62	65		
7	APtS SD	%	1,2	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2		
8	APtS SMP	%	10,13	9,87	8,49	7,42	6,31	5,50		
9	APtS SMA/K	%	39,41	32	28	17	10	5		
10	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif	%	75	10	10	10	10	10		
11	Jumlah SMP/SMA satu atap	%	0	0	17	34	68	102		
12	Angka Kelulusan SD	%	99,39	99,55	99,62	99,75	99,81	99,9		
13	Angka Kelulusan SMP	%	99,97	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90		
14	Angka Kelulusan SMA/K	%	99,94	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90		
15	Angka Melek Huruf	%	99,77	99,78	99,80	99,82	99,84	100		
16	SMA yang memiliki Lab dan Bengkel Keterampilan	%	20	22	27	29	32	35		
17	APK Perguruan Tinggi	%	17	19	21	23	26	30		
b. Perpustakaan										
1	Jumlah diversifikasi layanan perpustakaan	jenis	16	16	18	20	23	25		
2	Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan	orang	121.168	171.268	235.650	289.300	350.500	400.350		

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka	Eks	316.443	318.303	320.763	323.823	327.383	331.443
4	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	2.418	2.493	2.593	2.718	2.868	3.043
B. Urusan Kesehatan								
1	Jumlah Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Orang	123	120	115	110	105	100
2	Angka Harapan Hidup	%	70,30	70,50	70,70	70,90	80,10	80,30
3	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	%	0,45	<1	<1	<1	<1	<1
4	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Orang	144	142	140	138	136	134
5	Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	93,1	94	95	98	99	100
6	Angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur	%	56,6	60	62	65	67	70
7	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi	%	8,1	7,5	7,0	6,0	5,5	5,0
8	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>		2,7	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0
9	Jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela)	orang	20.044	23.385	27.126	31.466	36.500	42.340
11	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru (BTA +)	%	113	119	125	132	139	146
12	Angka Kesakitan Penyakit DBD Per 100.000 penduduk		52	51	50	49	48	47
13	<i>Annual Parasit Incidence (API)</i>	Per 1000 penddk	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14	Persentase Rumah Sehat	%	64,7	67,7	70,8	73,9	76,4	80
15	Persentase Keluarga yang Memiliki Akses Air Bersih	%	64	67,2	70,4	73,6	76,8	80
16	Jumlah Kasus Narkoba yang direhabilitasi	Orang	102	98	94	90	86	82

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
17	Jumlah Kunjungan Penderita narkoba Meningkat	Orang	366	376	387	400	415	425
18	Jumlah Kasus Gangguan Jiwa	Orang	5.600	3.000	2.850	2.700	2.640	2.555
19	Jumlah Kunjungan Penderita Gangguan Jiwa	Orang	41.208	43.208	45.208	47.208	49.208	51.208
20	Jumlah Kasus Pasung	orang	150	120	80	40	20	-
C. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Jumlah SKPD provinsi yang mengimplementasikan PPRG	SKPD	15	22	29	46	43	50
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	68,92	69,32	69,83	70,63	71,13	71,48
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	67,05	67,48	67,95	68,32	69,18	70,12
4	Jumlah SKPD prov yang memiliki dan memanfaatkan Data Terpilih	SKPD	25	29	32	37	39	41
5	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina	Klmpk	295	303	311	319	327	335
6	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	Kasus	263	245	228	211	197	183
7	Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani	kasus	17	15	13	11	10	9
8	Jumlah kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan dan ditangani	kasus	295	303	311	319	327	335
D. Urusan Sosial								
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya	%	1.00	4.98	5.72	6.58	7.57	8.70
E. Urusan Ketenagakerjaan								
1	Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Orang	44	60	80	100	120	140
2	Jumlah TKI yang dikirim ke LN legal	Orang	1.107	1.645	1.884	1.931	2.040	2.285

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK yang telah ditempatkan	Orang	3.288	3.650	4.015	4.417	4.859	5.345
4	Jumlah sarana dan prasarana BLKI	Unit	5	3	14	17	15	13
5	Jumlah Penduduk Yang bekerja	orang	3.464.620	3.516.589	3.569.336	3.622.878	3.677.221	3.732.380
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66.50	67.14	67.78	68.42	69.06	69.70
7	Pengangguran Terbuka	orang	182.376	182.358	182.340	182.321	182.303	182.285
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		5.00	4.85	4.70	4.50	4.23	3.98
9	Upah/Gaji Pekerja Lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan terendah, jabatan terendah serta masa kerja terendah	Rp.Juta	1.630.000	1.825.600	2.062.928	2.331.108	2.634.152	2.976.926
10	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	112	123	135	148	162	178
E. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1	Nilai Modal Koperasi	Rp. M	1.692,79	1.726,65	1.760,50	1.794,36	1.828,21	1.862,07
2	Pertumbuhan Modal Koperasi	%	2	2	2	2	2	2
3	Nilai volume usaha koperasi	Rp.M	2.688,47	2.742,24	2.796,0	2.849,77	2.903,54	2.957,31
4	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	2	2	2	2	2	2
5	Nilai Modal UMKMK	Rp. M	9.362,70	9.469,05	9.575,40	9.681,73	9.788,08	9.894,42
6	Omzet UMKMK	Rp.M	24.720,84	24.970,51	25.220,18	25.469,85	25.719,52	25.969,20
7	Penyerapan tenaga kerja sektor UMKMK	Orang	2.950.438	2.972.653	2.994.879	3.017.104	3.039.329	3.091.554
F. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral								
1	Persentase desa dengan akses listrik	%	91,31	92,30	93,16	94,02	94,90	95,78
G. Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
1	Jumlah pemuda yang difasilitasi	Orang	3097	1974	2529	3656	4156	4756
2	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	OKP	15	15	17	18	19	20

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	na	na	na	6	6	6
4	Jumlah anggota Pramuka yang difasilitasi dalam kepaduan	Orang	2.330	2.730	2.720	4.300	4.300	4.300
5	Jumlah usaha-usaha Baru yang Dikelola oleh Pemuda	Orang/unit	60	40/20	40/30	600/50	600/50	600/50
6	Jumlah pemuda yang dapat difasilitasi meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDS	Orang	na	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
7	Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikat	Orang	na	na	70	355	355	355
8	Jumlah Produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi	Orang/Produ- sen	na	na	50/2	50/4	50/8	50/10
9	Jumlah masyarakat yang ikut permassalan olahraga	Orang	5.328	8.725	5.267	6.787	10.447	11.437
10	Jumlah medali emas atlet PPLP	Medali	15	17	20	23	25	30
11	Jumlah prestasi atlet pada PON	Pering- kat	13	na	na	10	na	Na
12	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Ponpes /Cabor	40/21	25/75	50/150	50/150	50/150	50/150
H. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Jumlah Organisasi dan Lembaga Desa yang Aktif	Organisasi	14.230	14.414	14.638	14.910	15.236	15.626
2	Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa	% keterli- batan	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
3	Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Desa	%	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
4	Persentase Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	%	60-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Persentase aparatur pemdes yang tertib administrasi dan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Akte, KTP, Jamkesmas)	%	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90
6	Persentase Aparatur Desa yang Profesional	%	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55

9.2.5 Indikator Kinerja Misi Keempat

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Keempat: Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana.

Tabel 9. 9

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Keempat
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Urusan Wajib										
A. Lingkungan Hidup										
1	Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH	61,41	58,86	56,55	53,77	51,226	48,90		
2	Jumlah penurunan laju peningkatan emisi GRK di 6 sektor	Juta ton CO ₂ eq	2,354	2,439	2,529	2,600	2,730	2,865		
3	Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	orang	20.000	600	700	800	900	1000		
4	Percentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Peraturan daerah bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan	Dok	0	0	1 dok Raperda	1 dok Perda	0	0		
6	Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi	Jenis Akreditasi	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara						

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
B. Urusan Penanggulangan Bencana								
1	Percentase Sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)	%	na	na	20	20	20	20
2	Percentase kerugian akibat bencana	%	na	100	90	80	70	60
3	Jumlah masyarakat Siaga Bencana	orang	400	50	50	50	50	50
4	Jumlah Desa Tangguh	Desa	1	2	2	2	2	2
5	Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana	MOU	na	na	1	1	1	1
6	Percentase penurunan titik kebakaran (hotspot)	%	na	na	20	20	20	20
C. Urusan Penataan Ruang								
1.	Jumlah peraturan daerah tentang penataan ruang - RTRW	perda	13	1	2	2	-	-
	- Rencana Rinci		na	na	8	10	12	12
2.	Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang	Jumlah	0	11	15	15	20	23
3.	Percentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	na	60	75	80	80	90
4.	Panjang garis batas daerah yang disahkan	segmen	na	2	4	6	8	10
Urusan Pilihan								
C. Urusan Kehutanan								
1	Jumlah Identifikasi/Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas	Lokasi/tahun	1	9	16	10	10	8
2	Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi	Unit/tahun	11	2	2	3	3	3
3	Luasan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi	Ha/tahun	na	156.281	338.964	657.114	473.972	473.972
4	Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehab HL/KSA/KPA dan HKm/HD)	Ha/tahun	200	230	250	250	250	250
5	Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan	Ha/tahun	200	200	200	200	200	200
6	Luas hutan tanaman	Ha/tahun	102.701	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dan sekaligus merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya melaksanakan program pembangunan Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2015.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 sangat ditentukan oleh kesungguhan dalam pelaksanaan, konsistensi dalam penganggaran, serta kecermatan dalam pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan.

10.1. Pedoman Transisi

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 dilantik pada bulan November Tahun 2013 dan akan berakhir pada bulan November Tahun 2018. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2013-2018 atau setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih masa bakti 2018-2023, dan sebelum RPJMD 2018-2023 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2013-2018 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2013-2018, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Provinsi Sumatera Selatan, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan;
- (3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
- (4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Dinas, Badan, Kantor, dan Biro, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan kerangka Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
- (5) Renstra SKPD dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kontrak kinerja antara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan para Pimpinan SKPD yang selanjutnya menjadi dasar penilaian kinerja para Pimpinan SKPD;
- (6) Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, dan melaksanakan program-program RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya.
- (7) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan;
- (8) Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi.

- (9) RKPD Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (10) Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- (11) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- (12) Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;
- (13) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan konsistensi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD. Pimpinan SKPD wajib menyampaikan laporan secara rutin tentang hasil pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Renja SKPD dan RKA-SKPD kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda;
 - b. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dari Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar penilaian kinerja Pimpinan SKPD;
 - c. Pimpinan SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra SKPD, Renja SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD periode sebelumnya sebagai bagian dari laporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (14) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah direncanakan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yang terencana, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 menjadi pendorong gerakan bersama membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pemerintah, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan juga ditentukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. ALEX NOERDIN